



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kajian Fiskal Regional Gabungan 2022

KHATULISTIWA

Optimis Melaju
Menuju
Pertumbuhan Inklusif

131

SEKTOR UNGGULAN DAN
SEKTOR POTENSIAL
SUMATERA

137

SEKTOR UNGGULAN DAN
SEKTOR POTENSIAL JAWA

141

SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR
POTENSIAL KALIMANTAN

155

SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR
POTENSIAL MALUKU-PAPUA

151

SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR
POTENSIAL BALI-NUSRA

146

SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR
POTENSIAL SULAWESI

KHATULISTIWA

KFR GABUNGAN 2022

TEMA:

**FISKAL KUAT
EKONOMI TUMBUH
INKLUSIF
DAN BERDAYA TAHAN**

copyright©2023

**DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2023**

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perbendaharaan

PENANGGUNG JAWAB

Tri Budhianto
Direktur Pelaksanaan Anggaran

EDITOR

Mohamad Irfan Surya Wardana, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, Nur Hidayat, Mohamad Zaki, Kresnadi Prabowo Mukti, Agung Kurniawan Purbohadi

KONTRIBUTOR

Tommi Helmiwan, Susanti Dewi, Heru Cahyadi, Catur Ery Prabowo, Agus Ristanto, Teguh Dwi Prasetyo, Dian Merini, Hero Dwi Afrisal, Mochamad Zidan Oktavian, Chyntia Bella Br. Sitepu, Bayu Adi Handoko, Rifqi Achmad Rafi, Fatqur Hidayat, Zaki Bahrul Rifai, Alif Shofia Salsabila, Risky Utama, Yacob Yulis Setyoko, Restu Alam Siagian, Dwi Ismanto, Paryanto, Wiwin Arivinanto, Anggreyni Bontor Y. Tampubolon, Siti Nurhalizah.

DESAIN DAN LAYOUT

Dhika Habibi Zakaria, Wirakusuma Legendani



KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, atas rahmat-Nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan memublikasikan Laporan Khatulistiwa Tahun 2022 sebagai konsolidasi dari KFR Tingkat Wilayah yang disusun oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan atas implementasi kebijakan fiskal yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian dan kesejahteraan di tingkat nasional dan regional, yang disusun secara spasial berdasarkan 6 regional yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua, sebagai suatu kawasan yang memiliki karakteristik serupa ditinjau dari letak geografis, aspek ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam.

Khatulistiwa Tahun 2022 mengusung tema "Optimis Melaju Menuju Pertumbuhan Inklusif" sebagai bentuk optimisme peran fiskal dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan kondisi global agar tetap dapat mewujudkan pemulihan ekonomi nasional sekaligus melanjutkan target pembangunan melalui penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk para stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Pembaca yang budiman...

Sebagai negara berdaulat (sovereign nation), Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan fiskal dan implementasinya senantiasa diarahkan untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian bagi segenap masyarakat Indonesia.

Kebijakan fiskal yang tertuang pada APBN dan APBD memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi tumbuhnya investasi, dan memastikan distribusi pembangunan di Indonesia

yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, sinkronisasi pembangunan daerah terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama (ultimate goal) yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan fiskal tersebut.

Pembaca yang budiman...

Tahun 2022 merupakan kondisi yang berat seiring dengan turbulensi perekonomian global. Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut dan berkepanjangan, tekanan inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara maju, perang antara Rusia dengan Ukraina, dan isu perubahan iklim menunjukkan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja dan diliputi ketidakpastian.

Menghadapi tekanan kondisi global, APBN dan APBD sebagai instrumen strategis pemerintah, dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan berperan sebagai shock absorber dalam meredam dampak yang dihasilkan tekanan kondisi global. Oleh karena itu, sinkronisasi pembangunan daerah terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pada gilirannya, belanja pemerintah dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama (ultimate goal) yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan fiskal tersebut.

Pembaca yang budiman...

Hasil telaah makro tahun 2022 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang telah dilaksanakan berperan penting dalam menjaga perekonomian tetap resilience di tengah tekanan global. Perlambatan perekonomian global utamanya diampifikasi oleh peningkatan downside risk masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Namun, capaian tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tahun 2023 dengan optimis. Momentum ini harus terus dijaga dalam

rangka menuju konsolidasi fiskal tahun 2023, dimana defisit anggaran harus kembali di bawah 3 persen dari PDB.

Perekonomian nasional saat ini masih terkonsentrasi di regional Jawa dan Sumatera dengan kontribusi sebesar 78,52 persen terhadap PDB Nasional. Upaya pemerataan pembangunan secara berkesinambungan harus terus dilakukan dengan menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar kawasan Jawa-Sumatera. Selain itu, indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan yang tercermin, antara lain pada capaian IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat ketimpangan pendapatan, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan.

Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan secara inklusif melalui optimalisasi fungsi APBN/APBD sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, termasuk melalui peningkatan alokasi anggaran belanja pemerintah terutama bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI), penyempurnaan kebijakan TKDD, terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi pencairan anggarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, kemandirian fiskal pemerintah perlu terus didorong dengan strategi dan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis pada pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai keunggulan masing-masing daerah.

Pembaca yang budiman...

Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal

pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas dalam Laporan Khatulistiwa ini. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2022 ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian fiskal dan perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat nasional dan regional.

Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI
WABAROKATUH**

Jakarta, Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perbendaharaan

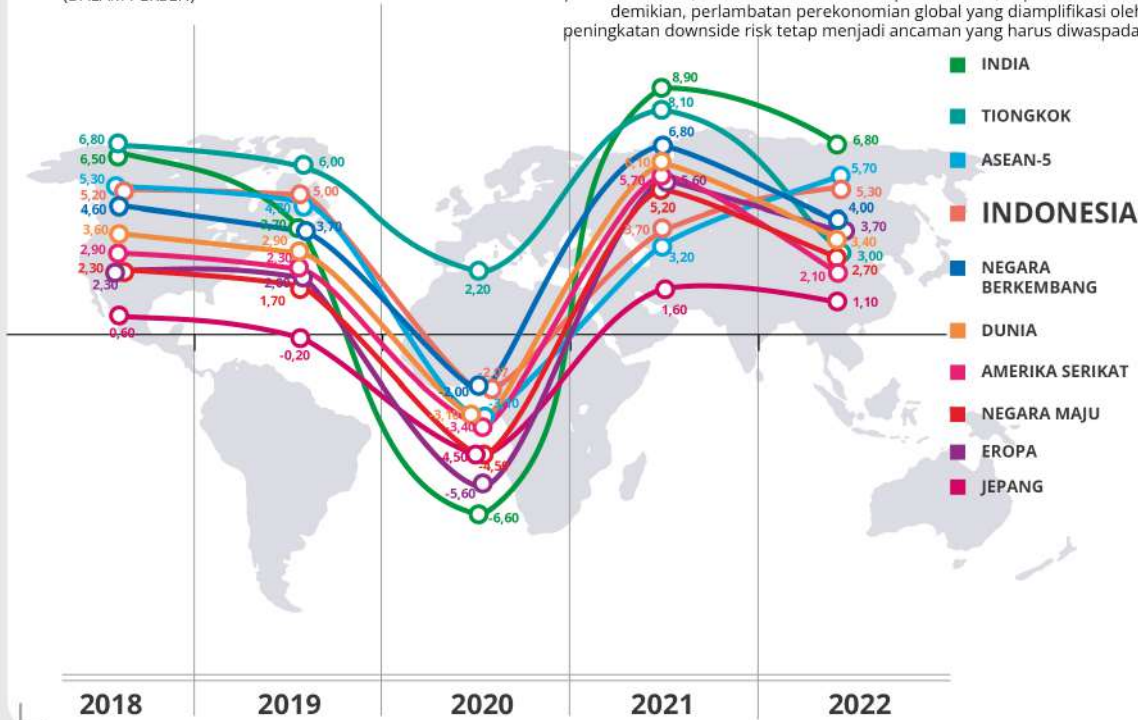
Laporan Khatulistiwa merupakan gabungan dari Kajian Fiskal Regional (KFR) yang disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.



PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2018-2022

(DALAM PERSEN)

Di tengah turbulensi kondisi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, tekanan inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara maju, perang antara Rusia dengan Ukraina, serta perubahan iklim, Ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,31 persen. Namun demikian, perlambatan perekonomian global yang diimplikasi oleh peningkatan downside risk tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai



TREN PERTUMBUHAN INDONESIA TAHUN 2022

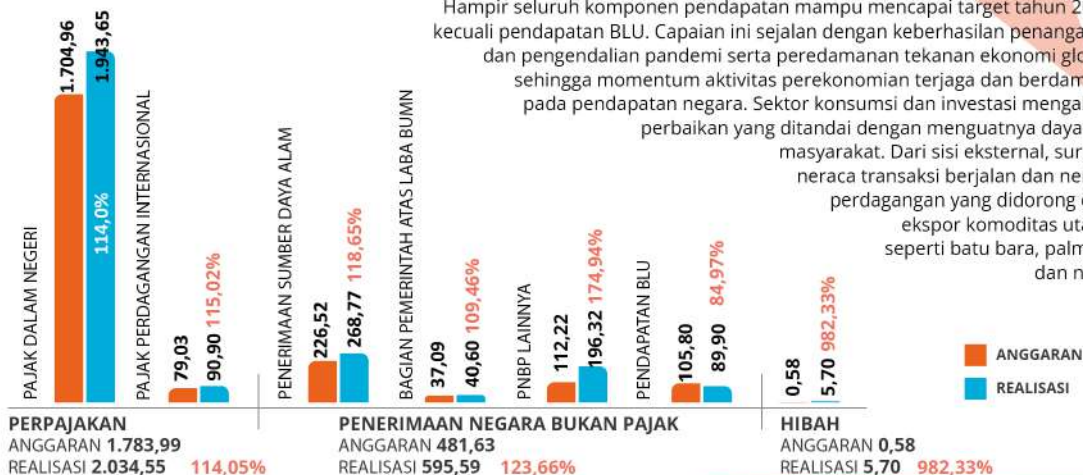
(DALAM PERSEN)

PERTUMBUHAN PDB TAHUN 2022 SEBESAR 5,31



PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2022

(DALAM TRILIUN)



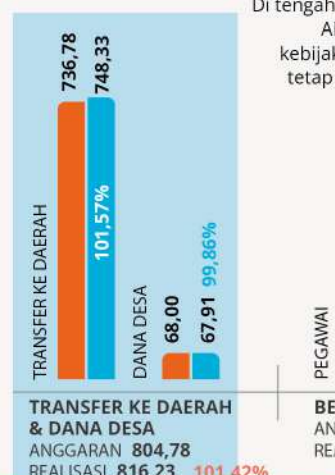
REALISASI PENDAPATAN NEGARA & HIBAH

Rp2.635,84 T

Hampir seluruh komponen pendapatan mampu mencapai target tahun 2023, kecuali pendapatan BLU. Capaian ini sejalan dengan keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi serta peredaman tekanan ekonomi global, sehingga momentum aktivitas perekonomian terjaga dan berdampak pada pendapatan negara. Sektor konsumsi dan investasi mengalami perbaikan yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat. Dari sisi eksternal, surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan nikel.

BELANJA NEGARA TAHUN 2022

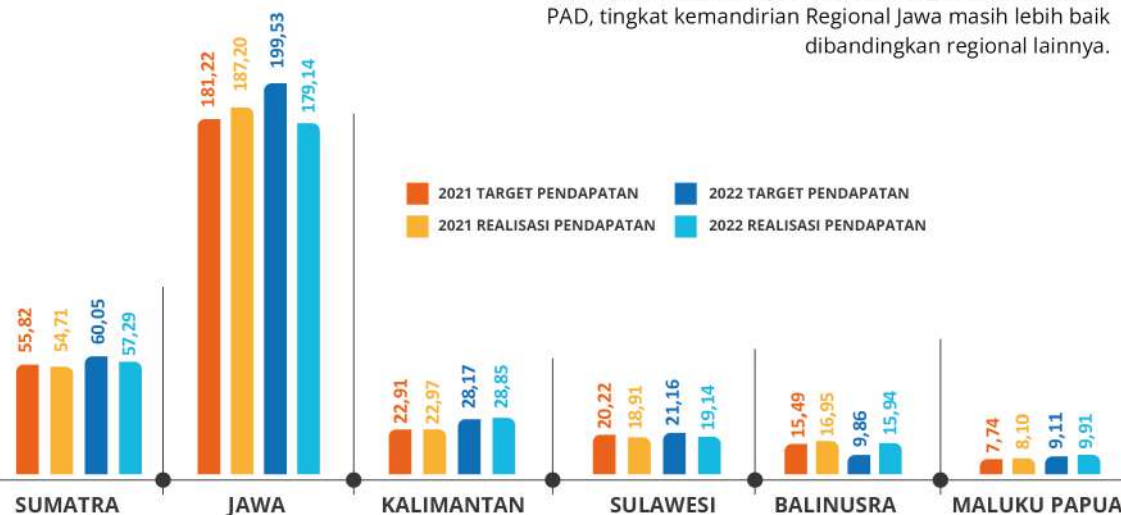
(DALAM TRILIUN)



PERBANDINGAN PAD & TOTAL PENDAPATAN REGIONAL TAHUN 2021-2022

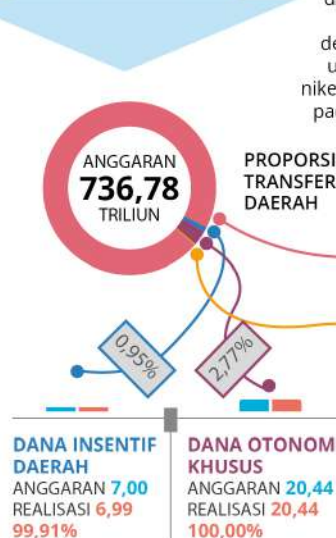
(DALAM TRILIUN)

Pada tahun 2022, dari enam regional terdapat empat regional yang mengalami peningkatan PAD, yaitu Regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Namun, meskipun Regional Jawa mengalami penurunan PAD, tingkat kemandirian Regional Jawa masih lebih baik dibandingkan regional lainnya.



TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2022

(DALAM TRILIUN)

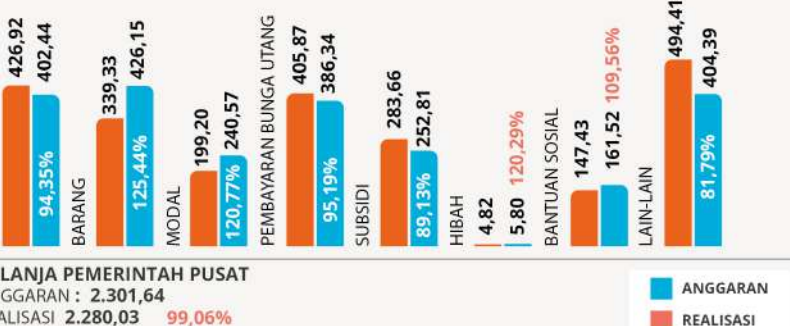


Ekonomi Indonesia tumbuh kuat di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen (c-to-c), melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen dan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk menghadapi tahun 2023 dengan optimis



badai krisis global, kebijakan fiskal dihadapkan pada alternatif kebijakan yang tidak utopis. APBN sebagai instrumen strategis pemerintah, dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan ekspansif dan berperan sebagai *shock absorber* dengan risiko yang terkendali, sehingga sehat dan berkelanjutan. Belanja negara teralisasi sebesar 99,67% yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat 99,06% dan TKDD 101,42%.

REALISASI BELANJA NEGARA Rp3.096,26 T

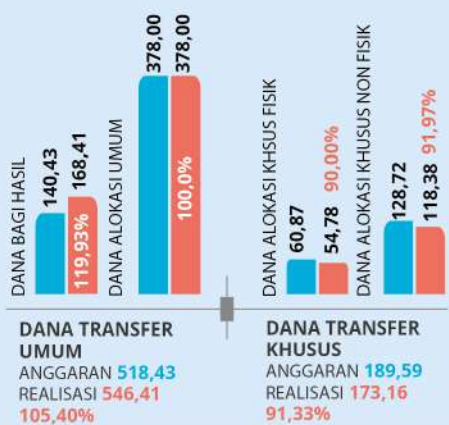


Penyaluran dana transfer pada tahun 2023 mencapai 101,57% terutama didorong oleh capaian DTU komponen DBH yang tersalur 119,93% sejalan dengan peningkatan ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan l. Adapun serapan terendah terdapat da komponen DAK Fisik sebesar 90%.

KE

96,10%

0,18%



DANA KEISTIMEWAAN DIY
ANGGARAN 1,32
REALISASI 1,32
100%

DANA PERIMBANGAN
ANGGARAN 708,02
REALISASI 719,58
101,63%

ANGGARAN
REALISASI

DASHBOARD FISKAL REGIONAL TAHUN 2022

OPTIMIS MELAJU
MENUJU PERTUMBUHAN INKLUSIF

PELAKSANAAN APBN TAHUN 2022 (DALAM TRILIUN)

APBN 2022 sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian harus mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi dan rencana pembangunan.

BELANJA
NEGARA
3.096,26
TRILIUN

DEFISIT
(460,42)
TRILIUN

PENDAPATAN
NEGARA & HIBAH
2.635,84
TRILIUN

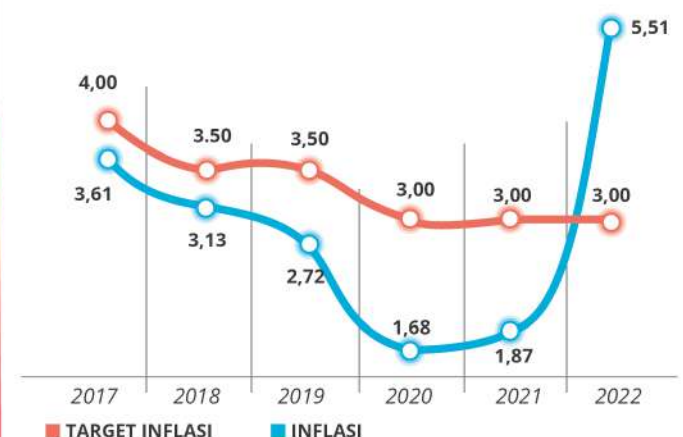
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022 (DALAM TRILIUN)

APBD 2022 mengalami penurunan baik dari segi pagu, maupun realisasinya jika dibandingkan dengan tahun 2021. Di tengah tekanan kondisi global, APBD terus berjuang dalam rangka pemulihan ekonomi dan melanjutkan prioritas pembangunan daerah di masing-masing wilayah.



TREN INFLASI TAHUN 2017-2022 (DALAM PERSEN)

Inflasi tahun 2022 sebesar 5,51 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2021 sebesar 1,87 persen (y-o-y) dan berada di atas asumsi makro inflasi sebesar 3 persen. Tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2008. Tingginya tingkat inflasi disebabkan oleh konflik geopolitik yang menyebabkan sejumlah wilayah mendisrupsi rantai pasok dan memicu kenaikan harga pangan dan energi.



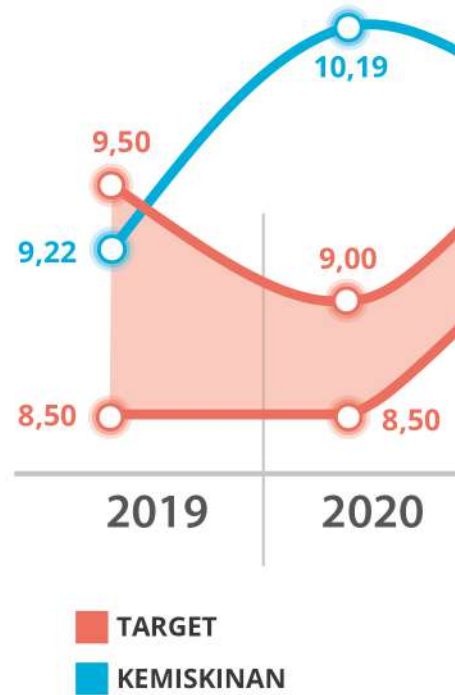
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan di tengah penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih berlangsung. IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen atau sebesar 0,62 basis poin dari tahun 2021 sebesar 72,29 menjadi 72,91 di tahun 2022



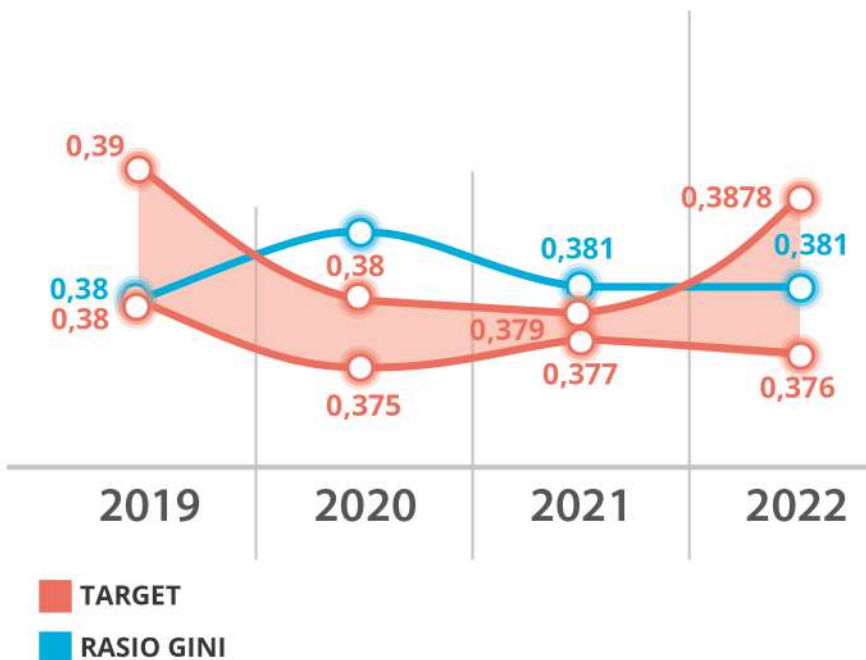
KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan tahun 2022 sebesar 9,50 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,00. Turun di tengah penyesuaian harga bahan pangan karena inflasi sehingga harga komoditas pangan tersebut, belum mencapai target pembanguan



RASIO GINI

Tingkat ketimpangan tahun 2022 sebesar 0,381 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya (y-o-y). Namun, capaian tersebut masih pada rentang target pembangunan tahun 2022.



NILAI TUKAR PETANI

NTP nasional tahun 2022 tercatat sebesar 101,69 dari capaian di tahun 2021 sebesar 104,69. Capaian NTP sepanjang tahun 2022 menunjukkan angka di atas 100 yang merepresentasikan petani mengalami surplus.



9,57 persen, mengalami penurunan
r 9,71. Tingkat kemiskinan mampu
n bakar minyak yang menyebabkan
meningkat. Namun, penurunan
ngunan tahun 2022

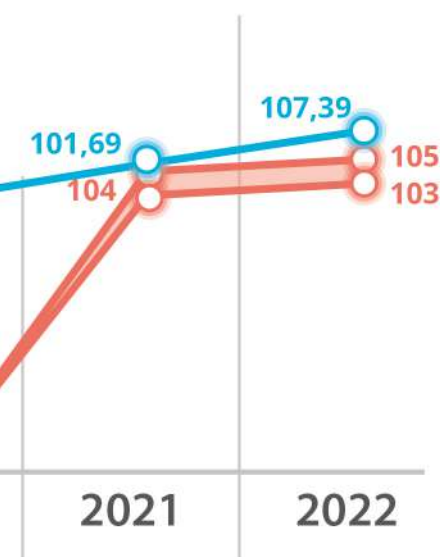


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT mengalami penurunan sebesar 0,68 persen poin, yaitu dari 6,49 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022. Capaian TPT berhasil memenuhi target pembangunan, tetapi belum berada pada level sebelum pandemi.



107,33 lebih besar
64 dan melebihi target
tahun selalu memiliki
an petani selalu

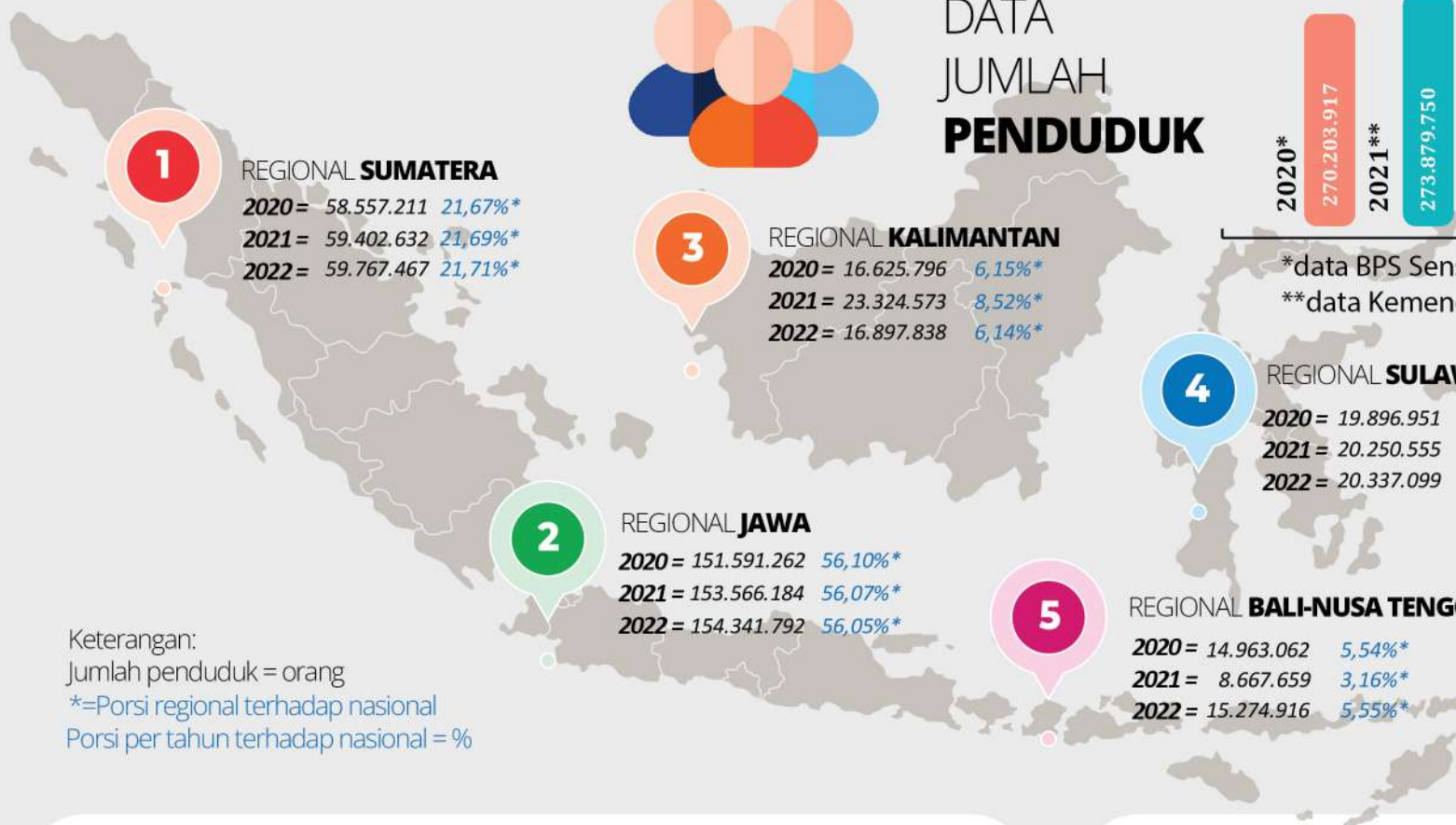


NILAI TUKAR NELAYAN

NTN nasional tahun 2022 tercatat sebesar 106,45 naik dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 104,64 dan dapat melebihi target pembangunan tahun 2022. Secara umum para nelayan dapat menikmati surplus pendapatan atas kegiatan produksi yang dilakukan sepanjang tahun 2022.



DATA JUMLAH PENDUDUK

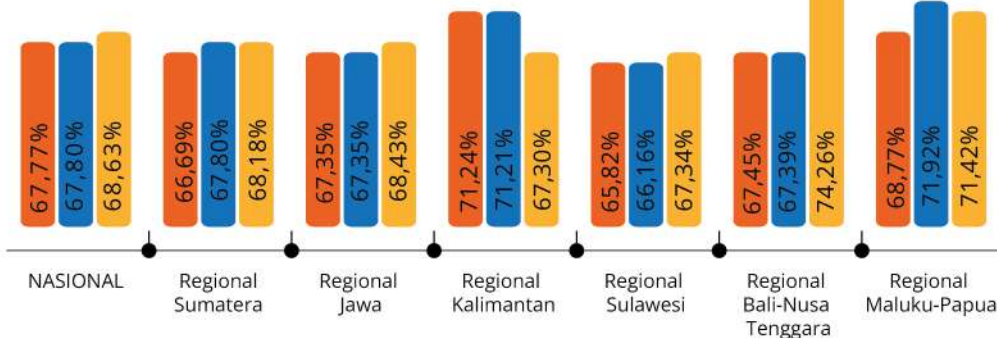


TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2020 2021 2022

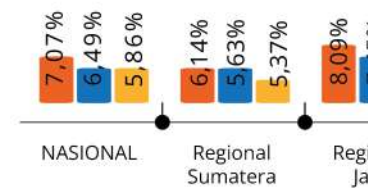
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Indonesia pada tahun 2022 sebesar 68,63%. Membaiknya TPAK sembari dengan peningkatan ekonomi menandakan bahwa pasar di Indonesia sudah semakin baik sehingga mampu dengan baik menyerap tenaga kerja.



TPT

Tingkat Pengangguran

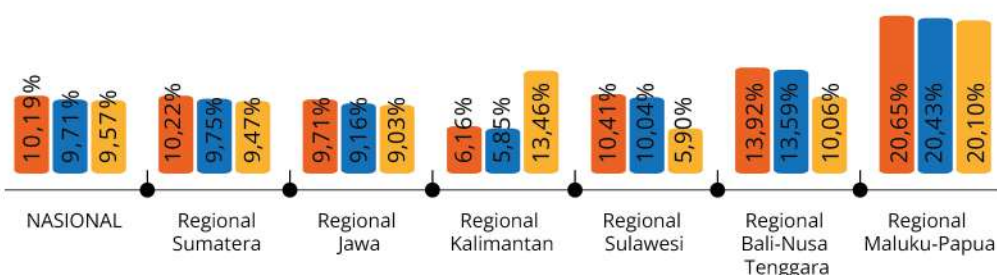
Pertum
 ta
 regional



TINGKAT KEMISKINAN

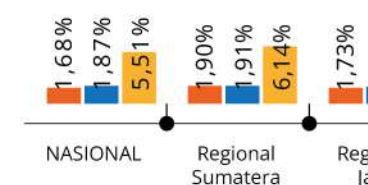
2020 2021 2022

Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukan hasil positif. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Indonesia berada pada 9,57% membaik dibandingkan kondisi pada 2 tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada regional Maluku-Papua



INFLASI G

peni
 d





Terbuka

2020 2021 2022

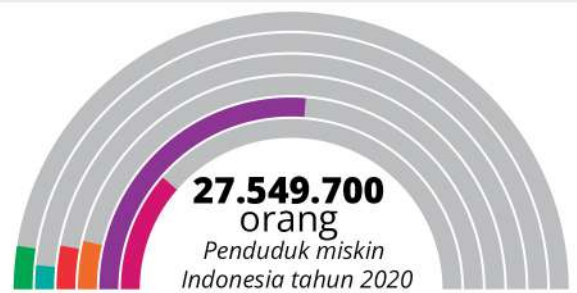
Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan pada setiap tahun. Pada tahun 2022, TPT sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan TPT



ABUNGAN

2020 2021 2022

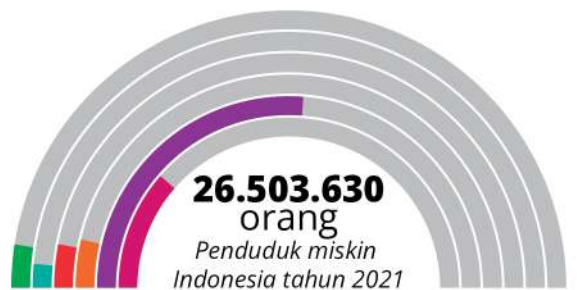
inflasi gabungan pada tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Regional dengan inflasi gabungan tertinggi adalah regional Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,29%



PORSI PENDUDUK MISKIN 2020

- Maluku-Papua 5,58%
- Bali-Nusa Tenggara 1,83%
- Sulawesi 7,48%
- Kalimantan 9,54%
- Jawa 53,55%
- Sumatera 22,02%

Porsi penduduk miskin terhadap seluruh penduduk miskin di Indonesia



PORSI PENDUDUK MISKIN 2021

- Maluku-Papua 5,82%
- Bali-Nusa Tenggara 1,81%
- Sulawesi 7,57%
- Kalimantan 9,76%
- Jawa 52,91%
- Sumatera 22,12%

Porsi penduduk miskin terhadap seluruh penduduk miskin di Indonesia



PORSI PENDUDUK MISKIN 2022

- Maluku-Papua 5,83%
- Bali-Nusa Tenggara 7,96%
- Sulawesi 7,70%
- Kalimantan 3,78%
- Jawa 52,86%
- Sumatera 21,28%

Porsi penduduk miskin terhadap seluruh penduduk miskin di Indonesia

**22 RINGKASAN EKSEKUTIF**

- 1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN KINERJA FISKAL 22**
- 2. KINERJA APBN 24**
- 3. KINERJA APBD 25**
- 4. KINERJA INDIKATOR KESEJAHTERAAN 26**
- 5. SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL DAERAH 27**

30 BAB I PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

- 1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI 30**
 - 1.I. PERTUMBUHAN EKONOMI 30
 - 1.II. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI 36
 - 1.III. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA 38
 - 1.IV. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR 38
- 2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN 39**
 - 2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 39

50 BAB II PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

- 1. OVERVIEW NASIONAL 2022 50**
 - 1.I. ANALISIS APBN 50
 - 1.II. ANALISIS APBD 56
- 2. PERKEMBANGAN KINERJA ANGGARAN REGIONAL 62**
 - 2.I. APBN 62
 - 2.II. APBD REGIONAL 69
- 3. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT 73**
 - 3.I. PENDAHULUAN 73
 - 3.II. KONTRIBUSI KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP PDRB (PK-P) 76
 - 3.III. KONTRIBUSI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO 80
 - 3.IV. KONTRIBUSI KONSUMSI PENGELUARAN LEMBAGA NON PROFIT PEMERINTAH (PK-LNPRT) TERHADAP PDRB 85
 - 3.V. KONTRIBUSI PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) TERHADAP PDRB 90
- 4. PERKEMBANGAN CAPAIAN OUTPUT BELANJA STRATEGIS (K/L & TKDD) 95**
 - 4.I. GAMBARAN UMUM CAPAIAN OUTPUT NASIONAL 95
 - 4.II. CAPAIAN OUTPUT 2022 PER REGIONAL 96

126 BAB III PERKEMBANGAN ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL

- 1. OVERVIEW KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL 126**
- 2. SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR POTENSIAL WILAYAH 131**
 - 2.I. REGIONAL SUMATERA 131
 - 2.II. REGIONAL JAWA 137

2.III. REGIONAL KALIMANTAN	141
2.IV. REGIONAL SULAWESI	146
2.V. REGIONAL BALI-NUSRA	151
2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA	155

160 BAB IV PERKEMBANGAN HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. REGIONAL SUMATERA 164

1.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN	164
1.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI	166
1.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH	167
1.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN	168

2. REGIONAL JAWA 169

2.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN	170
2.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI	171
2.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM	172
2.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN	173

3. REGIONAL KALIMANTAN 175

3.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN	175
3.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI	177
3.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH	178
3.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN	179

4. REGIONAL SULAWESI 180

4.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN	181
4.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI	182
4.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM	184
4.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN	184

5. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA 187

5.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN	187
5.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI	188
5.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH	189
5.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN	190

6. REGIONAL MALUKU-PAPUA 191

6.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN	191
6.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI	192
6.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH	194
6.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN	195

198 BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. SIMPULAN 198

2. REKOMENDASI 201

2.I. REGIONAL SUMATERA	201
2.II. REGIONAL JAWA	202
2.III. REGIONAL KALIMANTAN	202
2.IV. REGIONAL SULAWESI	203
2.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA	203
2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA	204



39	Tabel 1. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS Tahun 2022
45	Tabel 2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi Tahun 2020-2022
47	Tabel 3. NTP Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2022
48	Tabel 4. NTN Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2022
51	Tabel 5. Sebaran Pendapatan Negara di Tingkat Regional Tahun 2022
54	Tabel 6. Sebaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Tingkat Regional Tahun 2022
56	Tabel 7. I-Account Nasional
63	Tabel 8. konsolidasi di regional Sumatera
64	Tabel 9. konsolidasi di regional JAWA
65	Tabel 10. konsolidasi di regional KALIMANTAN
66	Tabel 11. konsolidasi di regional SULAWESI
67	Tabel 12. konsolidasi di regional BALI-NUSA TENGGARA
68	Tabel 13. konsolidasi di regional Papua-Maluku
70	Tabel 14. APBD regional SUMATERA
70	Tabel 15. APBD regional JAWA
71	Tabel 16. APBD regional KALIMANTAN
72	Tabel 17. APBD regional sulawesi
72	Tabel 18. APBD regional Bali-Nusa Tenggara
73	Tabel 19. APBD regional Maluku-Papua
76	Tabel 20. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sumatera
77	Tabel 21. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada di Regional Jawa
78	Tabel 22. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Regional Kalimantan
79	Tabel 24. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Regional Sulawesi
79	Tabel 23. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Regional bali-nusa tenggara
80	Tabel 25. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Regional Papua-Maluku
81	Tabel 26. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sumatera
82	Tabel 27. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Jawa
82	Tabel 28. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Kalimantan
83	Tabel 29. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Bali-Nusa Tenggara
84	Tabel 31. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Papua-Maluku
84	Tabel 30. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sulawesi
86	Tabel 32. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sumatera
87	Tabel 33. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Jawa
88	Tabel 34. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Kalimantan
88	Tabel 35. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Bali Nusa Tenggara
89	Tabel 36. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sulawesi
90	Tabel 37. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Papua-Maluku
91	Tabel 38. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sumatera
92	Tabel 39. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Jawa
92	Tabel 40. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Kalimantan
93	Tabel 41. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara
94	Tabel 42. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sulawesi
94	Tabel 43. LAJU Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Papua Maluku
95	Tabel 44. Capaian Output Regional 2022
97	Tabel 45. Pembangunan Bendungan (Unit) 2022 di REGIONAL Sumatera
97	Tabel 46. Pembangunan Jalan (Km) 2022 di REGIONAL Sumatera
98	Tabel 47. Pembangunan JEMBATAN (m) 2022 di REGIONAL Sumatera
98	Tabel 48. Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya (unit) 2022 di REGIONAL Sumatera
99	Tabel 49. Kawasan Padi (unit) 2022 di REGIONAL Sumatera
99	Tabel 50. Optimalisasi Lahan (Km2) 2022 di REGIONAL Sumatera
99	Tabel 51. Penyaluran Benih Jagung (Unit) 2022 di REGIONAL Sumatera
99	Tabel 52. Penyaluran Benih Padi (Unit) 2022 di REGIONAL Sumatera
100	Tabel 53. Optimalisasi Reproduksi (Ekor) 2022 di REGIONAL Sumatera

100	Tabel 54. Embung Pertanian (Unit) 2022 di REGIONAL Sumatera
100	Tabel 55. Penyuluh Pertanian (Orang) 2022 di REGIONAL Sumatera
101	Tabel 56. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan (Unit) 2022 di REGIONAL Sumatera
101	Tabel 57. Bantuan Operasional Sekolah (Orang) 2022 di REGIONAL Sumatera
102	Tabel 58. Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag (Orang) 2022 di REGIONAL Sumatera
102	Tabel 59. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 (Orang) 2022 di REGIONAL Sumatera
103	Tabel 60. Pembangunan Bendungan (Unit) 2022 di REGIONAL Jawa
103	Tabel 61. Pembangunan Jalan (Km) 2022 di REGIONAL Jawa
103	Tabel 62. Pembangunan Jalan (Km) 2022 di REGIONAL Jawa
104	Tabel 63. Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya (unit) 2022 di REGIONAL Jawa
104	Tabel 64. Kawasan Padi (unit) 2022 di REGIONAL Jawa
104	Tabel 65. Optimasi Lahan (Km2) 2022 di REGIONAL Jawa
104	Tabel 66. Penyaluran Benih Jagung (Unit) 2022 di REGIONAL Jawa
105	Tabel 67. Penyaluran Benih Padi (Unit) 2022 di REGIONAL Jawa
105	Tabel 68. Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak (Ekor) 2022 di REGIONAL Jawa
105	Tabel 69. Optimalisasi Reproduksi (Ekor) 2022 di REGIONAL Jawa
106	Tabel 70. Embung Pertanian (Unit) 2022 di REGIONAL Jawa
106	Tabel 71. Penyuluh Pertanian (Orang) 2022 di REGIONAL Jawa
106	Tabel 72. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan (Unit) 2022 di REGIONAL Jawa
107	Tabel 73. Bantuan Operasional Sekolah (Orang) 2022 di REGIONAL Jawa
107	Tabel 74. Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag (Orang) 2022 di REGIONAL Jawa
107	Tabel 75. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 (Orang) 2022 di REGIONAL Jawa
108	Tabel 76. Pembangunan Bendungan (Unit) 2022 di Regional Bali Nusra
108	Tabel 77. Pembangunan Jalan (Km) 2022 di Regional Bali Nusra
108	Tabel 78. Pembangunan JEMBATAN (m) 2022 di Regional Bali Nusra
109	Tabel 79. PPembangunan Stimulan Perumahan Swadaya (unit) 2022 di Regional Bali Nusra
109	Tabel 80. Kawasan Padi (unit) 2022 di Regional Bali Nusra
109	Tabel 81. Optimasi Lahan (Km2) 2022 di Regional Bali Nusra
109	Tabel 82. Penyaluran Benih Jagung (Unit) 2022 di Regional Bali Nusra
110	Tabel 83. Penyaluran Benih Padi (Unit) 2022 di Regional Bali Nusra
110	Tabel 84. Ternak Ruminansia, Unggas, Dan Aneka Ternak (EKOR) 2022 di Regional Bali Nusra
110	Tabel 85. Optimalisasi Reproduksi (Ekor) 2022 di Regional Bali Nusra
110	Tabel 86. Embung Pertanian (Unit) 2022 di Regional Bali Nusra
111	Tabel 87. Penyuluh Pertanian (Orang) 2022 Regional Bali Nusra
111	Tabel 88. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan (Unit) 2022 di Regional Bali Nusra
111	Tabel 89. Bantuan Operasional Sekolah (Orang) 2022 DI Regional Bali Nusra
111	Tabel 90. Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag (Orang) 2022 di Regional Bali Nusra
112	Tabel 91. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 (Orang) 2022 di Regional Bali Nusra
112	Tabel 92. Pembangunan Bendungan (Unit) 2022 di Regional Kalimantan
112	Tabel 93. Pembangunan Jalan (Km) 2022 di Regional Kalimantan
113	Tabel 94. Pembangunan Jembatan (m) 2022 di Regional Kalimantan
113	Tabel 95. Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya (unit) 2022 di Regional Kalimantan
113	Tabel 96. Kawasan Padi (unit) 2022 di Regional Kalimantan
114	Tabel 97. Optimasi Lahan (Km2) 2022 di Regional Kalimantan
114	Tabel 98. Penyaluran Benih Jagung (Unit) 2022 di Regional Kalimantan
114	Tabel 99. Penyaluran Benih Padi (Unit) 2022 di Regional Kalimantan
114	Tabel 100. Optimalisasi Reproduksi (Ekor) 2022 di Regional Kalimantan
115	Tabel 101. Embung Pertanian (Unit) 2022 di Regional Kalimantan
115	Tabel 102. Penyuluh Pertanian (Orang) 2022 di Regional Kalimantan
115	Tabel 103. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan (Unit) 2022 di Regional Kalimantan
115	Tabel 104. Bantuan Operasional Sekolah (Orang) 2022 di Regional Kalimantan
116	Tabel 105. Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag (Orang) 2022 di Regional Kalimantan
116	Tabel 106. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 (Orang) 2022 di Regional Kalimantan
117	Tabel 107. Pembangunan Bendungan (Unit) 2022 di Regional SULAWESI
117	Tabel 108. Pembangunan Jalan (Km) 2022 di Regional Sulawesi
117	Tabel 109. Pembangunan Jembatan (m) 2022 di Regional Sulawesi
117	Tabel 110. Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya (unit) 2022 di Regional Sulawsesi
118	Tabel 111. Kawasan Padi (unit) 2022 di Regional Sulawesi
118	Tabel 112. Optimasi Lahan (Km2) 2022 di Regional Sulawesi
118	Tabel 113. Penyaluran Benih Jagung (Unit) 2022 di Regional Sulawesi
119	Tabel 114. Penyaluran Benih Padi (Unit) 2022 di Regional Sulawesi
119	Tabel 115. Optimalisasi Reproduksi (Ekor) 2022 di Regional Sulawesi
119	Tabel 116. Embung Pertanian (Unit) 2022 di Regional Sulawesi



- 120 Tabel 117. Insentif Penyuluh Pertanian (Orang) 2022 di Regional Sulawesi
- 120 Tabel 118. Irigasi Perpipaian dan Perpompaaan (Unit) 2022 di Regional Sulawesi
- 120 Tabel 119. Bantuan Operasional Sekolah (Orang) 2022 di Regional Sulawesi
- 121 Tabel 120. Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag (Orang) 2022 di Regional Sulawesi
- 121 Tabel 121. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 (Orang) 2022 di Regional Sulawesi
- 121 Tabel 122. Pembangunan Bendungan (Unit) 2022 di Regional Maluku Papua
- 122 Tabel 123. Pembangunan Jalan (Km) 2022 di Regional MALUKU PAPUA
- 122 Tabel 124. Pembangunan Jembatan (m) 2022 di Regional Maluku Papua
- 122 Tabel 125. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (unit) 2022 di Regional Maluku Papua
- 123 Tabel 126. Kawasan Padi (unit) 2022 di Regional Maluku Papua
- 123 Tabel 127. Optimasi Lahan (Km2) 2022 di Regional Maluku Papua
- 123 Tabel 128. Penyaluran Benih Jagung (Unit) 2022 di Regional Maluku Papua
- 123 Tabel 129. Penyaluran Benih Padi (Unit) 2022 di Regional Maluku Papua
- 123 Tabel 130. Optimalisasi Reproduksi (Ekor) 2022 di Regional Maluku Papua
- 124 Tabel 131. Embung Pertanian (Unit) 2022 di Regional Maluku Papua
- 124 Tabel 132. Penyuluh Pertanian (Orang) 2022 di Regional Maluku Papua
- 124 Tabel 133. Irigasi Perpipaian dan Perpompaaan (Unit) 2022 di Regional Maluku Papua
- 125 Tabel 134. Bantuan Operasional Sekolah (Orang) 2022 di Regional Maluku Papua
- 125 Tabel 135. Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag (Orang) 2022 di Regional Maluku Papua
- 125 Tabel 136. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag (Orang) 2022 di Regional Maluku Papua
- 131 Tabel 137. Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Regional Sumatera Tahun 2022
- 132 Tabel 138. Perkembangan Sektor Unggulan Utama Regional Sumatera Tahun 2021 dan 2022
- 132 Tabel 139. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Per Provinsi Terhadap Total PDRB Sektor Terkait di Sumatera Tahun 2020-2022
- 134 Tabel 140. Kontribusi Sektor Konstruksi Per Provinsi Terhadap Total PDRB Sektor Terkait di Sumatera Tahun 2020-2022
- 135 Tabel 142. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tiap Provinsi Tahun 2020-2022
- 135 Tabel 141. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Potensial Regional Sumatera
- 136 Tabel 143. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Per Provinsi Tahun 2020-2022
- 137 Tabel 145. Perkembangan Sektor Unggulan Utama Regional Jawa Tahun 2021 dan 2022
- 137 Tabel 144. Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Regional Jawa Tahun 2022
- 138 Tabel 146. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Per Provinsi Terhadap Total PDRB Sektor Terkait di Jawa Tahun 2020-2022
- 139 Tabel 147. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Per Provinsi Terhadap Total PDRB Sektor Terkait di Jawa Tahun 2020-2022
- 141 Tabel 148. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Potensial Regional Sumatera
- 141 Tabel 149. Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Potensial Regional Jawa
- 142 Tabel 151. Perkembangan Sektor Unggulan Utama Regional KALIMANTAN Tahun 2021 dan 2022
- 142 Tabel 150. Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Regional KALIMANTAN Tahun 2022
- 143 Tabel 152. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Per Provinsi Terhadap Total PDRB Sektor Terkait di Kalimantan Tahun 2020-2022
- 145 Tabel 153. Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Konstruksi Tahun 2022 Per Provinsi
- 147 Tabel 155. Perkembangan Sektor Unggulan Utama Regional Sulawesi Tahun 2021 dan 2022
- 147 Tabel 156. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Per Provinsi Terhadap Total PDRB Sektor Terkait di Sulawesi Tahun 2020-2022
- 147 Tabel 154. Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Regional Sulawesi Tahun 2022
- 148 Tabel 157. Kontribusi Sektor Konstruksi Per Provinsi Terhadap Total PDRB Sektor Terkait di Sulawesi Tahun 2020-2022
- 150 Tabel 158. LAJU Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2022 Per Provinsi
- 151 Tabel 159. Perkembangan Sektor Unggulan Utama Regional Sulawesi Tahun 2021 dan 2022
- 152 Tabel 160. Kontribusi Sektor Unggulan Regional Bali-Nusra Tahun 2022
- 152 Tabel 161. Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap Total PDRB per Provinsi Tahun 2020-2022
- 154 Tabel 162. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan Tahun 2022 Per Provinsi
- 155 Tabel 163. Kontribusi Sektor Unggulan Regional Bali-Nusra Tahun 2022
- 156 Tabel 165. Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap Total PDRB per Provinsi Tahun 2020-2022
- 156 Tabel 164. Perkembangan Sektor Unggulan Regional Maluku-Papua Tahun 2021 dan 2022
- 157 Tabel 166. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Total PDRB per Provinsi Tahun 2020-2022
- 158 Tabel 167. Kontribusi Sektor Unggulan Regional Bali-Nusra Tahun 2022

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



- 22 Gambar 1. Kinerja Fiskal, Perekonomian, dan Kesejahteraan Tahun 2022
- 23 Gambar 2. Sebaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Regional Tahun 2022
- 24 Gambar 3. Peta Spasial Realisasi Belanja K/L dan TKDD TA 2022
- 25 Gambar 4. Peta Spasial Realisasi APBD Tahun 2022
- 26 Gambar 5. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Tahun 2022
- 28 Gambar 6. Potensi Ekonomi Daerah Menurut Regional
- 31 Gambar 7. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 2012-2022
- 32 Gambar 8. Kasus Covid-19 dan Data Vaksinasi sampai dengan Desember 2022
- 32 Gambar 9. Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2022
- 33 Gambar 10. Cadangan Devisa Tahun 2022
- 34 Gambar 11. Share dan Pertumbuhan Ekonomi per Regional Tahun 2022
- 35 Gambar 12. Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2022
- 35 Gambar 13. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022
- 36 Gambar 14. Perkembangan Inflasi Nasional (C-to-C) Tahun 2018-2022
- 37 Gambar 16. Tingkat Inflasi Gabungan Regional
- 37 Gambar 15. Tingkat Inflasi Gabungan Provinsi (C-to-C) Tahun 2022
- 38 Gambar 17. Perkembangan Suku Bunga BI 7 Day-Reverse Repo Rate (BI7DRR)
- 39 Gambar 18. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2022
- 40 Gambar 19. Peta Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022
- 41 Gambar 20. Perkembangan Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran
- 41 Gambar 21. Tingkat Ketimpangan Provinsi Tahun 2022
- 42 Gambar 22. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2022
- 42 Gambar 23. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2019-2022
- 43 Gambar 24. Penduduk Miskin Menurut Regional tahun 2022
- 43 Gambar 25. Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2022
- 44 Gambar 26. TPT Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Periode Tahun 2020-2022
- 44 Gambar 27. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2022
- 47 Gambar 28. Nilai Tukar Petani Tahun per Provinsi Tahun 2022
- 48 Gambar 29. Nilai Tukar Nelayan per Provinsi Tahun 2022
- 52 Gambar 30. Sebaran Pendapatan Negara Tingkat Daerah Selain di Regional Jawa Tahun 2022
- 53 Gambar 31. Sebaran Belanja Pemerintah Pusat Selain di DKI Jakarta Tahun 2022
- 55 Gambar 32. Distribusi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pada Tingkat Daerah Tahun 2022
- 56 Gambar 33. Perkembangan Target Komponen APBD (Dalam Triliun Rupiah) (2020-2022)
- 57 Gambar 34. Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional
- 57 Gambar 35. Pertumbuhan Realisasi APBD Regional Dibandingkan Nasional
- 58 Gambar 37. Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer
- 58 Gambar 36. Kontribusi Realisasi Komponen PAD
- 59 Gambar 38. Perkembangan Pendapatan Regional Per Jenis
- 59 Gambar 39. Komposisi Belanja APBD 2022
- 60 Gambar 40. Realisasi Komponen Belanja Operasi Regional
- 60 Gambar 41. Pertumbuhan Belanja Operasi Per Regional (2021-2022)
- 60 Gambar 42. Presentase Pertumbuhan Belanja Diluar Operasi Per Regional (2021-2022)
- 61 Gambar 43. Komposisi dan Perkembangan Penerimaan Pembiayaan (2021-2022) (Dalam Triliun Rupiah)
- 61 Gambar 44. Pertumbuhan Komponen Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SILPA (2021-2022)
- 62 Gambar 45. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan (2021-2022) (triliun)
- 62 Gambar 46. Perkembangan Pembiayaan Regional (Dalam Miliar Rupiah) (2021-2022)
- 63 Gambar 47. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL SUMATERA
- 64 Gambar 48. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL JAWA
- 65 Gambar 49. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL KALIMANTAN
- 66 Gambar 50. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL SULAWESI
- 67 Gambar 51. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA
- 68 Gambar 52. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL Papua-Maluku
- 74 Gambar 53. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 (c-to-c) Menurut Lapangan Usaha
- 75 Gambar 55. Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2022 (c-to-c) Menurut Pengeluaran
- 75 Gambar 54. Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2022 (c-to-c) Menurut Pengeluaran
- 76 Gambar 56. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran PK-P Nasional dan Regional Sumatera
- 77 Gambar 57. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran PK-P Nasional dan Regional Jawa
- 78 Gambar 58. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran PK-P Nasional dan Regional Kalimantan
- 79 Gambar 60. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran PK-P Nasional dan Regional Sulawesi
- 79 Gambar 59. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran PK-P Nasional dan Regional Bali-Nusa Tenggara

- 80 Gambar 61. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran PK-P Nasional dan Regional Papua-Maluku
- 80 Gambar 62. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Tiap Regional terhadap PDRB 2022
- 81 Gambar 63. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sumatera
- 82 Gambar 64. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Jawa
- 82 Gambar 65. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Kalimantan
- 83 Gambar 66. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara
- 84 Gambar 67. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sulawesi
- 84 Gambar 68. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Papua-Maluku
- 85 Gambar 69. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tiap Regional terhadap PDRB 2022
- 86 Gambar 70. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Sumatera
- 87 Gambar 71. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Jawa
- 87 Gambar 72. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Kalimantan
- 88 Gambar 73. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Bali Nusa Tenggara
- 89 Gambar 74. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Sulawesi
- 89 Gambar 75. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Papua-Maluku
- 90 Gambar 76. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Tiap Regional terhadap PDRB 2022
- 91 Gambar 78. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Jawa
- 91 Gambar 77. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sumatera
- 92 Gambar 79. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Kalimantan
- 93 Gambar 80. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara
- 93 Gambar 81. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sulawesi
- 94 Gambar 82. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Papua Maluku
- 95 Gambar 83. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tiap Regional terhadap PDRB 2022
- 127 Gambar 84. PDB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2022
- 128 Gambar 85. Laju Pertumbuhan PDB Per Sektor Lapangan Usaha di Tingkat Nasional Tahun 2022
- 129 Gambar 86. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Tingkat Nasional
- 130 Gambar 87. Peta Sektor Unggulan dan Potensial Per Regional Tahun 2022
- 131 Gambar 88. Diagram Klassen Sektor Unggulan Regional Sumatera
- 132 Gambar 89. Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Sumatera Tahun 2022
- 133 Gambar 90. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Lampung Terhadap Total Tenaga Kerja di Sumatera Tahun 2020-2022
- 134 Gambar 91. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Lampung Terhadap Total Tenaga Kerja di Sumatera Tahun 2020-2022
- 136 Gambar 92. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Per Provinsi Regional Sumatera Tahun 2020-2022
- 137 Gambar 93. Diagram Klassen Sektor Unggulan Regional Jawa
- 138 Gambar 94. Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Jawa Tahun 2022
- 139 Gambar 95. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Terhadap Total Tenaga Kerja di Jawa Tahun 2020-2022
- 140 Gambar 96. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta Terhadap Total Tenaga Kerja di Jawa Tahun 2020-2022
- 141 Gambar 97. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Per Provinsi Regional Jawa Tahun 2020-2022
- 142 Gambar 98. Diagram Klassen Sektor Unggulan Regional KALIMANTAN
- 143 Gambar 99. Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Kalimantan Tahun 2022
- 144 Gambar 100. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah Terhadap Total Tenaga Kerja di Kalimantan Tahun 2020-2022
- 144 Gambar 101. Nilai Location Quotient Sektor Konstruksi Regional Kalimantan
- 145 Gambar 102. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Per Provinsi Regional Kalimantan



- 146 Gambar 103. Diagram Klassen Sektor Unggulan Regional Sulawesi
- 147 Gambar 104. Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Sulawesi Tahun 2022
- 148 Gambar 105. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara Terhadap Total Tenaga Kerja di Sulawesi Tahun 2020-2022
- 149 Gambar 106. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara Terhadap Total Tenaga Kerja di Sulawesi Tahun 2020-2022
- 150 Gambar 107. Nilai Location Quotient Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Regional Sulawesi
- 150 Gambar 108. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Regional Sulawesi
- 151 Gambar 109. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Per Provinsi Regional Sulawesi
- 152 Gambar 110. Diagram Klassen Sektor Unggulan Regional Bali Nusra
- 153 Gambar 111. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Per Provinsi Regional Sulawesi
- 154 Gambar 112. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Per Provinsi Regional Bali-Nusra Tahun 2020-2022
- 155 Gambar 113. Diagram Klassen Sektor Unggulan Regional Maluku Papua
- 157 Gambar 114. Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Per Provinsi Regional Maluku-Papua Tahun 2020-2022
- 158 Gambar 115. Pertumbuhan Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Per Provinsi Regional Maluku-Papua Tahun 2020-2022
- 159 Gambar 116. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Per Provinsi Regional Maluku-Papua
- 162 Gambar 117. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- 163 Gambar 118. Kinerja belanja DAK Fisik, Dana Desa, Bantuan Operasional Sekolah, BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2022 Secara Nasional (per 30 Desember 2022)
- 165 Gambar 119. Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Regional Sumatera (Miliar Rupiah)
- 166 Gambar 120. Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi Regional Sumatera (Miliar Rupiah)
- 168 Gambar 121. Alokasi Anggaran Infrastruktur SPAM Air Bersih Regional Sumatera (Miliar Rupiah)
- 169 Gambar 122. Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan Regional Sumatera (Miliar Rupiah)
- 170 Gambar 123. Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Regional Jawa (Miliar Rupiah)
- 172 Gambar 124. Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi Regional Jawa (Miliar Rupiah)
- 173 Gambar 125. Alokasi Anggaran Infrastruktur SPAM Air Bersih Regional Jawa (Miliar Rupiah)
- 174 Gambar 126. Alokasi Anggaran BOS dan BOP Regional Jawa (Miliar Rupiah)
- 176 Gambar 127. Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Regional Kalimantan (Miliar Rupiah)
- 177 Gambar 128. Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi Regional Kalimantan (Miliar Rupiah)
- 178 Gambar 129. Alokasi Anggaran Infrastruktur SPAM Air Bersih Regional Kalimantan (Miliar Rupiah)
- 180 Gambar 130. Alokasi Anggaran BOS dan BOP Regional Kalimantan (Miliar Rupiah)
- 182 Gambar 131. Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Regional Sulawesi (Miliar Rupiah)
- 183 Gambar 132. Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi Regional Sulawesi (Miliar Rupiah)
- 185 Gambar 133. Alokasi Anggaran Infrastruktur SPAM Air Bersih Regional Sulawesi (Miliar Rupiah)
- 186 Gambar 134. Alokasi Anggaran BOS dan BOP Regional Sulawesi (Miliar Rupiah)
- 187 Gambar 135. Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Regional Bali-Nusa Tenggara (Miliar Rupiah)
- 188 Gambar 136. Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi Regional Bali-Nusa Tenggara (Miliar Rupiah)
- 189 Gambar 137. Alokasi Anggaran Infrastruktur SPAM Air Bersih Regional Bali-Nusa Tenggara (Miliar Rupiah)
- 190 Gambar 138. Alokasi Anggaran BOS dan BOP Regional Maluku-Papua (Miliar Rupiah)
- 191 Gambar 139. Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Regional Maluku-Papua (Miliar Rupiah)
- 193 Gambar 140. Alokasi Anggaran Infrastruktur Irigasi Regional Maluku-Papua (Miliar Rupiah)
- 195 Gambar 141. Alokasi Anggaran Infrastruktur SPAM Air Bersih Regional Maluku-Papua (Miliar Rupiah)
- 196 Gambar 142. Alokasi Anggaran BOS dan BOP Regional Maluku-Papua (Miliar Rupiah)

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN KINERJA FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada Alinea ke IV yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D). Fungsi tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjadi stimulus investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Sepanjang tahun 2022, dunia mengalami turbulensi yang kuat. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, tekanan inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara maju, dan perang antara Rusia dengan Ukraina menimbulkan gejolak bagi perekonomian global. Selain itu, tantangan ekologis berupa perubahan iklim menjadi ancaman yang dapat mendisrupsi pasokan pangan. Dinamika kondisi perekonomian, geopolitik, dan ekologis tersebut mengindikasikan

kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

Di tengah badai krisis global, kebijakan fiskal dihadapkan pada alternatif kebijakan yang tidak utopis. APBN dan APBD sebagai instrumen strategis pemerintah, dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan berperan sebagai shock absorber dengan risiko yang terkendali, sehingga tetap sehat dan berkelanjutan. Belanja pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi dan rencana pembangunan. Oleh karena itu, kualitas penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah menjadi penting dan menentukan, sehingga mampu menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

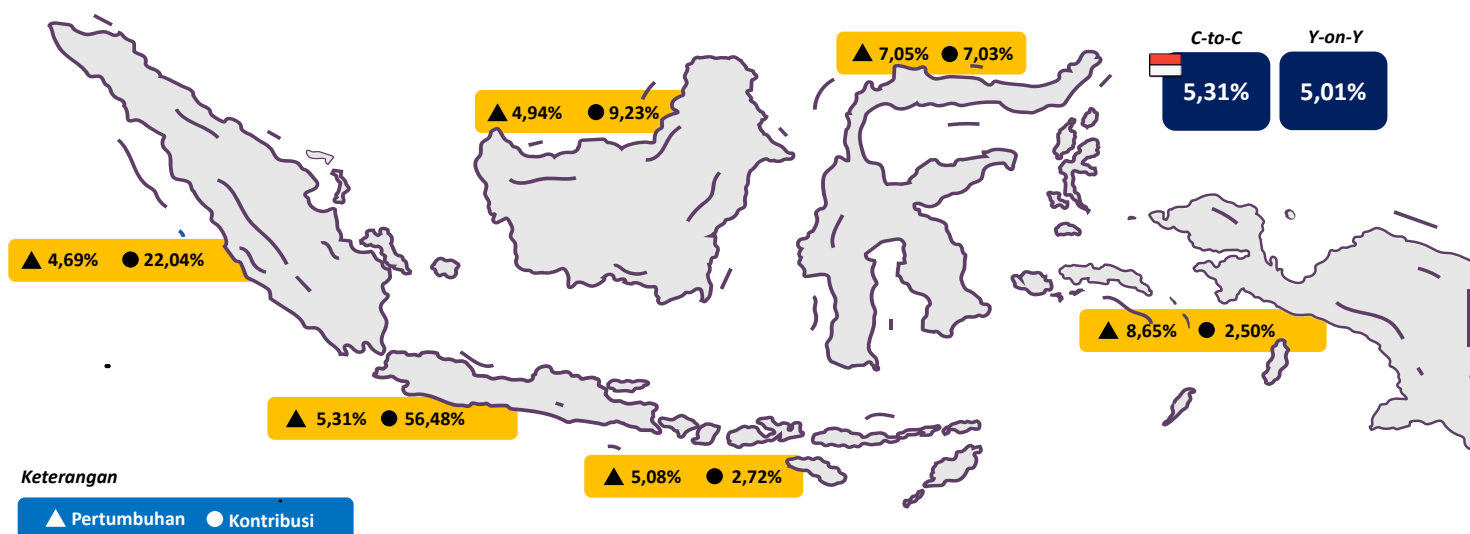
Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen (c-to-c). Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk menghadapi tahun 2023 dengan optimis. Namun demikian, perlambatan perekonomian global yang diimplikasi oleh peningkatan downside risk tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Miskalkulasi kebijakan moneter, apresiasi dolar AS, tekanan inflasi yg lebih lama, tekanan utang di negara berkembang yang rentan, krisis energi Eropa, krisis sektor properti Tiongkok dan fragmentasi internasional menghasilkan ketidakpastian

Pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi Wilayah

GAMBAR 1. KINERJA FISKAL, PEREKONOMIAN, DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2022

APBN		Makro Ekonomi	
a. Realisasi Pendapatan	Rp2.635,84 T (116,31%)	a. Pertumbuhan Ekonomi	5,31%
b. Realisasi Belanja	Rp3.096,26 T (99,67%)	b. Produk Domestik Bruto	Rp19.588,4 T
c. Defisit	Rp460,42 T (54,80%)	c. Inflasi	5,51%
d. Pembiayaan	Rp590,98 T (70,34%)		
e. SiLPA	Rp130,56 T		
APBD (konsolidasi)		Kesejahteraan	
a. Realisasi Pendapatan	Rp1.159,18 T (99,54%)	a. Indeks Pembangunan Manusia	72,91
b. Realisasi Belanja	Rp1.192,18 T (95,26%)	b. Rasio Gini	0,381
c. Defisit	Rp33,00 T	c. Pengangguran	5,86%
d. Pembiayaan	Rp106,83 T	d. Kemiskinan	9,57%
e. SiLPA	Rp73,82 T		

GAMBAR 2. SEBARAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL TAHUN 2022



sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Maluku-Papua sebesar 8,65 persen, sedangkan terendah dialami Wilayah Sumatera sebesar 4,69 persen. Keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi serta peredaman tekanan ekonomi global menjadi kunci untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali seiring turunnya kasus harian dan tingginya tingkat vaksinasi. Momentum perbaikan pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejala tantangan global saat ini melalui perbaikan indikator pada berbagai sektor. Sektor konsumsi dan investasi mengalami perbaikan yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10 persen sejak Juni 2022. Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan nikel, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2022 mencapai Rp19.588,4 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp16.970,8 triliun. PDB per kapita mencapai Rp71 juta atau US\$4.783,9, sehingga Indonesia masih termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country).

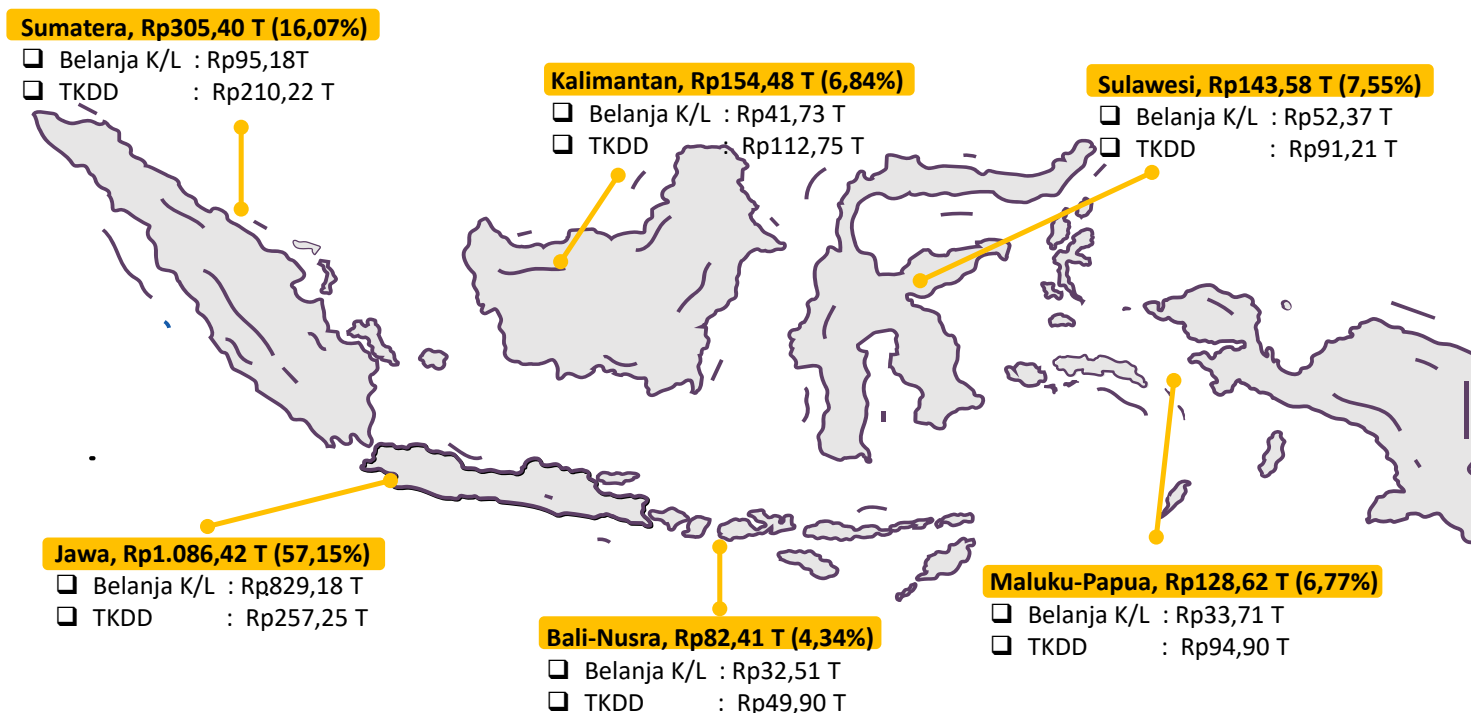
Dilihat secara spasial, perekonomian Indonesia

masih didominasi oleh perkembangan aktivitas ekonomi di regional Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 56,48 persen, diikuti oleh regional Sumatera sebesar 22,04 persen, dan regional Kalimantan 9,23 persen, sedangkan regional Sulawesi memiliki kontribusi sebesar 7,03 persen, Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,72 persen, serta regional Maluku-Papua sebesar 2,50 persen. Berdasarkan share PDB tersebut, variasi angka kontribusi PDB setiap regional menunjukkan bahwa distribusi PDB masih didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Namun demikian, pemerintah telah berupaya untuk mendorong peningkatan kontribusi PDB ini ke Kawasan Indonesia Timur (KIT) melalui sejumlah program prioritas di bidang infrastruktur dan kesejahteraan baik yang didanai melalui APBN maupun APBD. Secara laju pertumbuhan, Provinsi Maluku Utara mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 22,94 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah di Provinsi Papua Barat yang tumbuh sebesar 2,01 persen.

Pada capaian tingkat inflasi nasional di tahun 2022, tingkat inflasi Indonesia sebesar 5,51 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2021 sebesar 1,87 persen (y-o-y) dan berada di atas asumsi makro inflasi sebesar 3,00 persen. Tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2008. Tingginya tingkat inflasi disebabkan oleh konflik geopolitik yang menyebabkan sejumlah wilayah mendisrupsi rantai pasok dan memicu kenaikan harga pangan dan energi.



GAMBAR 3. PETA SPASIAL REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD TA 2022



sumber: Kementerian Keuangan, diolah

2. KINERJA APBN

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2022 masih memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan pengelolaan yang prudent dan sustainable. Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, melampaui target. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat tumbuh sebesar 31,05 persen dari sebesar Rp2.011,41 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp2.635.84 triliun pada tahun 2022. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp2,266.20 triliun atau tercapai sebesar 116,31 persen. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia, membaiknya harga komoditas, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, realisasi belanja negara pada TA 2022 sebesar Rp3,096.26 triliun atau 99,67 persen. Capaian tersebut meningkat Rp309,85 triliun atau tumbuh sebesar 11,12 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,280.03 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp816.23 triliun. Pada bagian BPP, besaran realisasi belanja barang merupakan kebutuhan belanja utama yakni sebesar Rp426,15 triliun atau sekitar 13,76 persen dari total belanja negara, disusul kemudian oleh belanja subsidi sebesar

Rp404,39 triliun (13,06 persen total belanja), belanja pegawai sebesar Rp402,44 triliun (13,00 persen total belanja), sedangkan belanja bantuan sosial sebesar Rp386,34 triliun (12,48 persen total belanja). Belanja negara baik dalam bentuk BPP maupun TKDD berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Optimalisasi belanja pada tahun 2022 dilakukan dalam kerangka belanja yang responsif dan fleksibel, seiring dengan tingginya realisasi belanja pemerintah, kondisi perekonomian pada tahun 2022 terus berupaya untuk pulih.

Dilihat secara spasial, porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata serta pencairan Program PC-PEN yang dilakukan terpusat, sehingga belanja tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Tahun 2022, regional Jawa memiliki kontribusi sebesar 57,15 persen untuk pencairan anggaran belanja K/L dan TKDD, disusul oleh regional Sumatera sebesar 16,07 persen. Porsi terendah dari realisasi anggaran berada di regional Bali-Nusa Tenggara dengan kontribusi sebesar 4,34 persen. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan belanja perkapita, maka masyarakat di regional Jawa dengan jumlah penduduk sebanyak 154,34 juta jiwa mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp7,04 juta per kapita, lebih rendah dibandingkan dengan

nilai belanja perkapita di regional Maluku-Papua dengan jumlah penduduk sebanyak 8,74 juta jiwa, yakni sebesar Rp14,71 juta perkapita. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengembangkan kawasan Indonesia Timur di tekanan kondisi global dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan masih tetap dilakukan seoptimal mungkin. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

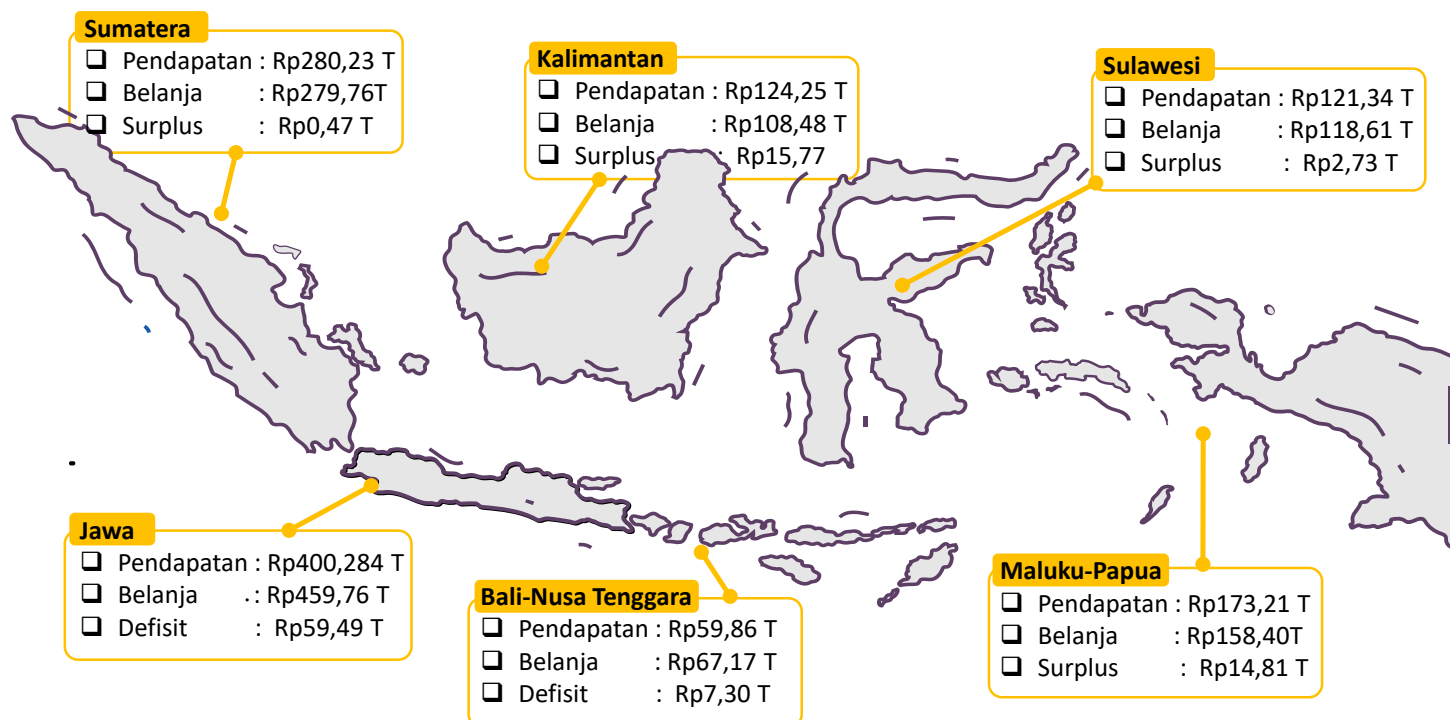
Kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan countercyclical menghasilkan realisasi defisit anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp460,42 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau mencapai 4,57 persen dari PDB. Realisasi defisit tahun 2022 lebih rendah dari target sebesar Rp840,23 triliun dari target atau sebesar 4,29 persen dari PDB seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP yang melampaui target. Hal ini menunjukkan terjadinya pemulihan dan sudah mencapai di bawah 3 persen. Pada masa pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020 dan 2021, pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN dapat di atas 3 persen untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen. Defisit anggaran

tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp590,98 triliun. Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk TA 2022 sebesar Rp130,56 triliun yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembiayaan APBN pada tahun-tahun berikutnya.

3. KINERJA APBD

Dari sisi fiskal daerah, konsolidasi APBD secara nasional di tahun 2022 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah mengalami pertumbuhan. Konsolidasi realisasi pendapatan APBD secara nasional (gabungan) adalah sebesar Rp1.159,18 triliun atau tumbuh sebesar 1,60 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 triliun, sedangkan dana transfer (TKDD) mengalami peningkatan sebesar Rp35,23 triliun. Dana transfer merupakan kontributor utama dalam pendapatan daerah, yakni sebesar Rp837,71 triliun atau sekitar 72,27 persen dari total pendapatan daerah. Pada pos belanja daerah, terjadi kontraksi belanja yakni sebesar 1,78 persen menjadi Rp1.192,18 triliun di tahun 2022. Berdasarkan komposisi, belanja operasi merupakan jenis belanja APBD 2022 terbesar dengan realisasi mencapai Rp805,53 T atau 67,57 persen dari seluruh belanja. Pada posisi kedua dan ketiga, belanja modal dan transfer

GAMBAR 4. PETA SPASIAL REALISASI APBD TAHUN 2022



sumber: Kementerian Keuangan, diolah



berkontribusi sebesar 17,03 persen dan 15,06 persen atau sebesar 202,98 T dan 179,58 T. Selain ketiga belanja ini, terdapat belanja tidak terduga yang berkontribusi sebesar 0,34 persen atau setara Rp4,08 T. Secara ideal, proporsi alokasi dan serapan belanja modal yang bersumber dari APBD hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih besar atau cenderung mendekati kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang, sehingga belanja yang bersifat investasi dapat memberikan stimulus yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Dengan pendapatan daerah yang lebih rendah daripada realisasi belanjanya, maka secara konsolidasi APBD dihasilkan angka defisit anggaran sebesar Rp33,00 triliun, ditambah dengan pembiayaan neto yang telah direalisasikan sebesar Rp106,83 triliun, maka SiLPA Daerah di tahun 2022 mencapai Rp73,82 triliun.

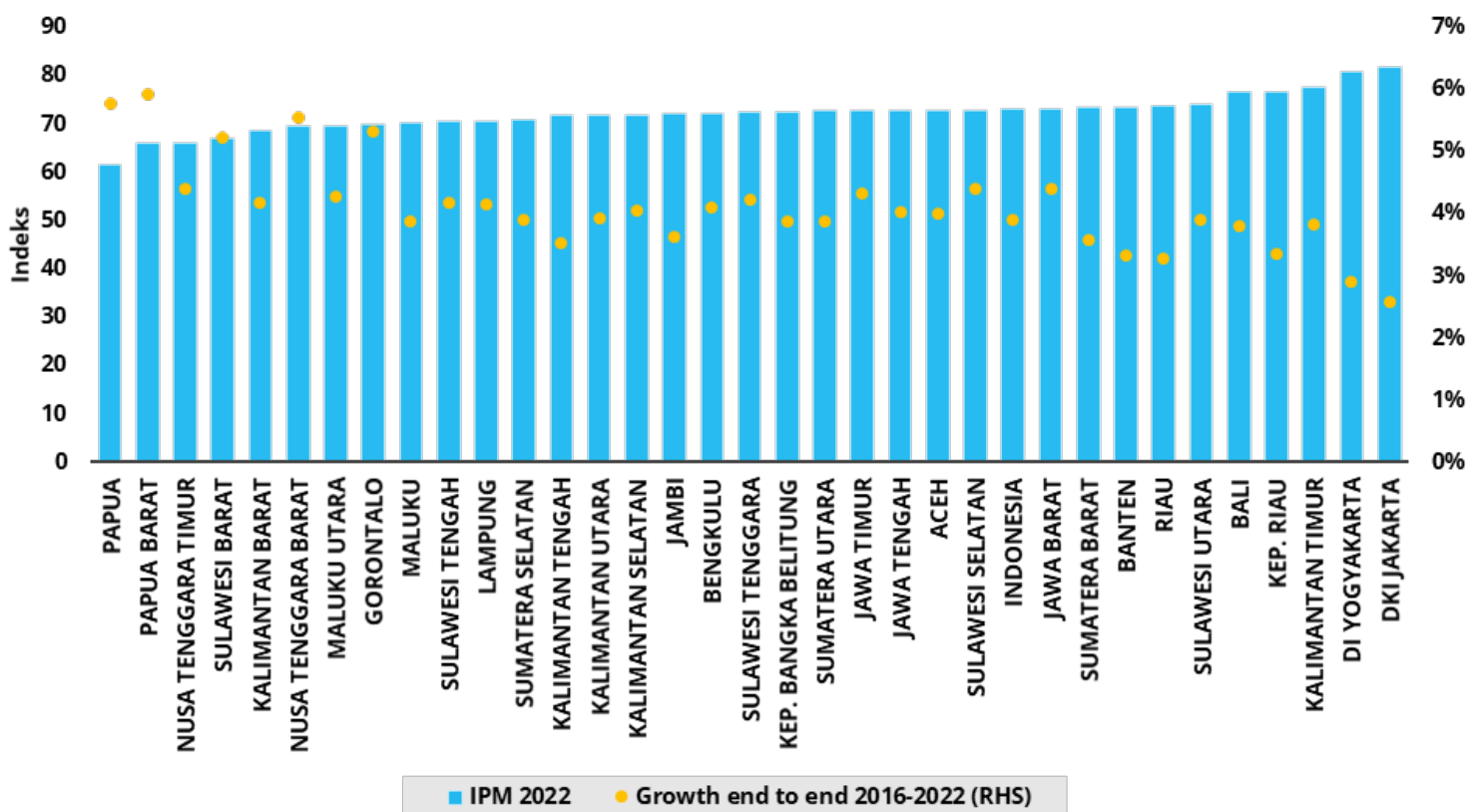
Di lihat secara spasial, pada tahun 2022 belanja daerah dikontribusikan secara signifikan oleh pemerintah daerah di regional Jawa sekitar 38,57 persen dari total belanja APBD konsolidasi, disusul oleh regional Sumatera dengan kontribusi sebesar 23,47 persen. Adapun dari sisi postur APBD secara umum, dapat diketahui bahwa terdapat dua regional mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran terbesar terjadi di regional Jawa sebesar Rp59,49 triliun, sedangkan terendah berada di regional Bali sebesar Rp7,30 triliun. PAD pada Regional Jawa dan Bali-Nusa Tenggara justru

mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,31 persen dan 5,95 persen. Pada regional Jawa, terlihat penurunan PAD yang mencolok di Provinsi Jawa Barat yang turun sebesar 28,24 persen. Sementara itu, di regional Maluku-Papua penurunan PAD paling signifikan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami penurunan sebesar 36,76 persen.

4. KINERJA INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama (ultimate goal) dari setiap perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Pemerintah terus berupaya untuk membangun keselarasan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan perbaikan indikator kesejahteraan. Oleh sebab itu, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran yang menggambarkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin ke dalam 3 aspek, yaitu: akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak. Pada tahun 2022, capaian tingkat IPM nasional sebesar 72,91 atau meningkat sebesar 0,62 basis poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 72,29. Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi dan termasuk dalam

GAMBAR 5. KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM REGIONAL TAHUN 2022



Sumber: BPS, 2022 (diolah)

kategori sangat tinggi mencapai 81,65, sedangkan provinsi Papua masih menjadi yang terendah dengan indeks sebesar 61,39 meskipun pada 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,77 basis poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata IPM di wilayah Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di KTI masih menjadi tantangan tersendiri.

Dari indikator kesejahteraan yang lain, tingkat kemiskinan nasional telah mengalami penurunan dari 9,71 persen di tahun 2021 menjadi 9,57 persen di tahun 2022. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 26,50 juta orang (2021) menjadi sebanyak 26,36 juta orang di tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan merupakan target dari program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, dan ini terus menerus dilakukan melalui belanja negara terutama pada sektor perlindungan sosial, kesehatan, serta dukungan permodalan usaha mikro, kecil, menengah. Sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional, mayoritas provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan, tetapi terdapat sebelas provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat kemiskinan tertinggi dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,28 persen poin, sedangkan terendah dialami Provinsi Jawa Barat sebesar 0,01 persen poin. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi (di atas 15 persen) masih terjadi pada provinsi-provinsi di KTI, seperti Papua (26,80 persen), Papua Barat (21,43 persen), Nusa Tenggara Timur (20,23 persen), Maluku (16,23 persen), dan Gorontalo (15,51 persen), sedangkan di KBI Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan sebesar 14,75 persen. Hal ini menandakan bahwa pemerintah perlu untuk terus fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan pada kantong-kantong atau daerah miskin dan terarah dalam mengatasi akar penyebabnya, termasuk meningkatkan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatannya.

Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan belum menunjukkan perubahan dengan nilai rasio gini sebesar 0,381 sama dengan tingkat ketimpangan tahun sebelumnya. Sebagian besar provinsi menunjukkan indeks dibawah angka nasional. Ketimpangan terendah terjadi pada Provinsi Bangka Belitung dengan gini rasio 0,255 sedangkan tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan gini rasio 0,459. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia dalam

2 tahun terakhir terus mengalami perbaikan meskipun belum signifikan. Penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,63 persen poin, dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 5,86 persen di tahun 2022. Jumlah pengangguran turun dari 9,10 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 8,43 juta jiwa di tahun 2022.

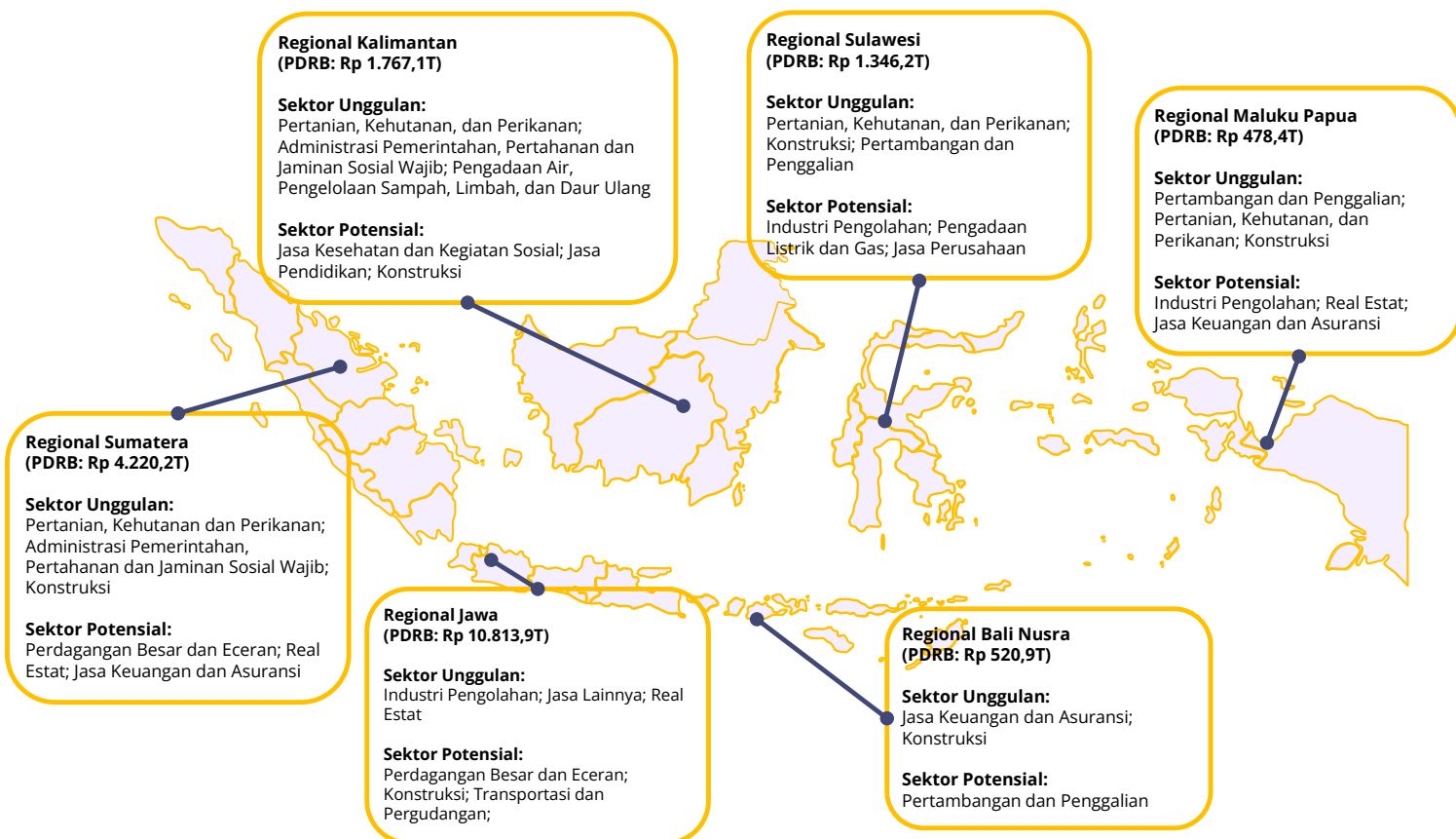
5. SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL DAERAH

Kebijakan fiskal yang dituangkan dalam APBN dan APBD merupakan instrumen kebijakan yang langsung berdampak dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif harus memperhatikan kebutuhan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah, kultur masyarakat, dan potensi ekonomi pada masing-masing wilayah. Pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam RPJMN bertujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok wilayah melalui program-program berbasis infrastruktur dan ekonomi yang akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dalam mengalokasikan dana APBN dan APBD tersebut. Kemandirian fiskal daerah harus semakin ditingkatkan dengan upaya-upaya konstruktif, sehingga daerah semakin mampu dalam membiayai kebutuhan daerah. Adapun hasil identifikasi dan pemetaan atas sektor unggulan dan potensial sesuai dengan karakteristik daerah, kultur masyarakat, dan potensi ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan variasi antara satu regional dengan regional lainnya. Namun, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Pertambangan dan Penggalan, masih menjadi sektor utama aktivitas perekonomian di daerah.

Berdasarkan pemetaan sektor unggulan dan potensial ekonomi daerah, maka diperlukan sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk saling mendukung dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan. Secara umum belanja pemerintah pusat dan daerah yang dilihat dari belanja K/L dengan TKDD pada komponen DAK Fisik, Dak non Fisik, dan Dana Desa telah berjalan selaras. Tidak terdapat tumpang tindih antara belanja



GAMBAR 6. POTENSI EKONOMI DAERAH MENURUT REGIONAL



K/L dengan TKDD. Keduanya saling mendukung dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan. Selain itu, harmonisasi antara belanja pusat dan daerah juga dilihat implementasi dukungan terhadap pencapaian Major Project. Hasil analisis menunjukkan implementasi belanja pusat dan daerah saling mendukung dalam upaya pencapaian Major Project untuk seluruh Prioritas Nasional (PN).

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB I

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Highlights 2022:

- Konflik Rusia-Ukraina yang terjadi menyebabkan harga minyak mentah melonjak hingga kenaikan inflasi
- Pertumbuhan PDB sebesar 5,31 persen (c-to-c)
- Tingkat inflasi sebesar 5,51 persen (y-o-y)
- Nilai tukar Rupiah Dolar AS pada rentang level Rp14.356 sampai Rp15.731
- BI-7 Day Reverse Repo Rate sebesar 5,50 persen

1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

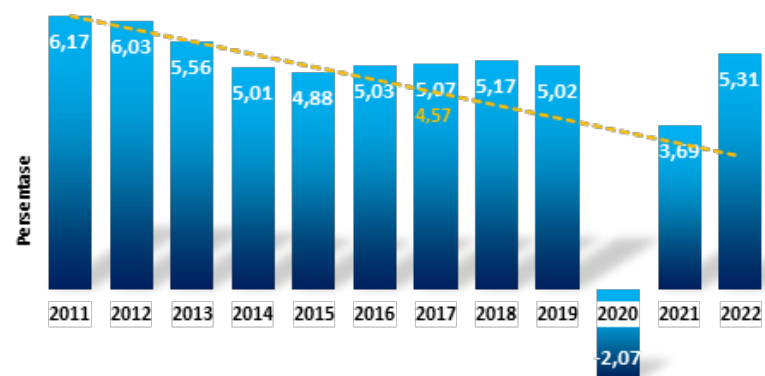
Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mampu menunjukkan pemulihan dan tumbuh secara positif di tengah kondisi pelemahan global. Pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,31 persen (c-to-c), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen (c-to-c). Capaian

tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan pada tahun 2011 hingga 2022 sebesar 4,57 persen (c-to-c).

Perekonomian nasional terus pulih sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan pemulihan perekonomian global. Kinerja ekonomi tahun 2023 diperkirakan tetap meningkat dengan melanjutkan tren positif yang terjadi di 2022. Keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi serta peredaman tekanan ekonomi global menjadi kunci untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali seiring turunnya



GAMBAR 7. TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI PERIODE TAHUN 2012-2022



Sumber: BPS

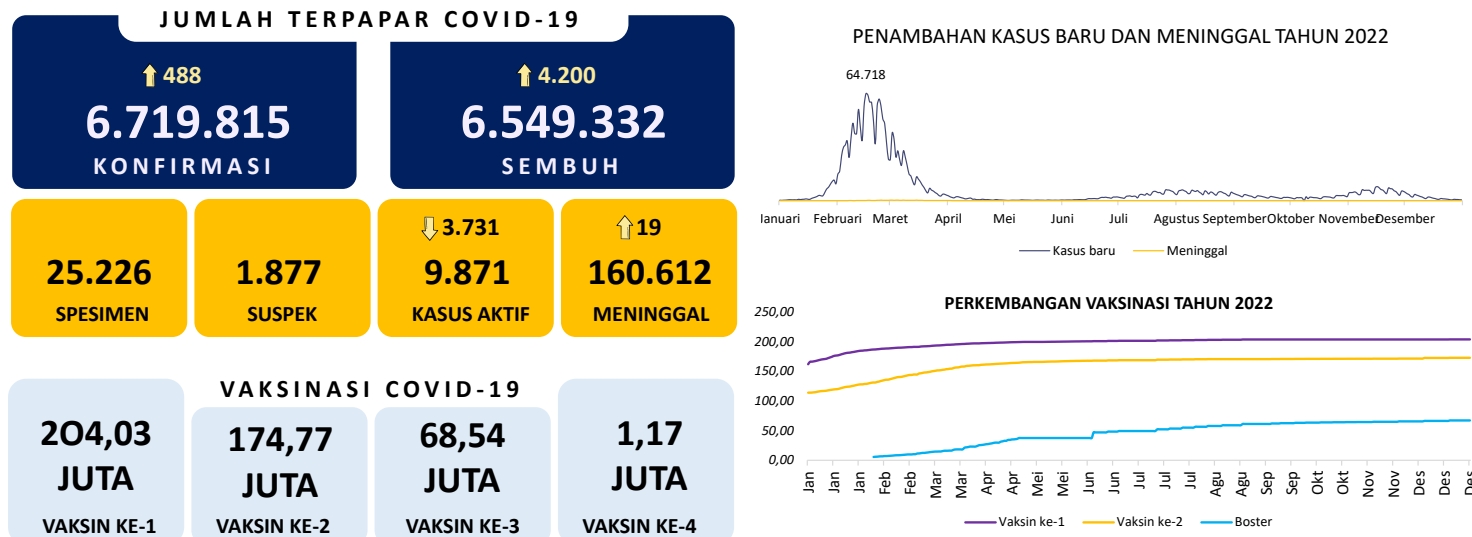
kasus harian dan tingginya tingkat vaksinasi.

Pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali, terlihat dari penambahan kasus harian semakin menurun sebesar 1,7 kasus per satu juta penduduk, tingkat perawatan rumah sakit berada pada angka 4,7 persen, dan tingkat kematian pada angka 2,3 persen. Selain itu, seluruh kabupaten di Indonesia hingga

akhir bulan Desember 2022 berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang berada di tingkat rendah. Berdasarkan perkembangan tersebut, pada 30 Desember 2022, Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan PPKM melalui konferensi pers. Pencabutan PPKM dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas masyarakat yang



GAMBAR 8. KASUS COVID-19 DAN DATA VAKSINASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022



Sumber: covid19.go.id & ourworldindata.org

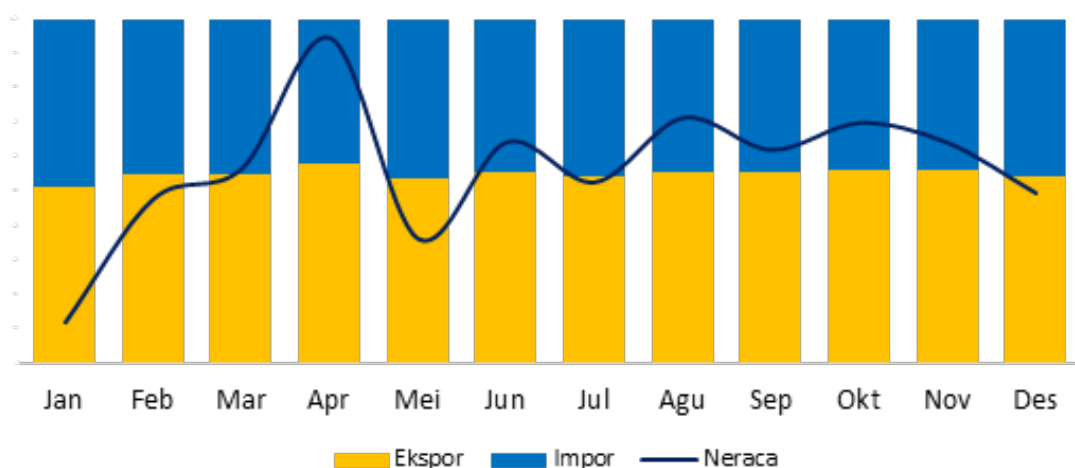
tercermin dari jumlah vaksinasi. Hingga akhir bulan Desember 2022, tingkat vaksinasi terus meningkat di mana vaksinasi dosis 1 telah mencapai 204 juta, vaksinasi dosis 2 mencapai 174 juta, vaksinasi dosis 3 (booster) mencapai 68 juta, serta vaksinasi dosis 4 mencapai 1,1 juta dari total 234 juta sasaran vaksin. Meskipun PPKM telah secara resmi dicabut, Pemerintah terus mengakselerasi vaksinasi kepada seluruh masyarakat sebagai salah satu perlindungan terhadap penyebaran kasus Covid-19.

Ancaman datang dari dampak konflik Rusia-Ukraina yang terjadi pada awal triwulan I 2022. Konflik tersebut menyebabkan harga minyak mentah melonjak hingga kenaikan inflasi. Namun, terjadinya goncangan terhadap perekonomian global yang disebabkan konflik Rusia-Ukraina ini masih menunjukkan pemulihan, diwarnai dengan harga komoditas utama dunia yang masih volatile meski beberapa mulai menurun akibat membaiknya supply.

Momentum perbaikan pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global saat ini melalui perbaikan indikator pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10 persen sejak Juni 2022. Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman. Tercatat pada Januari hingga Agustus 2022, neraca perdagangan telah mengalami surplus hingga USD 54,46 miliar yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan nikel.

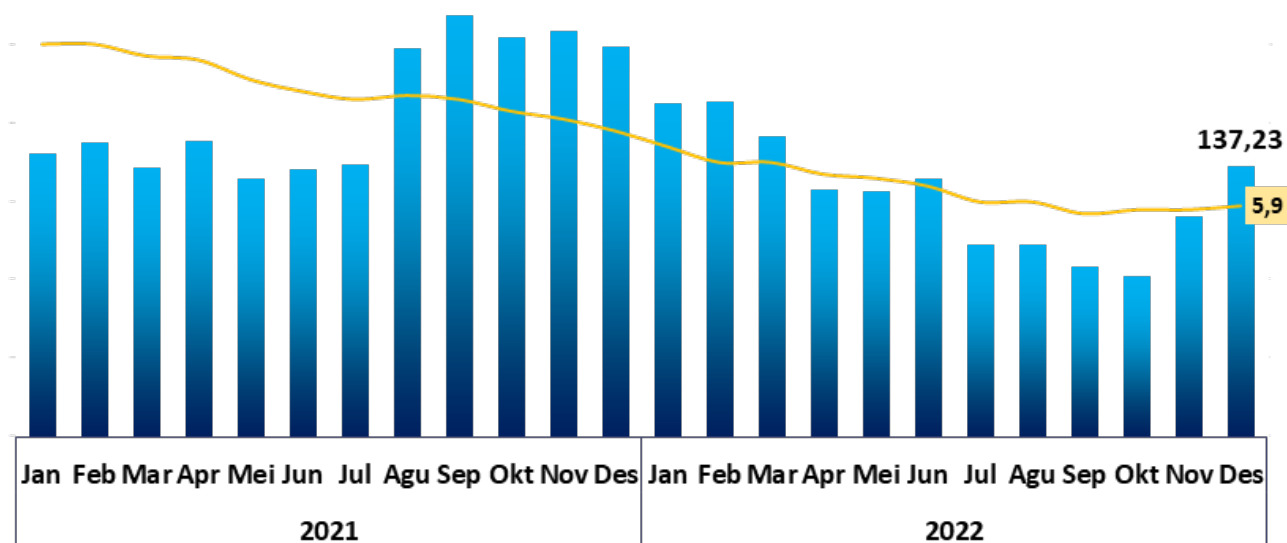
Cadangan devisa Indonesia pada bulan Desember

GAMBAR 9. NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: BPS

GAMBAR 10. CADANGAN DEVISA TAHUN 2022



Sumber: Bank Indonesia

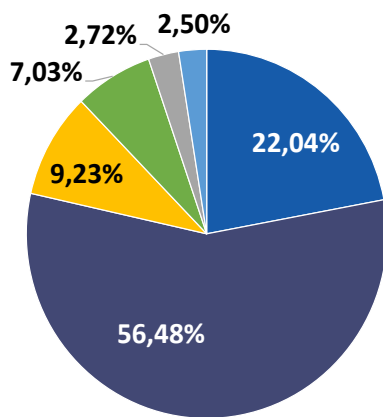
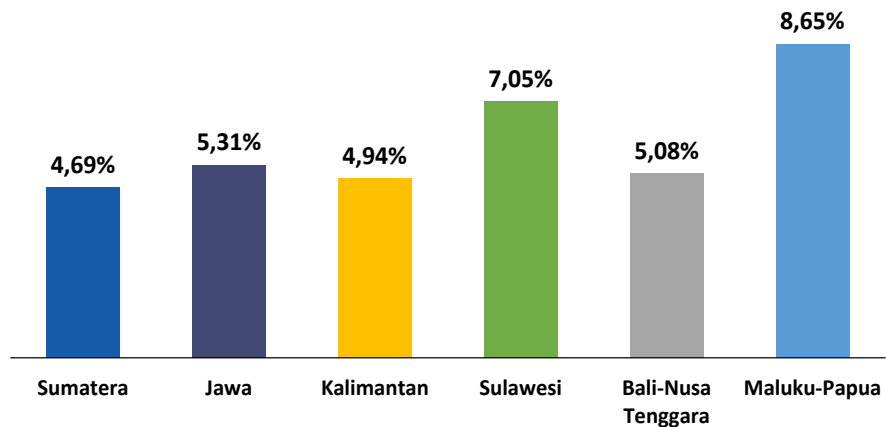
2022 terpantau mencapai USD137,2 miliar. Capaian tersebut meningkat 2,39 persen (m-to-m) dibandingkan dengan posisi pada akhir bulan November 2022 yang sebesar USD134,0 miliar. Setelah sebelumnya berada dalam tren menurun hingga bulan Oktober 2022, kini posisi cadangan devisa meningkat dan mendekati level saat bulan Maret 2022 yang sebesar USD139,1 miliar. Peningkatan posisi cadangan devisa pada akhir bulan Desember 2022 antara lain dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman pemerintah. Jika dilihat lebih detail, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut diperkirakan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun berada di tengah ketidakpastian dan krisis global. Pada triwulan II 2022 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen (y-o-y) mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,07 persen (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 5,72 persen (y-o-y). Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01 persen (y-o-y), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31 persen (c-to-c), mengalami akselerasi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70 persen (c-to-c). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3 persen, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga

maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan PPKM, membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48 persen (y-o-y) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93 persen (y-o-y), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33 persen (y-o-y) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi 4,77 persen (y-o-y), namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik.

Perekonomian nasional didukung oleh capaian perekonomian daerah yang tumbuh secara positif hampir di seluruh daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua yang mencatatkan pertumbuhan tahun 2022 (c-to-c) berturut-turut sebesar 22,94 persen, 15,17 persen, dan 8,97 persen. Sementara itu, terdapat provinsi dengan pertumbuhan paling rendah yaitu provinsi Papua Barat dengan capaian sebesar 2,01 persen 2022 (c-to-c). Terdapat empat provinsi di Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi

GAMBAR 11. SHARE DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER REGIONAL TAHUN 2022
Share PDRB per Regional 2022

Tingkat Pertumbuhan (C-to-C) 2022


Sumber: BPS, diolah

lebih rendah daripada periode 2021, yaitu Kepulauan Bangka dan Belitung, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Papua dengan capaian pertumbuhan (c-to-c) secara berturut-turut 4,40 persen, 5,15 persen, 2,30 persen, dan 8,97 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi 2022 tercatat tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada sebagian daerah yang melambat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di regional Maluku-Papua, diikuti Sulawesi, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. Distribusi perekonomian yang terpusat di pulau Jawa dapat mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengusung tema pembangunan ekonomi inklusif untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Melalui pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti:

1. menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya,
2. memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya

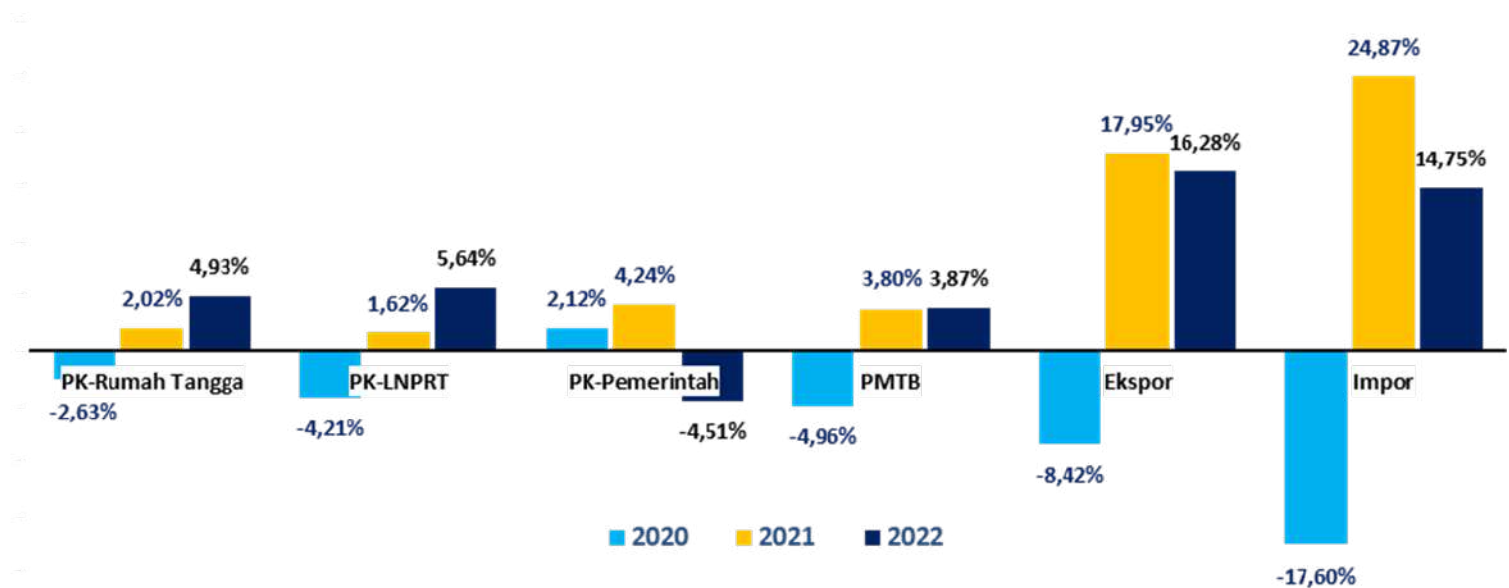
dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsiantan).

1.1.A. PERKEMBANGAN PDB BERDASARKAN PENGELUARAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis global membuat pertumbuhan ekonomi waspada disetiap sektor. Meskipun begitu, kebijakan pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah mampu untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 4,51 persen. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,64 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,93 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,87 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 14,75 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 51,87 persen, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 29,08 persen, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,49 persen, Komponen PK-P

GAMBAR 12. PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS

sebesar 7,66 persen, Komponen PK-LNPRT sebesar 1,17 persen, dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,66 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 20,90 persen.

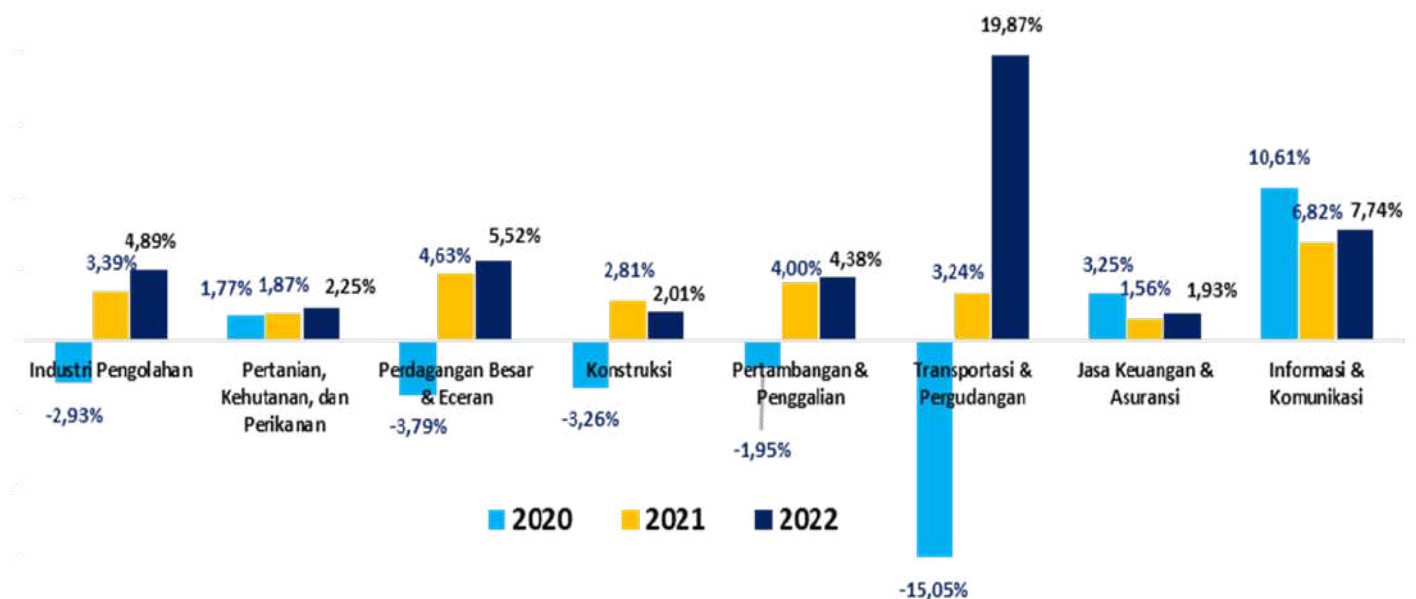
1.1.B. PERKEMBANGAN PDB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh sektor ekonomi tercatat mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen,

diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,97 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 9,47 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,89 persen. Adapun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 2,25 persen dan 5,52 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,34 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar

GAMBAR 13. PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS



12,40 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 12,22 persen; serta Konstruksi sebesar 9,77 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,58 persen.

1.II. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI

1.II.A. PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL

Tingkat inflasi nasional pada triwulan I di tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,51 persen (c-to-c). Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari inflasi tahun 2021 sebesar 1,87 persen (y.o.y) dan berada di atas asumsi makro inflasi sebesar 3 persen. Tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2008. Hal ini dikarenakan adanya konflik geopolitik yang menyebabkan sejumlah wilayah mendisrupsi rantai pasok, memicu kenaikan harga pangan dan energi sehingga memicu tekanan inflasi global. Meskipun kenaikan inflasi yang cukup tinggi pemerintah melakukan pengendalian inflasi melalui, operasi pasar murah, kerjasama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan masyarakat menanam, merealisasikan belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi dari APBD.

Tekanan inflasi komponen Harga Diatur Pemerintah secara tahunan masih tinggi yang didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan dalam kota dalam setahun terakhir. Penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing sebesar 1,15 persen; 0,30 persen; dan 0,27 persen. Tekanan inflasi tahunan komponen Harga Bergejolak pada Desember kembali mengalami pelemahan dibandingkan bulan sebelumnya, disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan. Selama Desember

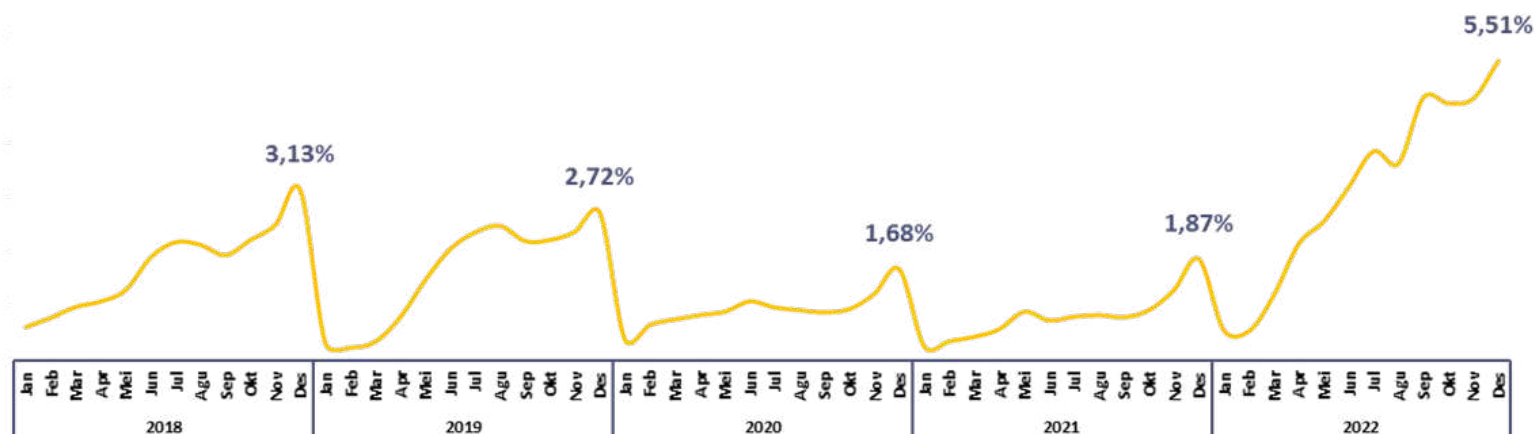
2022 tekanan inflasi komponen inti secara tahunan masih terkendali.

1.II.B. PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

Tingkat inflasi tahun 2022 seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan mengalami tingkat inflasi tertinggi secara nasional (c-to-c), yaitu berturut-turut sebesar 7,43 persen, 7,39 persen, dan 6,99 persen. Selanjutnya, Jakarta, Papua Barat, dan Maluku Utara mengalami tingkat inflasi lebih rendah di tahun 2022 dengan capaian sebesar 4,21 persen, 3,87 persen, dan 3,37 persen.

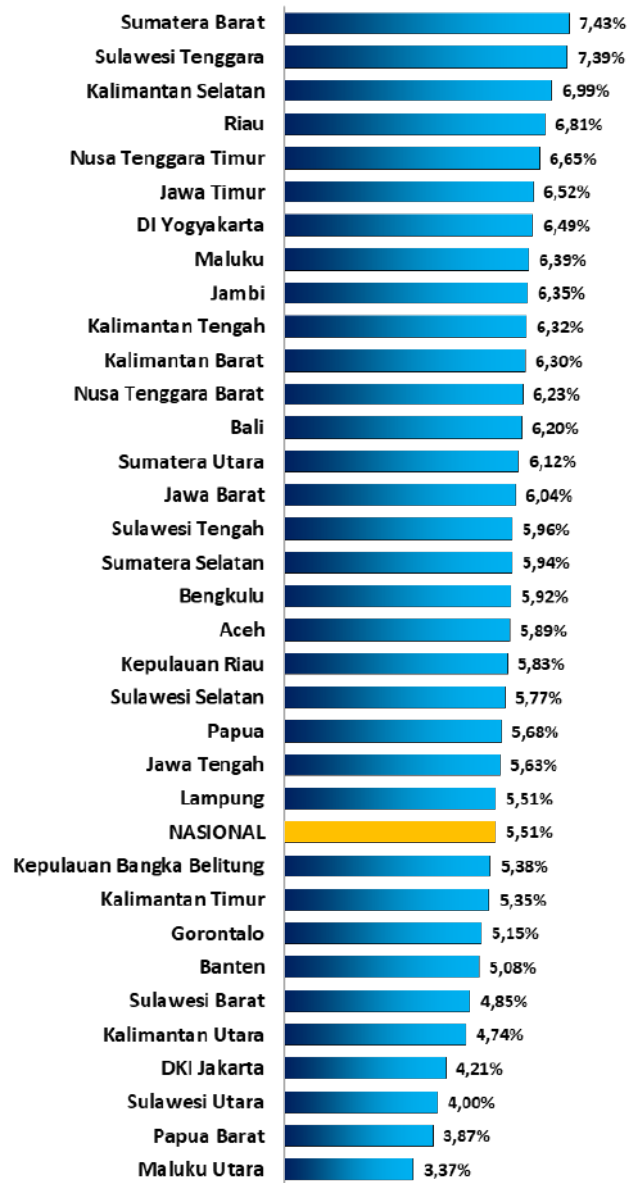
Pada bulan Desember 2022, terdapat 24 provinsi dengan capaian inflasi tahunan yang melebihi angka nasional, dengan tiga angka inflasi tertinggi berada di Sumatera Barat sebesar 7,43 persen (c-to-c), Sulawesi Tenggara 7,39 persen (c-to-c), dan Kalimantan Selatan 6,99 persen (c-to-c). Sesuai pola musimannya, inflasi pada bulan Desember 2022 cenderung meningkat, termasuk juga Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Meski demikian, inflasi tahunan Kalimantan Selatan termoderasi dibandingkan bulan sebelumnya yang disebabkan oleh deflasi pada komoditas minyak goreng, cabai rawit, pepaya, cabai merah, laptop, ikan saluang, ikan asin telang, ikan sepat siam, terong, dan mentimun. Tiga komoditas penyumbang inflasi bulanan terbesar di Sumatera Barat adalah angkutan udara, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Tiga komoditas penyumbang inflasi bulanan terbesar di Sulawesi Tenggara adalah angkutan udara, beras, dan ikan cakalang, sedangkan di Kalimantan Selatan adalah beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Bahan Bakar Minyak sudah tidak lagi menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Desember 2022 sebagai dampak kebijakan pengendalian inflasi, meski secara tahunan bensin masih menjadi salah satu penyumbang andil inflasi tertinggi.

GAMBAR 14. PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL (C-TO-C) TAHUN 2018-2022



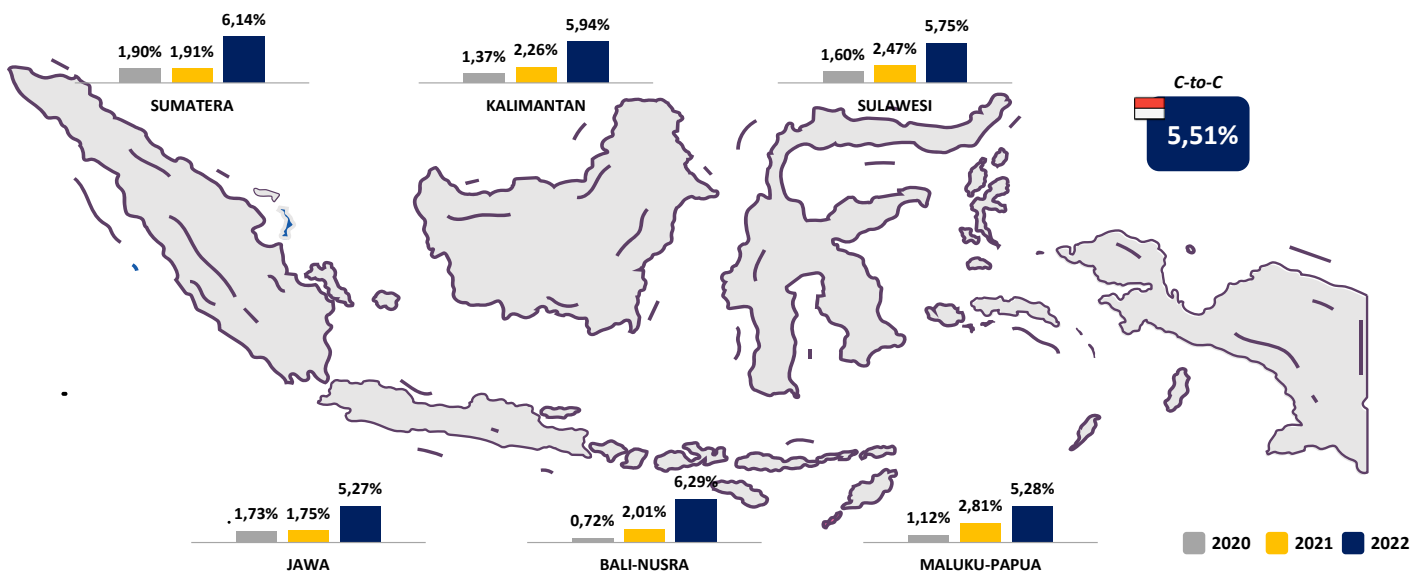
Sumber: BPS

GAMBAR 15. TINGKAT INFLASI GABUNGAN PROVINSI (C-TO-C) TAHUN 2022

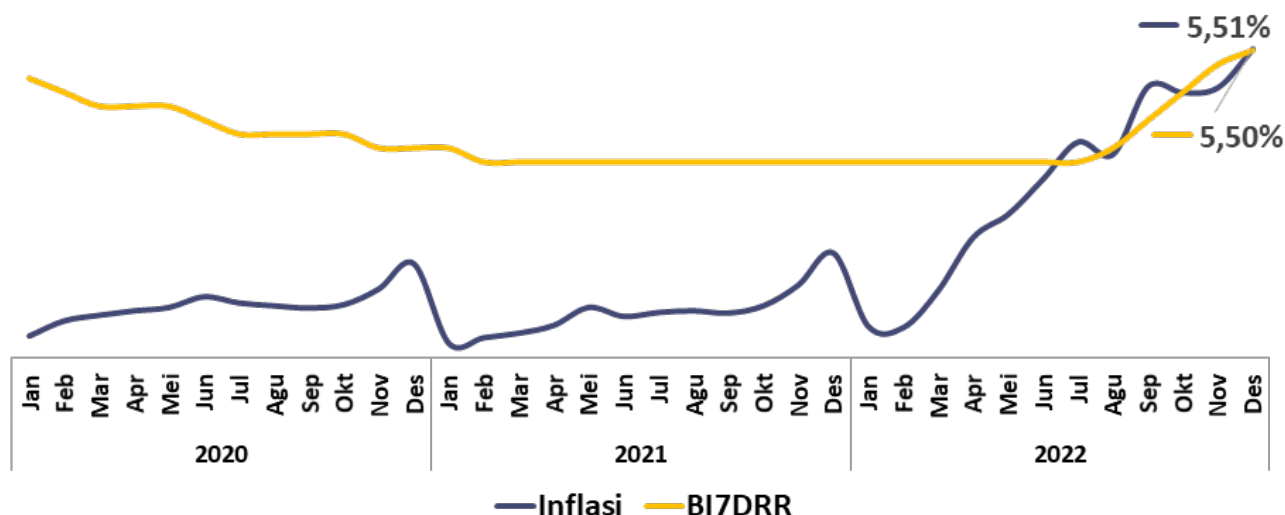


Sumber: BPS

GAMBAR 16. TINGKAT INFLASI GABUNGAN REGIONAL



Sumber: Bank Indonesia

GAMBAR 17. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA BI 7 DAY-REVERSE REPO RATE (BI7DRR)


Sumber: Bank Indonesia

1.III. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA

Suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 5,50 persen. Pada bulan Juli Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Hingga pada Desember 2022 Bank Indonesia menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,50 persen. Hal ini sebagai langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) di samping untuk memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Tekanan inflasi yang masih tinggi mendorong Indonesia untuk meningkatkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,50 persen pada 22 Desember 2022 sebagai langkah lanjutan untuk secara front-loaded, pre-emptive, dan forward-looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi, sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Keputusan tersebut memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,

di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

1.IV. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR

Nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2022 fluktuatif, terkadang menguat dan melemah. Pada awal tahun 2022 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada di 14 381 dan menguat pada Februari dan Maret masing-masing Rp 14.371 dan Rp 14.349. Per April, rupiah sempat menyentuh Rp 14.356. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah masih stabil selama April 2022 ditopang berlanjutnya valas domestik, aliran masuk modal asing, dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Memasuki Mei, nilai tukar rupiah mulai melemah dan sempat berada di Rp 14.544. Pada Juni, nilai tukar rupiah bahkan sampai anjlok ke Rp 14.860. Per 22 Juni 2022, rupiah terdepresiasi 1,93 persen dibandingkan akhir Mei 2022. Memasuki Juli, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian melemah mencapai Rp 14.958 atau hampir Rp 15.000. Penguatan nilai tukar dolar AS ini dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya ancaman resesi hingga kenaikan suku bunga acuan AS. Hingga pada akhir tahun 2022 nilai tukar rupiah mencapai Rp 15.731.

Sepanjang 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melemah 9,31 persen. Pelemahan ini didorong oleh menurunnya pasokan dollar AS di dalam negeri karena adanya arus modal keluar yang dipicu kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed. Dengan kenaikan suku bunga The Fed, investor menilai, menyimpan uangnya di AS lebih menjanjikan imbal hasil lebih besar dan berisiko lebih rendah ketimbang di negara berkembang, termasuk Indonesia. Begitu juga dengan mata uang asing lainnya nilai rupiah

TABEL 1. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AS TAHUN 2022

Bulan	USD	JPY	GBP	CHF
Desember	15,731.00	11,757.00	18,926.00	16,968.00
November	15,737.00	11,392.48	18,953.66	16,607.24
Oktober	15,542.00	10,564.52	17,900.50	15,626.40
September	15,247.00	10,535.88	16,436.28	15,487.06
Agustus	14,875.00	10,744.34	17,455.84	15,330.33
Juli	14,958.00	11,033.82	18,222.59	15,593.44
Juni	14,848.00	10,903.63	18,074.48	15,546.04
Mei	14,544.00	11,424.54	18,372.00	15,201.47
April	14,418.00	11,268.03	18,086.66	14,931.66
Maret	14,349.00	11,793.88	18,853.90	15,502.40
Februari	14,371.00	12,533.04	19,340.52	15,620.68
Januari	14,381.00	12,447.32	19,233.17	15,446.86

Sumber : Kementerian Perdagangan

tercatat fluktuatif. Pada awal tahun 2022 nilai tukar rupiah terhadap yen di angka Rp 12,447.32 hingga pada akhir tahun mencapai Rp 11,757.00 bahkan pernah menguat pada bulan September mencapai angka Rp 10,535.88. Selanjutnya nilai tukar terhadap mata uang Pound sterling pada Januari 2022 di angka Rp 12,447.30 dan pada bulan Desember 2022 Rp 18,926.00. Selanjutnya, pada mata uang Swiss France pada Januari 2022 di angka Rp 15,446.86 dan pada Desember 2022 di angka Rp 16,968.00.

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Highlights 2022:

- Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi sebesar 72,91
- Rasio Gini turun menjadi sebesar 0,381
- Jumlah Penduduk Miskin turun menjadi sebesar 26,36 juta orang
- Persentase Penduduk Miskin turun menjadi sebesar 9,57 persen
- Jumlah Pengangguran turun menjadi sebesar 8,42 juta jiwa
- Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi sebesar 5,86 persen
- Nilai Tukar Petani naik menjadi sebesar 107,33
- Nilai Tukar Nelayan naik menjadi sebesar 106,45

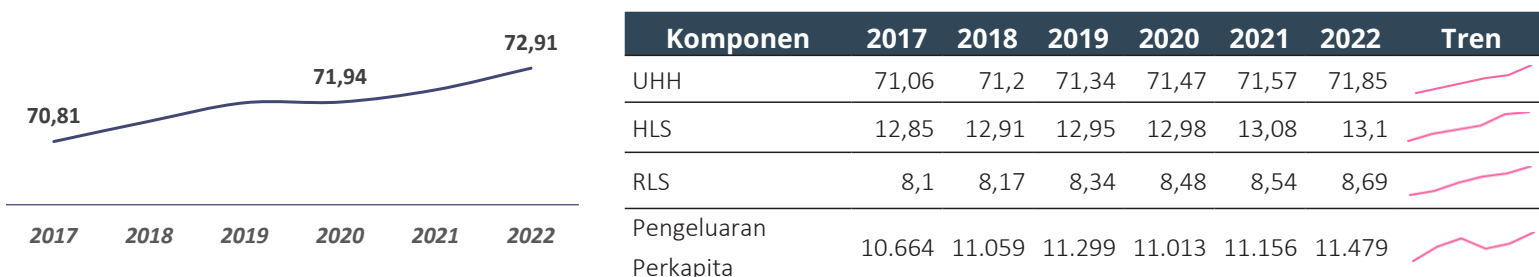
2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2.I.A. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan di tengah penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih berlangsung. IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen atau sebesar 0,62 poin dari tahun 2021 sebesar 72,29 menjadi 72,91 di tahun 2022. Pertumbuhan pada tahun 2022 ini hampir menyamai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2010-2019 atau periode sebelum pandemi covid-19. Selama 2010-2022, IPM Indonesia mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,77 persen. Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Umur Harapan

GAMBAR 18. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2017-2022



Sumber: BPS



GAMBAR 19. PETA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2022



Sumber: BPS

Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 2,04 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH Indonesia adalah 69,81 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun selama pandemi Covid-19 sempat mengalami perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2022, HLS Indonesia rata-rata meningkat 1,25 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,28 persen per tahun. Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai Rp11,48 juta per tahun. Capaian ini meningkat 2,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut. Pengeluaran riil per kapita pada tahun 2021 dan 2022 terus meningkat setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

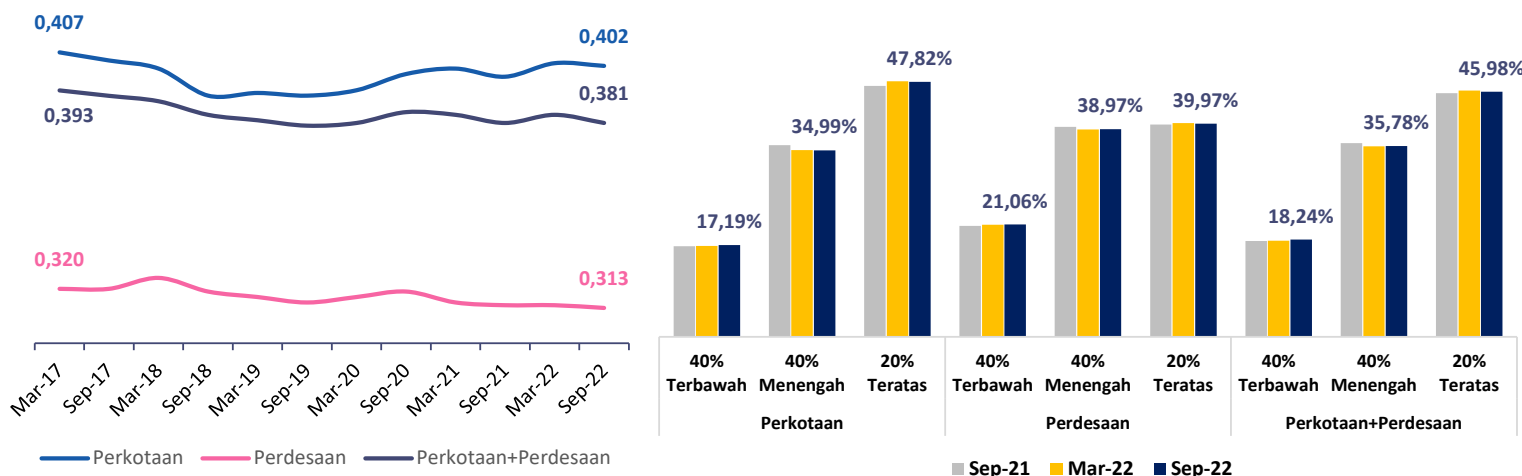
Secara spasial, peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi. Terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Papua (61,39), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,65). Peringkat Kalimantan Tengah bertukar dengan Kalimantan Utara. Peringkat Kalimantan Tengah turun dari urutan ke-21 menjadi urutan ke-22, sementara Kalimantan Utara meningkat dari

urutan ke-22 menjadi urutan ke-21. Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

2.I.B. PERKEMBANGAN TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI)

Secara nasional, sejak September 2016, angka Gini Ratio terus mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga September 2021, angka Gini Ratio meningkat lagi menjadi 0,384 pada Maret 2022. Namun, pada September 2022, angka Gini Ratio berhasil menurun kembali menjadi 0,381. Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,402. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar

GAMBAR 20. PERKEMBANGAN GINI RATIO DAN DISTRIBUSI PENGELUARAN



Sumber: BPS

0,001 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,403 dan kenaikan 0,004 poin dibanding kondisi September 2021 yang sebesar 0,398. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,313; terjadi penurunan sebesar 0,001 poin dari kondisi Maret 2022 dan September 2021 yang sebesar 0,314.

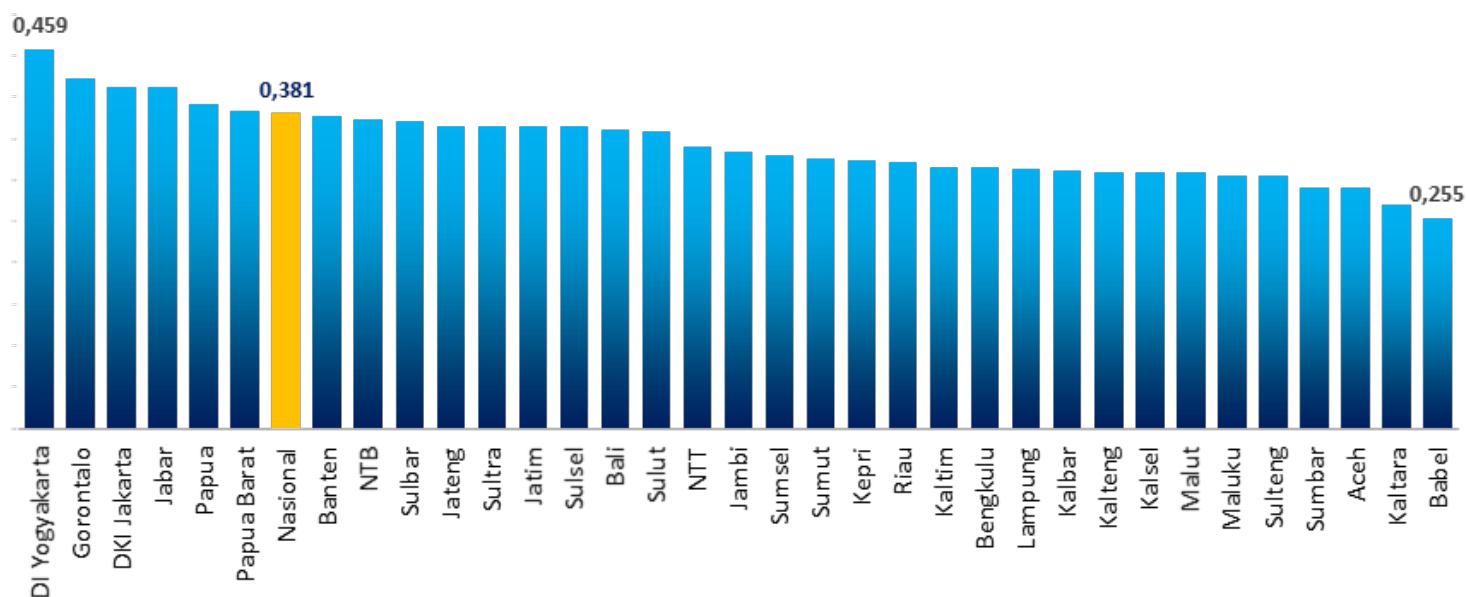
Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,24 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar 18,06 persen, dan September 2021 yang sebesar 17,97 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah, pada September 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,19 persen. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar

21,06 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di daerah perkotaan dan daerah perdesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Pada September 2022, provinsi dengan Gini Ratio tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,459. Sementara itu, provinsi dengan Gini Ratio terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,255 (Gambar Tingkat Ketimpangan Provinsi Tahun 2022). Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,381; terdapat enam provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,459), Gorontalo (0,423), DKI Jakarta (0,412), Jawa Barat (0,412), Papua (0,393), dan Papua Barat (0,384).

APBN merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi

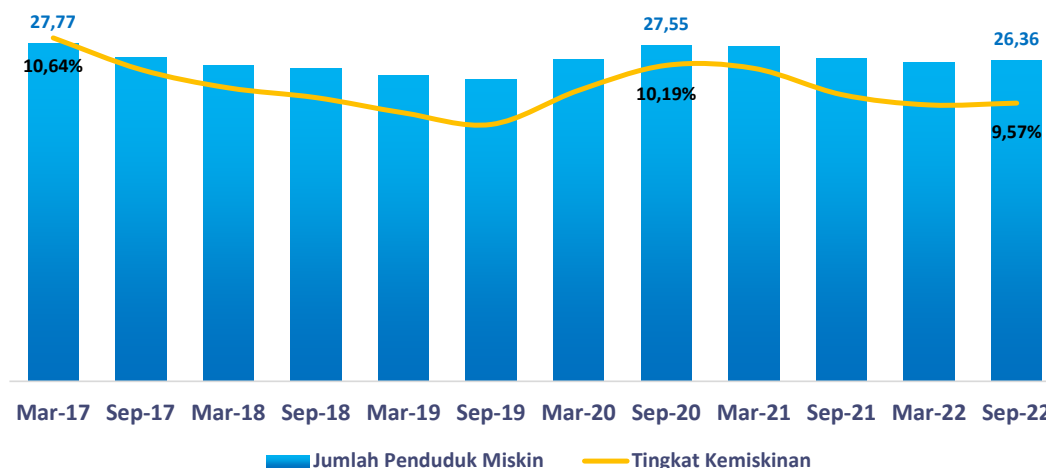
GAMBAR 21. TINGKAT KETIMPANGAN PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: BPS



GAMBAR 22. JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2017-2022



Sumber: BPS

ketimpangan diantaranya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. APBN dirancang untuk mendukung pembangunan tersebut agar tercipta lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, serta agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.I.C. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan di masa pemulihan pandemi covid-19. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 adalah sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

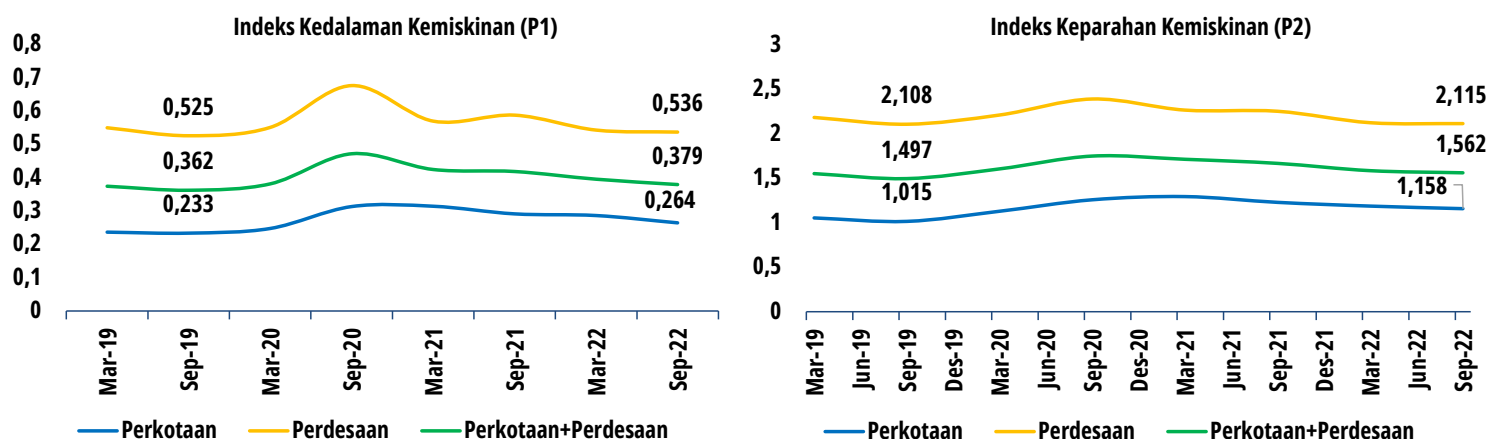
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 0,04 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Sementara

itu, di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.

Tingkat kemiskinan yang naik pada bulan September 2022 terhadap Maret 2022 dikarenakan pertumbuhan ekonomi melambat pada triwulan III tahun 2022. Salah satunya penyesuaian bahan bakar minyak yang menyebabkan inflasi sehingga harga komoditas pangan meningkat. Namun, dengan bantalan untuk melindungi daya beli, pemerintah memberikan bantuan sosial dan subsidi guna mengurangi kenaikan beban pengeluaran masyarakat. Terhitung pada bulan September 2022 bantuan langsung tunai sebesar Rp150.000 selama 4 bulan untuk 20,65 juta KPM. Bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk 16 juta pekerja gaji dibawah 3,5 juta rupiah diberikan satu kali, dan dukungan Pemda melalui 2 persen DTU untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi, nelayan, dan UMKM.

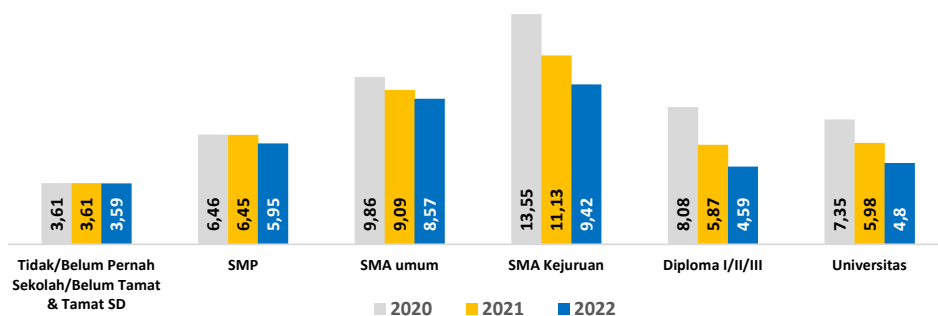
Selanjutnya, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada September 2022 menunjukkan perbaikan dibandingkan pandemi covid-19. Pada periode Maret 2022–September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparah

GAMBAR 23. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) DI INDONESIA MENURUT DAERAH TAHUN 2019-2022



Sumber: BPS

GAMBAR 26. TPT BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN PERIODE TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS

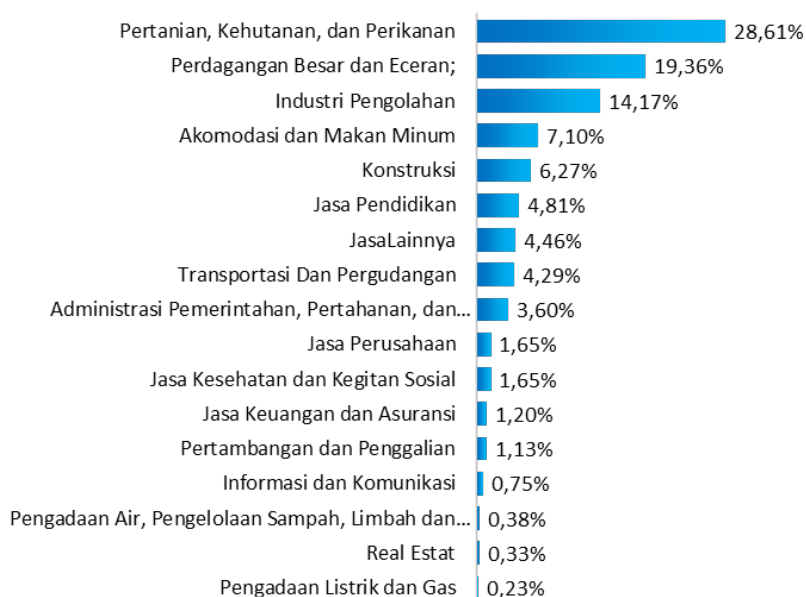
pada Agustus 2022 masih lebih besar dari sebelum pandemic, yaitu pada Agustus 2019 sebesar 7,10 juta jiwa dan pada Agustus 2022 sebesar 8,42 juta jiwa. Selanjutnya, TPT mengalami penurunan sebesar 0,68 persen poin, yaitu dari 6,49 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022. Penurunan tersebut juga belum berada pada level sebelum pandemi, yaitu pada Agustus 2020 sebesar 5,23 persen dan pada Agustus 2022 sebesar 5,86 persen. Penurunan jumlah pengangguran dan TPT tersebut belum berada pada level sebelum pandemi seiring terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat inflasi pada triwulan III 2022.

Penurunan TPT di daerah pedesaan lebih besar dari penurunan TPT di daerah perkotaan, sedangkan penurunan TPT laki-laki lebih besar dari penurunan TPT perempuan. Pada Agustus 2022, TPT di daerah perkotaan sebesar 7,74 persen dan di daerah pedesaan 3,43 persen. TPT di perkotaan turun 0,58 persen poin dari 8,32 persen pada Agustus 2021 menjadi 7,74 persen pada Agustus 2022 dan TPT di pedesaan turun 0,74 persen poin dari 4,17 persen pada Agustus 2021 menjadi 3,43 persen pada Agustus 2022. Sementara, pada Agustus 2022 TPT

laki-laki sebesar 5,93 persen dan TPT perempuan sebesar 5,75 persen. TPT laki-laki turun 0,81 persen poin dari 6,74 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,93 persen pada Agustus 2022 dan TPT perempuan turun 0,36 persen poin dari 6,11 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,75 persen pada Agustus 2022.

Jumlah pengangguran berdasarkan jenjang Pendidikan yang ditamatkan mengalami penurunan pada Agustus 2022. Jumlah pengangguran berdasarkan jenjang Pendidikan yang ditamatkan, paling tinggi berasal dari jenjang pendidikan menengah kejuruan dan terendah pada SD ke Bawah. Pada Agustus 2022, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,42 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 3,59 persen. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan TPT terjadi pada semua kategori pendidikan dengan penurunan terbesar pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 1,71 persen poin dan penurunan terendah pada kategori SD ke Bawah sebesar 0,02 persen poin. Hampir semua kategori mengalami perbaikan kontribusi terhadap

GAMBAR 27. PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN TAHUN 2022



Sumber: BPS

TABEL 2. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022

Wilayah	2020	2021	2022	TREN
Regional Sumatera	6,14%	5,63%	5,37%	
Aceh	6,59%	6,30%	6,17%	
Sumatera Utara	6,91%	6,33%	6,16%	
Sumatera Barat	6,88%	6,52%	6,28%	
Riau	6,32%	4,42%	4,37%	
Jambi	5,13%	5,09%	4,59%	
Sumatera Selatan	5,51%	4,98%	4,63%	
Bengkulu	4,07%	3,65%	3,59%	
Lampung	4,67%	4,69%	4,52%	
Kepulauan Bangka Belitung	5,25%	5,03%	4,77%	
Kepulauan Riau	10,34%	9,91%	8,23%	
Regional Jawa	8,09%	7,45%	6,66%	
DKI Jakarta	10,95%	8,50%	7,18%	
Jawa Barat	10,46%	9,82%	8,31%	
Jawa Tengah	6,48%	5,95%	5,57%	
DI Yogyakarta	4,57%	4,56%	4,06%	
Jawa Timur	3,84%	5,74%	5,49%	
Banten	10,64%	8,98%	8,09%	
Regional Bali-Nusa Tenggara	5,65%	5,71%	3,73%	
Bali	5,63%	5,37%	4,80%	
Nusa Tenggara Barat	4,22%	3,01%	2,89%	
Nusa Tenggara Timur	4,28%	3,77%	3,54%	
Regional Kalimantan	4,92%	4,46%	4,97%	
Kalimantan Barat	5,81%	5,82%	5,11%	
Kalimantan Tengah	4,58%	4,53%	4,26%	
Kalimantan Selatan	4,74%	4,95%	4,74%	
Kalimantan Timur	6,87%	6,83%	5,71%	
Kalimantan Utara	4,97%	4,58%	4,33%	
Regional Sulawesi	5,45%	4,97%	4,09%	
Sulawesi Utara	7,37%	7,06%	6,61%	
Sulawesi Tengah	3,77%	3,75%	3,00%	
Sulawesi Selatan	6,31%	5,72%	4,51%	
Sulawesi Tenggara	4,58%	3,92%	3,36%	
Gorontalo	4,28%	3,01%	2,58%	
Sulawesi Barat	3,32%	3,13%	2,34%	
Regional Maluku-Papua	5,50%	4,66%	4,22%	
Maluku	7,57%	6,93%	6,88%	
Maluku Utara	5,15%	4,71%	3,98%	
Papua Barat	6,80%	5,84%	5,37%	
Papua	4,28%	3,33%	2,83%	

Sumber : BPS



jumlah pengangguran. Kelompok tersebut mengalami tren peningkatan sebelum masa pandemi, kemudian peningkatan tersebut makin besar pada mulai masa pandemi tahun 2020, mulai turun pada Agustus 2021 dan turun lagi pada Agustus 2022.

Pada Agustus 2022 penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan mengalami peningkatan dari 131,05 juta tenaga kerja pada Agustus 2021 menjadi 135,30 juta tenaga kerja Agustus 2022. Terdapat tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 28,61 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,36 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 14,17 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2021. Dibandingkan Agustus 2021, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,57 juta tenaga kerja); Industri Pengolahan (0,47 juta tenaga kerja); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,45 juta tenaga kerja). Sementara itu, lapangan pekerjaan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami penurunan sebesar 0,05 juta tenaga kerja. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja sebesar 1,57 juta tenaga kerja pada Agustus 2022. Kondisi tersebut kemungkinan menggambarkan bahwa sektor tersebut menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang kehilangan pekerjaan pada sektor lainnya.

Secara spasial, sebagian besar provinsi mengalami penurunan TPT pada Agustus 2022. Provinsi Jawa menjadi daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia pada Agustus 2022 mencapai sebesar 8,31 persen diikuti dengan Barat Kepulauan Riau sebesar 8,23 persen, Banten 8,09 persen, dan DKI Jakarta sebesar 7,18 persen. Sementara itu, provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, dan Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terendah pada Agustus 2022, yaitu berturut-turut sebesar 2,34 persen, 2,58 persen, 2,83 persen, dan 2,89 persen. Penurunan TPT tertinggi terjadi di provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah dengan poin berturut-turut sebesar -1,68 persen poin, -1,51 persen poin, -1,32 persen poin, dan -1,21 persen poin. Terdapat 9 provinsi yang TPTnya di atas TPT nasional yang sebesar 5,86 persen, yaitu Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), Maluku (6,88 persen), Sulawesi Utara (6,28 persen), Sulawesi Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), dan Sumatera Utara (6,16 persen),

APBN 2022 terus bekerja keras untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sehingga mampu

untuk membuka lapangan kerja baru dalam rangka menyerap penambahan angkatan kerja baru serta mampu untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi. APBN melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mendukung penguatan sektor ketenagakerjaan melalui berbagai program, diantaranya yaitu program prioritas padat karya dan kartu prakerja. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga terus melakukan kebijakan struktural untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan struktural tersebut, diantaranya yaitu di bidang investasi, perdagangan, dan produktivitas tenaga kerja.

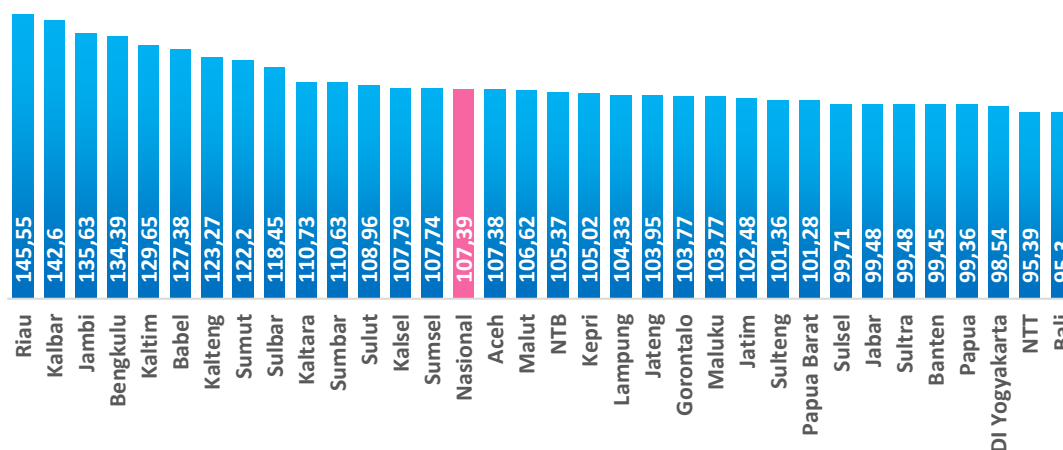
2.I.E. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tahun 2022 meningkat cukup tinggi dan sepanjang tahun selalu memiliki angka di atas 100 atau petani selalu mengalami surplus. NTP nasional tahun 2022 tercatat sebesar 107,33 lebih besar dari capaian di tahun 2021 sebesar 104,64 dan capaian tahun 2020 sebesar 101,90. Pada sepanjang tahun 2022 atau setiap bulannya capaian NTP selalu memiliki angka di atas 100. NTP yang di atas 100 menggambarkan bahwa petani mengalami surplus, yaitu pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, jika NTP di bawah 100 maka petani mengalami defisit, yaitu pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum para petani dapat menikmati surplus pendapatan atas kegiatan produksi yang dilakukan sepanjang tahun 2022. Capaian NTP tersebut sekaligus memberikan sinyal positif bahwa kesejahteraan para petani mulai meningkat.

Kenaikan NTP nasional tahun 2022 ditopang oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 120,67 lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 112,43. Penghitungan NTP dilakukan dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks harga jual atas hasil produksi petani. Sementara itu, indeks harga yang dibayarkan petani adalah indeks harga barang kebutuhan petani, baik untuk keperluan rumah tangga maupun proses produksi.

NTP tahun 2022 dipengaruhi oleh komponen pengeluaran Pupuk, Pestsida, Obat, dan Pakan yang meningkat paling tinggi. Komponen Upah Buruh merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (112,14) pada kelompok pengeluaran Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM), sedangkan komponen Sewa dan Pengeluaran Lainnya merupakan pengeluaran dengan indeks terendah

GAMBAR 28. NILAI TUKAR PETANI TAHUN PER PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: BPS

(108,00). Sementara itu, komponen Pakaian dan Alas Kaki merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (114,75) pada kelompok Indeks Konsumsi Rumah tangga, , sedangkan komponen Pendidikan merupakan pengeluaran dengan indeks terendah (104,18).

Provinsi Riau masih menjadi daerah dengan NTP tertinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 145,55. Provinsi Riau menjadi provinsi dengan NTP tertinggi selama tahun 2019 sampai 2022 dengan peningkatan yang cukup tinggi sebesar 145,55 dibandingkan peningkatan di tahun 2021 sebesar 138,72. Sementara itu, Bali menjadi daerah dengan NTP terendah di tahun 2022 dengan capaian di bawah angka 100, yaitu sebesar 95,3. Terdapat 8 (delapan) provinsi yang memiliki angka NTP di bawah 100, yaitu, Bali (95,03), Nusa Tenggara Timur (95,39), DI Yogyakarta (98,54), Papua (99,36), Banten (99,45), Jawa Barat (99,48), Sulawesi Tenggara (99,48), dan Sulawesi Selatan (91,71).

Capaian NTP di setiap wilayah pada tahun 2022 cukup bervariasi dengan sebagian besar daerah mengalami peningkatan. Regional Jawa, Sumatera, dan Kalimantan mencatatkan NTP dengan angka di atas 100 untuk semua provinsi di setiap regionalnya. Sementara itu, regional Bali & Nusa, Maluku & Papua, dan Sulawesi terdapat beberapa daerah yang mencatatkan NTP dengan angka di bawah 100. Selain itu, disparitas capaian NTP di regional Sumatera merupakan yang tertinggi pada tahun 2022, yaitu

NTP Riau sebesar 152,94 dan NTP Jambi 140,63.

NTP regional Sumatera secara rata-rata memiliki angka tertinggi pada tahun 2022, sedangkan NTP regional Bali & Nusa secara rata-rata memiliki angka terendah. NTP dengan angka tertinggi masih dicapai oleh provinsi Riau sebesar 145,55 di regional Sumatera, sedangkan NTP dengan angka terendah pada daerah Lampung sebesar 104,33. Provinsi DKI Jakarta sebesar 105,89 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Jawa, sedangkan NTP Provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,54 merupakan yang terendah. NTP Kalimantan Barat sebesar 142,60 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Kalimantan, sedangkan NTP Provinsi Kalimantan Selatan 107,79 merupakan yang terendah. NTP Provinsi Sulawesi Barat sebesar 118,45 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Sulawesi, sedangkan NTP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 99,71 merupakan NTP dengan angka yang terendah. NTP Nusa Tenggara Barat sebesar 105,37 merupakan NTP dengan angka yang tertinggi di regional Bali & Nusa, sedangkan NTP Bali sebesar 95,30 merupakan yang terendah. NTP Maluku Utara 106,62 merupakan angka tertinggi di regional Maluku & Papua, sedangkan NTP Papua 99,36 merupakan yang terendah.

2.I.F. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional tahun 2021

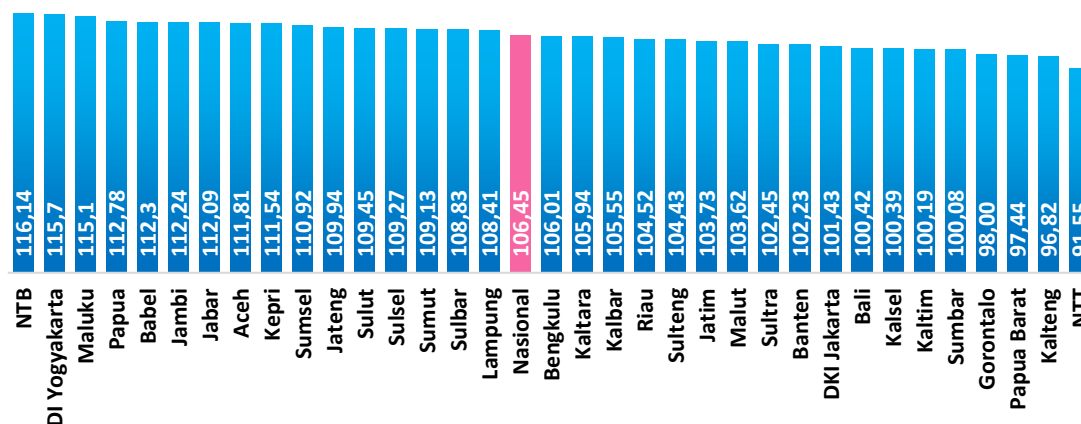
TABEL 3. NTP TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2022

Regional	Tertinggi	Terendah
Regional Sumatera	Riau (145,55)	Lampung (104,33)
Regional Jawa	DKI Jakarta (105,89)	DI Yogyakarta (98,54)
Regional Kalimantan	Kalimantan Barat (142,60)	Kalimantan Selatan (107,79)
Regional Sulawesi	Sulawesi Barat (118,45)	Sulawesi Selatan (99,71)
Regional Bali-Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat (105,37)	Bali (95,30)
Regional Maluku-Papua	Maluku Utara (106,62)	Papua (99,36)

Sumber : BPS



GAMBAR 29. NILAI TUKAR NELAYAN PER PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: BPS

meningkat cukup tinggi dan sepanjang tahun selalu memiliki angka di atas 100 atau nelayan mengalami surplus. NTN nasional tahun 2022 tercatat sebesar 106,45 naik dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 104,64, dan naik dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 101,65. Pada sepanjang tahun 2022 atau setiap bulannya capaian NTN selalu memiliki angka di atas 100. NTN yang di atas 100 menggambarkan bahwa nelayan mengalami surplus, yaitu pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, jika NTN di bawah 100 maka nelayan mengalami defisit, yaitu pendapatan nelayan turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum para nelayan dapat menikmati surplus pendapatan atas kegiatan produksi yang dilakukan sepanjang tahun 2022. Capaian NTN tersebut sekaligus memberikan sinyal positif bahwa kesejahteraan para nelayan mulai meningkat.

Kenaikan NTN nasional tahun 2022 ditopang oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 117,71 lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sebesar 110,58. Penghitungan NTN dilakukan dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan (Ib). Indeks harga yang diterima nelayan merupakan indeks harga jual atas hasil produksi nelayan. Sementara itu, indeks harga yang dibayarkan nelayan adalah indeks harga barang kebutuhan

nelayan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun proses produksi.

NTN tahun 2022 dipengaruhi oleh komponen penerimaan Penangkapan Laut dan komponen pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki yang meningkat paling tinggi. Komponen penerimaan Penangkapan Laut memiliki indeks tertinggi pada kelompok penerimaan, yaitu sebesar 117,91. Komponen Transportasi dan Komunikasi merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (110,85) pada kelompok Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM), sedangkan komponen Upah Buruh merupakan pengeluaran dengan indeks terendah (106,30). Sementara itu, Pakaian dan Alas Kaki merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (112,74), sedangkan Pendidikan merupakan komponen dengan indeks terendah (102,95).

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan NTN tertinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 116,14. Peningkatan NTN di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 4,03 persen poin dari sebesar 112,11 pada tahun 2021. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi dengan NTN terendah di tahun 2022 dengan capaian dibawah angka 100, yaitu sebesar 91,55. Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) provinsi yang memiliki angka NTN di bawah 100, berturut-turut dari yang terendah, yaitu Nusa Tenggara Timur (91,55), Kalimantan Tengah (96,82), Papua Barat (97,44), dan Gorontalo (98,00).

TABEL 4. NTN TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2022

Regional	Tertinggi	Terendah
Regional Sumatera	Jambi (112,24)	Sumatera Barat (100,08)
Regional Jawa	Jawa Barat (112,09)	DKI Jakarta (101,43)
Regional Kalimantan	Kalimantan Utara (105,94)	Kalimantan Tengah (96,82)
Regional Sulawesi	Sulawesi Utara (109,45)	Gorontalo (98,00)
Regional Bali-Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat 116,14)	Nusa Tenggara Timur (91,55)
Regional Maluku-Papua	Maluku (115,10)	Papua Barat (97,44)

Sumber : BPS

Capaian NTN di setiap regional pada tahun 2022 cukup bervariasi dengan sebagian daerah mengalami peningkatan dan sebagian lainnya mengalami penurunan. Regional Sumatera adalah satu-satunya wilayah yang mencatatkan angka NTN di atas 100 untuk semua provinsinya. NTN tahun 2021 secara rata-rata di regional Sumatera, Sulawesi, Jawa, Maluku & Papua, dan Bali & Nusa Tenggara mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian NTN periode tahun 2021. Sementara itu, regional Kalimantan mengalami capaian NTN yang menurun. Selain itu, disparitas capaian NTN di regional Bali & Nusa Tenggara merupakan yang tertinggi pada tahun 2021, yaitu NTN Nusa Tenggara Barat sebesar 116,14.

NTN regional Sumatera secara rata-rata memiliki angka tertinggi pada tahun 2021, sedangkan NTN regional Kalimantan secara rata-rata memiliki angka terendah. NTN Provinsi Jambi sebesar 112,24 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Sumatera, sedangkan NTN Provinsi Sumatera Barat sebesar 100,08 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Jawa Barat sebesar 112,09 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Jawa, sedangkan NTN Provinsi DKI Jakarta sebesar 101,43 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Kalimantan Utara sebesar 105,94 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Kalimantan, sedangkan NTN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 96,82 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Sulawesi Utara sebesar 109,45 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Sulawesi, sedangkan NTN Provinsi Gorontalo sebesar 98,00 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 116,14 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Bali & Nusa Tenggara, sedangkan NTN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 91,55 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Maluku sebesar 115,10 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Maluku & Papua, sedangkan NTN Provinsi Papua barat sebesar 97,44 merupakan yang terendah.



BAB II

PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN



1. OVERVIEW NASIONAL 2022

1.1. ANALISIS APBN

1.1.A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, melampaui target, dan telah berada pada level sebelum pandemi. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat tumbuh sebesar 27,03% dari sebesar Rp 2.011,41 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2.555.199,45 triliun pada tahun 2022. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 1.964.987,90 triliun atau tercapai sebesar 130,04%. Selain itu, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2022 telah berada pada level sebelum pandemi (tahun 2019) setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2022 tercatat lebih besar dari realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp2.011.347,07 triliun. Kontribusi komponen Penerimaan Perpajakan

terhadap Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 masih lebih besar dibandingkan kontribusi komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meskipun kontribusi komponen PNBP mengalami tren peningkatan terbesar.

Penerimaan Perpajakan pada tahun 2022 tercatat melampaui target dan tumbuh positif setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi dan pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Realisasi Penerimaan Perpajakan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 43,56% setelah pada tahun 2021 sebesar 20,45%. Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2022 tercapai sebesar 119,23% dari target atau tercapai sebesar Rp 2.116.283,74 triliun dari target APBN sebesar Rp1.784,0 triliun. Jika dilihat rinciannya, terdapat dua komponen Penerimaan Perpajakan yang realisasinya melampaui target, yaitu Pajak Dalam Negeri tercapai sebesar 104,58% dari target atau tercapai sebesar Rp1.474,19 triliun dari target sebesar Rp1.409,58 triliun, dan Pajak Perdagangan Internasional tercapai sebesar 210,80% dari target atau tercapai sebesar Rp73,70



triliun dari target sebesar Rp34,96 triliun. Penerimaan perpajakan yang melampaui target tersebut seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia, membaiknya harga komoditas, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan dan melampaui dari target APBN dengan persentase realisasi yang lebih besar dari capaian Penerimaan Perpajakan. Realisasi PNBP tahun 2022 tercapai sebesar 229,19% dari target atau tercapai sebesar Rp 433.879,08 triliun dari target APBN sebesar

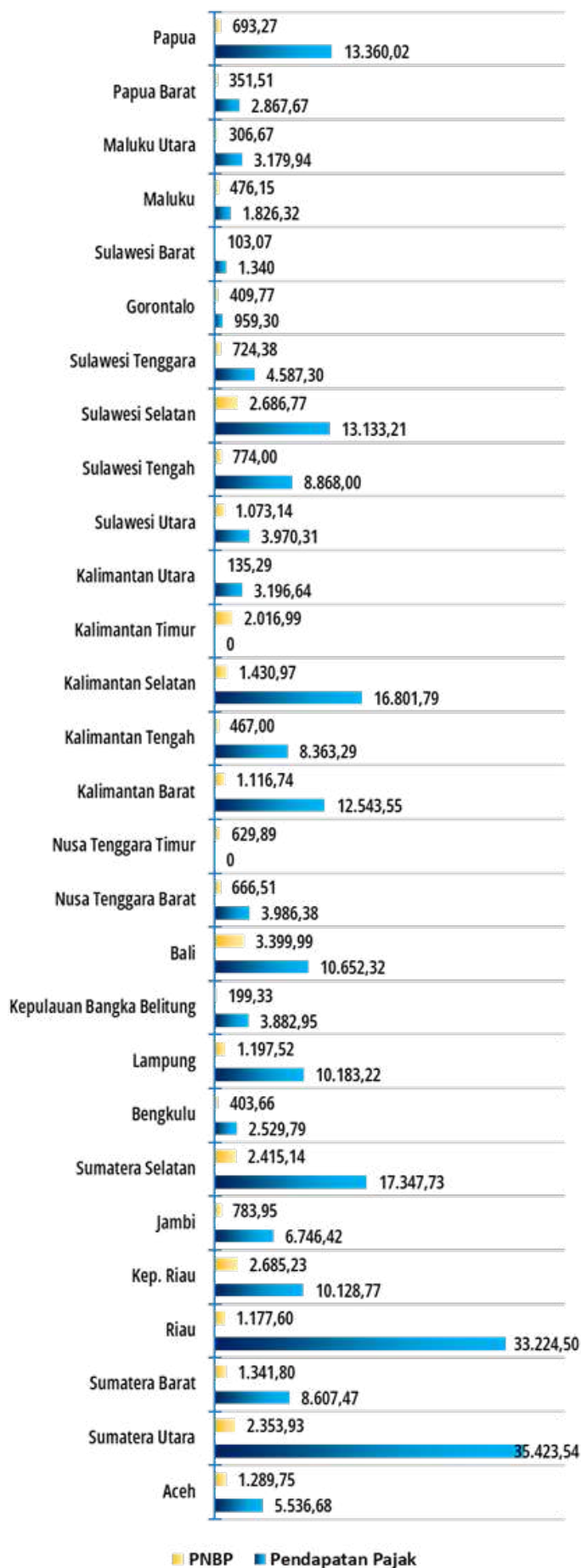
Rp189.308,60 triliun. Jika dilihat rinciannya, realisasi semua komponen PNBP telah melampaui dari target yang ditetapkan. Realisasi PNBP pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 28,35% setelah pada periode tahun 2021 sebesar 33,37%. Capaian PNBP yang melampaui target ditopang oleh kenaikan harga komoditas migas dan non migas serta kenaikan pendapatan BLU dan PNBP kementerian/ lembaga.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2022 sebesar Rp 5.036,63 triliun atau telah melampaui target APBN sebesar Rp 0,69 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi

TABEL 5. SEBARAN PENDAPATAN NEGARA DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2022

Regional	PAJAK (Triliun)	PNBP (Triliun)
Regional Sumatera	133.611,08	13.847,91
Regional Jawa	1.835.320,36	402.569,06
Regional Kalimantan	74.682,18	5.166,99
Regional Sulawesi	32.857,62	5.771,13
Regional Bali-Nusa Tenggara	18.578,55	4.696,39
Regional Maluku-Papua	21.233,95	1.827,60

Sumber : LKPP per 15 Maret 2023

**GAMBAR 30. SEBARAN PENDAPATAN NEGARA TINGKAT DAERAH SELAIN DI REGIONAL JAWA TAHUN 2022**

Sumber: LKPP per 15 Maret 2023

dari realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2021 yang sebesar Rp 5.013,04 triliun atau terjadi kenaikan sebesar 4,70%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang Tahun 2022 sebesar Rp2,76 triliun lebih rendah dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17,00 triliun atau terjadi penurunan sebesar 83,78%.

Regional Jawa mencatatkan realisasi Pendapatan Negara tertinggi dibandingkan regional lainnya seiring dengan kegiatan ekonomi yang lebih banyak terjadi di regional Jawa dan pusat pemerintahan yang berada di regional Jawa, yaitu di DKI Jakarta. Realisasi penerimaan pajak dan PNPB di regional Jawa pada tahun 2022 berturut-turut, yaitu sebesar 86,72% dan 92,78% dari total realisasi seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu, DKI Jakarta merupakan daerah yang mencatatkan realisasi tertinggi di regional Jawa, yaitu penerimaan pajak sebesar Rp 1.260.623,69 triliun atau 60,00%, dan realisasi PNPB sebesar Rp 377.278,71 triliun atau 87,00% dari total realisasi seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan ekonomi tahun 2022 di regional Jawa, yaitu sebesar 57,89% dari total seluruh PDRB di Indonesia. Tingginya tingkat ekonomi di regional Jawa kemungkinan besar sangat memengaruhi tingginya tingkat penerimaan pajaknya. Selain itu, di DKI Jakarta terdapat Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus yang ruang lingkupnya seluruh wilayah Indonesia. Tingginya tingkat realisasi PNPB di regional Jawa tidak terlepas juga dari kantor pusat Kementerian/Lembaga yang berada di DKI Jakarta dengan ruang lingkup pengelolaan penerimaannya di seluruh wilayah Indonesia.

Penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas di tahun 2022, sementara realisasi PNPB tertinggi terjadi di daerah yang mengalami peningkatan pendapatan BLU. Penerimaan Perpajakan tertinggi selain daerah di Regional Jawa terjadi di daerah Sumatera Utara, Riau Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, realisasi terendah tercatat di daerah Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Bengkulu, dan Papua Barat. Tingginya realisasi penerimaan pajak seiring dengan tingginya harga komoditas perkebunan (CPO dan turunannya) dan tingginya harga komoditas pertambangan. Realisasi PNPB tertinggi terjadi di daerah Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi PNPB terendah tercatat di daerah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Gorontalo. Tingginya realisasi PNPB seiring dengan peningkatan pendapatan BLU, penguatan regulasi terhadap objek dan tarif PNPB, dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

1.I.B. BELANJA NEGARA

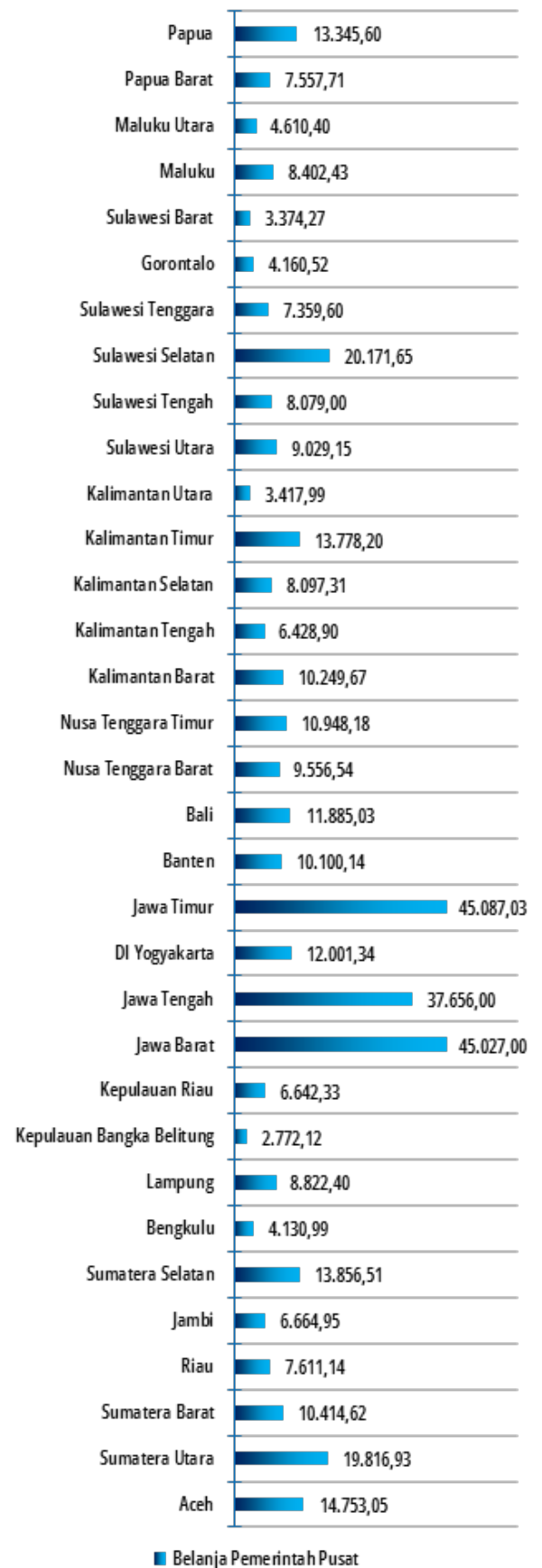
Belanja Negara pada tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan sebesar 10,66% dari sebesar Rp 2.786.411,35 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 3.083.446,80 triliun pada tahun 2022. Peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pemerintah Pusat, yaitu dari sebesar Rp2.000.703,77 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2.269.737,60 triliun pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 13,44%. Realisasi Belanja Negara tercapai sebesar Rp3.083.446,80 triliun atau 99,42% dari pagu anggaran sebesar Rp2.335.706,48 triliun. Optimalisasi belanja utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja barang dan belanja modal untuk percepatan pembayaran beberapa program pemulihan ekonomi nasional dan realisasi proyek infrastruktur dasar atau konektivitas, dan pengadaan peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Negara yang melampaui pagu anggaran merupakan kondisi yang cukup jarang terjadi, selain terjadi pada tahun 2022, kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun 2007. Optimalisasi belanja pada tahun 2021 dilakukan dalam kerangka belanja yang responsif dan fleksibel. Seiring dengan tingginya realisasi belanja pemerintah, kondisi perekonomian pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan. Optimalisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen belanja yang melebihi pagu anggaran, yaitu Belanja Barang (95,01%), Belanja Subsidi (97,03%), dan Belanja Bantuan Sosial (98,92%). Sementara itu, komponen belanja lainnya memiliki realisasi di bawah pagu anggarannya.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 tumbuh positif sebesar 13,44% yang digunakan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain belanja barang dan belanja modal, realisasi belanja subsidi juga mengalami peningkatan sebesar 4,43%, yaitu dari Rp242.087,81 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp252.812,91 triliun pada tahun 2022. Realisasi belanja subsidi tersebut berasal dari realisasi belanja subsidi energi sebesar Rp140,40 triliun dengan tingkat pertumbuhan 28,99% dan realisasi belanja subsidi non energi sebesar Rp101,69 dengan tingkat pertumbuhan 16,36%. Realisasi belanja subsidi energi bersumber dari belanja subsidi BBM dan LPG 3 Kg. Sementara itu, subsidi kredit program merupakan komponen belanja subsidi non energi yang mengalami realisasi terbesar seiring dengan dukungan terhadap UMKM melalui program PEN.

Regional Jawa terutama daerah DKI Jakarta mencatatkan realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat tertinggi dibandingkan daerah lainnya seiring dengan pusat pemerintahan yang berada di DKI Jakarta. Realisasi Belanja Negara dan

GAMBAR 31. SEBARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT SELAIN DI DKI JAKARTA TAHUN 2022



Sumber: LKPP per 15 Maret 2023

Belanja Pemerintah Pusat di regional Jawa berturut-turut, yaitu sebesar 73,66% dan 88,73% dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Sementara itu, realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat di daerah DKI Jakarta berturut-turut, yaitu sebesar 61,13% dan 82,13% dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Belanja yang hanya dilakukan di DKI Jakarta sehubungan dengan keberadaan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, yaitu belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja hibah. Meskipun belanja subsidi dan belanja hibah tercatat di DKI Jakarta, tetapi manfaatnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat juga pembayaran belanja yang dicatatkan di DKI Jakarta tetapi manfaatnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu belanja pegawai untuk pensiunan dan belanja bantuan sosial.

1.I.C. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami peningkatan sebesar 3,31%, yaitu dari Rp787.707,58 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp813.809,20 triliun pada tahun 2022. Peningkatan realisasi TKDD terutama dipengaruhi oleh peningkatan Transfer ke Daerah sebesar 4,47%, yaitu dari Rp713.853,87 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp745.803,05 triliun pada tahun 2022, sedangkan Dana Desa mengalami kontraksi sebesar 5,49%, yaitu dari Rp71.853,71 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp67.906,15 triliun pada tahun 2022. Jika dilihat dari persentase realisasi TKDD terhadap pagu anggaran maka persentase realisasi pada tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021, yaitu persentase realisasi tahun 2021 dan tahun 2020 berturut-turut sebesar 99,82% dan 106,25%.

Realisasi TKDD mengalami pemulihan dan menuju ke level sebelum pandemi terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Transfer ke Daerah, sementara realisasi Dana Desa mengalami kontraksi di masa pemulihan pandemi. Realisasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan sebesar 4,47%, yaitu dari Rp713.853,87 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp745.803,05 triliun pada tahun 2022. Realisasi Transfer ke Daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari periode 2020 dan 2020 yang masing-masing sebesar Rp691,43 dan 713,85. Sementara itu, realisasi Dana Desa pada periode tahun 2022

mengalami penurunan daripada periode tahun 2020 dan 2021, yaitu berturut-turut tumbuh sebesar Rp71,10 triliun dan 71,85 triliun. Sebagian besar komponen TKDD telah berada pada level sebelum pandemi, dan beberapa komponen mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama periode tahun 2016-2022. Dana Perimbangan yang merupakan komponen TKDD dengan porsi terbesar (96,14%) mencatatkan realisasi yang belum berada pada level sebelum pandemi. Selain itu, Dana Otonomi Khusus juga belum berada pada level sebelum pandemi dengan perkembangan selama kurun waktu 2019-2022 mengalami penurunan sebesar 7,14%. Dana Insentif Daerah mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2016-2021 dengan pertumbuhan sebesar 169,29%. Selain Dana Insentif Daerah, selama kurun waktu 2016-2021, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Desa mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 141,12% dan 53,93%.

Sebaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa lebih banyak terjadi di luar regional Jawa dibandingkan sebaran Belanja Pemerintah Pusat yang lebih banyak terjadi di regional Jawa. Meskipun begitu, regional Jawa masih mencatatkan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tertinggi dibandingkan regional lainnya. Sebaran Dana Desa di regional Jawa masih yang tertinggi meskipun DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan alokasi Dana Desa. Regional Bali & Nusra mencatatkan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terendah, tetapi jika dilihat per daerah maka ketiga daerah pada regional Bali & Nusra tidak tercatat sebagai daerah dengan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terendah.

Transfer Ke Daerah tertinggi sebagian besar terjadi di regional Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta terjadi di Papua dan Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi Transfer Ke Daerah terendah terjadi di Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Sama halnya dengan Transfer Ke Daerah, daerah dengan Dana Desa tertinggi sebagian besar berada di regional Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta terjadi di Papua dan Aceh. Sementara itu, DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Desa, dan realisasi Dana Desa terendah terjadi di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Utara.

TABEL 6. SEBARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2022

	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua
TKD	191.500,44	233.602,21	107.090,21	84.121,95	45.247,02	84.241,22
Dana Desa	18.793,17	23.654,00	5.660,14	7.227,80	4.593,82	7.977,22

Sumber : LKPP per 15 Maret 2023

GAMBAR 32. DISTRIBUSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PADA TINGKAT DAERAH TAHUN 2022



Sumber: LKPP per 15 Maret 2023

1.I.D. SURPLUS/DEFISIT APBN

Realisasi defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp464,30 triliun atau mencapai 2,38% dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2021 sebesar Rp775,10 triliun atau mencapai 4,57% dari PDB. Realisasi defisit tahun 2022 lebih rendah dari target sebesar Rp868,00 triliun atau dari target sebesar 4,58% dari PDB seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNPB yang melampaui target. Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2022 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit di bawah 3%, lebih cepat satu tahun dalam pencapaian defisit maksimal 3% dari PDB sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020. Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realisasi Defisit APBN dan defisit Keseimbangan Primer tahun 2022 menunjukkan arah perbaikan. Realisasi defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer di tahun 2020 merupakan yang tertinggi dikarenakan mulai terjadinya pandemi Covid-19 di tahun tersebut, lalu berjalan pulih di tahun 2021. Sementara itu, realisasi defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer sebelum masa pandemi Covid-19 menunjukkan tren perbaikan dengan keseimbangan primer menuju ke arah positif dan mengalami defisit terkecil pada tahun 2018. Defisit anggaran tahun 2022 berhasil di bawah 3% menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal yang sehat, diantaranya dilakukan melalui optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNPB serta melakukan spending better atau belanja yang berkualitas melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dalam rangka menghadapi ketidakpastian global.

Defisit anggaran tahun 2021 dibiayai terutama melalui pembiayaan utang dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal. Realisasi Pembiayaan (Neto) Tahun 2021 sebesar Rp871,72 triliun atau 86,62% dari target sebesar Rp1.006,38 triliun. Pembiayaan utang tahun 2021 berada di bawah target APBN, yaitu tercapai sebesar Rp870,54 triliun dari target sebesar Rp1.177,35 triliun atau terjadi penurunan sebesar 29,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi Pembiayaan dikarenakan penurunan defisit APBN, pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program, dan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB III. Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terutama digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19, seperti pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung penguatan reformasi.



1.II. ANALISIS APBD

1.II.A. GAMBARAN UMUM APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah dalam upaya memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa, dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanganan yang dimaksud meliputi dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan realokasi program dan kegiatan yang bukan prioritas kepada belanja yang lebih bersifat urgent dalam rangka mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.

Secara nasional, setelah mengalami penurunan di Tahun 2021, target pendapatan APBD 2022 mengalami kenaikan sebesar 63.615 M (5,78%). Selaras dengan kenaikan target pendapatan, realisasi

pendapatan mengalami peningkatan sebesar 1,60% (yoy). Sementara itu, dari sisi belanja, alokasi pagu mengalami kenaikan sebesar 29.368 M (2,40%), tetapi realisasi belanja mengalami kontraksi sebesar 1,78% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk alokasi dana untuk menutupi surplus/defisit APBD mengalami kenaikan sebesar 1.400 M (1,97%), nilai realisasi turut mengalami pertumbuhan sebesar 54,71% (yoy).

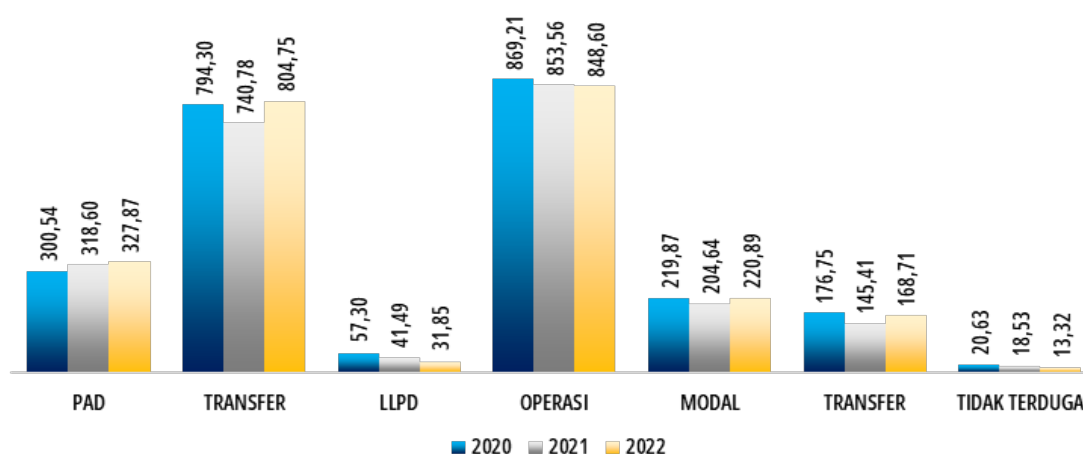
Dalam kurun waktu 2020 - 2022, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat kondisi perekonomian yang belum pulih kembali ke masa sebelum pandemi covid-19. Target pendapatan mengalami peningkatan (yoy) baik di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,91% dari 318 T menjadi 327 T dan pada komponen Pendapatan Transfer sebesar 8,64% dari 740 T menjadi 804 T. Sebaliknya, untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPD) mengalami penurunan sebesar (-23,23%) dari 41 T menjadi 31 T.

Dari sisi belanja, penurunan alokasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada komponen belanja tidak terduga dan belanja operasi. Komponen jenis belanja yang mengalami penurunan terbesar (yoy) adalah belanja tidak terduga sebesar (-28,12%), sedangkan untuk belanja operasi meskipun tidak terlalu signifikan namun mengalami penurunan sebesar (-0,58%). Penurunan target belanja operasi disebabkan oleh berkurangnya alokasi belanja pada beberapa komponen belanja operasi. Salah satu komponen belanja operasi yang mengalami

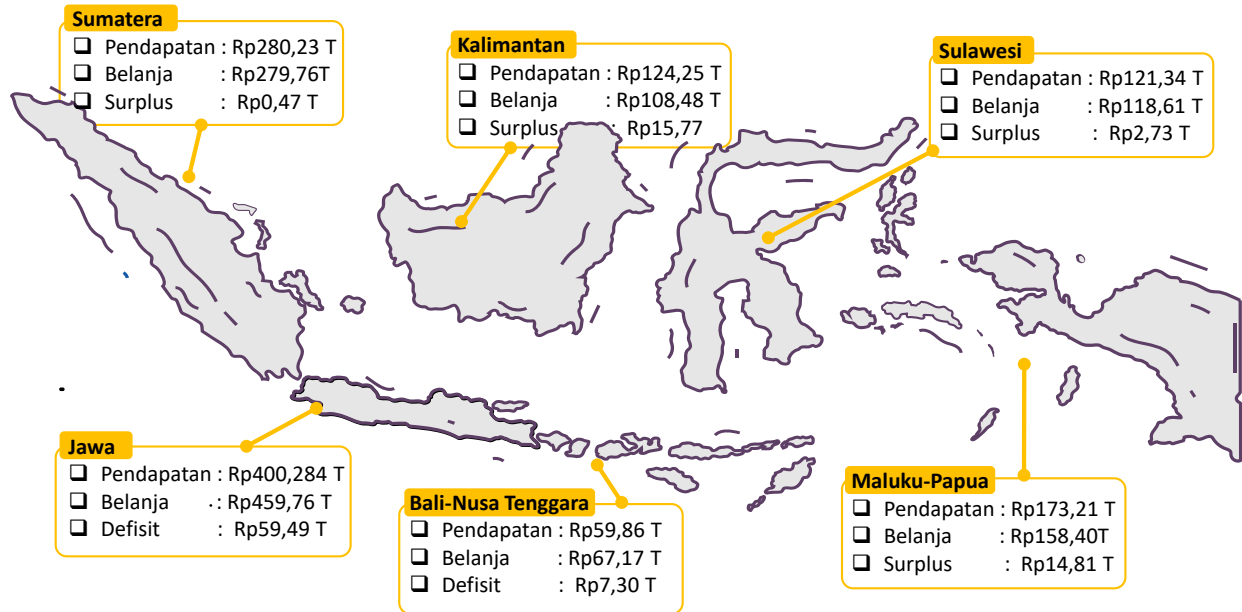
TABEL 7. I-ACCOUNT NASIONAL

(Dalam Triliun Rupiah)	2022		% Real	%Growth Real (yoy)
	Pagu	Real		
PENDAPATAN DAERAH	1.164,48	1.159,18	99,54%	1,60%
BELANJA DAERAH	1.251,52	1.192,18	95,26%	-1,78%
SURPLUS/(DEFISIT)	-4,14	-33,00	797,99%	54,71%
PEMBIAYAAN	4,89	61,43	2.184,26%	44,97%
SILPA	0,76	73,82		

GAMBAR 33. PERKEMBANGAN TARGET KOMPONEN APBD (DALAM TRILIUN RUPIAH) (2020-2022)



GAMBAR 34. PELAKSANAAN APBD DI TINGKAT REGIONAL



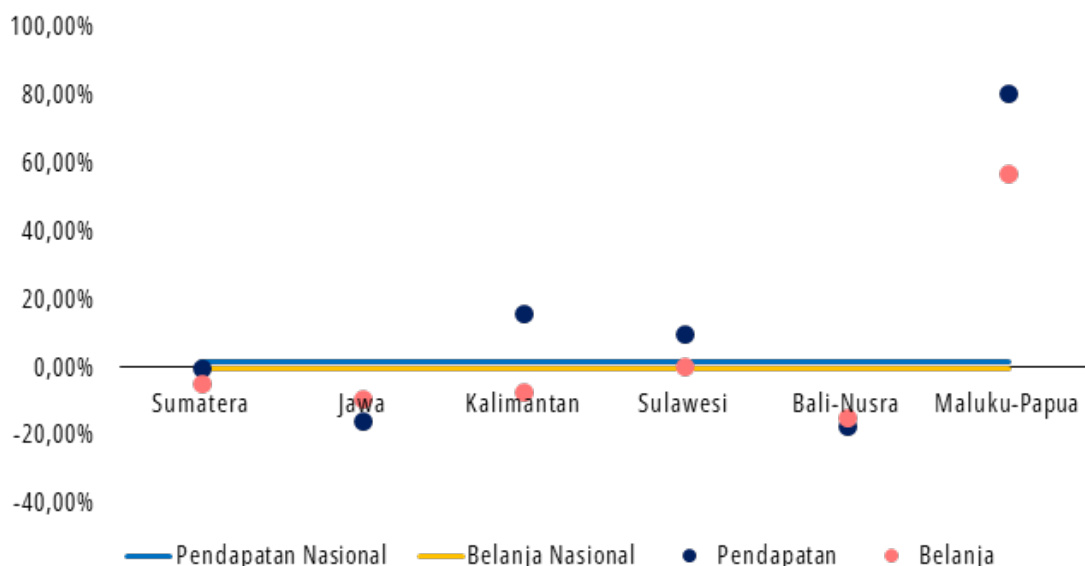
penurunan alokasi pagu belanja yang cukup signifikan adalah belanja subsidi, dengan penurunan sebesar (-47,44%) dari tahun sebelumnya. Selain itu, belanja bantuan sosial juga memberikan andil terhadap penurunan alokasi belanja operasi pada TA 2022, dimana untuk belanja bantuan sosial mengalami penurunan alokasi sebesar (-25,78%) dari 16,25 T menjadi 12,06 T dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, alokasi belanja Transfer dan Modal mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 16,02% dan 7,94%. Kenaikan belanja transfer digunakan setiap pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan berupa bantuan keuangan ke desa maupun bantuan ke kota/kab. Sedangkan kenaikan alokasi belanja modal mengindikasikan komitmen penuh pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya masing-masing.

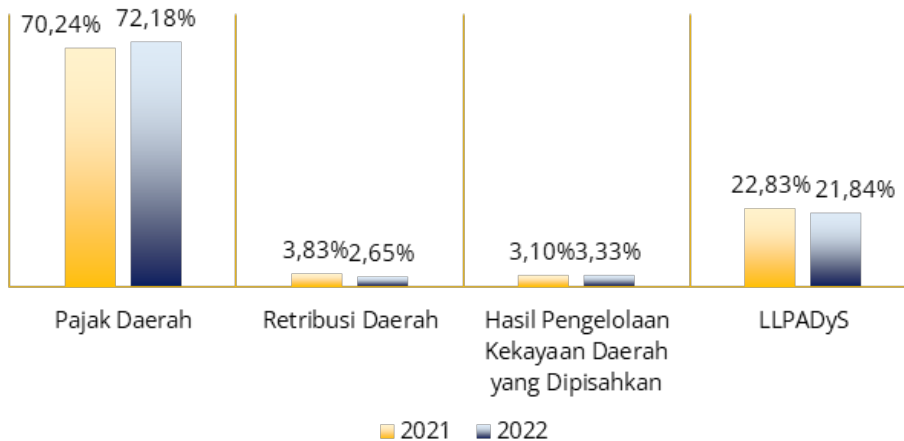
Defisit nasional mengalami penyempitan dari target yang diestimasikan, defisit APBD secara nasional berkurang sebesar (-28,24%) dari -121,28 T menjadi -87,04 T. Hal ini mengindikasikan bahwa

secara nasional pendapatan tiap daerah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan alokasi belanja yang akan dikeluarkan. Untuk menutup defisit, maka pemerintah daerah menggunakan mekanisme pembiayaan agar kegiatan belanja pemerintah daerah dapat terus berjalan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 1,97% namun kenaikan alokasi pembiayaan tidak diikuti dengan realisasinya. Dimana realisasi pembiayaan pada TA 2022 hanya mencapai 84,76% atau turun (-8,54%) dari tahun anggaran sebelumnya.

Di tingkat regional, wilayah Jawa dan sekitarnya masih menjadi kontributor terbesar pendapatan daerah dengan porsi (34,53%) diikuti oleh Regional Sumatera (24,18%), Maluku Papua (14,94%), Kalimantan (10,72%), Sulawesi (10,47%), dan Bali Nusra (5,16%). Apabila dibandingkan dengan persentase pertumbuhan pendapatan nasional dengan tahun sebelumnya, Regional Maluku-Papua (80,52%), regional Kalimantan (15,80%), dan regional Sulawesi (10,47%) mengalami peningkatan sedangkan ketiga regional lainnya

GAMBAR 35. PERTUMBUHAN REALISASI APBD REGIONAL DIBANDINGKAN NASIONAL



GAMBAR 36. KONTRIBUSI REALISASI KOMPONEN PAD


memiliki pertumbuhan pendapatan yang turun diantaranya Regional Sumatera (-0,13%), Jawa (-15,68%) dan regional Bali Nusra(-17,10%). Dari sisi belanja, secara nasional alokasi belanja mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan tercatat sebesar (2,40%) dari 1.222 T menjadi 1.251 T. Dua regional yakni Maluku-Papua (57,19%) dan Sulawesi (0,59%) memiliki tingkat pertumbuhan belanja positif sedangkan keempat regional lainnya yakni Sumatera (-4,75%) Regional Jawa (-9,07%), Kalimantan (-7,22%), dan Bali-Nusra (-14,76%) mengalami kontraksi selaras dengan realisasi nasional. Dari sisi pembiayaan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintahan daerah dimana pertumbuhan pembiayaan neto seluruh regional berada pada kisaran 44,97% Pertumbuhan pembiayaan tertinggi terjadi pada Regional Sumatera sedangkan terendah pada Regional Bali-Nusra. Sedangkan Defisit tertinggi terjadi pada Regional Jawa sebesar Rp59,49 T.

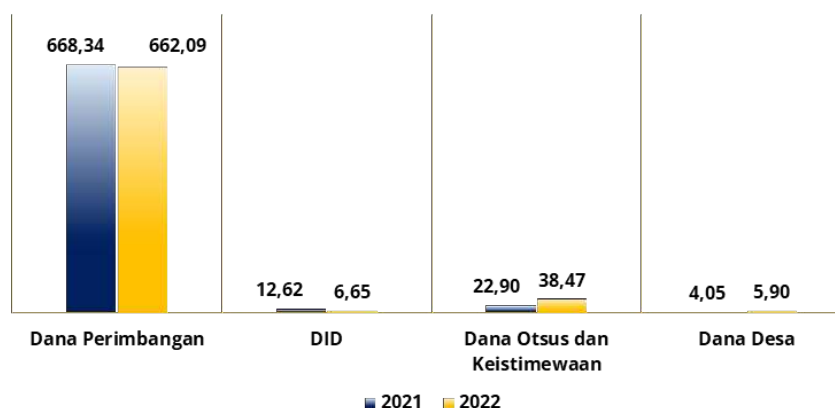
1.II.B. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 tercatat 1.159,18 Triliun atau mencapai 99,54% dari target pendapatan akumulatif sampai dengan akhir tahun. Capaian ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun lalu (98,90%). Meskipun persentase capaian/realisasinya turun, nominal realisasi pendapatan daerah menguat 1,60% dibandingkan tahun sebelumnya.

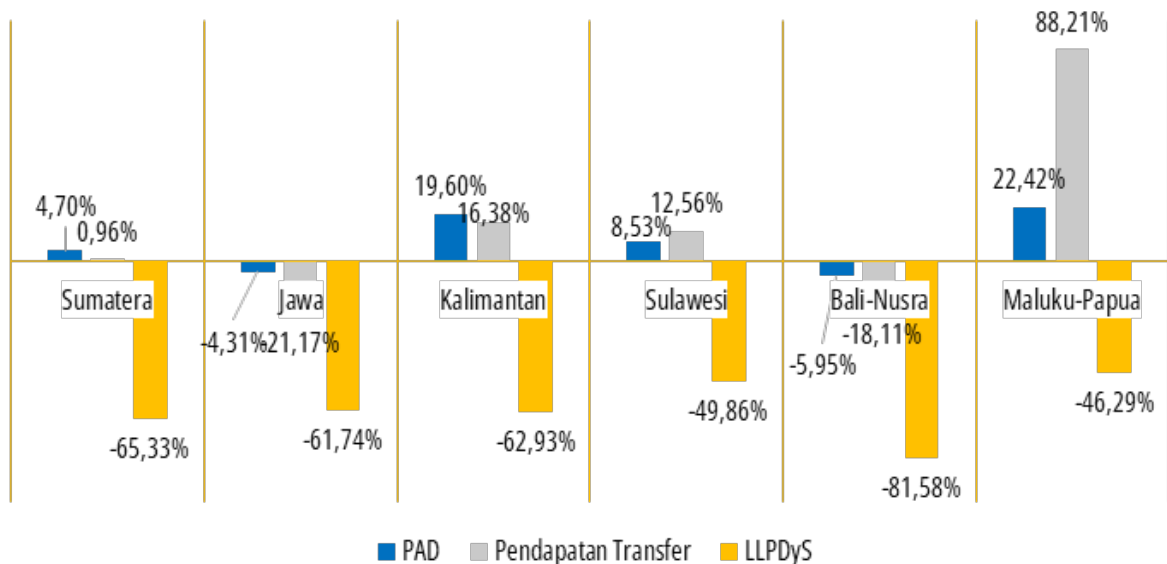
Pajak Daerah masih menjadi pendapatan penopang terbesar PAD. Pada 2022, terjadi kenaikan capaian realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 208,42 T atau 9,13 T lebih besar dibandingkan tahun lalu. Selain pajak, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami peningkatan sebesar 0,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen PAD yang mengalami penurunan seperti Retribusi Daerah dan LLPADS dimana penurunan paling besar terjadi pada komponen LLPADS sebesar -5,28% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di samping PAD, dana perimbangan memegang peranan penting bagi kelangsungan pemulihan ekonomi di daerah. Di Tahun 2022, kontribusi dana transfer mencapai Rp837,71 T atau 72,27% dari total seluruh pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan pemda masih menggantungkan dana transfer ketimbang pendapatannya sendiri untuk menggerakkan perekonomian. Nilai ini sebagian besar direalisasikan dalam bentuk Transfer Dana Perimbangan seperti (DBH,DAU, dan DAK). Realisasi Dana Perimbangan 2022 sebesar Rp662,09 triliun terkontraksi 0,93%. Selain Dana Perimbangan, komponen Dana Penyesuaian dan Otsus (-0,27%).

Secara keseluruhan PAD regional mengalami peningkatan realisasi dibandingkan tahun lalu. Peningkatan PAD tertinggi terjadi pada Regional Maluku-Papua sebesar 22,42% hal ini disebabkan karena tingginya realisasi pendapatan dari

GAMBAR 37. PERTUMBUHAN REALISASI KOMPONEN PENDAPATAN TRANSFER


GAMBAR 38. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL PER JENIS



pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang mengindikasikan aktivitas di sektor perdagangan besar dan eceran menguat. Meskipun pendapatan transfer masih tinggi/meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,39% atau Rp35,24 T namun dengan meningkatnya PAD sudah memberikan harapan bahwa regional Maluku-Papua mampu meningkatkan pendapatannya melebihi tahun anggaran sebelumnya dan melepas ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat.

PAD pada Regional Jawa dan Bali-Nusa Tenggara justru mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,31 persen dan 5,95 persen. Pada regional Jawa, terlihat penurunan PAD yang mencolok di Provinsi Jawa Barat yang turun sebesar 28,24 persen. Sementara itu, di regional Maluku-Papua penurunan PAD paling signifikan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami penurunan sebesar 36,76 persen.

1.II.C. BELANJA DAERAH

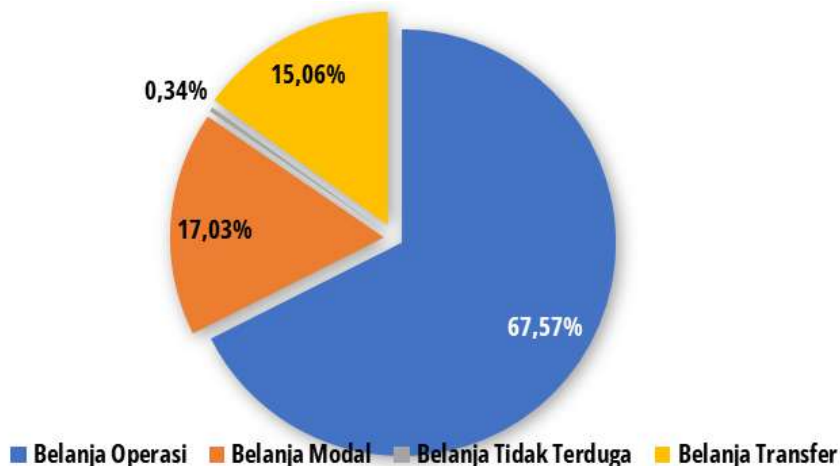
Realisasi belanja daerah Tahun 2022 tercatat Rp1.192,18 Triliun atau mencapai 95,26% dari target belanja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Persentase capaian belanja ini mengalami

penurunan apabila dibandingkan dengan tahun lalu (97,45%). Persentase yang turun diikuti juga dari sisi nominal realisasi belanja daerah yang berkontraksi sebesar 1,78%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan alokasi belanja daerah sebesar 29,36 T (2,40%).

Berdasarkan komposisi, belanja operasi merupakan jenis belanja APBD 2022 terbesar dengan realisasi mencapai Rp805,53 T atau 67,57% dari seluruh belanja. Pada posisi kedua dan ketiga, belanja modal dan transfer terealisasi sebesar 17,03% dan 15,06% atau sebesar Rp202,98 T dan Rp179,58 T. Selain ketiga belanja ini, terdapat belanja tidak terduga yang terealisasi sebesar 0,34% atau setara Rp4,08 T.

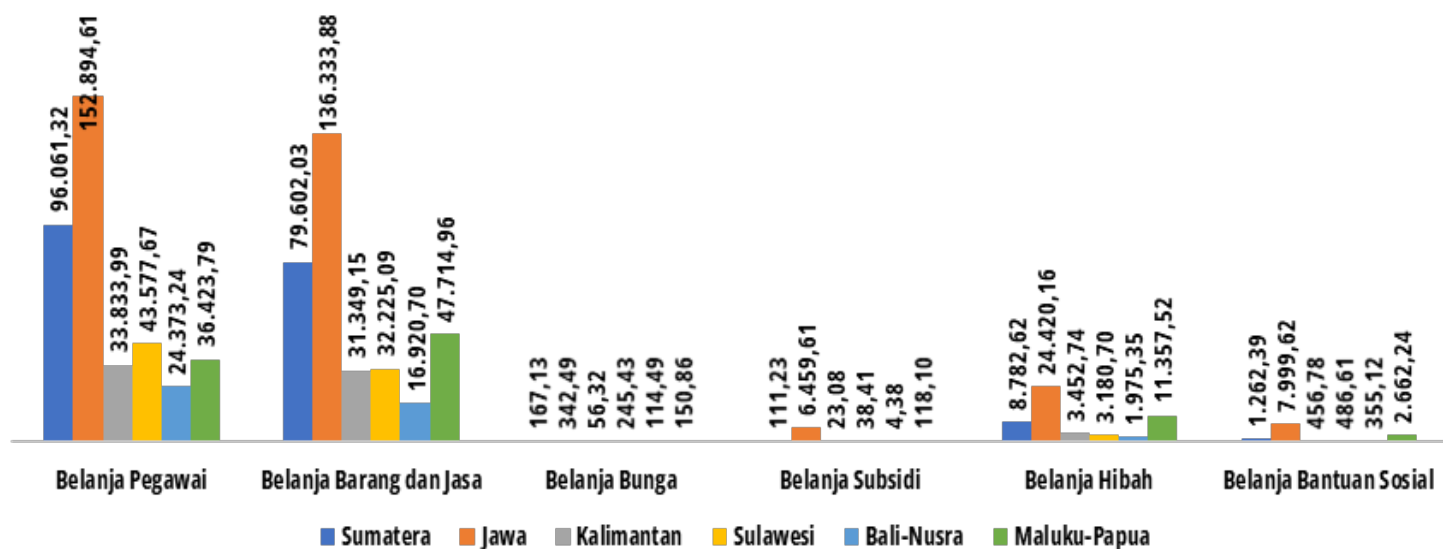
Belanja operasi didominasi oleh pembayaran belanja pegawai pada hampir seluruh regional. Meskipun jumlahnya terbilang besar, belanja pegawai di daerah mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 dengan persentase penurunan sebesar (-4,65%) dari tahun sebelumnya secara Nasional. Regional Jawa menempati peringkat teratas dengan besaran belanja pegawai sebesar Rp152,89 T atau 39,49% secara nasional. Sedangkan regional Bali Nusra menempati peringkat terbawah realisasi belanja pegawai yang hanya sebesar Rp24,37 T atau 6,30 % dari total nasional.

GAMBAR 39. KOMPOSISI BELANJA APBD 2022





GAMBAR 40. REALISASI KOMPONEN BELANJA OPERASI REGIONAL

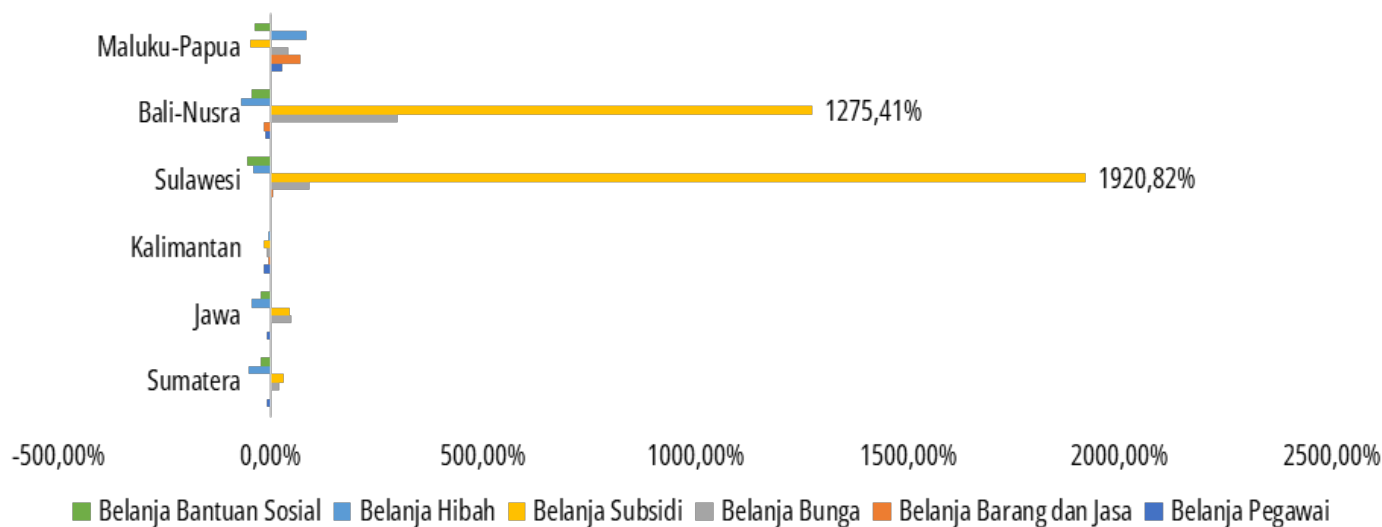


Pertumbuhan belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bansos cukup variatif di tiap regional. Adapun belanja barang dan jasa selama kurun waktu dua tahun secara nasional mengalami pertumbuhan sebesar 6,59%. Penurunan belanja barang dan jasa tertinggi terjadi pada Regional Bali-Nusra sedangkan peningkatan belanja tertinggi terjadi pada Regional

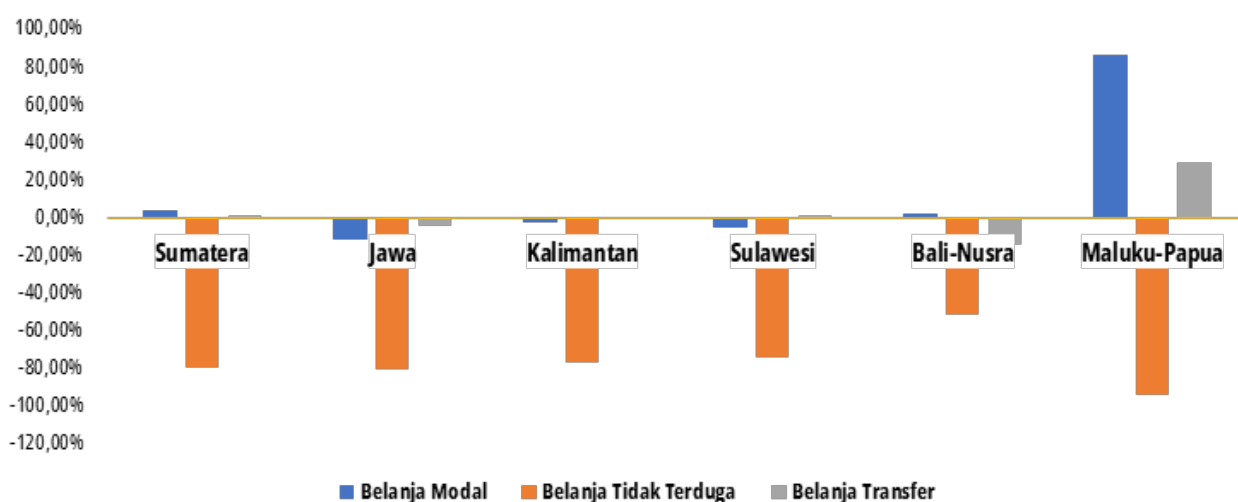
Maluku-Papua.

Pada jenis belanja bunga, pertumbuhan belanja terjadi pada Regional Bali Nusra (298,86%), Sulawesi (93,75%), Jawa (51,39%), Maluku Papua (41,74%), dan Sumatera (20,56%), sedangkan regional Kalimantan mengalami kontraksi sebesar (7,68%). Pada jenis

GAMBAR 41. PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI PER REGIONAL (2021-2022)



GAMBAR 42. PRESENTASE PERTUMBUHAN BELANJA DILUAR OPERASI PER REGIONAL (2021-2022)



belanja subsidi, hanya Regional Sulawesi dan Bali-Nusra yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 1.920,82% dan 1.275,41%. Pada jenis belanja hibah, kenaikan belanja Tahun 2022 hanya terjadi di regional Maluku-Papua (84,17%). Sedangkan untuk belanja bansos, pertumbuhan belanja hanya terjadi di Regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 1,61%.

Selain belanja operasi, belanja tidak terduga juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi pada hampir seluruh regional dengan persentase penurunan belanja tidak terduga secara nasional sebesar (-65,12%). Sejalan dengan pandemi yang lebih terkendali, seluruh regional mengalami kontraksi belanja tidak terduga dengan kontraksi terbesar terdapat di regional Maluku-Papua 94,47%. Di sisi lain, terjadi pertumbuhan pada belanja modal pada level provinsi sebesar 4,84%. Sedangkan untuk belanja transfer pertumbuhan hanya terjadi pada regional Sumatera (1,37%), Sulawesi (0,57%), dan Maluku-Papua (28,76%).

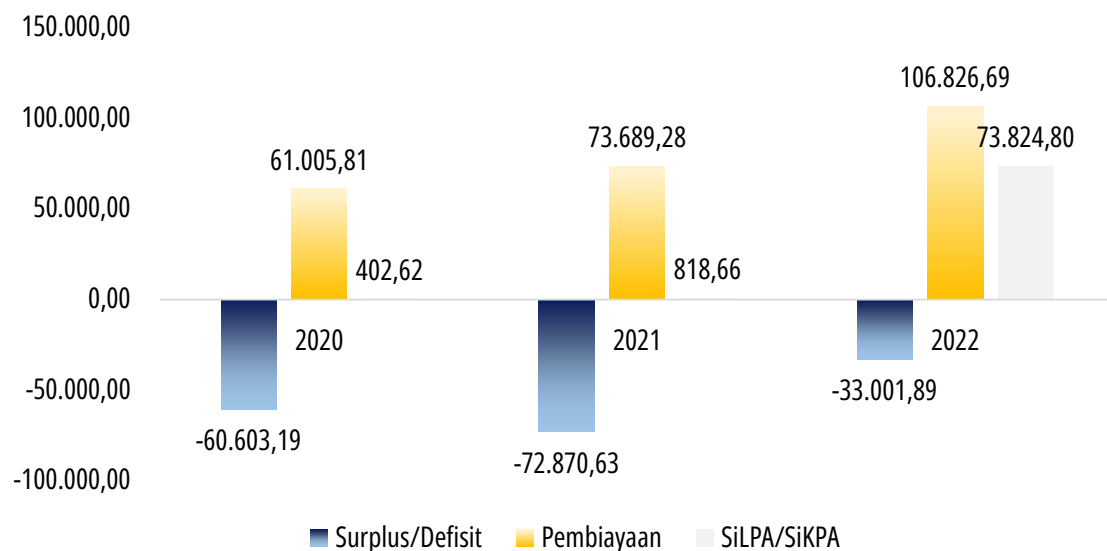
1.II.D. SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi defisit APBD Tahun 2022 sebesar Rp33,00 triliun. Nilai defisit tersebut lebih rendah dari

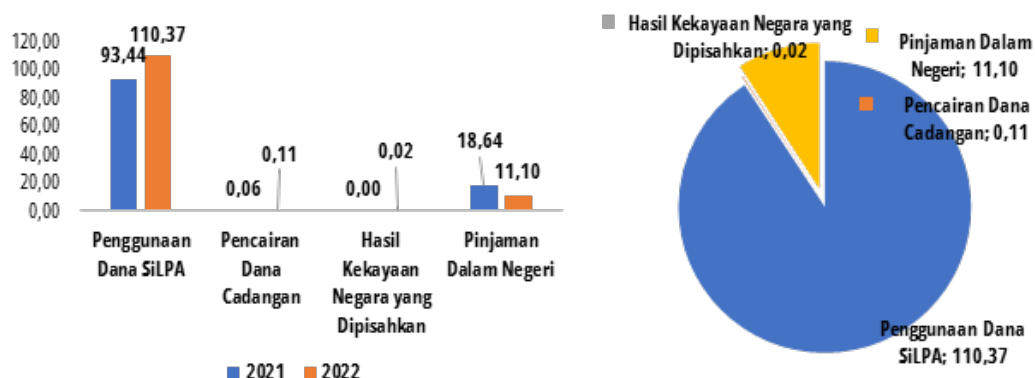
tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp72,87 triliun di Tahun 2021. Realisasi defisit tahun 2022 lebih tinggi dari target dengan persentase mencapai 797,99%. Defisit anggaran tahun 2022 dibiayai terutama melalui penggunaan SiLPA. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pembiayaan tahun 2022 difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terutama digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19, seperti pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung penguatan reformasi. Persentase SiLPA mengalami pertumbuhan dari sebelumnya turun Rp0,81 T di 2021 menjadi Rp73,82 T di 2022.

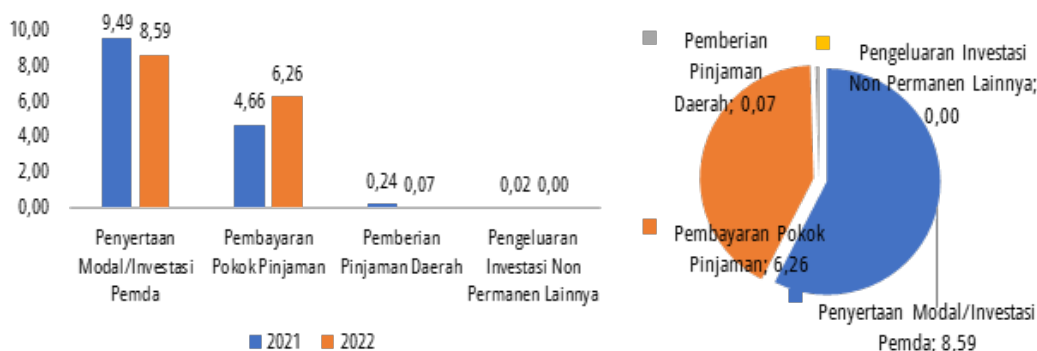
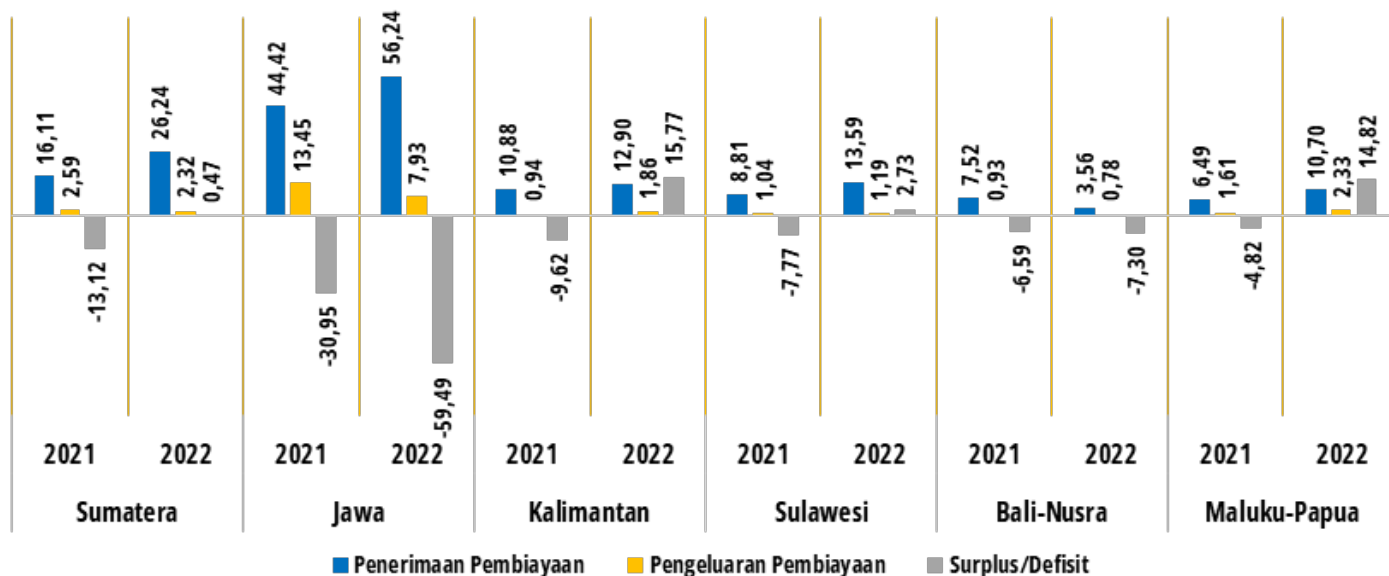
Berbanding terbalik dengan penurunan defisit, terjadi peningkatan realisasi pembiayaan dari Rp72,87 triliun di 2021 menjadi Rp106,83 triliun di 2022. Seiring dengan peningkatan pembiayaan, SiLPA 2022 mengalami kenaikan dari Rp0,82 T (2021) menjadi Rp73,82 T (2022). Kontributor terbesar penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp110,37 T atau setara 89,56% dari seluruh penerimaan pembiayaan. Komponen ini mengalami peningkatan 18,12% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp93,44 T. Sebaliknya, sumber penerimaan pinjaman daerah yang berkontribusi 9,09% dari total penerimaan pembiayaan, mengalami penurunan 40,42% atau

GAMBAR 44. PERTUMBUHAN KOMPONEN SURPLUS/DEFISIT, PEMBIAYAAN, DAN SiLPA (2021-2022)



GAMBAR 43. KOMPOSISI DAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN (2021-2022) (DALAM TRILIUN RUPIAH)



GAMBAR 45. PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN (2021-2022) (TRILIUN)

GAMBAR 46. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL (DALAM MILIAR RUPIAH) (2021-2022)


Rp7,53 T dibandingkan Tahun 2021.

Sementara pada Komponen pengeluaran pembiayaan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang menjadi dua komponen pengeluaran tertinggi dengan nilai masing-masing sebesar Rp8,59 T dan Rp6,26T.

Perkembangan surplus/defisit tiap regional sangat variatif, terdapat empat regional (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku Papua) mengalami surplus, sedangkan dua regional lainnya (Jawa dan Bali-Nusra) masih mengalami defisit hingga TA 2022 berakhir. Adapun defisit di Regional Jawa dan Bali-Nusra mengalami penurunan jika dibandingkan dengan defisit tahun 2021. Sedangkan untuk sektor pembiayaan, tingkat pertumbuhan pembiayaan tiap regional juga sangat variatif baik dari penerimaan maupun pengeluaran. Penerimaan cenderung mengalami tren peningkatan pada tahun 2021-2022, tercatat hanya regional Bali-Nusra yang mengalami penurunan pembiayaan. Pada pengeluaran pembiayaan, regional Kalimantan tercatat sebagai regional dengan pertumbuhan pengeluaran pembiayaan tertinggi dengan kenaikan sebesar 98,05% dibandingkan tahun lalu dan regional Jawa menjadi regional dengan tingkat pengeluaran

pembiayaan terendah dengan penurunan sebesar -41,01% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

2. PERKEMBANGAN KINERJA ANGGARAN REGIONAL

2.1. APBN

2.1.A. GAMBARAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. APBN mencerminkan gambaran umum mengenai alokasi dana untuk berbagai sektor dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

APBN terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan APBN berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan pembiayaan lainnya. Sementara itu, belanja APBN mencakup belanja pemerintah, belanja transfer ke daerah, dan belanja lainnya seperti belanja modal.

Dalam APBN, alokasi dana dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas dan kebijakan pemerintah. Setiap sektor atau program mendapatkan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa sektor yang biasanya mendapatkan perhatian dalam APBN adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pembangunan ekonomi.

Selain itu, APBN juga mencerminkan target surplus atau defisit anggaran. Jika pendapatan negara melebihi belanja negara, maka terdapat surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara melebihi pendapatan negara, maka terdapat defisit anggaran. Surplus anggaran dapat digunakan untuk membayar utang, memperkuat cadangan devisa, atau diinvestasikan dalam pembangunan jangka panjang, sedangkan defisit anggaran dapat diatasi melalui pembiayaan seperti pinjaman.

Penyusunan APBN dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan keuangan negara. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter menjadi pertimbangan dalam menentukan target pendapatan dan alokasi belanja.

Tujuan utama dari APBN adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan nasional. Dalam APBN, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat.

Melalui APBN, pemerintah berperan dalam mengelola keuangan negara dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. APBN menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan APBN harus dilakukan dengan seksama dan berdasarkan prinsip-prinsip yang menguntungkan bagi rakyat dan negara.

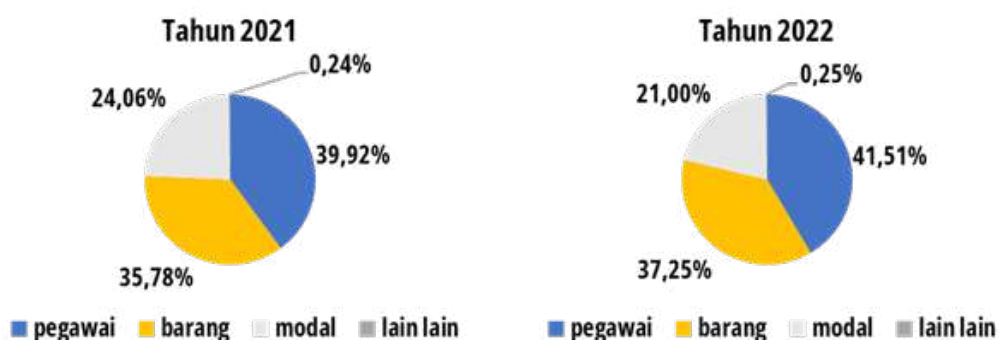
2.I.B. REGIONAL SUMATERA

Hasil konsolidasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi di regional Sumatera menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir mengalami defisit. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu menutup defisit anggaran menghasilkan SiKPA Rp161,5 triliun atau turun 17,86 persen dari tahun sebelumnya. Penerimaan negara bukan pajak juga mengalami peningkatan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam diversifikasi sumber pendapatan negara di luar sektor perpajakan. Pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak sebesar 8,33% pada tahun 2022 menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan lainnya. Belanja negara dan belanja pemerintah mengalami fluktuasi selama periode yang diamati. Meskipun terjadi penurunan belanja negara dan belanja pemerintah pada tahun 2022, penurunan tersebut tidak signifikan. Penurunan belanja negara dan belanja pemerintah dapat diinterpretasikan sebagai upaya pengendalian pengeluaran dan efisiensi penggunaan

TABEL 8. KONSOLIDASI DI REGIONAL SUMATERA

Uraian	2019	2020	2021	2022	growth 22 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	86	81	113	145,4	28,32
Penerimaan Perpajakan	75	70	100	131	31,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	11	11	12	13	8,33
Belanja Negara	325	164	309	306	(0,97)
Belanja Pemerintah	105	94	99	96	(3,03)
Belanja Daerah	220	69	210	210	(0,1)
Surplus/Defisit Anggaran	(239)	(82)	(196)	(161)	(17,86)
SILPA/SIKPA	(239)	82)	(196)	(161)	(17,86)

GAMBAR 47. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL SUMATERA



anggaran dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah. Belanja daerah cenderung stabil selama periode yang diamati, meskipun ada fluktuasi kecil. Stabilitas belanja daerah mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pengendalian pengeluaran. Penurunan belanja daerah yang sedikit pada tahun 2022 (-0,1%) menunjukkan keberlanjutan kebijakan pengendalian belanja di tingkat daerah.

Hingga akhir tahun 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah konsolidasian regional Sumatera sebesar Rp 145,4 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 28,32 persen yoy. Terjadi kenaikan karena sudah mulai membaiknya perekonomian setelah berakhirnya pandemi covid-19. Kondisi ekonomi yang membaik membuat belanja negara di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,97%.

Jika dibandingkan komposisi Belanja Pemerintah antara tahun 2021 dengan 2022, terlihat komposisi belanja masih relatif sama secara total dengan proporsi tertinggi pada belanja pegawai sebesar 39,9 persen di tahun 2021 dan 41,5 persen di tahun 2022. Belanja Pegawai dan Modal mengalami pertumbuhan di tahun 2022, artinya pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat dengan rebound belanja-belanja tersebut.

2.I.C. REGIONAL JAWA

Hasil Konsolidasi antara laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah

menunjukkan bahwa pada tahun 2019 regional Jawa mampu mendapatkan surplus anggaran sebesar Rp266,59 triliun.

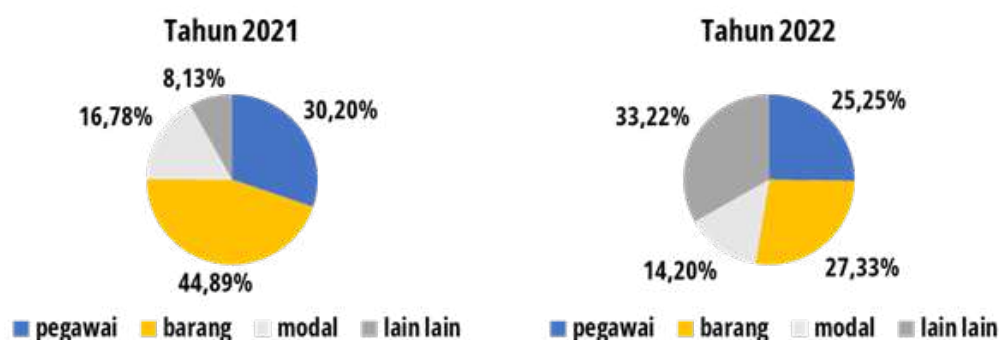
Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami defisit, terutama kontraksi terdalam pada tahun 2020 hingga menyentuh Rp715,62 triliun dimana wabah pandemi Covid-19 masih dalam masa kritisnya. Namun di tahun 2022 sudah mulai bangkit ditunjukkan dengan pengurangan defisit negara sebesar 122,25 persen menjadi Rp49,49 triliun. Penerimaan hibah mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dalam penerimaan hibah yang dapat mengindikasikan faktor eksternal atau perubahan kebijakan terkait hibah. Meskipun terdapat pertumbuhan sebesar 13,83% pada tahun 2022, kontribusi penerimaan hibah terhadap pendapatan negara masih relatif kecil.

Pengurangan defisit pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan Pendapatan Negara sebesar 30,71 persen yoy. Pendapatan tumbuh dan hal ini didukung oleh meningkatnya Belanja Negara sebesar 13,73 persen. Belanja Pemerintah sendiri tumbuh 16,30 persen. Pertumbuhan Belanja Pemerintah dipicu oleh program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dimana regional Jawa memiliki populasi terbesar di Indonesia. Belanja negara dan belanja pemerintah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan pengeluaran untuk memperkuat perekonomian, memenuhi kebutuhan publik, dan mendukung pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan belanja negara dan

TABEL 9. KONSOLIDASI DI REGIONAL JAWA

Uraian	2019	2020	2021	2022	growth 22 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.761,64	1.469,10	1.781,75	2.328,91	30,71
Penerimaan Perpajakan	1.371,97	1.130,80	1.345,64	1.759,30	30,74
Penerimaan Negara Bukan Pajak	384,18	319,47	431,11	563,92	30,81
Penerimaan Hibah	5,50	18,83	4,997	5,69	13,83
Belanja Negara	1.495,06	2.184,72	2.004,21	2.279,42	13,73
Belanja Pemerintah	1.234,45	1.597,47	1.738,71	2.022,17	16,30
Belanja Daerah	260,61	587,25	265,51	257,25	(3,11)
Surplus/Defisit Anggaran	266,59	(715,62)	(222,46)	49,49	(122,25)
SILPA/SIKPA	668,64	475,66	649,26	640,47	(1,35)

GAMBAR 48. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL JAWA



belanja pemerintah yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan negara menunjukkan upaya pengendalian defisit anggaran.

Perbandingan proporsi Belanja Pemerintah antara tahun 2021 dengan 2022, terlihat pada tahun 2021 proporsi terbesar adalah Belanja Barang sebesar 44,8 persen dari Total Belanja regional Jawa. Berbeda pada tahun 2022 dimana terjadi pergeseran proporsi Belanja pada Belanja lain-lain menjadi proporsi terbesar sebesar 33,22 persen. Hal ini dikarenakan pandemi covid yang sudah mulai membaik menyebabkan perekonomian yang cenderung menuju arah stabil.

2.I.D. REGIONAL KALIMANTAN

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Kalimantan menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2021 terakhir mengalami defisit anggaran namun surplus pada tahun 2022. Pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dari sumber pendapatan negara, baik dalam bentuk hibah maupun pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Pertumbuhan pendapatan negara dan hibah sebesar 52,07% pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara. Belanja negara dan belanja pemerintah mengalami fluktuasi selama periode yang diamati. Meskipun terjadi peningkatan belanja negara dan belanja pemerintah pada tahun

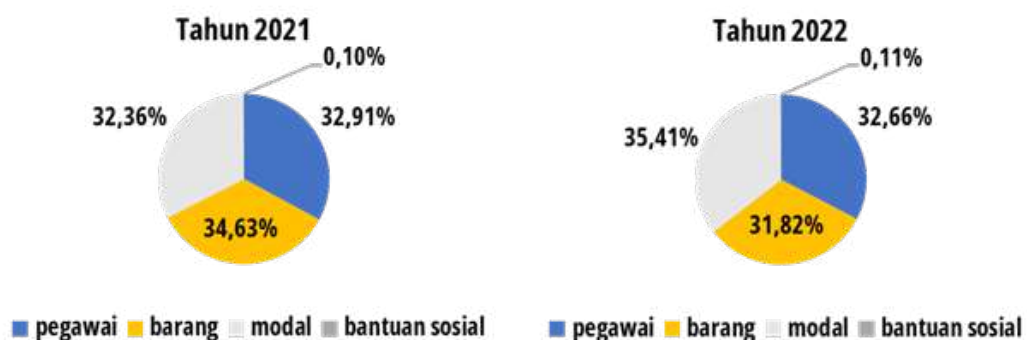
2022, peningkatan tersebut terjadi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan negara. Pertumbuhan belanja negara sebesar 24,90% pada tahun 2022 menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang lebih hati-hati dan efisien. Belanja transfer dan belanja daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya alokasi dana yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat daerah. Pertumbuhan belanja transfer sebesar 35,80% dan belanja daerah sebesar 39,78% pada tahun 2022 menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik.

Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicanangkan Pemerintah di tahun 2022 menghasilkan dampak yang positif. Selain Pendapatan Negara yang tumbuh, Belanja Negara pada regional Kalimantan juga tumbuh. Belanja Negara pada regional Kalimantan masih sangat dipengaruhi oleh Belanja Pemerintah dimana realisasi tahun 2021 sebesar Rp133,74 triliun atau tumbuh sebesar 5,8 persen yoy. Belanja pegawai untuk belanja regional di Kalimantan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai di Kalimantan. Peningkatan belanja pegawai menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pemberdayaan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Belanja barang untuk belanja regional di Kalimantan mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2022. Penurunan ini dapat

TABEL 10. KONSOLIDASI DI REGIONAL KALIMANTAN

Uraian	2019	2020	2021	2022	growth 22 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	48,30	40,15	51,58	78,44	52,07
Penerimaan Perpajakan	44,18	36,06	47,15	73,15	55,13
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,12	4,08	4,43	5,29	19,47
Penerimaan Hibah					
Belanja Negara	129,50	72,76	123,88	154,72	24,90
Belanja Pemerintah	37,53	33,998	40,85	41,97	2,74
Belanja Transfer	91,97	38,76	83,03	112,75	35,80
Belanja Daerah	85,82	32,47	76,61	107,09	39,78
Surplus/Defisit Anggaran	(81,21)	(32,62)	(72,30)	(76,28)	5,51
SILPA/SIKPA	(81,21)	(32,62)	(72,30)	(76,28)	5,51

GAMBAR 49. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL KALIMANTAN





disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pengadaan barang atau penghematan pengeluaran dalam pengadaan barang. Meskipun terjadi penurunan belanja barang, upaya pengelolaan dan efisiensi penggunaan barang tetap penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan. Belanja modal untuk belanja regional di Kalimantan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di Kalimantan. Peningkatan belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

2.I.E. REGIONAL SULAWESI

Pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, yang dapat diatribusikan kepada berbagai faktor seperti kebijakan perpajakan yang efektif dan peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan pendapatan negara dan hibah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penerimaan Perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi. Namun, penerimaan perpajakan mengalami pemulihan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan yang tinggi pada tahun 2022 (sebesar 55,13%) menunjukkan adanya pemulihan

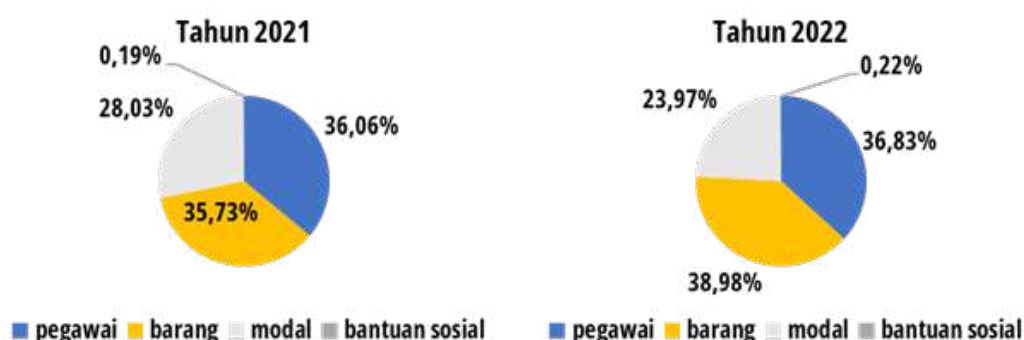
ekonomi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain selain pajak, seperti dividen, aset negara, dan lain sebagainya. Peningkatan yang relatif stabil pada tahun 2022 (sebesar 19,47%) menunjukkan adanya potensi dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber tersebut. Belanja Negara mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2022, dengan pertumbuhan moderat. Peningkatan belanja negara mencerminkan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan, proyek, dan program pemerintah. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 (sebesar 24,90%) menunjukkan adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan anggaran belanja pegawai dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pegawai yang dibiayai oleh pemerintah regional. Hal ini bisa mengindikasikan pertumbuhan sektor publik dan peningkatan layanan publik di wilayah Sulawesi. Peningkatan belanja pegawai juga dapat menunjukkan adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pelayanan publik di daerah tersebut. Kenaikan anggaran belanja barang menunjukkan peningkatan kebutuhan akan barang dan perlengkapan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di wilayah Sulawesi. Hal ini bisa mengindikasikan pertumbuhan sektor ekonomi di daerah tersebut, termasuk peningkatan aktivitas bisnis dan perdagangan. Penurunan anggaran

TABEL 11. KONSOLIDASI DI REGIONAL SULAWESI

Uraian	2019	2020	2021	2022	growth 22 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	27,64	24,43	28,94	37,11	28,23
Penerimaan Perpajakan	22,69	19,61	23,71	31,18	31,51
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,95	4,82	5,23	5,93	13,36
Penerimaan Hibah					
Belanja Negara	146,09	73,00	144,04	144,00	(0,02)
Belanja Pemerintah	52,56	47,34	52,41	52,79	0,74
Belanja Transfer	93,53	25,66	91,63	91,21	(0,46)
Belanja Daerah	85,62	17,69	83,60	83,98	0,46
Surplus/Defisit Anggaran	(118,44)	(48,57)	(115,10)	(106,89)	(7,13)
SILPA/SIKPA	(118,44)	(48,57)	(115,10)	(106,89)	(7,13)

GAMBAR 50. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL SULAWESI



belanja modal dapat mengindikasikan penurunan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan aset modal di wilayah Sulawesi. Hal ini bisa mencerminkan situasi ekonomi yang kurang stabil atau adanya pengalihan alokasi anggaran ke sektor lain. Kenaikan anggaran belanja bantuan sosial menunjukkan upaya pemerintah regional dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa mencerminkan adanya kesadaran terhadap ketimpangan sosial dan upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi di wilayah tersebut.

2.I.F. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian pada regional Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami defisit. Pendapatan negara dan hibah mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan pada tahun 2020 mungkin terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor ekonomi dan pendapatan nasional secara keseluruhan. Peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dapat diatribusikan kepada upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan perbaikan kondisi perekonomian secara umum. Penerimaan perpajakan juga mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Seperti pendapatan negara dan hibah, penurunan pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19, seperti penurunan aktivitas ekonomi dan pengurangan

pendapatan usaha. Peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 mencerminkan pemulihan ekonomi dan upaya pengembalian aktivitas ekonomi yang lebih kuat.

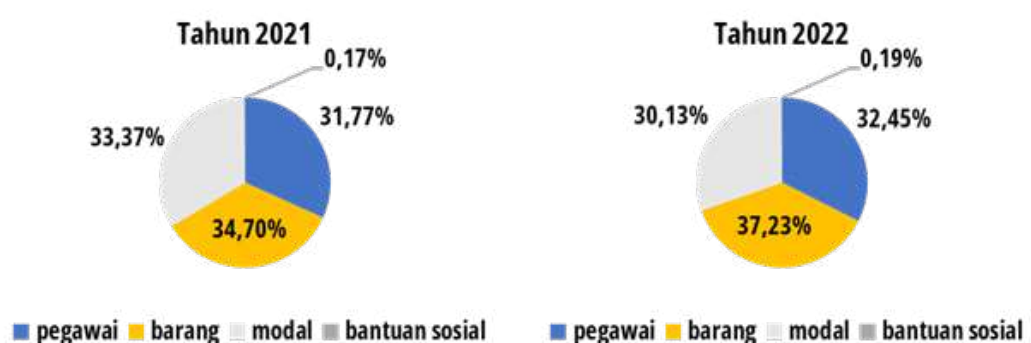
Penerimaan negara bukan pajak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan ini mungkin dapat dijelaskan oleh kebijakan pemerintah yang lebih proaktif dalam meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari sektor energi, pengelolaan aset negara, atau dana-dana lainnya. Belanja negara menunjukkan tren yang berbeda-beda dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2020, belanja negara mengalami penurunan yang mungkin terkait dengan kebijakan pemotongan anggaran dan penyesuaian keuangan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dan 2022, belanja negara mengalami peningkatan yang moderat, menunjukkan upaya pemulihan ekonomi dan pengembalian kegiatan pemerintah.

Terjadi peningkatan belanja pegawai dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini bisa mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di wilayah Bali Nusa. Belanja barang juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa di wilayah tersebut. Namun, terjadi penurunan belanja modal dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini bisa menunjukkan adanya pengurangan investasi dalam pembangunan

TABEL 12. KONSOLIDASI DI REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Uraian	2019	2020	2021	2022	growth 22 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	20,48	16,81	17,77	23,28	31,04
Penerimaan Perpajakan	17,64	13,88	14,44	18,58	28,67
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,84	2,93	3,33	4,70	41,32
Penerimaan Hibah					
Belanja Negara	81,38	42,98	82,45	82,61	0,19
Belanja Pemerintah	29,71	28,29	33,01	32,71	(0,90)
Belanja Transfer	51,66	14,69	49,45	49,90	0,91
Belanja Daerah	46,84	9,76	44,48	45,30	1,86
Surplus/Defisit Anggaran	(60,90)	(26,17)	(64,69)	(59,33)	(8,29)
SILPA/SIKPA	(60,90)	(26,17)	(64,69)	(59,33)	(8,29)

GAMBAR 51. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA



infrastruktur atau proyek-proyek pengembangan di wilayah Bali Nusa. Terdapat peningkatan signifikan dalam belanja bantuan sosial. Hal ini mungkin merupakan respons pemerintah daerah terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang membutuhkan dukungan tambahan, terutama selama masa pandemi COVID-19. Analisis data belanja regional Bali Nusa perlu dipertimbangkan dalam konteks kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal dan moneter. Belanja regional Bali Nusa yang meningkat dapat mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

2.I.G. REGIONAL PAPUA-MALUKU

Hasil Konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Maluku dan Papua menunjukkan bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir mengalami defisit anggaran. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan penanganan masalah keuangan yang muncul dalam periode tersebut. Pendapatan Negara dan Hibah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 26,82% per tahun. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan dalam aktivitas ekonomi, kebijakan

perpajakan yang efektif, dan penerimaan hibah dari lembaga donor atau mitra negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,32% per tahun. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh perluasan basis penerimaan negara di luar sektor perpajakan, seperti penerimaan dari sektor sumber daya alam, investasi, dan sektor non-pajak lainnya.

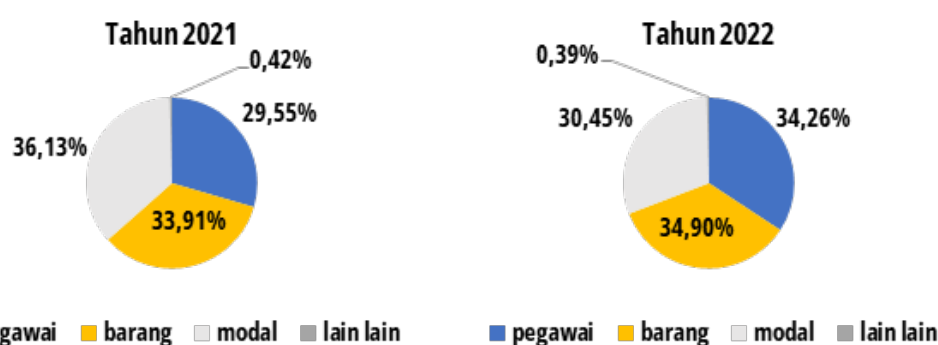
Terdapat fluktuasi dan perubahan dalam belanja negara, belanja pemerintah, belanja transfer, dan belanja daerah dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan belanja negara pada tahun 2022 mungkin terkait dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis lainnya. Penurunan belanja pemerintah pada tahun 2022 mungkin merupakan hasil dari upaya pengendalian pengeluaran dan restrukturisasi anggaran untuk meningkatkan efisiensi. Peningkatan belanja transfer dan belanja daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan keuangan kepada daerah untuk pembangunan lokal.

Terjadi peningkatan signifikan dalam belanja pegawai dari tahun 2021 ke 2022. Peningkatan ini mungkin mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat sektor ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Hal ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat. Terjadi penurunan belanja barang dari tahun 2021 ke 2022.

TABEL 13. KONSOLIDASI DI REGIONAL PAPUA-MALUKU

Uraian	2019	2020	2021	2022	growth 22 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	16,12	15,38	18,04	22,88	26,82
Penerimaan Perpajakan	14,56	13,88	16,51	21,05	27,52
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,55	1,50	1,54	1,83	19,32
Penerimaan Hibah					
Belanja Negara	131,31	57,65	122,44	128,81	5,20
Belanja Pemerintah	36,98	31,39	36,37	33,90	(6,77)
Belanja Transfer	94,33	26,27	86,08	94,90	10,26
Belanja Daerah	85,57	17,32	77,02	86,93	12,86
Surplus/Defisit Anggaran	(115,19)	(42,28)	(104,40)	(105,92)	1,46
SILPA/SIKPA	(115,19)	(42,28)	(104,40)	(105,92)	1,46

GAMBAR 52. KOMPOSISI BELANJA REGIONAL PAPUA-MALUKU



Penurunan ini mungkin dapat dikaitkan dengan perubahan prioritas penggunaan anggaran regional, seperti penyesuaian kebutuhan infrastruktur atau penekanan pada pengembangan sektor non-barang.

Terjadi penurunan yang signifikan dalam belanja modal dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya penyesuaian dalam rencana pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor yang terkait dengan proyek infrastruktur. Terjadi penurunan belanja lain-lain dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan dalam kebutuhan wilayah, penyesuaian kebijakan anggaran, atau penekanan pada penghematan pengeluaran.

2.II. APBD REGIONAL

2.II.A. GAMBARAN UMUM

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan rencana keuangan mereka untuk tahun tersebut. APBD tahun 2022 memberikan gambaran umum mengenai sumber pendapatan dan alokasi belanja yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Dalam APBD Tahun 2022, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, dan Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah. Pendapatan ini akan menjadi sumber dana untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah.

Selanjutnya, alokasi belanja daerah juga menjadi bagian penting dari APBD Tahun 2022. Belanja daerah mencakup berbagai jenis belanja, seperti belanja operasional, belanja pembangunan infrastruktur, belanja program sosial, dan belanja administrasi pemerintahan daerah. Tujuan dari alokasi belanja ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, APBD Tahun 2022 juga mencerminkan surplus atau defisit anggaran. Jika pendapatan daerah melebihi belanja daerah, maka terdapat surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja daerah melebihi pendapatan daerah, maka terdapat defisit anggaran. Surplus anggaran dapat digunakan untuk kegiatan investasi atau memperkuat cadangan keuangan daerah, sedangkan defisit anggaran dapat diatasi melalui pembiayaan daerah.

Dalam APBD Tahun 2022, juga terdapat pembiayaan

daerah yang merupakan sumber dana tambahan untuk memenuhi kekurangan pendapatan atau pembiayaan belanja yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan daerah. Pembiayaan daerah dapat berasal dari pinjaman, hibah, penjualan aset, atau sumber-sumber lainnya.

Terakhir, APBD Tahun 2022 juga mencakup sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang disebut sebagai SiLPA/SiKPA. Sisa anggaran ini dapat dialokasikan kembali untuk kegiatan atau program lain pada tahun berikutnya.

Dalam rangkaian pengelolaan APBD Tahun 2022, pemerintah daerah akan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kondisi ekonomi dan keuangan saat itu. Tujuan utama dari APBD Tahun 2022 adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di wilayah pemerintah daerah tersebut.

2.II.B. REGIONAL SUMATERA

Terjadi penurunan pendapatan daerah dari tahun 2020 ke 2021, tetapi penurunan pada tahun 2022 lebih rendah dari penurunan tahun sebelumnya. Penurunan ini diindikasikan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Sumatera, seperti pariwisata, perdagangan, dan industri. Penurunan pendapatan daerah juga dapat mencerminkan adanya penurunan aktivitas ekonomi secara umum di daerah Sumatera, baik dalam hal produksi maupun konsumsi.

Pendapatan transfer dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan dan berlanjut pada tahun 2022. Peningkatan pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Adapun pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan diindikasikan oleh pendapatan yang berasal dari peningkatan harga komoditas yang berdampak pada pendapatan daerah Sumatera. Terjadi penurunan belanja daerah dari tahun 2020 ke 2021 dan penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2022. Penurunan ini mungkin mencerminkan upaya penghematan anggaran daerah sebagai respons terhadap penurunan pendapatan daerah. Belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer juga mengalami penurunan yang sejalan dengan kondisi perekonomian yang diliputi ketidakpastian.

Terjadi defisit pada tahun 2020 dan 2021, namun surplus pada tahun 2022. Defisit pada tahun 2020 dan 2021 dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan dan peningkatan belanja. Surplus pada tahun 2022 mungkin mencerminkan adanya penyesuaian dalam

TABEL 14. APBD REGIONAL SUMATERA

Sumatera	2020	2021	Tahun 2022
Pendapatan Daerah	300.438	280.594	280.233
Pendapatan Asli Daerah	55.981	54.713	57.285
Pendapatan Transfer	191.461	218.186	220.280
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.996	7.695	2.667
Belanja Daerah	312.374	293.711	279.761
Belanja Operasi	206.780	200.141	185.986
Belanja Modal	46.614	46.152	48.031
Belanja Tidak Terduga	937	2.821	538
Belanja Transfer	58.043	44.595	45.205
Surplus/Defisit	(11.936)	(13.117)	(471)
Pembiayaan Daerah	12.167	13.523	23.922
Penerimaan Pembiayaan	14.144	16.114	26.244
Pengeluaran Pembiayaan	1.976	2.591	2.321
SILPA/SiKPA	0.232	0.406	24.393

kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021, dan berlanjut sampai dengan tahun 2022. Terjadi peningkatan signifikan pada SILPA/SiKPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/ Sisa Kas Peraturan Penggunaan Anggaran) dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022.

2.II.C. REGIONAL JAWA

Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap perekonomian daerah di Jawa. Penurunan pendapatan daerah dapat berdampak negatif terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Ini menunjukkan adanya penurunan sumber

pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lokal di daerah Jawa. Penurunan pendapatan asli daerah dapat mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan pendapatan transfer pada tahun 2021 dapat mengindikasikan adanya bantuan dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lain yang dapat membantu mengatasi penurunan pendapatan daerah. Namun, penurunan pendapatan transfer pada tahun 2022 dapat menjadi indikasi adanya pembatasan atau penurunan bantuan dari pemerintah pusat. Surplus anggaran daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 menjadi defisit. Sejalan dengan penurunan pendapatan, meskipun belanja pemerintah daerah tetap turun, defisit yang dialami Regional Jawa tetap tidak terhindarkan.

TABEL 15. APBD REGIONAL JAWA

Jawa	2020	2021	Tahun 2022
Pendapatan Daerah	507.577	474.702	400.276
Pendapatan Asli Daerah	200.813	187.202	179.143
Pendapatan Transfer	237.298	273.947	215.947
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	69.466	13.553	5.185
Belanja Daerah	535.120	505.647	459.764
Belanja Operasi	370.905	358.571	328.450
Belanja Modal	86.198	68.037	60.090
Belanja Tidak Terduga	1.325	5.415	1.178
Belanja Transfer	76.692	73.624	70.045
Surplus/Defisit	(27.543)	(30.945)	(59.488)
Pembiayaan Daerah	27.544	30.973	48.308
Penerimaan Pembiayaan	38.312	44.421	56.242
Pengeluaran Pembiayaan	10.768	13.448	7.933
SILPA/SiKPA	0.011	0.275	(11.180)

Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan tambahan dalam membiayai kegiatan dan proyek di daerah Jawa. Peningkatan pembiayaan daerah dapat mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman atau pembiayaan lainnya. SiLPA/SiKPA mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

2.II.D. REGIONAL KALIMANTAN

Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi pendapatan di daerah Kalimantan. Peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2022 dapat menjadi indikasi pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun mengalami peningkatan pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2022 dapat menunjukkan adanya peningkatan sumber pendapatan lokal di daerah Kalimantan, yang dapat menjadi indikasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan peningkatan lebih lanjut pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan transfer dapat berasal dari peningkatan dana bagi hasil seiring dengan meningkatnya harga dan permintaan global atas komoditas unggulan Regional Kalimantan. Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan penurunan lebih lanjut pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya penghematan belanja di daerah Kalimantan. Penghematan belanja daerah dapat disebabkan oleh sikap waspada dan penuh kehati-hatian dari

pemerintah daerah sejalan dengan kondisi yang masih diliputi ketidakpastian.

Defisit anggaran daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 defisit meningkat menjadi surplus. Peningkatan surplus anggaran pada tahun 2022 sejalan dengan peningkatan pendapatan dan penurunan belanja daerah. Meskipun, regional Kalimantan mengalami surplus anggaran, pemerintah daerah tetap merealisasikan pembiayaan, sehingga menghasilkan SiLPA yang semakin besar. Kedepan, perlu evaluasi saldo SiLPA agar tidak menjadi idle dan dapat bermanfaat bagi masyarakat regional Kalimantan secara lebih optimal.

2.II.E. REGIONAL SULAWESI

Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kembali pendapatan di daerah Sulawesi. Peningkatan pendapatan daerah dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi di daerah tersebut, terutama dalam hal konsumsi pemerintah yang dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi regional. Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi meningkat kembali di tahun 2022. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat menunjukkan adanya perbaikan kondisi aktivitas perekonomian di daerah Sulawesi yang terus berlanjut pasca Pandemi Covid-19.

Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan peningkatan lebih lanjut pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan transfer dapat berasal dari peningkatan dana bagi hasil seiring dengan meningkatnya harga dan permintaan global atas komoditas unggulan Regional Sulawesi. Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi kembali meningkat

TABEL 16. APBD REGIONAL KALIMANTAN

Kalimantan	2020	2021	Tahun 2022
Pendapatan Daerah	121.781	107.298	124.248
Pendapatan Asli Daerah	24.617	22.967	27.468
Pendapatan Transfer	79.182	82.607	96.140
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.981	1.724	639
Belanja Daerah	128.760	116.919	108.475
Belanja Operasi	82.020	75.849	69.172
Belanja Modal	27.594	21.846	21.315
Belanja Tidak Terduga	261	1.546	359
Belanja Transfer	18.883	17.676	17.629
Surplus/Defisit	(6.979)	(9.621)	15.772
Pembiayaan Daerah	7.191	9.946	11.045
Penerimaan Pembiayaan	7.812	10.883	12.900
Pengeluaran Pembiayaan	621	937	1.855
SiLPA/SiKPA	212	325	26.817

TABEL 17. APBD REGIONAL SULAWESI

Sulawesi	2020	2021	Tahun 2022
Pendapatan Daerah	122.722	110.139	121.341
Pendapatan Asli Daerah	19.587	18.906	20.517
Pendapatan Transfer	86.158	88.234	99.319
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.977	2.999	1.503
Belanja Daerah	129.853	117.914	118.609
Belanja Operasi	86.167	77.331	79.753
Belanja Modal	26.753	24.227	22.882
Belanja Tidak Terduga	255	921	449
Belanja Transfer	16.677	15.435	15.523
Surplus/Defisit	(7.131)	(7.775)	2.723
Pembiayaan Daerah	7.13	7.776	12.394
Penerimaan Pembiayaan	7.850	8.813	13.587
Pengeluaran Pembiayaan	716	1.035	1.193
SiLPA/SiKPA	2,28	1,24	15.126

pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah yang lebih keras dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Defisit anggaran daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 defisit meningkat menjadi surplus. Peningkatan surplus anggaran pada tahun 2022 sejalan dengan peningkatan pendapatan, meskipun belanja daerah juga meningkat. Meskipun, regional Sulawesi mengalami surplus anggaran, pemerintah daerah tetap merealisasikan pembiayaan, sehingga menghasilkan SiLPA yang semakin besar. Kedepan, perlu evaluasi saldo SiLPA agar tidak menjadi idle dan dapat bermanfaat bagi masyarakat regional Sulawesi secara lebih optimal.

2.II.F. BALI-NUSA TENGGARA

Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan penurunan lebih lanjut pada tahun 2022. Penurunan ini bisa terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor ekonomi secara keseluruhan, termasuk

pendapatan daerah. COVID-19 menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, seperti pariwisata dan perdagangan, yang merupakan sektor utama di Bali Nusa. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah yang sangat terkait dengan sektor ekonomi lokal.

Surplus/Defisit anggaran daerah menunjukkan defisit dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Defisit semakin memburuk pada tahun 2022. Hal ini bisa terkait dengan penurunan pendapatan dan upaya penghematan belanja yang tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran. Defisit anggaran yang semakin memburuk dapat mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi Bali Nusa, terutama dalam mengatasi dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

2.II.G. REGIONAL MALUKU PAPUA

Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan daerah berasal dari peningkatan dana transfer baik untuk

TABEL 18. APBD REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Bali Nusa	2020	2021	Tahun 2022
Pendapatan Daerah	79.344	72.210	59.864
Pendapatan Asli Daerah	20.326	16.949	15.940
Pendapatan Transfer	47.868	53.170	43.539
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.151	2.091	0.385
Belanja Daerah	82.979	78.801	67.169
Belanja Operasi		53.685	43.743
Belanja Modal		13.536	13.733
Belanja Tidak Terduga		0.498	0.180
Belanja Transfer		11.081	9.513
Surplus/Defisit	(3.635)	(6.591)	(7.305)
Pembiayaan Daerah	3.635	6.591	2.787
Penerimaan Pembiayaan	4.039	7.522	3.565
Pengeluaran Pembiayaan	0.404	0.932	0.777
SiLPA/SiKPA	0.000	0.000	(4.517)

TABEL 19. APBD REGIONAL MALUKU-PAPUA

Papua-Maluku	2020	2021	Tahun 2022
Pendapatan Daerah	107.888	95.951	173.214
Pendapatan Asli Daerah	7.095	8.099	9.915
Pendapatan Transfer	70.614	86.329	162.481
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.179	1.523	818
Belanja Daerah	111.267	100.772	158.399
Belanja Operasi	67.705	63.350	98.427
Belanja Modal	23.030	19.817	36.930
Belanja Tidak Terduga	384	0.781	1.379
Belanja Transfer	20.148	16.824	21.661
Surplus/Defisit	(3.379)	(4.821)	14.815
Pembiayaan Daerah	3.334	4.880	8.368
Penerimaan Pembiayaan	5.402	6.491	10.698
Pengeluaran Pembiayaan	2.068	1.611	2.330
SiLPA/SiKPA	(45.42)	58.42	23.183

komponen DAU, DBH, DAK, maupun Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Regional Maluku Papua. Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah yang lebih keras dalam upaya pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan kondisi aktivitas perekonomian daerah yang terus membaik, sehingga transaksi meningkat yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Peningkatan pendapatan transfer dapat berasal dari peningkatan dana bagi hasil seiring dengan meningkatnya harga dan permintaan global atas komoditas unggulan Regional Maluku-Papua. Belanja Daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah yang lebih keras dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Surplus/Defisit anggaran daerah menunjukkan defisit dari tahun 2020 hingga tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 meningkat menjadi surplus. Peningkatan surplus anggaran pada tahun 2022 sejalan dengan peningkatan pendapatan, meskipun belanja daerah juga meningkat. Meskipun, regional Maluku-Papua mengalami surplus anggaran, pemerintah daerah tetap merealisasikan pembiayaan, sehingga menghasilkan SiLPA yang semakin besar. Kedepan, perlu evaluasi saldo SiLPA agar tidak menjadi idle dan dapat bermanfaat bagi masyarakat regional Sulawesi secara lebih optimal.

3. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT

3.1. PENDAHULUAN

Secara garis besar, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan belanja negara untuk mencapai tujuan pemerintah seperti penurunan ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan. Umumnya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi kebijakan fiskal ekspansif (expansionary fiscal policy) dan kebijakan fiskal kontraksi (contractionary fiscal policy). Perbedaan keduanya terletak pada pendirian pemerintah mengenai penerimaan dan belanjanya.

Kebijakan fiskal yang ekspansif terjadi ketika pemerintah meningkatkan belanjanya serta menurunkan penerimaan pajak. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi ekspansif adalah mendorong perekonomian. Sebaliknya, suatu kebijakan fiskal dapat dikategorikan kontraksioner ketika pemerintah menurunkan pengeluarannya dan meningkatkan tarif pajak. Kebijakan fiskal kontraksioner bertujuan untuk meredam tekanan inflasi yang terjadi ketika perekonomian mengalami overheating.

Selanjutnya, berdasarkan polanya terhadap siklus bisnis (business cycle) kebijakan fiskal dapat dikategorikan menjadi prosiklikal (pro-cyclical fiscal policy) dan kontrasiklikal (counter-cyclical fiscal policy). Kebijakan fiskal prosiklikal bersifat mengikuti pola siklus bisnis, apabila perekonomian sedang berada dalam resesi maka pengeluaran pemerintah juga ikut rendah. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontrasiklikal bersifat bertentangan dengan siklus bisnis, sehingga ketika perekonomian sedang dalam kondisi resesi maka pengeluaran pemerintah justru meningkat.

Pada tahun 2022 Indonesia masih menghadapi

tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi), serta dalam merespon dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Sejalan dengan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal, maka arah kebijakan fiskal tahun 2022 adalah ekspansif-konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah. Secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pendapatan negara, antara lain:
 - Perluasan basis perpajakan antara lain e-commerce, cukai, plastik, dan optimalisasi PPN;
 - Penguatan sistem perpajakan;
 - Pemberian insentif fiskal secara terukur dan berkeadilan;
 - Optimalisasi pengelolaan aset;
 - Peningkatan inovasi dan kualitas pada satuan kerja dan BLU.
- Mendorong penguatan belanja yang berkualitas, antara lain melalui:
 - Fokus untuk mendukung reformasi struktural penguatan daya saing dan kapasitas produksi;
 - Penyesuaian cara kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Penyelesaian prioritas nasional secara terstruktur dan efektif;
 - Pengembangan infrastruktur dasar pada

kawasan 3T;

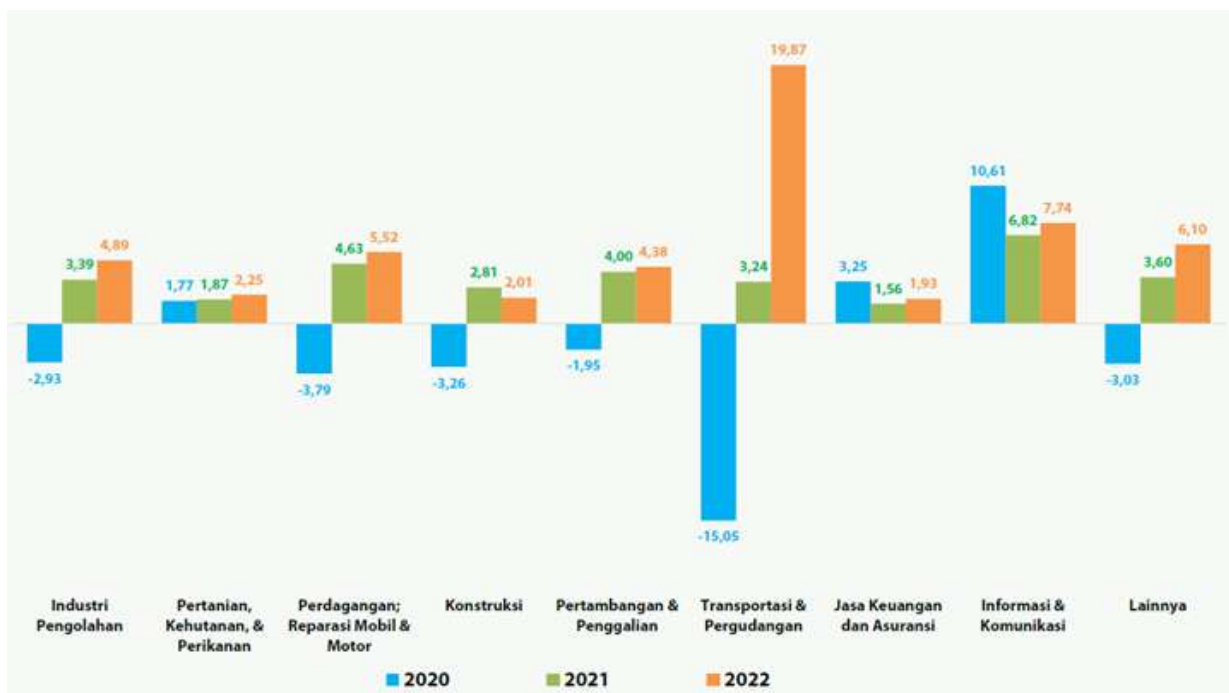
5) Reformasi sistem penganggaran.

c. Mengoptimalkan pembiayaan anggaran, antara lain melalui:

- Fleksibilitas pembiayaan utang sebagai instrumen countercyclical;
- Mendorong pembiayaan inovatif;
- Meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi UMKM, UMi, dan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga khususnya pada saat resesi. Pemerintah menerapkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dengan alokasi Rp455,62 T, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Dampak dari kebijakan PEN salah satunya terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian seiring dengan menurunnya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada triwulan IV 2022 ekonomi yang dilihat dari nilai PDB mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen,

GAMBAR 53. PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022 (C-TO-C) MENURUT LAPANGAN USAHA



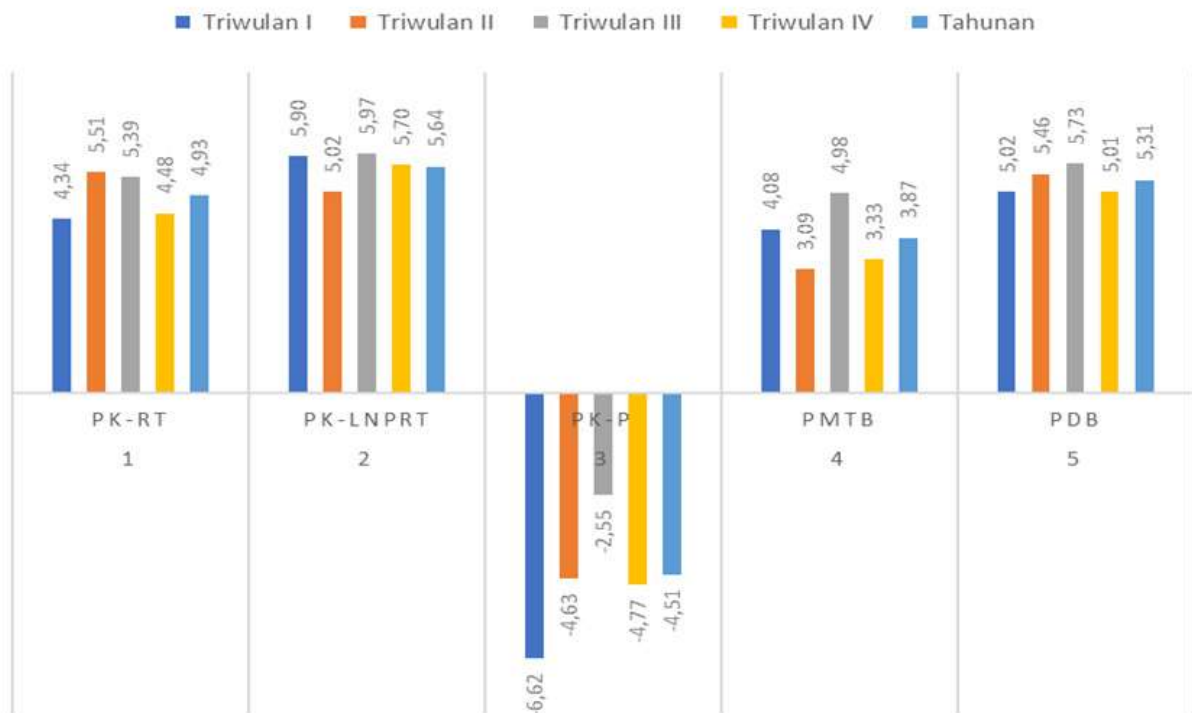
diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,97 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 9,47 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,89 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 2,25 persen dan 5,52 persen.

Dari sisi output nasional, laju PDB tahun 2022 menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan hampir pada semua komponen kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang berkontraksi sebesar 4,51 persen. Komponen pengeluaran yang

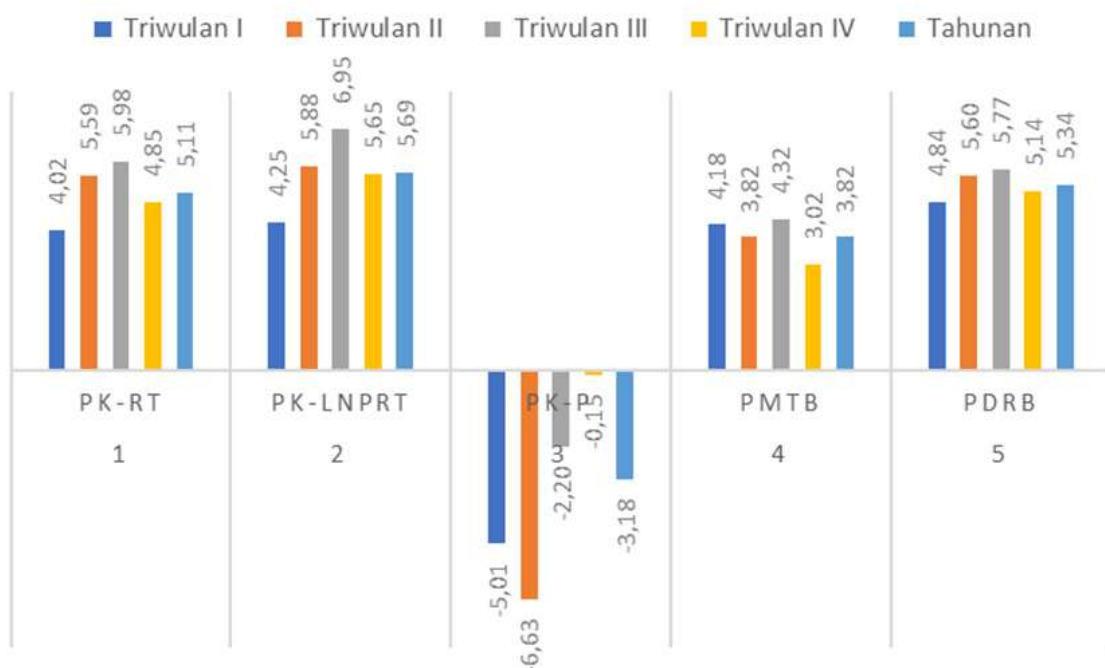
tumbuh signifikan adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,64 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,93 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,87 persen.

Dari sisi output regional, laju pertumbuhan PDRB seluruh provinsi tahun 2022 juga mengalami pertumbuhan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai berturut-turut sebesar 4,84 persen; 5,6 persen; 5,77 persen; dan 5,14 persen sehingga pertumbuhan tahunan naik sebesar 5,34 persen.

GAMBAR 55. PERTUMBUHAN EKONOMI PDB TAHUN 2022 (C-TO-C) MENURUT PENGELUARAN



GAMBAR 54. PERTUMBUHAN EKONOMI PDB TAHUN 2022 (C-TO-C) MENURUT PENGELUARAN



3.II. KONTRIBUSI KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP PDRB (PK-P)

3.II.A. GAMBARAN UMUM

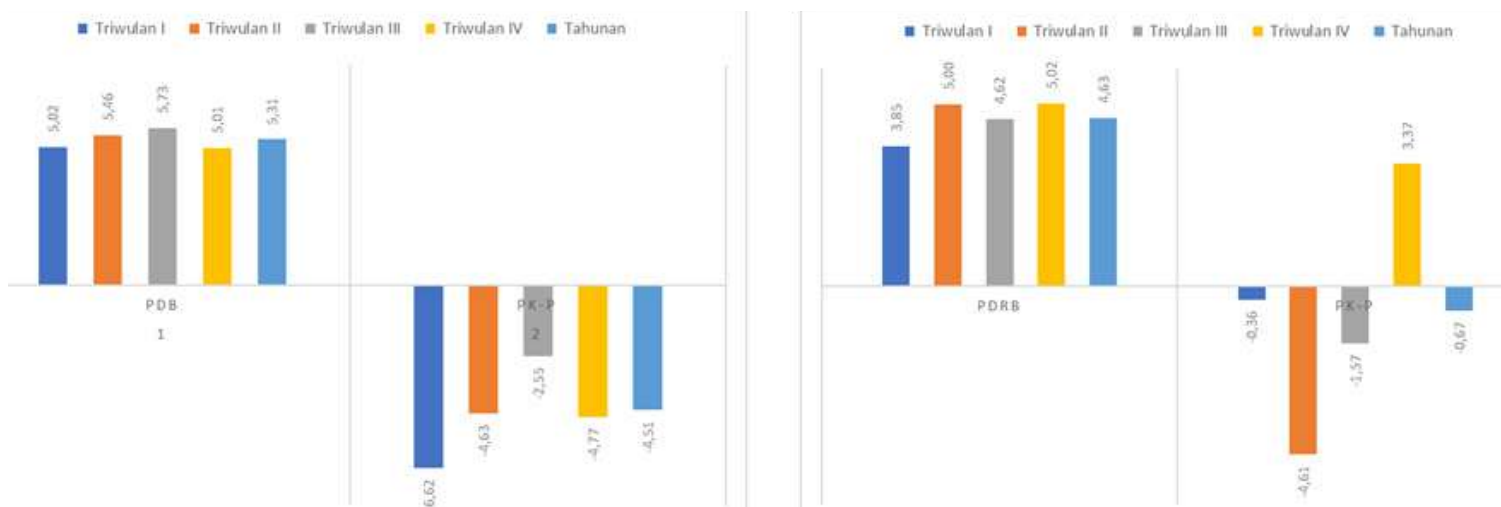
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind-purchased market production). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dicerminkan dari nilai yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa.

3.II.B. REGIONAL SUMATERA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Sumatera mengalami kontraksi penurunan sebesar 1,57 persen (y-on-y) pada triwulan III 2022 dan tumbuh positif sebesar 3,37 persen pada triwulan IV 2022. Namun secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah turun sebesar 0,67 persen. Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya sisi pengeluaran konsumsi pemerintah relatif seimbang dengan adanya belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB rata-rata 7,06 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 7,45 persen pada tahun 2018.

3.II.C. REGIONAL JAWA

GAMBAR 56. PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PDB DAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PK-P NASIONAL DAN REGIONAL SUMATERA



TABEL 20. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) PADA PROVINSI DI REGIONAL SUMATERA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
ACEH	4,25	1,06	4,44	15,14	2,51	3,70	5,60	4,42	4,21	3,59
SUMATERA UTARA	3,95	1,54	4,70	0,21	4,97	7,01	5,26	4,23	4,73	3,34
SUMATERA BARAT	3,64	1,36	5,10	8,57	4,56	3,96	4,15	6,29	4,36	3,13
RIAU	4,70	0,35	4,86	1,40	4,58	3,32	4,10	9,34	4,55	3,08
JAMBI	4,71	3,00	5,37	7,02	5,20	0,17	5,22	8,78	5,13	1,52
SUMATERA SELATAN	5,14	0,32	5,24	5,34	5,32	0,60	5,23	8,50	5,23	1,21
BENGKULU	3,11	0,21	4,82	1,89	4,51	4,98	4,75	9,04	4,31	0,82
LAMPUNG	2,86	2,55	5,23	3,65	3,94	7,94	5,05	5,18	4,28	5,04
KEP, BANGKA BELITUNG	3,28	3,25	5,27	1,07	4,54	2,71	4,44	8,64	4,40	2,41
KEP, RIAU	2,83	1,53	5,01	1,77	6,03	1,29	6,40	0,67	5,09	0,67
Regional Sumatera	3,85	0,36	5,00	4,61	4,62	1,57	5,02	3,37	4,63	0,67

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Jawa menjadi salah satu komponen penyusun PDRB yang mengalami kontraksi penurunan dengan nilai sebesar 0,77 persen (y-on-y) pada triwulan III 2022 dan 0,08 persen pada triwulan IV 2022 sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah turun sebesar 1,69 persen. Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB rata-rata 7,15 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 7,52 persen pada tahun 2021.

3.II.D. REGIONAL KALIMANTAN

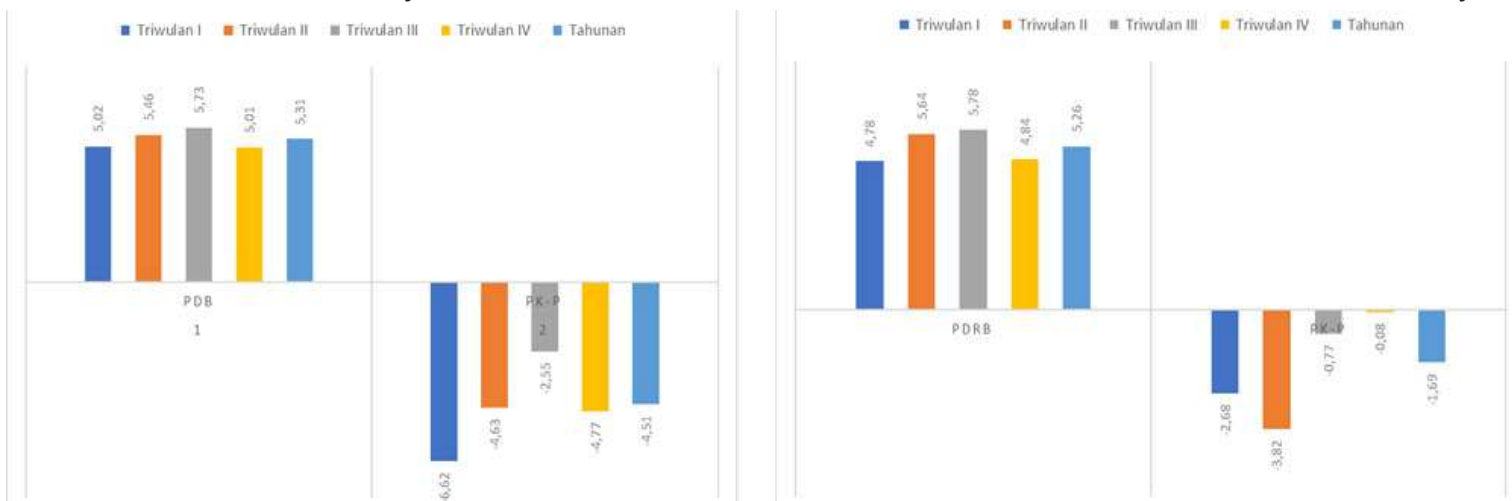
Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

pada Regional Kalimantan mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,48 persen (y-on-y) pada triwulan III 2022 dan 2,12 persen pada triwulan IV 2022 namun secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah turun sebesar 0,85 persen. Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada PDRB rata-rata 6,71 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 6,85 persen pada tahun 2021.

3.II.E. REGIONAL BALI-NUSRA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,59 persen (y-on-y) pada triwulan III 2022 dan 1,41 persen pada

GAMBAR 57. PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PDB DAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PK-P NASIONAL DAN REGIONAL JAWA



TABEL 21. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) PADA DI REGIONAL JAWA

	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
Provinsi	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
DKI JAKARTA	4,61	-15,9	5,61	-9,79	5,93	-9,93	4,85	-4,48	5,25	-9,41
JAWA BARAT	5,57	3,2	5,62	-5,07	6,03	4,39	4,61	-5,55	5,45	-1,72
JAWA TENGAH	5,12	-4,81	5,62	-3,3	5,27	-4,02	5,24	7,62	5,31	0,12
DI YOGYAKARTA	3,22	0,1	5,65	-0,05	6,2	0,8	5,53	1,05	5,15	0,52
JAWA TIMUR	5,24	3,83	5,76	-4,05	5,59	-0,06	4,76	1,4	5,34	0,11
BANTEN	4,9	-2,48	5,6	-0,68	5,63	4,23	4,03	-0,51	5,03	0,22
REGIONAL JAWA	4,78	-2,68	5,64	-3,82	5,78	-0,77	4,84	-0,08	5,26	-1,69

GAMBAR 58. PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PDB DAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PK-P NASIONAL DAN REGIONAL KALIMANTAN



TABEL 22. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) PADA REGIONAL KALIMANTAN

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
KALIMANTAN BARAT	4,15	6,53	4,58	7,84	6,53	4,60	5,01	6,64	5,07	6,39
KALIMANTAN TENGAH	6,78	5,69	6,77	14,95	6,62	6,47	5,70	0,51	6,45	4,57
KALIMANTAN SELATAN	3,51	1,04	5,84	2,72	5,64	3,50	5,32	1,76	5,11	0,56
KALIMANTAN TIMUR	2,40	2,85	3,62	0,48	5,34	13,88	6,47	13,09	4,48	8,48
KALIMANTAN UTARA	4,64	4,56	5,05	3,35	5,44	3,93	6,17	5,41	5,34	1,23
REGIONAL KALIMANTAN	4,30	0,72	5,17	5,87	5,91	0,48	5,73	2,12	5,29	0,85

triwulan IV 2022 namun secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah turun sebesar 0,86 persen. Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada regional Bali-Nusa Tenggara telah memberikan kontribusi pada PDRB rata-rata 14,30 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 14,63 persen pada tahun 2018.

3.II.F. REGIONAL SULAWESI

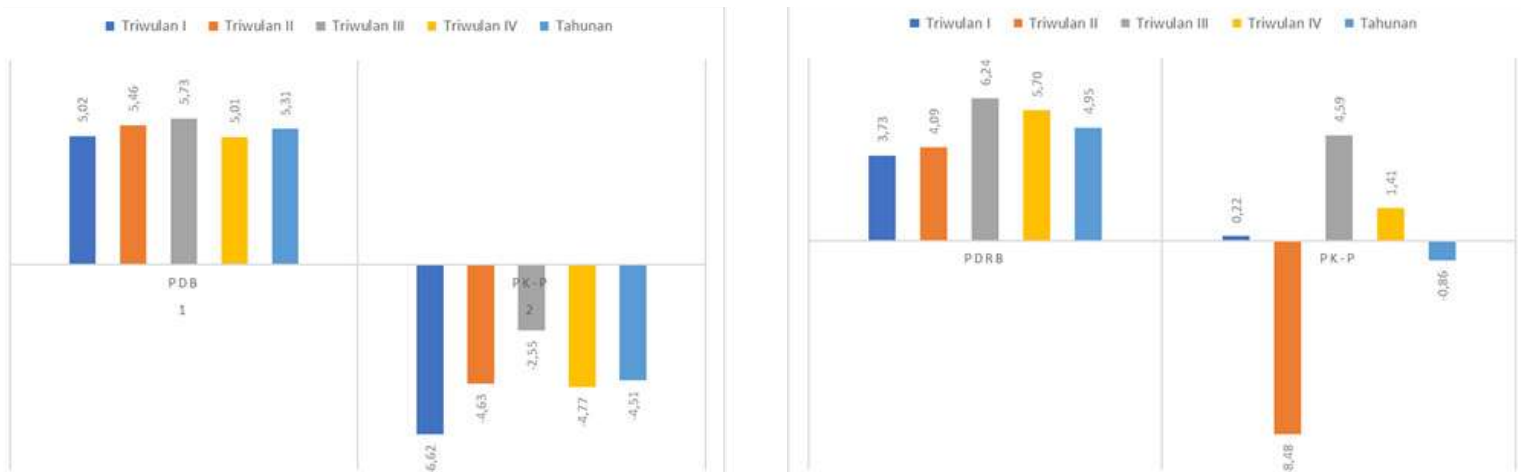
Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Sulawesi mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,50 persen (y-on-y) pada triwulan III 2022 dan 4,49 persen pada triwulan IV 2022 sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah naik sebesar 0,31 persen. Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi

pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB rata-rata 10,77 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 11,50 persen pada tahun 2018.

3.II.G. REGIONAL PAPUA-MALUKU

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Papua-Maluku mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,57 persen (y-on-y) pada triwulan III 2022 dan 1,83 persen pada triwulan IV 2022 sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah naik sebesar 0,69 persen. Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB

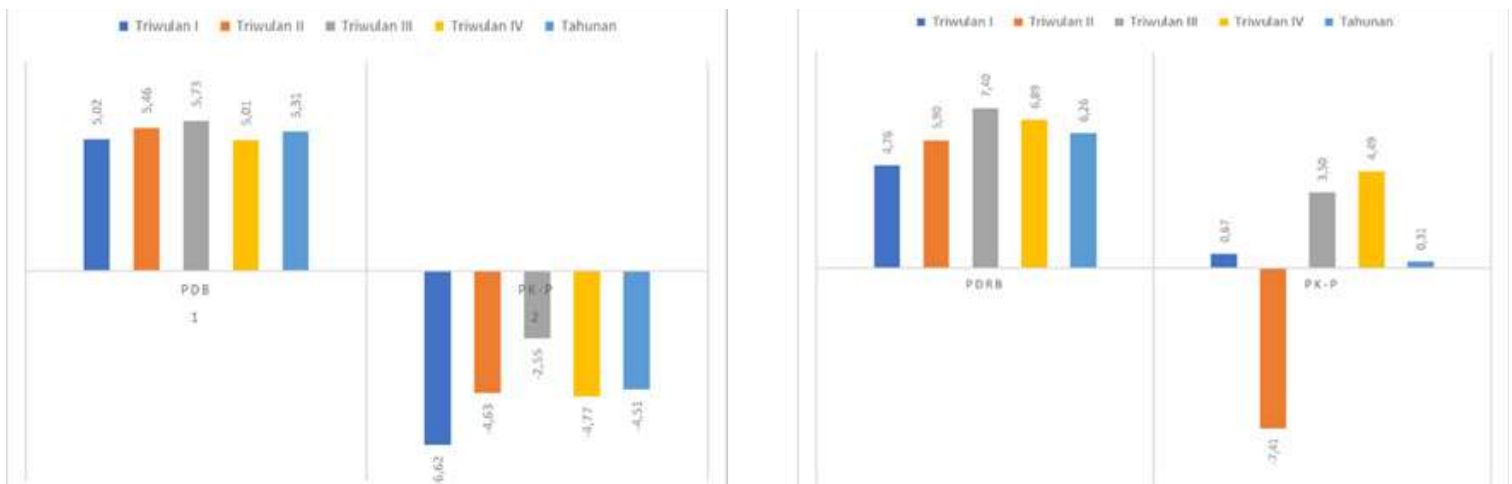
GAMBAR 59. PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PDB DAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PK-P NASIONAL DAN REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA



TABEL 23. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) PADA REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

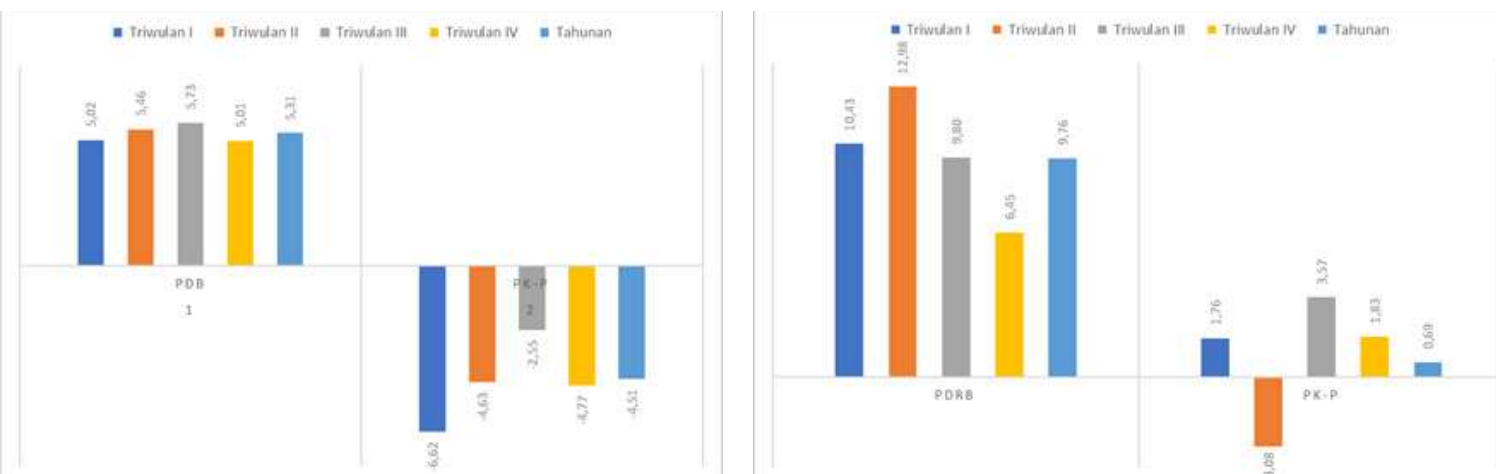
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
BALI	1,48	- 1,27	3,09	- 7,95	8,10	- 1,07	6,61	4,17	4,84	- 1,25
NUSA TENGGARA BARAT	7,73	1,99	5,99	- 2,77	7,10	0,36	7,04	5,21	6,95	1,17
NUSA TENGGARA TIMUR	1,98	- 0,07	3,20	- 14,73	3,51	14,48	3,45	- 5,15	3,05	- 2,50
REGIONAL BALI NUSRA	3,73	0,22	4,09	- 8,48	6,24	4,59	5,70	1,41	4,95	- 0,86

GAMBAR 60. PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PDB DAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PK-P NASIONAL DAN REGIONAL SULAWESI



TABEL 24. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) PADA REGIONAL SULAWESI

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
SULAWESI UTARA	3,89	0,13	5,93	- 2,21	6,62	3,20	5,20	- 0,03	5,42	0,17
SULAWESI TENGAH	11,08	1,43	11,17	- 13,41	19,12	- 4,76	18,96	14,39	15,17	- 0,29
SULAWESI SELATAN	4,29	- 11,01	5,21	- 17,28	5,68	11,23	5,11	2,85	5,09	- 2,77
SULAWESI TENGGARA	5,07	4,65	6,09	- 4,99	5,40	- 0,33	5,57	13,38	5,53	3,08
GORONTALO	3,17	2,93	4,92	- 2,51	4,08	- 0,29	3,98	0,78	4,04	0,13
SULAWESI BARAT	1,04	5,88	2,06	- 4,08	3,52	11,94	2,53	- 4,45	2,30	1,56
REGIONAL SULAWESI	4,76	0,67	5,90	- 7,41	7,40	3,50	6,89	4,49	6,26	0,31

**GAMBAR 61. PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PDB DAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PK-P NASIONAL DAN REGIONAL PAPUA-MALUKU****TABEL 25. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) PADA REGIONAL PAPUA-MALUKU**

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
MALUKU	3,70	4,55	4,83	- 19,98	6,10	12,85	5,73	- 4,75	5,11	- 3,41
MALUKU UTARA	25,50	0,49	26,22	1,36	23,28	- 0,61	17,75	13,45	22,94	4,25
PAPUA BARAT	- 1,01	1,87	6,06	3,09	3,70	- 3,22	- 0,37	2,49	2,01	1,11
PAPUA	13,51	0,12	14,80	3,22	6,13	5,25	2,70	- 3,89	8,97	0,82
REGIONAL PAPUA MALUKU	10,43	1,76	12,98	- 3,08	9,80	3,57	6,45	1,83	9,76	0,69

rata-rata 19,81 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 22,30 persen pada tahun 2019.

3.II.H. KESIMPULAN

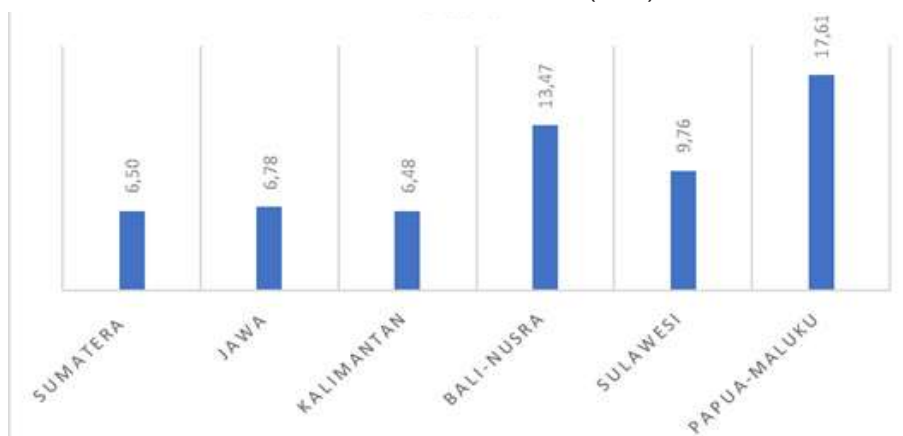
Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2022 di tiap regional berkisar antara 6,48-17,61 persen. Dengan gap sebesar 11,13 persen, Regional Papua-Maluku menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar dan Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

3.III. KONTRIBUSI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

3.III.A. . GAMBARAN UMUM

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Berdasarkan sistem informasi rujukan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS), secara garis besar Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

GAMBAR 62. KONTRIBUSI PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) TIAP REGIONAL TERHADAP PDRB 2022

didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu.

3.III.B. REGIONAL SUMATERA

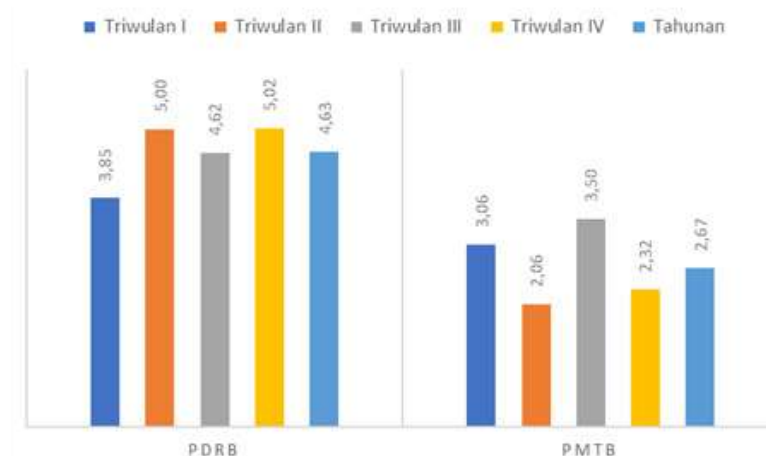
Pada tahun 2022, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,06 persen; 2,06 persen; 3,50 persen; dan 2,32 persen sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 2,67 persen. Provinsi Riau menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran PMTB dengan nilai sebesar 5,87 persen sedangkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi

dengan kontraksi penurunan tertinggi dengan nilai sebesar 2,43 persen. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Sumatera rata-rata sebesar 31,57 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 31,85 persen pada tahun 2019.

3.III.C. REGIONAL JAWA

Pada tahun 2022, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,35 persen; 3,29 persen; 3,55 persen; dan 3,82 persen sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 3,51 persen. Provinsi D.I. Yogyakarta menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 5,86 persen sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 0,29 persen. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Jawa rata-rata sebesar 30,48 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 31,81 persen pada tahun 2018.

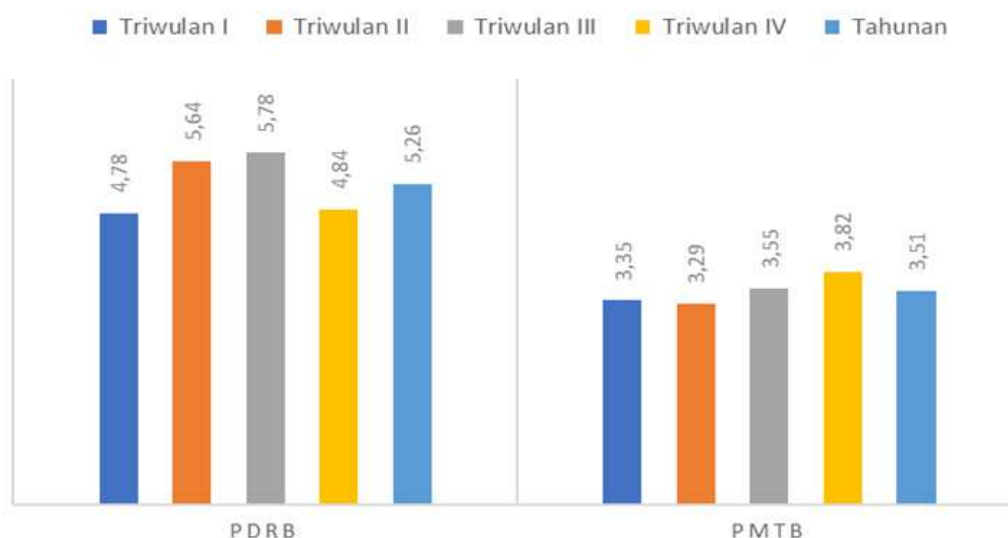
GAMBAR 63. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL SUMATERA



TABEL 26. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL SUMATERA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
ACEH	4,25	- 0,44	4,44	- 0,43	2,51	- 0,90	5,60	- 0,93	4,21	- 0,68
SUMATERA UTARA	3,95	5,95	4,70	2,12	4,97	3,90	5,26	3,36	4,73	3,80
SUMATERA BARAT	3,64	- 0,02	5,10	3,83	4,56	4,10	4,15	6,97	4,36	3,71
RIAU	4,70	9,35	4,86	11,04	4,58	4,90	4,10	- 1,11	4,55	5,87
JAMBI	4,71	6,83	5,37	2,84	5,20	7,24	5,22	- 6,08	5,13	2,38
SUMATERA SELATAN	5,14	- 3,08	5,24	- 8,21	5,32	0,18	5,23	1,71	5,23	- 2,43
BENGKULU	3,11	3,45	4,82	3,32	4,51	4,90	4,75	2,37	4,31	3,49
LAMPUNG	2,86	2,31	5,23	3,36	3,94	1,09	5,05	2,78	4,28	2,38
KEP. BANGKA BELITUNG	3,28	5,11	5,27	0,83	4,54	4,59	4,44	6,71	4,40	4,33
KEP. RIAU	2,83	1,18	5,01	1,89	6,03	4,96	6,40	7,46	5,09	3,89
Regional Sumatera	3,85	3,06	5,00	2,06	4,62	3,50	5,02	2,32	4,63	2,67

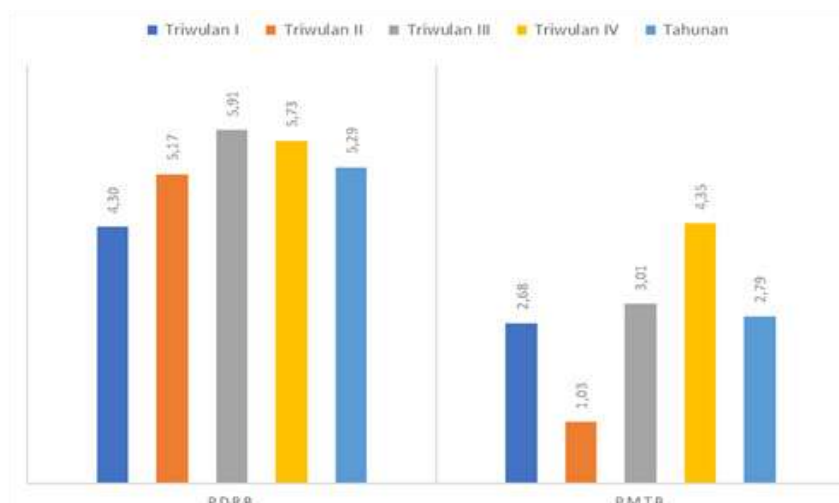
GAMBAR 64. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL JAWA



TABEL 27. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL JAWA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
DKI JAKARTA	4,61	4,85	5,61	5,71	5,93	6,37	4,85	1,23	5,25	4,48
JAWA BARAT	5,57	1,17	5,62	0,51	6,03	0,09	4,61	-0,6	5,45	0,29
JAWA TENGAH	5,12	-0,24	5,62	-0,61	5,27	1,88	5,24	6,39	5,31	1,95
DI YOGYAKARTA	3,22	7,29	5,65	4,52	6,2	4,57	5,53	7,08	5,15	5,86
JAWA TIMUR	5,24	3,88	5,76	7,14	5,59	4,57	4,76	6,1	5,34	5,41
BANTEN	4,9	3,16	5,6	2,47	5,63	3,81	4,03	2,77	5,03	3,05
REGIONAL JAWA	4,78	3,35	5,64	3,29	5,78	3,55	4,84	3,82	5,26	3,51

GAMBAR 65. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL KALIMANTAN



TABEL 28. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL KALIMANTAN

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
KALIMANTAN BARAT	4,15	1,89	4,58	3,50	6,53	3,28	5,01	3,52	5,07	3,06
KALIMANTAN TENGAH	6,78	-0,88	6,77	-4,09	6,62	0,12	5,70	-3,47	6,45	-2,09
KALIMANTAN SELATAN	3,51	5,54	5,84	4,08	5,64	3,84	5,32	7,07	5,11	5,16
KALIMANTAN TIMUR	2,40	5,12	3,62	2,43	5,34	5,81	6,47	8,32	4,48	5,47
KALIMANTAN UTARA	4,64	1,73	5,05	-0,78	5,44	1,98	6,17	6,32	5,34	2,37
REGIONAL KALIMANTAN	4,30	2,68	5,17	1,03	5,91	3,01	5,73	4,35	5,29	2,79

3.III.D. REGIONAL KALIMANTAN

Pada tahun 2022, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 2,68 persen; 1,03 persen; 3,01 persen; dan 4,35 persen sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 2,79 persen. Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 5,47 persen sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami kontraksi tahunan dengan nilai sebesar 2,09 persen. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Kalimantan rata-rata sebesar 28,23 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 28,61 persen pada tahun 2021.

3.III.E. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

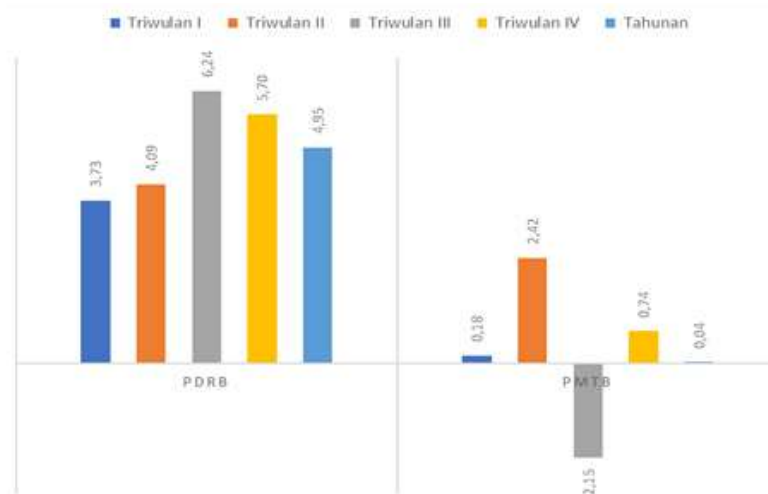
Pada tahun 2022, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami tren positif pada triwulan I, II, dan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 0,18 persen; 2,42 persen; dan 0,74 persen dan sempat mengalami kontraksi pada triwulan III sebesar 2,15 namun nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan

pada Regional Bali-Nusa Tenggara tumbuh sebesar 0,04 persen. Provinsi Bali menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 2,62 persen sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang mengalami kontraksi tahunan tertinggi dengan nilai sebesar 1,97 persen. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Bali-Nusa Tenggara rata-rata sebesar 35,25 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 36,45 persen pada tahun 2019.

3.III.F. REGIONAL SULAWESI

Pada tahun 2022, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sulawesi mengalami tren positif pada triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 10,94 persen; 3,95 persen; 6,65 persen; dan 1,55 persen sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 5,3 persen. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 23,22 persen sedangkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami kontraksi tahunan dengan nilai sebesar 0,12 persen. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional

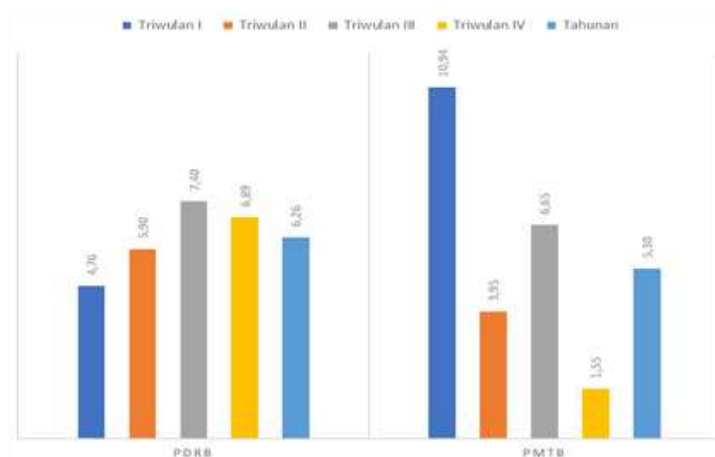
GAMBAR 66. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA



TABEL 29. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
BALI	1,48	- 6,75	3,09	2,69	8,10	6,38	6,61	8,61	4,84	2,62
NUSA TENGGARA BARAT	7,73	2,33	5,99	- 0,35	7,10	- 2,73	7,04	- 6,33	6,95	- 1,97
NUSA TENGGARA TIMUR	1,98	4,97	3,20	4,92	3,51	- 10,11	3,45	- 0,05	3,05	- 0,52
REGIONAL BALI NUSRA	3,73	0,18	4,09	2,42	6,24	- 2,15	5,70	0,74	4,95	0,04

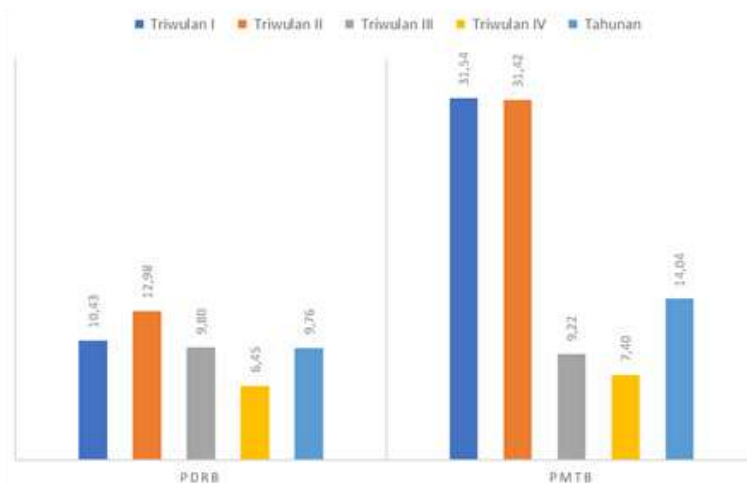
GAMBAR 67. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL SULAWESI



TABEL 30. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL SULAWESI

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
SULAWESI UTARA	3,89	- 0,28	5,93	1,15	6,62	5,06	5,20	5,28	5,42	2,94
SULAWESI TENGAH	11,08	51,70	11,17	20,27	19,12	24,19	18,96	6,61	15,17	23,22
SULAWESI SELATAN	4,29	1,56	5,21	1,22	5,68	11,36	5,11	- 0,65	5,09	3,31
SULAWESI TENGGARA	5,07	5,35	6,09	1,09	5,40	- 2,38	5,57	- 0,63	5,53	0,64
GORONTALO	3,17	3,77	4,92	3,44	4,08	3,12	3,98	- 2,35	4,04	1,83
SULAWESI BARAT	1,04	3,54	2,06	- 3,49	3,52	- 1,43	2,53	1,02	2,30	- 0,12
REGIONAL SULAWESI	4,76	10,94	5,90	3,95	7,40	6,65	6,89	1,55	6,26	5,30

GAMBAR 68. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL PAPUA-MALUKU



TABEL 31. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) PADA REGIONAL PAPUA-MALUKU

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
MALUKU	3,70	- 2,46	4,83	3,54	6,10	- 1,40	5,73	4,21	5,11	1,02
MALUKU UTARA	25,50	131,63	26,22	120,56	23,28	49,51	17,75	33,50	22,94	61,37
PAPUA BARAT	- 1,01	- 13,40	6,06	- 3,54	3,70	- 3,60	- 0,37	- 11,91	2,01	- 8,61
PAPUA	13,51	10,40	14,80	5,10	6,13	- 7,65	2,70	3,81	8,97	2,36
REGIONAL PAPUA MALUKU	10,43	31,54	12,98	31,42	9,80	9,22	6,45	7,40	9,76	14,04

Sulawesi rata-rata sebesar 38,33 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 39,78 persen pada tahun 2022.

3.III.G. REGIONAL PAPUA-MALUKU

Pada tahun 2022, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Papua-Maluku mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 31,54 persen; 31,42 persen; 9,22 persen; dan 7,4 persen sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Papua-Maluku tumbuh sebesar 14,04 persen. Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 61,37 persen sedangkan Provinsi Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami kontraksi tahunan dengan nilai sebesar 8,61 persen. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Papua-Maluku rata-rata sebesar 30,21 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 32,1 persen pada tahun 2022.

3.III.H. KESIMPULAN

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2022 di tiap regional berkisar antara 28,27-39,78 persen. Dengan gap sebesar 11,51 persen, Regional Sulawesi menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar dan Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

3.IV. KONTRIBUSI KONSUMSI PENGELUARAN LEMBAGA NON PROFIT PEMERINTAH (PK-LNPRT) TERHADAP PDRB

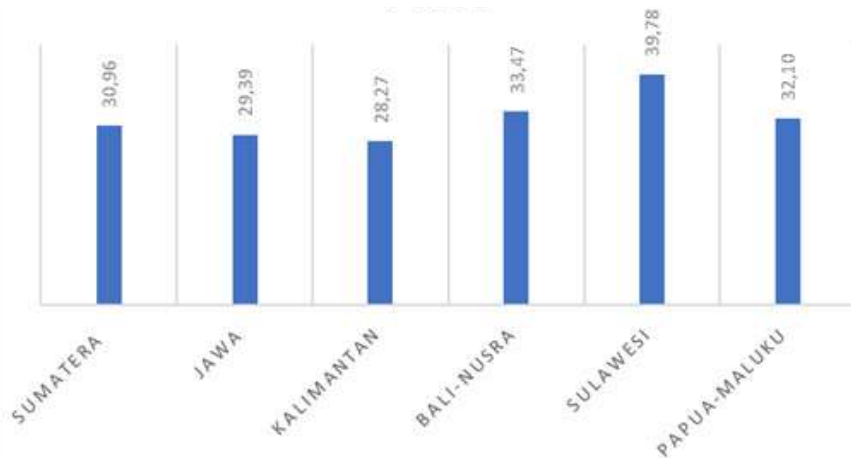
3.IV.A. GAMBARAN UMUM

Lembaga non-profit (LNP) atau yang dikenal sebagai 'lembaga non-pemerintah memiliki peran penting di Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. LNP bergerak di bidang jasa sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kegiatan LNP memberdayakan masyarakat ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Perkumpulan Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1912), dan Organisasi Taman Siswa (1926) adalah LNP yang berpartisipasi meningkatkan sumber daya manusia Indonesia saat itu.

UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. LNP merupakan lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan, masyarakat, pemerintah, atau kalangan usaha dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota atau masyarakat tanpa ada motivasi meraih keuntungan. Salah satu jenis LNP adalah lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yaitu LNP yang tidak dikendalikan pemerintah, dibentuk dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga tidak signifikan secara ekonomi pada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat.

Menurut System of National Accounts (SNA) 2008, aktivitas LNPRT dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi. Aktivitas tersebut mencakup produksi, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa LNPRT merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian nasional disamping pelaku ekonomi lain yang telah dikenal seperti rumah

GAMBAR 69. KONTRIBUSI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) TIAP REGIONAL TERHADAP PDRB 2022



tangga, pemerintah, dan korporasi.

3.IV.B. REGIONAL SUMATERA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,05 persen; 4,7 persen; 6,38 persen; dan 3,45 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 4,37 persen. Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 8,94 persen sedangkan Provinsi Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami kontraksi tahunan dengan nilai sebesar 0,53 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Sumatera rata-rata sebesar 1,03 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 1,08 persen pada tahun 2019.

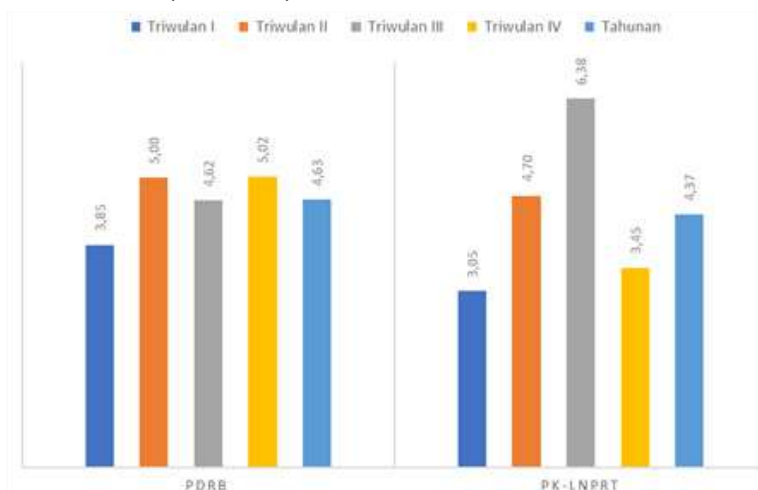
3.IV.C. REGIONAL JAWA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,02 persen; 4,88 persen; 6,69 persen; dan 4,85 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 4,85 persen. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 7,25 persen sedangkan Provinsi Banten menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 2 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Jawa rata-rata sebesar 1,23 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 1,26 persen pada tahun 2019.

3.IV.D. REGIONAL KALIMANTAN

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 1,9 persen; 3,51 persen; 4,67 persen; dan

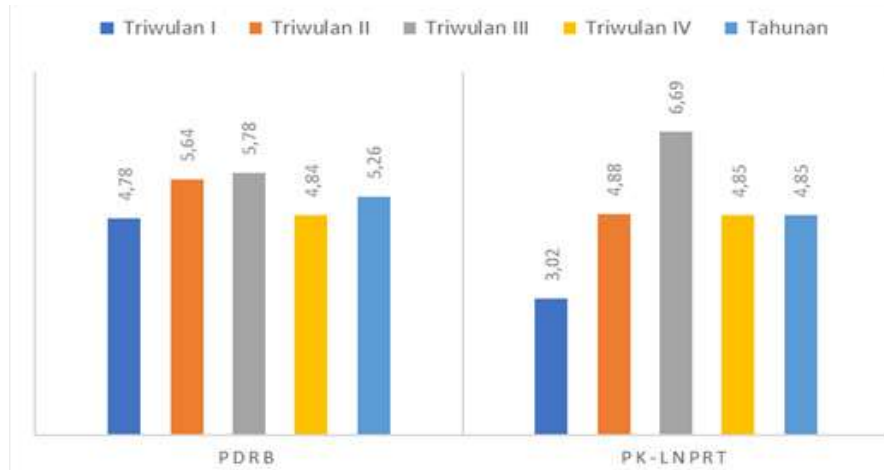
GAMBAR 70. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL SUMATERA



TABEL 32. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL SUMATERA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT
ACEH	4,25	4,24	4,44	5,25	2,51	5,07	5,60	5,94	4,21	5,13
SUMATERA UTARA	3,95	3,71	4,70	5,93	4,97	4,77	5,26	7,43	4,73	5,47
SUMATERA BARAT	3,64	3,62	5,10	2,47	4,56	4,91	4,15	0,88	4,36	0,53
RIAU	4,70	3,64	4,86	5,79	4,58	6,11	4,10	3,03	4,55	4,61
JAMBI	4,71	6,47	5,37	7,10	5,20	8,04	5,22	2,76	5,13	6,05
SUMATERA SELATAN	5,14	1,53	5,24	3,30	5,32	7,20	5,23	9,61	5,23	5,42
BENGKULU	3,11	6,31	4,82	8,18	4,51	12,48	4,75	8,78	4,31	8,94
LAMPUNG	2,86	1,23	5,23	5,04	3,94	3,66	5,05	4,36	4,28	1,22
KEP. BANGKA BELITUNG	3,28	3,90	5,27	4,63	4,54	5,62	4,44	4,31	4,40	4,62
KEP. RIAU	2,83	3,09	5,01	4,20	6,03	5,93	6,40	2,11	5,09	2,75
Regional Sumatera	3,85	3,05	5,00	4,70	4,62	6,38	5,02	3,45	4,63	4,37

GAMBAR 71. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL JAWA



TABEL 33. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL JAWA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT
DKI JAKARTA	4,61	5,99	5,61	6,03	5,93	6,68	4,85	6,28	5,25	6,25
JAWA BARAT	5,57	0,95	5,62	1,32	6,03	5,03	4,61	5,33	5,45	3,13
JAWA TENGAH	5,12	3,01	5,62	5,17	5,27	5,98	5,24	5,39	5,31	4,89
DI YOGYAKARTA	3,22	2,29	5,65	7,28	6,2	8,8	5,53	4,16	5,15	5,58
JAWA TIMUR	5,24	4,11	5,76	8,19	5,59	8,82	4,76	7,8	5,34	7,25
BANTEN	4,9	1,74	5,6	1,28	5,63	4,85	4,03	0,16	5,03	2
REGIONAL JAWA	4,78	3,02	5,64	4,88	5,78	6,69	4,84	4,85	5,26	4,85

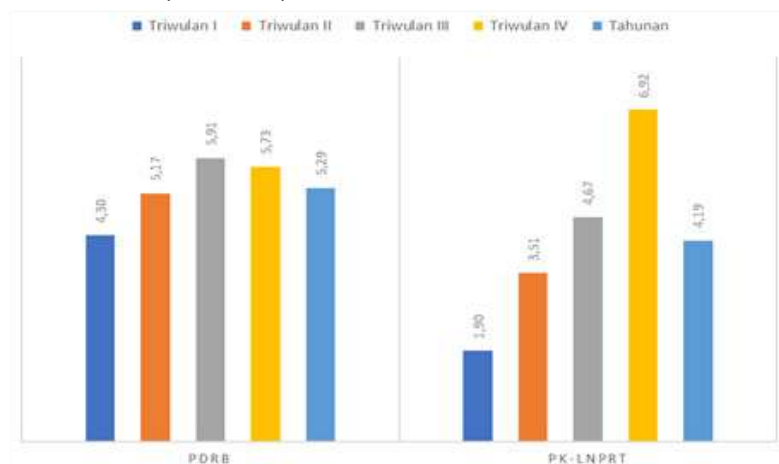
6,92 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 4,19 persen. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,02 persen sedangkan Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 3,03 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Jawa rata-rata sebesar 0,74 persen dalam lima tahun

terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 0,76 persen pada tahun 2020.

3.IV.E. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Bali Nusa Tenggara mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 7,11 persen; 7,89 persen; 9,30 persen; dan 5,19 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga

GAMBAR 72. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL KALIMANTAN



TABEL 34. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL KALIMANTAN

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT
KALIMANTAN BARAT	4,15	1,82	4,58	0,31	6,53	0,46	5,01	19,11	5,07	4,26
KALIMANTAN TENGAH	6,78	4,54	6,77	5,43	6,62	4,81	5,70	1,04	6,45	3,92
KALIMANTAN SELATAN	3,51	0,64	5,84	4,56	5,64	6,91	5,32	7,95	5,11	5,02
KALIMANTAN TIMUR	2,40	3,10	3,62	2,99	5,34	4,40	6,47	1,68	4,48	3,03
KALIMANTAN UTARA	4,64	3,03	5,05	4,26	5,44	6,78	6,17	4,82	5,34	4,72
REGIONAL KALIMANTAN	4,30	1,90	5,17	3,51	5,91	4,67	5,73	6,92	5,29	4,19

secara tahunan pada Regional Bali-Nusa Tenggara tumbuh sebesar 7,34 persen. Provinsi Bali menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 11,06 persen sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 5,10 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Bali-Nusa Tenggara rata-rata sebesar 1,93 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 2,01 persen pada tahun 2022.

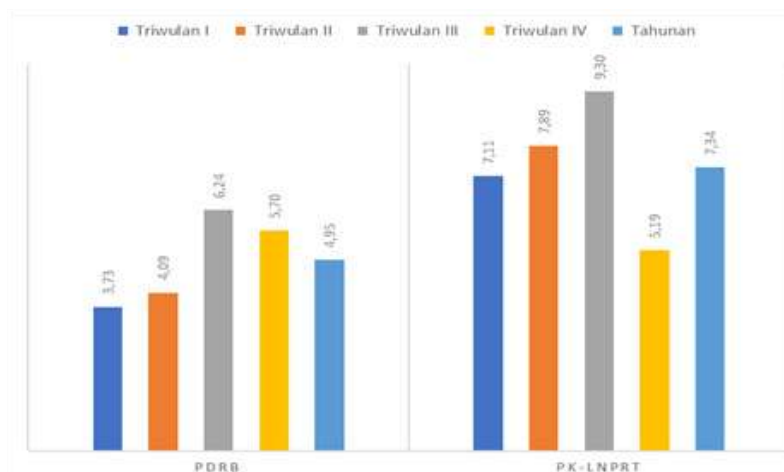
3.IV.F. REGIONAL SULAWESI

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Sulawesi mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan

triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,41 persen; 9,14 persen; 10,43 persen; dan 4,55 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 7,04 persen. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 11,13 persen sedangkan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 4,45 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Sulawesi rata-rata sebesar 1,37 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 1,45 persen pada tahun 2019.

3.IV.G. REGIONAL PAPUA-MALUKU

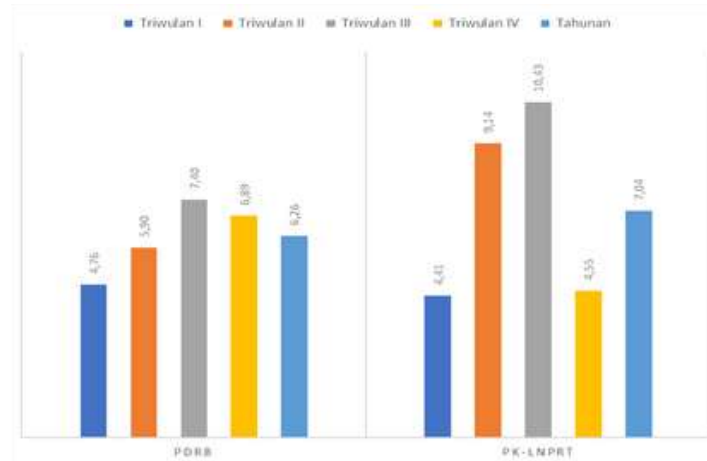
GAMBAR 73. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA



TABEL 35. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT
BALI	1,48	5,59	3,09	13,82	8,10	14,81	6,61	10,04	4,84	11,06
NUSA TENGGARA BARAT	7,73	9,16	5,99	5,86	7,10	6,41	7,04	2,27	6,95	5,86
NUSA TENGGARA TIMUR	1,98	6,59	3,20	3,98	3,51	6,69	3,45	3,26	3,05	5,10
REGIONAL BALI NUSRA	3,73	7,11	4,09	7,89	6,24	9,30	5,70	5,19	4,95	7,34

GAMBAR 74. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL SULAWESI



TABEL 36. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL SULAWESI

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT
SULAWESI UTARA	3,89	8,74	5,93	8,74	6,62	9,82	5,20	1,40	5,42	6,94
SULAWESI TENGAH	11,08	3,73	11,17	13,94	19,12	8,64	18,96	4,36	15,17	7,60
SULAWESI SELATAN	4,29	6,41	5,21	10,56	5,68	18,28	5,11	9,33	5,09	11,13
SULAWESI TENGGARA	5,07	6,65	6,09	6,97	5,40	4,41	5,57	4,52	5,53	5,61
GORONTALO	3,17	4,74	4,92	4,85	4,08	6,08	3,98	2,24	4,04	4,45
SULAWESI BARAT	1,04	3,82	2,06	9,79	3,52	15,32	2,53	5,47	2,30	6,50
REGIONAL SULAWESI	4,76	4,41	5,90	9,14	7,40	10,43	6,89	4,55	6,26	7,04

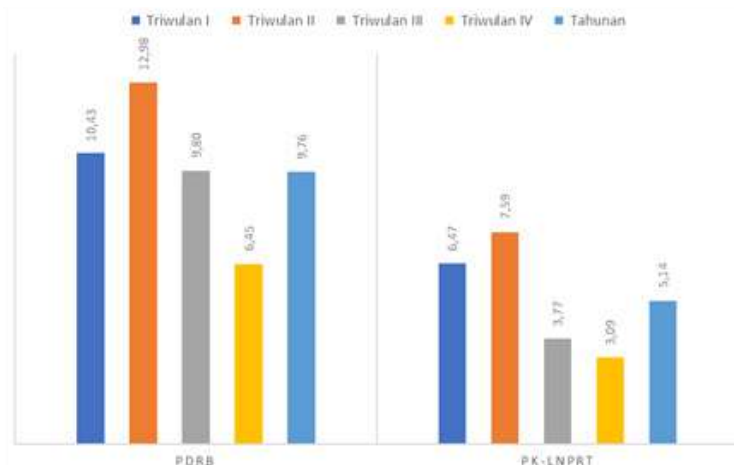
Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Papua-Maluku mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 6,47 persen; 7,59 persen; 3,77 persen; dan 3,09 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 5,14 persen. Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 7,70 persen sedangkan Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 3,32

persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Papua-Maluku rata-rata sebesar 1,66 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 1,87 persen pada tahun 2019.

3.IV.H. KESIMPULAN

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) terhadap PDRB tahun 2022 di tiap regional berkisar antara 0,73-2,01 persen. Dengan gap sebesar 1,28 persen, Regional Bali-Nusa Tenggara menjadi kawasan yang memiliki

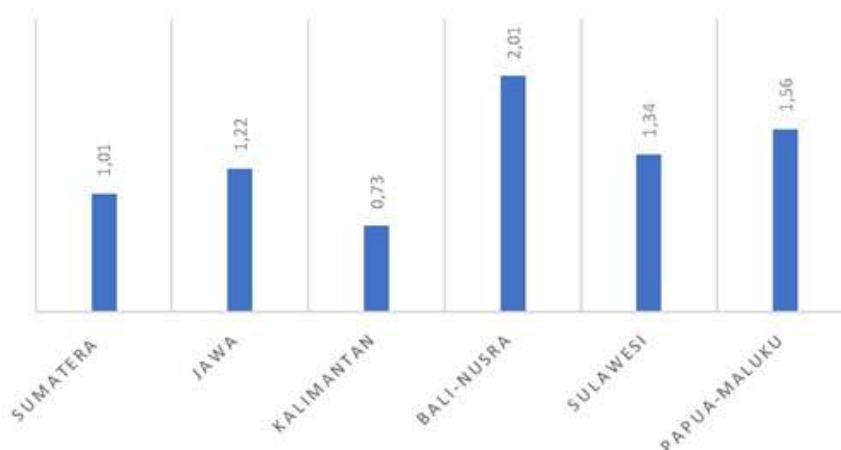
GAMBAR 75. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL PAPUA-MALUKU



TABEL 37. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) PADA REGIONAL PAPUA-MALUKU

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT	PDRB	PK-LNPRT
MALUKU	3,70	6,14	4,83	6,67	6,10	9,06	5,73	8,87	5,11	7,70
MALUKU UTARA	25,50	6,03	26,22	9,87	23,28	4,31	17,75	0,23	22,94	4,93
PAPUA BARAT	- 1,01	4,63	6,06	6,34	3,70	0,49	- 0,37	2,04	2,01	3,32
PAPUA	13,51	9,09	14,80	7,49	6,13	1,23	2,70	1,23	8,97	4,59
REGIONAL PAPUA MALUKU	10,43	6,47	12,98	7,59	9,80	3,77	6,45	3,09	9,76	5,14

GAMBAR 76. KONTRIBUSI PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) TIAP REGIONAL TERHADAP PDRB 2022



kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar dan Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

3.V. KONTRIBUSI PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) TERHADAP PDRB

3.V.A. GAMBARAN UMUM

Menurut Badan Pusat Statistik Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal, mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya, serta mengonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir.

Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencakup:

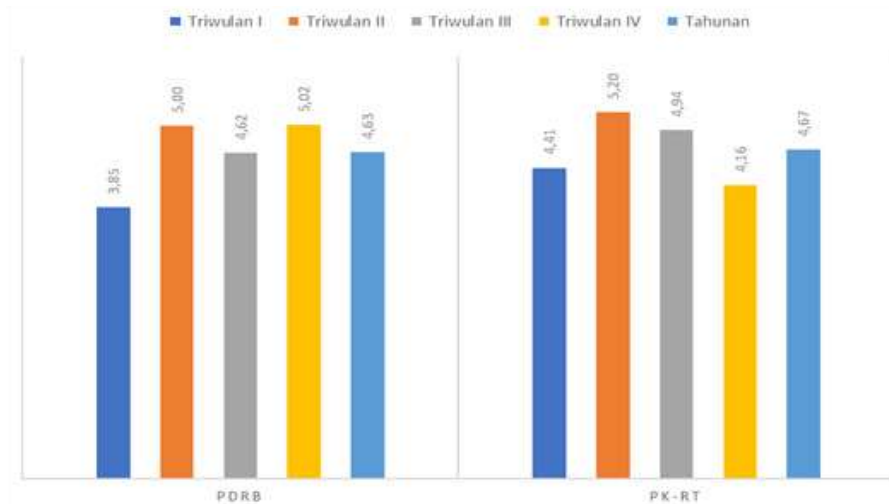
- Nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter;

- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga. Dalam keadaan ini rumah tangga berperan selaku konsumen akhir dari bermacam-macam jenis barang dan jasa yang sudah ada di dalam perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2020). Konsumsi rumah tangga butuh mendapatkan perhatian secara lebih mendalam karena beberapa alasan. Alasan pertama, pendapatan nasional menerima sumbangan yang amat besar dari konsumsi rumah tangga. Di sebagian besar negara, pengeluaran konsumsi mencakup sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan kedua, konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang sangat fundamental dalam menentukan perubahan kegiatan ekonomi dari suatu masa ke masa yang lain (Sukirno, 2016).

3.V.B. REGIONAL SUMATERA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar

GAMBAR 77. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL SUMATERA**TABEL 38. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL SUMATERA**

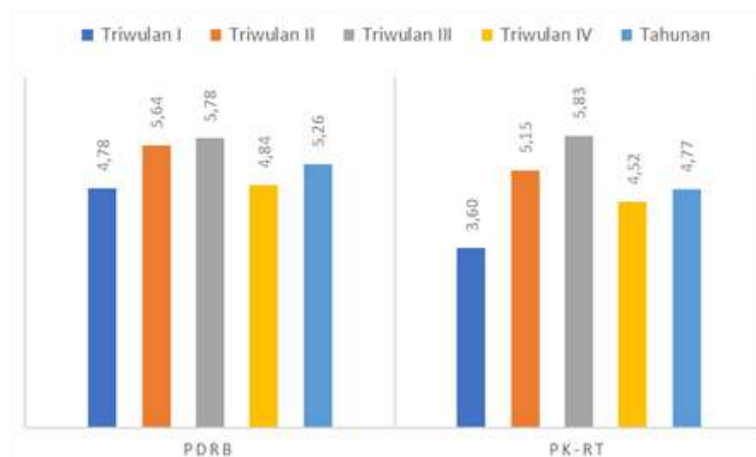
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT
ACEH	4,25	6,44	4,44	4,27	2,51	2,01	5,60	- 0,60	4,21	2,96
SUMATERA UTARA	3,95	3,58	4,70	4,64	4,97	4,63	5,26	5,33	4,73	4,55
SUMATERA BARAT	3,64	3,01	5,10	5,05	4,56	4,41	4,15	4,01	4,36	4,12
RIAU	4,70	5,01	4,86	5,15	4,58	4,44	4,10	4,27	4,55	4,71
JAMBI	4,71	5,03	5,37	6,11	5,20	3,80	5,22	2,99	5,13	4,46
SUMATERA SELATAN	5,14	6,19	5,24	6,79	5,32	5,95	5,23	5,07	5,23	5,99
BENGKULU	3,11	3,81	4,82	5,96	4,51	6,26	4,75	5,80	4,31	5,47
LAMPUNG	2,86	4,03	5,23	5,42	3,94	4,80	5,05	4,67	4,28	4,74
KEP. BANGKA BELITUNG	3,28	5,85	5,27	4,94	4,54	5,70	4,44	3,62	4,40	5,02
KEP. RIAU	2,83	1,15	5,01	3,66	6,03	7,44	6,40	6,43	5,09	4,65
Regional Sumatera	3,85	4,41	5,00	5,20	4,62	4,94	5,02	4,16	4,63	4,67

4,41 persen; 5,2 persen; 4,94 persen; dan 4,16 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 4,67 persen. Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,99 persen sedangkan Provinsi Aceh menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 2,96 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Sumatera rata-rata sebesar 48,7 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar

49,26 persen pada tahun 2018.

3.V.C. REGIONAL JAWA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,6 persen; 5,15 persen; 5,83 persen; dan 4,52 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 4,77 persen. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan

GAMBAR 78. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL JAWA

TABEL 39. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL JAWA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT
DKI JAKARTA	4,61	4,09	5,61	5,12	5,93	7,62	4,85	5,74	5,25	5,64
JAWA BARAT	5,57	3,05	5,62	5,89	6,03	5,03	4,61	4,73	5,45	4,67
JAWA TENGAH	5,12	4,3	5,62	6,14	5,27	5,94	5,24	5,67	5,31	5,52
DI YOGYAKARTA	3,22	1,9	5,65	2,2	6,2	3,12	5,53	3,33	5,15	2,64
JAWA TIMUR	5,24	5,31	5,76	6,69	5,59	7,16	4,76	5	5,34	6,03
BANTEN	4,9	2,92	5,6	4,84	5,63	6,09	4,03	2,64	5,03	4,11
REGIONAL JAWA	4,78	3,60	5,64	5,15	5,78	5,83	4,84	4,52	5,26	4,77

laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 6,03 persen sedangkan Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 2,64 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Jawa rata-rata sebesar 59,13 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 59,51 persen pada tahun 2020.

menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,37 persen sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 1,55 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Kalimantan rata-rata sebesar 27,69 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 28,14 persen pada tahun 2020.

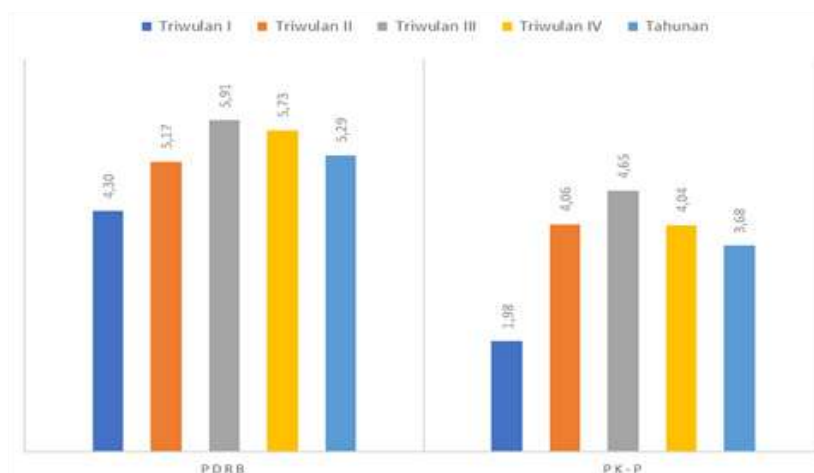
3.V.D. REGIONAL KALIMANTAN

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 1,98 persen; 4,06 persen; 4,65 persen; dan 4,04 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 3,68 persen. Provinsi Kalimantan Selatan

3.V.E. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 2,49 persen; 3,87 persen; 4,37 persen; dan 3,63 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Bali-Nusa Tenggara tumbuh sebesar 3,59 persen. Provinsi Bali

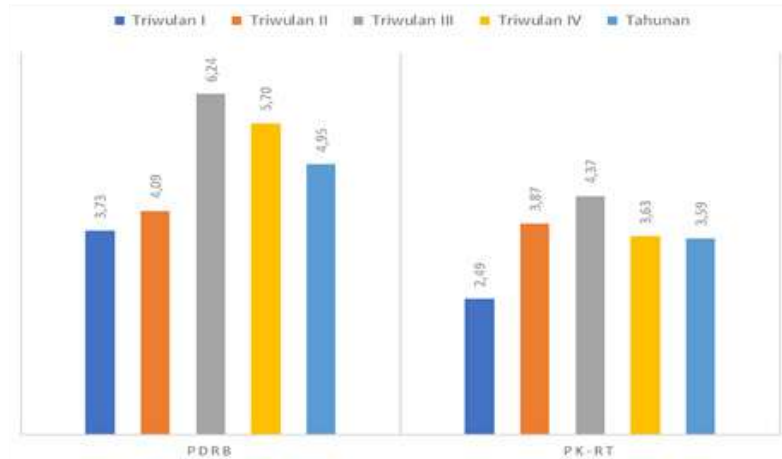
GAMBAR 79. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL KALIMANTAN



TABEL 40. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL KALIMANTAN

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT
KALIMANTAN BARAT	4,15	2,38	4,58	4,82	6,53	4,35	5,01	2,93	5,07	3,61
KALIMANTAN TENGAH	6,78	0,92	6,77	2,03	6,62	2,04	5,70	1,22	6,45	1,55
KALIMANTAN SELATAN	3,51	1,60	5,84	6,76	5,64	6,74	5,32	6,36	5,11	5,37
KALIMANTAN TIMUR	2,40	1,41	3,62	2,23	5,34	5,02	6,47	4,99	4,48	3,41
KALIMANTAN UTARA	4,64	3,57	5,05	4,45	5,44	5,10	6,17	4,70	5,34	4,46
REGIONAL KALIMANTAN	4,30	1,98	5,17	4,06	5,91	4,65	5,73	4,04	5,29	3,68

GAMBAR 80. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA



TABEL 41. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT
BALI	1,48	2,53	3,09	4,09	8,10	4,76	6,61	4,74	4,84	4,04
NUSA TENGGARA BARAT	7,73	4,13	5,99	3,17	7,10	4,40	7,04	4,21	6,95	3,98
NUSA TENGGARA TIMUR	1,98	0,80	3,20	4,35	3,51	3,95	3,45	1,94	3,05	2,76
REGIONAL BALI NUSRA	3,73	2,49	4,09	3,87	6,24	4,37	5,70	3,63	4,95	3,59

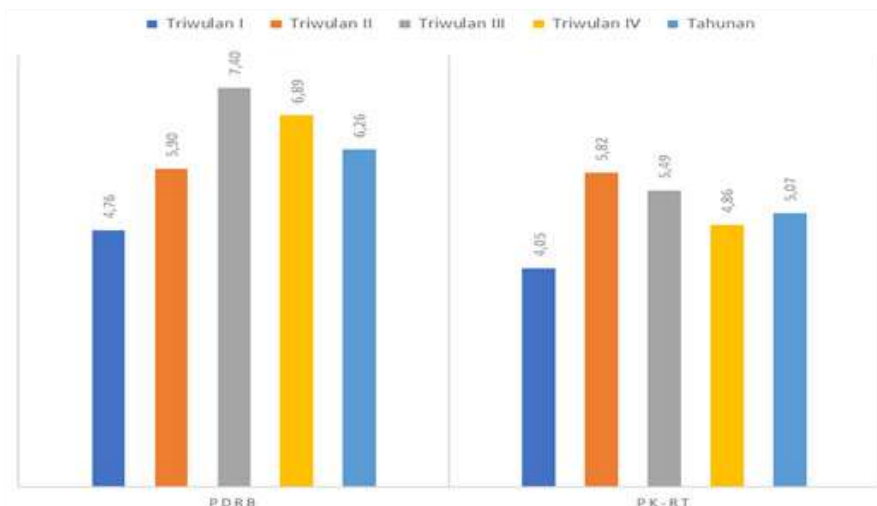
menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 4,04 persen sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 2,76 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Bali-Nusa Tenggara rata-rata sebesar 61,14 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 62,19 persen pada tahun 2021.

3.V.F. REGIONAL SULAWESI

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga pada Regional Sulawesi mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,05 persen; 5,82 persen; 5,49 persen; dan 4,86 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 5,07 persen. Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 6,93 persen sedangkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 3,6 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Sulawesi rata-rata sebesar 47,52 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar

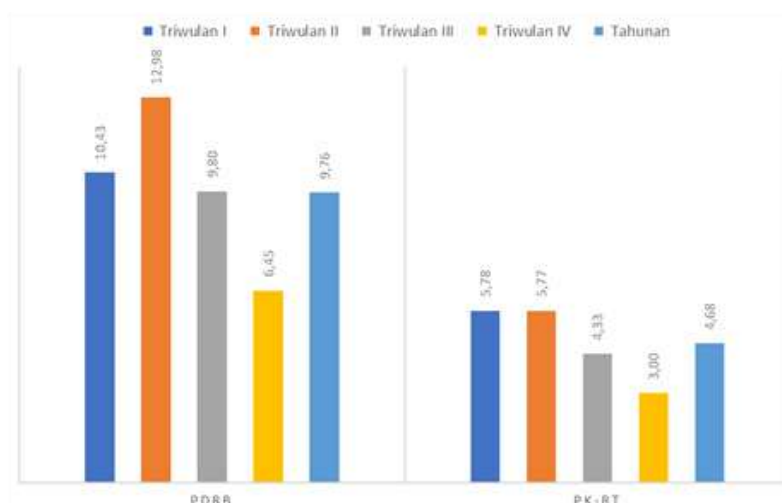
GAMBAR 81. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL SULAWESI



TABEL 42. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL SULAWESI

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT
SULAWESI UTARA	3,89	5,87	5,93	7,42	6,62	6,64	5,20	7,66	5,42	6,93
SULAWESI TENGAH	11,08	4,73	11,17	6,04	19,12	5,07	18,96	5,15	15,17	5,25
SULAWESI SELATAN	4,29	4,24	5,21	6,83	5,68	7,41	5,11	5,61	5,09	6,04
SULAWESI TENGGARA	5,07	3,14	6,09	5,66	5,40	5,17	5,57	4,24	5,53	4,56
GORONTALO	3,17	2,89	4,92	5,03	4,08	5,18	3,98	3,01	4,04	4,02
SULAWESI BARAT	1,04	3,45	2,06	3,95	3,52	3,48	2,53	3,51	2,30	3,60
REGIONAL SULAWESI	4,76	4,05	5,90	5,82	7,40	5,49	6,89	4,86	6,26	5,07

GAMBAR 82. LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL PAPUA MALUKU



TABEL 43. LAJU PERTUMBUHAN BERDASARKAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (PK-RT) PADA REGIONAL PAPUA MALUKU

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT	PDRB	PK-RT
MALUKU	3,70	4,13	4,83	5,68	6,10	6,31	5,73	4,04	5,11	5,03
MALUKU UTARA	25,50	7,48	26,22	6,78	23,28	2,59	17,75	1,51	22,94	4,48
PAPUA BARAT	- 1,01	5,85	6,06	4,37	3,70	2,45	- 0,37	2,03	2,01	3,64
PAPUA	13,51	5,67	14,80	6,26	6,13	5,95	2,70	4,43	8,97	5,56
REGIONAL PAPUA MALUKU	10,43	5,78	12,98	5,77	9,80	4,33	6,45	3,00	9,76	4,68

49,08 persen pada tahun 2018.

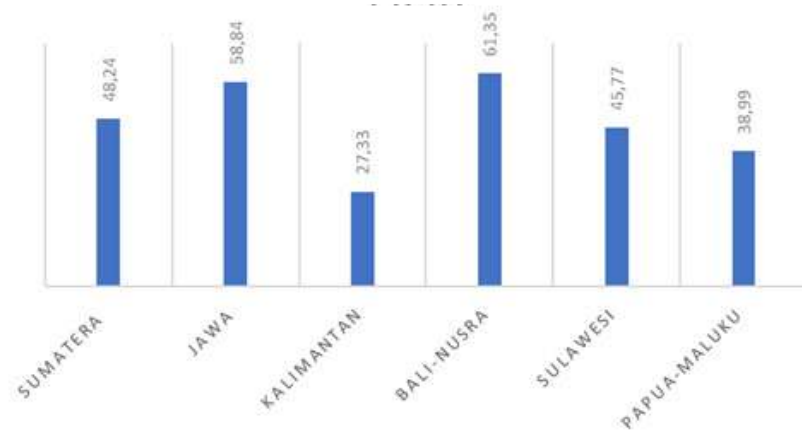
3.V.G. REGIONAL PAPUA-MALUKU

Pada tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Papua-Maluku mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,78 persen; 5,77 persen; 4,33 persen; dan 3 persen sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Papua-Maluku tumbuh sebesar 4,68 persen. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,56 persen sedangkan Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang mengalami laju pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar 3,64 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga terhadap PDRB tahun 2022 pada Regional Papua-Maluku rata-rata sebesar 41,98 persen dalam lima tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi sebesar 45,99 persen pada tahun 2019.

3.V.H. KESIMPULAN

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) terhadap PDRB tahun 2022 di tiap regional berkisar antara 27,33-61,35 persen. Dengan gap sebesar 34,02 persen, Regional Bali-Nusa Tenggara menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar dan Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

GAMBAR 83. KONTRIBUSI PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA TIAP REGIONAL TERHADAP PDRB 2022

4. PERKEMBANGAN CAPAIAN OUTPUT BELANJA STRATEGIS (K/L & TKDD)

4.1. GAMBARAN UMUM CAPAIAN OUTPUT NASIONAL

Capaian output 2022 adalah salah satu indikator IKPA yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pengisian capaian output oleh satker telah dimulai sejak 2020. Agregasi atas capaian output telah diinisiasi sejak 2019. Dari tahun ke tahun, pengisian capaian output terus mengalami perbaikan meskipun masih terdapat satker yang belum melakukan pengisian sesuai dengan ketentuan sehingga memunculkan isian akumulatif non valid (N/A).

Jumlah output yang teragregasi mengalami peningkatan dibandingkan 2021, yakni dari 184 output menjadi 209. Secara keseluruhan terdapat 9 kelompok sektor output dimana hanya sektor pangan dan pertahanan yang jumlah outputnya mengalami penurunan sedangkan yang lainnya naik. Pada sektor Pertahanan dan Keamanan, terjadi penurunan jenis output dari 2021 yakni dari 19 menjadi 12 di 2022. Sebaliknya, pada sektor infrastruktur, terjadi kenaikan jumlah output dari 43 di tahun lalu ke 44 di 2022. Pada sektor Kesehatan, terdapat kenaikan output dari 29 di 2021 menjadi 36 di 2022. Di sektor pariwisata, jenis output naik dari 2 menjadi 13 output. Di sektor Pangan, terjadi penurunan jumlah output dari 62 menjadi 51 di 2022. Disisi lain, sektor Pendidikan juga mengalami kenaikan dari 11 menjadi 23 output di 2023. Pada sektor Sosial, terjadi kenaikan dari 13 menjadi 17 output di 2022. Terakhir, pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi terjadi kenaikan

TABEL 44. CAPAIAN OUTPUT REGIONAL 2022

KEL	OUTPUT	KENAIKAN (PENURUNAN) DIBANDINGKAN 2021																	
		SUMATERA			JAWA			BALI NUSRA			KALIMANTAN			SULAWESI			MALUKU PAPUA		
		PAGU	OUT	REAL	PAGU	OUT	REAL	PAGU	OUT	REAL	PAGU	OUT	REAL	PAGU	OUT	REAL	PAGU	OUT	REAL
INF	PEMBANGUNAN BENDUNGAN	-56%	-17%	7%	-35%	-4%	-5%	-17%	46%	0%	108%	50%	-27%	-24%	-48%	-7%	13%	100%	1%
INF	PEMBANGUNAN JALAN	41%	N/A	-29%	59%	N/A	-23%	-24%	1%	-14%	107%	N/A	-12%	75%	59%	-34%	-32%	4%	-21%
INF	PEMBANGUNAN JEMBATAN	-9%	N/A	9%	-6%	N/A	-3%	-64%	-47%	6%	1%	N/A	-19%	35%	N/A	1%	1%	N/A	-17%
INF	BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA	3%	50%	8%	12%	18%	0%	-28%	41%	1%	-17%	0%	10%	-13%	64%	5%	-33%	47%	0%
PGN	KAWASAN PADI	-24%	29%	5%	11%	13%	-3%	27%	0%	-6%	-66%	7%	-2%	-13%	35%	-1%	-75%	17%	-2%
PGN	OPTIMASI LAHAN	-36%	37%	-3%	43%	27%	1%	-24%	30%	31%	-59%	-2%	0%	-36%	40%	-19%	-66%	9%	-3%
PGN	PENYALURAN BENIH JAGUNG	-95%	-13%	15%	-52%	17%	0%	-93%	0%	-1%	-97%	-97%	-1%	-97%	74%	6%	-99%	9%	-99%
PGN	PENYALURAN BENIH PADI	-43%	28%	15%	-23%	31%	-1%	-51%	0%	-6%	-42%	-37%	-10%	-60%	20%	4%	-65%	45%	-2%
PGN	TERNAK RUMINANSIA, UNGGAS, DAN ANEKA TERNAK	-30%	28%	16%	-45%	-7%	-37%	-34%	17%	-9%	-13%	-1%	-18%	140%	-2%	28%	326%	0%	1%
PGN	OPTIMALISASI REPRODUKSI	-5%	N/A	-3%	-28%	-24%	-1%	-40%	-5%	20%	-29%	N/A	-3%	-36%	N/A	57%	-42%	-4%	1%
PGN	EMBUNG PERTANIAN	16%	0%	7%	-12%	26%	0%	19%	-20%	1%	7%	-18%	0%	-7%	24%	-28%	5%	N/A	0%
PGN	INSENTIF PENYULUH PERTANIAN	-23%	-13%	7%	-16%	-18%	0%	-6%	-7%	0%	-11%	2%	-1%	-6%	-17%	3%	-5%	N/A	-6%
PGN	IRIGASI PERPIPAAN DAN PERPOMPAAN	-54%	141%	6%	104%	17%	-1%	-10%	-14%	-2%	-38%	N/A	0%	-58%	29%	-14%	-2%	N/A	-1%
PND	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	11%	6%	4%	1%	70%	0%	N/A	75%	4%	8%	1%	8%	8%	20%	2%	-13%	13%	2%
PND	KIP KULIAH - KEMENAG	65%	N/A	-9%	69%	10%	0%	N/A	-13%	1%	22%	-15%	-2%	54%	19%	5%	41%	N/A	1%
PND	PROGRAM INDONESIA PINTAR - KEMENAG	16%	1%	20%	0%	7%	0%	N/A	1%	-1%	506%	-9%	0%	-6%	10%	3%	-4%	5%	-1%



dibandingkan 2021, dari 6 menjadi 13 di 2022.

Sebaliknya, sebanyak 72 output 2021 tidak lagi dapat ditemukan di 2022 khususnya untuk Regional Jawa. Output tersebut diantaranya 12 output dari sektor Pertahanan dan Keamanan, 12 output dari sektor Infrastruktur, 14 dari sektor Kesehatan, 16 dari sektor Pangan, 4 dari sektor Pendidikan, 9 dari sektor Sosial, dan 5 dari sektor TIK. Sebagian besar dari output tersebut merupakan bantuan sosial dan pembangunan.

Dari sektor Pertahanan dan Keamanan, output yang tidak dialokasikan kembali di 2022 adalah Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Prajurit, Penanganan Dan Penanggulangan Konten Negatif, Penanganan Tindak Pidana Narkoba, Pengendalian Tata Kelola Pse Dan Transaksi PSE, Sarana Pertahanan Dan Keamanan, Solusi Ekosistem, Alutsista Strategis, Data Center Penyidikan, Kapal Frigate, Kapal Selam Diesel Elektrik, Kerja Sama Badan Usaha dan KRI, KAL, Alpeng, Dan Ranpur/Rantis.

Di sektor Infrastruktur, output yang tidak dialokasikan kembali di 2022 ialah Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian, Pembangunan Jalur Ka Sulawesi Antar Makassar, Pembangunan Prasarana Lrt Provinsi Sumatera Selatan, Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian, Layanan Angkutan Pemadu Moda

Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api, Jaringan Gas Dan Bumi Rumah Tangga, Konverter Kit, Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis, Layanan Angkutan Tol Laut, Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan, dan Layanan Fasilitas Kapal Laut.

Pada sektor kesehatan, output yang hilang di 2022 diantaranya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit HIV, Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit TBC, Penugasan Khusus Nakes, Alat Dan Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi, Buffer Obat Dan Perbekalan Kesehatan, Dukungan Penanganan Darurat Bencana, Klaim Perawatan Pasien Covid-19, Operasi Vaksinasi Covid-19, Pengadaan Alat Dan Bahan Kesehatan Dan Pengendalian Penyakit, Prasarana Penanggulangan Krisis Kesehatan, Produk Litbang Kesehatan, Bantuan Pendidikan, Makanan Bagi Balita Kurus, dan Makanan Bagi Ibu Hamil.

Di sektor pangan, output yang tidak ditemukan lagi di 2022 adalah Pengelolaan Irigasi Perikanan Partisipatif, Perlindungan Nelayan, Kawasan Kacang Tanah, Kawasan Kacang Hijau, Lahan Konservasi Dah Rehabilitasi, Alat Dan Mesin Pertanian Pra Panen, Penyaluran Sarana Kawasan Perikanan, Bantuan Premi, Asuransi Pembudidaya Ikan, Pasar Ikan, Sentra Kuliner Ikan, Sarana Penyimpanan Ikan, Unit Pengolah Pupuk Organik (Uppo), Galur Harapan Tanaman, Bantuan Sarana Produksi Pertanian, Pembangunan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Di

Kawasan Transmigrasi, serta Rehabilitasi Hutan Mangrove.

Hanya terdapat empat output pada sektor Pendidikan yang tidak dimunculkan kembali di 2022 diantaranya Bantuan Kuota Internet – Kemenag, Bantuan Kuota Internet (Tahap II) – Kemendikbud, Bantuan Kuota Internet – Kemendikbud, dan TPG Non PNS – Kemendikbud. Sedangkan pada sektor Sosial, output yang tidak ada ialah Bansos Pangan, Program Keluarga Harapan (PEN), Bansos Tunai, Bantuan Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial, Bantuan Logistik Bencana Alam, Bantuan Masyarakat Rawan Bencana Sosial, Bantuan Pelaku Usaha, Bantuan Rehabilitasi Rumah, serta Bantuan Sosial Ekonomi Produktif. Pada sektor TIK, sektor yang tidak ada di 2022 adalah Akses Internet Wilayah 3T, BTS Wilayah 3T, Palapa Ring, Pusat Monitoring Dan Telekomunikasi, dan Satelit.

4.II. CAPAIAN OUTPUT 2022 PER REGIONAL

Output Historis ialah output yang dimiliki oleh seluruh regional pada tahun 2021 dan 2022 sehingga dapat diperbandingkan baik dari alokasi pagu, realisasi, hingga capaian output. Output historis terdiri atas 16 output yang termasuk dalam tiga kelompok output yakni infrastruktur ketahanan pangan, dan pendidikan.

4.II.A. REGIONAL SUMATERA

Secara umum total alokasi pagu di regional Sumatera untuk ketiga kelompok output historis mengalami penurunan 25% dari 5.520,6 M menjadi 4.121,7 dibandingkan 2021. Sedangkan rata-rata realisasi belanja mengalami kenaikan dari 90% menjadi 95% yang mengindikasikan bahwa output yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya cenderung memiliki capaian lebih baik di tahun berikutnya. Akan tetapi masih terdapat pengisian capaian output yang belum valid di beberapa daerah.

4.II.A.1. INFRASTRUKTUR

Output hasil dari kelompok infrastruktur terdiri atas 4 output diantaranya 1) pembangunan bendungan, 2) pembangunan jalan, 3) pembangunan jembatan, dan 4) bantuan stimulan perumahan.

4.II.A.1.i. Pembangunan Bendungan

Alokasi belanja output bendungan 2022 sebesar 1.126 M mengalami penurunan 56% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 17% menjadi 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, capaian output mengalami penurunan

TABEL 45. PEMBANGUNAN BENDUNGAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	2	2	358.02	358.02
LAMPUNG	PN	1	1	43.07	42.74
SUMATERA SELATAN	PN	1	1	377.83	377.83
SUMATERA UTARA	Non PN	1	0	12.00	6.92
	PN	1	1	335.66	335.66
TOTAL		6	5	1,126.57	1,121.17

TABEL 46. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	Non PN	0.0875	0.0875	14.43	14.27
BENGKULU	PN	0.516666667	0.516666667	43.99	28.61
JAMBI	PN	0.0002	0	0.20	0.00
KEPULAUAN RIAU	PN	0.491666667	0.491666667	130.23	75.62
LAMPUNG	PN	0.001	0.0006	1.20	0.72
RIAU	PN	0.004166667	34306.00069	9.32	9.22
SUMATERA BARAT	PN	7.688294444	7.688294444	168.15	118.87
SUMATERA SELATAN	PN	0.000694444	0	0.10	0.00
SUMATERA UTARA	Non PN	0.03125	0.03125	8.32	8.06
	PN	2.054166667	0.044444444	62.55	51.80
TOTAL		10.87560556	34,314.86	438.48	307.16

sebesar 17% dibanding 2021.

Pada 2022, dari target 6 unit bendungan di 4 provinsi (Aceh, Lampung, Sumsel, dan Sumut), hanya 5 unit bendungan yang terselesaikan dan 1 bendungan Non PN di Provinsi Sumatera Utara tidak selesai sampai akhir tahun. Sedangkan tahun sebelumnya, dari target 6 bendungan, seluruhnya berhasil diselesaikan. Hal ini terindikasi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan yang digunakan untuk pembangunan bendungan.

4.II.A.1.ii. Pembangunan Jalan

Alokasi belanja output jalan 2022 sebesar 438,48 M mengalami kenaikan 44% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 30% menjadi 70%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 96%, namun pada 2022 capaian output menjadi tidak valid karena terisi lebih dari 100%.

Target output jalan di Sumatera ialah 10,87 km yang tersebar pada 9 provinsi yakni Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dari kesembilan lokasi tersebut, target output yang tercapai hanya ada di Aceh, Bengkulu, Kepri, dan Sumbar. Capaian provinsi lainnya tidak mencapai target. Khusus di Sumatera Utara, pembangunan jalan dengan tagging Non PN justru memiliki capaian lebih baik dari pada jalan dengan kode PN. Selain itu, pada provinsi Riau pengisian capaian tidak valid.

4.II.A.1.iii. Pembangunan Jembatan

Alokasi belanja output jembatan 2022 sebesar 453,3 M mengalami penurunan 9% sedangkan realisasi

belanja mengalami kenaikan 9% menjadi 89%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 80%, namun pada 2022 capaian output menjadi tidak valid karena terisi lebih dari 100%.

Target output jembatan di Sumatera tahun 2022 ialah 5.228,27 meter yang tersebar pada 9 provinsi, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3.637,73 m. Pada Provinsi Riau dan Sumatera Selatan, capaian pembangunan jalan Non PN lebih rendah dibandingkan PN. Sebaliknya, di Kepri capaian jalan PN di bawah jalan Non PN. Selain itu masih terdapat pengisian capaian output yang tidak valid di Jambi, Lampung, Sumsel, dan Sumut yang membutuhkan konfirmasi dari satker terkait.

4.II.A.1.iv. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Alokasi belanja output bantuan perumahan 2022 sebesar 986,32 M mengalami kenaikan 3% sejalan dengan realisasi belanja mengalami kenaikan 8% menjadi hampir 100%. Capaian output 2021 sebesar 50% mengalami kenaikan menjadi 100% di 2022.

Target output PN bantuan perumahan swadaya 2022 sebesar 49.306 yang tersebar pada 10 provinsi, meningkat dibandingkan target 48.058 unit di 2021. Capaian output di seluruh provinsi secara umum sangat baik. Hal ini mengindikasikan kinerja pembangunan perumahan yang lebih baik di Regional Sumatera dibandingkan tahun lalu.

4.II.A.2. KETAHANAN PANGAN

Output hasil dari kelompok ketahanan pangan

TABEL 47. PEMBANGUNAN JEMBATAN (M) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	Non PN	385.1256944	385.1256944	17.41	17.41
	PN	152	152	74.61	70.88
BENGKULU	PN	65.95	65.95	19.44	11.46
JAMBI	Non PN	483	1650507.87	73.89	53.52
KEPULAUAN RIAU	Non PN	60	60	3.92	3.92
	PN	78.67	68.67	33.90	21.62
LAMPUNG	Non PN	150.8805556	1201445.881	17.27	16.33
	PN	0.000694444	0.000694444	0.02	0.02
RIAU	Non PN	120	33.84583333	4.07	4.07
	PN	26	26	12.69	12.69
SUMATERA BARAT	Non PN	42	42	3.97	3.97
SUMATERA SELATAN	Non PN	397.7951389	360.7951389	59.74	59.26
	PN	2292.959722	2292.959722	71.75	71.21
SUMATERA UTARA	Non PN	240	240	6.33	6.33
	PN	733.89	4482100	54.28	51.23
TOTAL		5228.271806	7,337,781.10	453.30	403.93

TABEL 48. PEMBANGUNAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (UNIT) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	17150	17150	343.00	343.00
BENGKULU	PN	2576	2573	51.52	51.52
JAMBI	PN	1300	1300	26.00	26.00
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	900	900	18.00	18.00
KEPULAUAN RIAU	PN	865	864	17.30	17.30
LAMPUNG	PN	4440	4440	88.80	88.80
RIAU	PN	3905	3905	78.10	78.10
SUMATERA BARAT	PN	3610	3588	72.20	72.20
SUMATERA SELATAN	PN	6992	6984	139.84	139.84
SUMATERA UTARA	PN	7568	7427	151.56	151.56
TOTAL		49.306	49.131	986.32	986.32

terdiri atas 9 output, diantaranya 1) Kawasan Padi, 2) Optimasi Lahan, 3) Penyaluran Benih Jagung, 4) Penyaluran Benih Padi, 5) Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak, 6) Optimalisasi Reproduksi, 7) Embung Pertanian, 8) Insentif Penyuluh Pertanian, dan 9) Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan

4.II.A.2.i. Kawasan Padi

Alokasi belanja output kawasan padi 2022 sebesar 28,8 M mengalami penurunan 24% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 6% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 30% dibanding 2021.

Target output PN kawasan padi 2022 ialah 16.633 unit yang tersebar 9 provinsi, menurun dibandingkan 27.203 unit di 2021. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena capaian output 2021 hanya mampu mencapai 19.650 unit (72%). Dari kesembilan provinsi, hanya Riau dan Sumbar yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.A.2.ii. Optimasi Lahan

Alokasi belanja output optimasi lahan 2022 sebesar 59,76 M mengalami penurunan 36% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 3% menjadi 96% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 37% dibanding 2021.

Target output PN optimasi lahan 2022 ialah 79,6 km² yang tersebar 9 provinsi, menurun dibandingkan 151 km² di 2021. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena capaian output 2021 hanya mampu mencapai 90,6 unit (60%). Dari kesembilan provinsi, Provinsi Lampung, Riau, dan Sumsel belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.A.2.iii. Penyaluran Benih Jagung

Alokasi belanja output penyaluran benih jagung 2022 sebesar 4,6 M mengalami penurunan sangat signifikan 95,5% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 15% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 13% dibanding 2021.

TABEL 49. KAWASAN PADJ (UNIT) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	1456	1456	2.46	1.91
BENGKULU	PN	250	250	0.39	0.39
JAMBI	PN	762	762	1.20	1.19
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	1000	1750	1.30	1.28
LAMPUNG	PN	3126	3126	5.97	5.96
RIAU	PN	2039	2028	3.34	3.32
SUMATERA BARAT	PN	1250	820	1.96	1.94
SUMATERA SELATAN	PN	5750	5750	10.44	10.42
SUMATERA UTARA	PN	1000	975	1.74	1.70
TOTAL		16,633	16,917	28.80	28.10

TABEL 50. OPTIMASI LAHAN (KM2) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	24	24	12.36	12.30
BENGKULU	PN	0.253472222	0.253472222	2.91	2.91
JAMBI	PN	43	43	19.09	18.09
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	1	1	0.36	0.35
LAMPUNG	PN	1	0	0.11	0.11
RIAU	PN	2.213888889	1.213888889	13.58	12.42
SUMATERA BARAT	PN	6	6	3.25	3.24
SUMATERA SELATAN	PN	0.690972222	0.634722222	7.86	7.73
SUMATERA UTARA	PN	1	1	0.25	0.25
TOTAL		79.16	77.10	59.76	57.40

TABEL 51. PENYALURAN BENIH JAGUNG (UNIT) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BENGKULU	PN	1000	1000	0.63	0.63
JAMBI	PN	1000	1000	0.63	0.63
LAMPUNG	PN	2020	2020	1.26	1.25
SUMATERA BARAT	PN	1000	41.71180556	0.63	0.61
SUMATERA SELATAN	PN	2300	2300	1.45	1.44
TOTAL		7.320	6.361	4.60	4.56

TABEL 52. PENYALURAN BENIH PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	10150	10150	3.13	3.05
BENGKULU	PN	10000	10000	2.98	2.98
JAMBI	PN	10200	10200	3.20	3.20
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	1000	2000	0.29	0.29
KEPULAUAN RIAU	PN	1	1	0.01	0.01
LAMPUNG	PN	37500	37500	9.74	9.71
RIAU	PN	7500	6521	2.30	2.26
SUMATERA BARAT	PN	15000	22010	4.36	4.35
SUMATERA SELATAN	PN	21000	21000	6.08	6.06
SUMATERA UTARA	PN	10000	10000	3.20	3.14
TOTAL		122.351	129.382	35.29	35.04

Target output PN penyaluran benih jagung 2022 ialah 7.320 unit yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan target 163.539 unit. Dari keempat provinsi, hanya Sumbar yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.A.2.iv. Penyaluran Benih Padi

Alokasi belanja output penyaluran benih padi 2022 sebesar 35,29 M mengalami penurunan 43%

sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 15% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 28% dibanding 2021.

Target output PN penyaluran benih padi 2022 ialah 122.351 unit yang tersebar pada 10 provinsi, menurun dibandingkan target 262.053 unit di 2021. Dari kesepuluh provinsi, hanya Riau yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

TABEL 53. OPTIMALISASI REPRODUKSI (EKOR) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	40000	40000	3.94	3.41
BENGKULU	PN	7500	9229	1.17	1.17
JAMBI	PN	15000	15000	2.07	2.07
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	1000	939	0.67	0.53
KEPULAUAN RIAU	PN	1000	1000	0.64	0.63
LAMPUNG	PN	200000	200000	12.99	12.82
RIAU	PN	30000	300000	2.90	2.91
SUMATERA BARAT	PN	70000	70	6.13	5.62
SUMATERA SELATAN	PN	40000	40000	3.32	3.24
SUMATERA UTARA	PN	100000	100000	7.82	7.71
TOTAL		504.500	706.238	41.67	40.10

TABEL 54. EMBUNG PERTANIAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	13	13	1.56	1.56
BENGKULU	PN	6	6	0.72	0.72
JAMBI	PN	10	10	1.20	1.16
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	3	3	0.36	0.36
LAMPUNG	PN	9	9	1.08	1.08
RIAU	PN	9	9	1.08	1.08
SUMATERA BARAT	PN	10	10	1.20	1.20
SUMATERA SELATAN	PN	10	10	1.20	1.20
SUMATERA UTARA	PN	3	3	0.36	0.36
TOTAL		73	73	8.76	8.72

TABEL 55. PENYULUH PERTANIAN (ORANG) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	2531	2531	11.74	11.58
BENGKULU	PN	808	808	5.78	5.76
JAMBI	PN	845	827	6.41	6.24
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	247	10.225694	0.95	0.94
KEPULAUAN RIAU	PN	48	48	0.24	0.24
LAMPUNG	PN	1102	4	5.86	5.86
RIAU	PN	716	716	3.06	3.04
SUMATERA BARAT	PN	1080	1081	4.24	4.22
SUMATERA SELATAN	PN	1440	842	7.29	7.20
SUMATERA UTARA	PN	2120	2120	11.21	11.21
TOTAL		10.937	8.987	56.79	56.30

4.II.A.2.v. Optimalisasi Reproduksi

Alokasi belanja output optimalisasi reproduksi 2022 sebesar 35,29 M mengalami penurunan 43% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 15% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 28% dibanding 2021.

Target output PN optimalisasi reproduksi 2022 ialah 504.500 ekor yang tersebar pada 10 provinsi, meningkat dibandingkan target 399.407 unit di 2021. Dari kesepuluh provinsi, Kepulauan Babel belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.A.2.vi. Embung Pertanian

Alokasi belanja output embung pertanian 2022 sebesar 8,76 M mengalami penurunan 43% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 15% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 28% dibanding 2021.

Target output PN embung pertanian 2022 ialah 73 unit yang tersebar pada 9 provinsi, menurun dibandingkan target 63 unit di 2021. Seluruh provinsi di Regional Sumatera telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.A.2.vii. Insentif Penyuluh Pertanian

Alokasi belanja output insentif penyuluh pertanian

TABEL 56. IRIGASI PERPIPAAN DAN PERPOMPAAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	19	19	1.98	1.98
BENGKULU	PN	13	13	1.36	1.36
JAMBI	PN	9	9	0.94	0.86
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	4	4	0.44	0.44
LAMPUNG	PN	10	19	1.08	1.08
RIAU	PN	4	4	0.44	0.43
SUMATERA BARAT	PN	10	112.02	1.09	1.05
SUMATERA SELATAN	PN	17	17	1.85	1.83
TOTAL		86	197.02	9.20	9.03

2022 sebesar 56,79 M mengalami penurunan 23% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 7% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 13% dibanding 2021.

Target output PN insentif penyuluh pertanian 2022 ialah 10.937 orang yang tersebar pada 10 provinsi, menurun dibandingkan target 13.221 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Sumatera yang telah mencapai target output yang telah ditentukan ialah Aceh, Bengkulu, Kepri, Sumbar, dan Sumut.

4.II.A.2.viii. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan

Alokasi belanja output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 sebesar 9,20 M mengalami penurunan 54% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 6% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan menjadi >100% dibanding 2021.

Target output PN output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 ialah 86 unit yang tersebar pada 8 provinsi, menurun dibandingkan target 177 unit di 2021. Seluruh provinsi di Regional Sumatera yang telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.A.3. PENDIDIKAN

Output historis hasil dari kelompok pendidikan terdiri atas 3 output diantaranya 1) Bantuan Operasional Sekolah, 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag,

3) Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag.

4.II.A.3.i. Bantuan Operasional Sekolah

Alokasi belanja output BOS 2022 sebesar 647,83 M mengalami kenaikan 11% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 5% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 5% menjadi 100% dibanding 2021.

Target output PN output BOS 2022 ialah 587.631 orang yang tersebar pada 10 provinsi, meningkat dibandingkan target 582.942 orang di 2021. Beberapa provinsi di Regional Sumatera yang belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Bengkulu, Kepri, dan Sumut.

4.II.A.3.ii. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag

Alokasi belanja output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 sebesar 171,23 M mengalami kenaikan 65% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 5% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 5% menjadi 100% dibanding 2021.

Target output PN output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 ialah 13. 175 orang yang tersebar pada 10 provinsi, meningkat dibandingkan target 10.388 orang di 2021. Beberapa provinsi di Regional Sumatera yang belum mencapai target

TABEL 57. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ORANG) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	175684	178520	178.57	172.56
BENGKULU	PN	25957	22983	28.90	25.98
JAMBI	PN	37666	38966	43.25	42.24
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	8646	8848	9.90	9.45
KEPULAUAN RIAU	PN	10484	10425	11.76	11.61
LAMPUNG	PN	49890	52788	54.20	53.67
RIAU	PN	35809	37293	41.81	41.13
SUMATERA BARAT	PN	92380	95440	107.17	105.22
SUMATERA SELATAN	PN	43891	45102	50.81	49.81
SUMATERA UTARA	PN	107224	98085	121.46	115.25
TOTAL		587.631	588.453	647.83	626.94

TABEL 58. KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) – KEMENAG (ORANG) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
ACEH	PN	1956	1956	29.97	29.97
BENGKULU	PN	839	839	10.78	10.78
JAMBI	PN	1297	1297	14.15	14.15
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PN	240	240	3.99	3.99
KEPULAUAN RIAU	PN	200	200	1.98	1.98
LAMPUNG	PN	1953	1953	23.44	23.44
RIAU	PN	1341	1525158	20.18	20.18
SUMATERA BARAT	PN	1506	1506	20.73	20.73
SUMATERA SELATAN	PN	1129	0	12.59	0.00
SUMATERA UTARA	PN	2714	1250	33.41	17.24
TOTAL		13.175	1.534.399	171.23	142.47

TABEL 59. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) – KEMENAG 2022 (ORANG) 2022 DI REGIONAL SUMATERA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KEPULAUAN RIAU	PN	330	330	0.15	0.15
LAMPUNG	PN	92	92	0.05	0.04
RIAU	PN	80	80	0.08	0.08
SUMATERA BARAT	PN	20	20	0.01	0.01
SUMATERA UTARA	PN	1306	1306	1.18	1.17
TOTAL		1.828	1.828	1.47	1.44

output yang telah ditentukan ialah Sumsel dan Sumut.

4.II.A.3.iii. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag

Alokasi belanja output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 sebesar 1,26 M mengalami kenaikan 16% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 20% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 1% menjadi 100% dibanding 2021.

Target output PN output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 ialah 1.828 orang yang tersebar pada 5 provinsi, meningkat dibandingkan target 1.394 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Sumatera sudah berhasil mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.B. REGIONAL JAWA

Secara umum total alokasi pagu di Regional Jawa untuk ketiga kelompok output historis mengalami penurunan 49% dari 24.534,63 M menjadi 12.614,84 M dibandingkan 2021. Sedangkan rata-rata realisasi belanja mengalami penurunan dari 100% menjadi 95%. Akan tetapi, rerata capaian output secara umum mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa output telah dicapai dengan lebih efisien.

4.II.B.1. INFRASTRUKTUR

Output hasil dari kelompok infrastruktur terdiri atas 4 output diantaranya 1) pembangunan bendungan, 2) pembangunan jalan, 3) pembangunan jembatan,

dan 4) bantuan stimulan perumahan.

4.II.B.1.i. Pembangunan Bendungan

Alokasi belanja output bendungan 2022 sebesar 5.240,43 M mengalami penurunan 35% sejalan dengan realisasi belanja yang juga mengalami penurunan 5% menjadi 95% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, capaian output juga mengalami penurunan sebesar 4% dibanding 2021.

Pada 2022, dari target 15 unit bendungan di 6 provinsi, hanya 13 unit bendungan yang terselesaikan dan 2 bendungan PN di Provinsi Jawa Barat tidak selesai sampai akhir tahun. Sedangkan tahun sebelumnya, dari target 19 bendungan, 18 berhasil diselesaikan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh permasalahan pembebasan lahan.

4.II.B.1.ii. Pembangunan Jalan

Alokasi belanja output pembangunan jalan 2022 sebesar 4.431,52 M mengalami kenaikan 59% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 23% menjadi 77%. Capaian output 2021 maupun 2022 terekam > 100%.

Target output pembangunan jalan di Jawa ialah 3.318 km yang tersebar pada 5 provinsi. Dari kelima provinsi tersebut, target output yang tidak tercapai hanya ada di Banten kode PN dimana persentasenya baru mencapai 562,97 M dari alokasi 1.447,71 M.

4.II.B.1.iii. Pembangunan Jembatan

TABEL 60. PEMBANGUNAN BENDUNGAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	Non PN	1	1	312.16	122.97
DI YOGYAKARTA	PN	1	1	633.66	633.65
DKI JAKARTA	Non PN	1	1	566.03	566.01
JAWA BARAT	Non PN	1	1	409.95	409.95
	PN	5	3	1,787.79	1,731.20
JAWA TENGAH	PN	4	4	671.67	671.67
JAWA TIMUR	PN	2	2	859.52	856.00
TOTAL		15	13	5,240.78	4,991.46

TABEL 61. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	0.505555	0.202083	1,447.71	561.97
DI YOGYAKARTA	Non PN	0.000694	0.000694	3.09	3.09
	PN	0.552083	0.552083	324.87	309.27
JAWA BARAT	Non PN	0.004166	0.004166	3.81	3.69
	PN	0.004861	0.365972	1,149.00	1,146.62
JAWA TENGAH	Non PN	0.14375	0.14375	17.50	17.50
	PN	0.503472	0.504166	742.42	659.65
JAWA TIMUR	Non PN	0.565277	2.6436.	66.47	52.76
	PN	1.038194	1.4254	676.65	641.84
TOTAL		3.318	1.772	4,431.52	3,396.39

TABEL 62. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	Non PN	84	48	8.06	8.06
DI YOGYAKARTA	Non PN	1.250694444	1.250694444	4.24	4.22
	PN	2015	2015	90.00	84.26
JAWA BARAT	Non PN	614.0006944	842.106008	148.40	148.25
	PN	520	518.856	82.16	77.39
JAWA TENGAH	Non PN	417.3357222	345.483335	106.47	105.96
	PN	22.48333333	22.48333333	33.79	33.79
JAWA TIMUR	Non PN	439.9666667	261.9081	45.22	39.68
	PN	85	85	56.40	56.40
TOTAL		4.199,037	4140.087	574.73	558.01

Alokasi belanja output pembangunan jembatan 2022 sebesar 574,73 M mengalami penurunan 6% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 3% menjadi 97%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 91%, namun pada 2022 capaian output (belum konfirmasi) adalah 98,5%.

Target output jembatan di Jawa tahun 2022 ialah 4.199,4 meter yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 5.760,64 m. Pada Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pembangunan jembatan Non PN belum mencapai target. Sedangkan di Jabar, jembatan PN belum mencapai target.

4.II.B.1.iv. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Alokasi belanja output bantuan perumahan 2022 sebesar 1.655,58 M mengalami kenaikan 12%

sedangkan realisasi belanja stabil di angka 100%. Capaian output 2021 sebesar 50% mengalami kenaikan 18% menjadi 100% di 2022.

Target output PN bantuan perumahan swadaya 2022 sebesar 82.769 unit yang tersebar pada 5 provinsi, meningkat dibandingkan target 74.129 unit di 2021. Capaian output di seluruh provinsi secara umum sangat baik seperti pada regional lainnya.

4.II.B.2. KETAHANAN PANGAN

Output hasil dari kelompok ketahanan pangan terdiri atas 9 output, diantaranya 1) Kawasan Padi, 2) Optimasi Lahan, 3) Penyaluran Benih Jagung, 4) Penyaluran Benih Padi, 5) Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak, 6) Optimalisasi Reproduksi, 7) Embung Pertanian, 8) Insentif Penyuluh Pertanian, dan 9) Irigasi Perpipaan dan Perpompaan

TABEL 63. PEMBANGUNAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (UNIT) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	2468	2468	49.36	49.36
DI YOGYAKARTA	PN	1903	1903	38.06	38.08
JAWA BARAT	PN	16691	16691	333.82	333.82
JAWA TENGAH	PN	29674	29674	593.68	594.02
JAWA TIMUR	PN	32033	32033	640.66	640.66
TOTAL		82.769	82.769	1.655,58	1.655,94

TABEL 64. KAWASAN PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	550	550	0.86	0.86
DI YOGYAKARTA	PN	200	200	0.31	0.29
DKI JAKARTA	PN	148172	146887	300.13	291.06
JAWA BARAT	PN	3000	2950	4.80	4.53
JAWA TENGAH	PN	1000	1000	1.74	1.63
JAWA TIMUR	PN	1200	1200	2.05	2.00
TOTAL		154.122	152.787	309,90	300,38

TABEL 65. OPTIMASI LAHAN (KM2) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
DKI JAKARTA	PN	1	1	3.10	3.35
JAWA BARAT	PN	1.422222	1.42152	6.68	6.68
JAWA TENGAH	PN	25	25	14.23	14.21
JAWA TIMUR	PN	22	20	12.60	12.15
TOTAL		49.42222	47.42	36.61	36.39

TABEL 66. PENYALURAN BENIH JAGUNG (UNIT) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	1000	1000	0.63	0.63
DKI JAKARTA	PN	342070	342000	216.98	216.98
JAWA BARAT	PN	3000	3000	1.89	1.73
JAWA TENGAH	PN	3000	3000	1.89	1.89
JAWA TIMUR	PN	3000	3000	1.89	1.74
TOTAL		352.070	352.000	223.28	222.96

4.II.B.2.i. Kawasan Padi

Alokasi belanja output kawasan padi 2022 sebesar 309,9 M mengalami kenaikan 11% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 3% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 13% dibanding 2021.

Target output PN kawasan padi 2022 ialah 154.122 unit yang tersebar 6 provinsi, meningkat dibandingkan target 148.196 unit di 2021. Dari keenam provinsi, DKI Jakarta dan Jawa Barat belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.B.2.ii. Optimasi Lahan

Alokasi belanja output optimasi lahan 2022 sebesar 36,61 M mengalami kenaikan 43% sejalan dengan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 27% dibanding 2021.

Target output PN optimasi lahan 2022 ialah 49,42 km² yang tersebar di 4 provinsi, meningkat dibandingkan target 35 km² di 2021. Dari keempat provinsi, Provinsi Jawa Timur belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.B.2.iii. Penyaluran Benih Jagung

Alokasi belanja output penyaluran benih jagung 2022 sebesar 223,28 M mengalami penurunan sangat signifikan 52% sedangkan realisasi stabil di angka 100% sama dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 17% dibanding 2021.

Target output PN penyaluran benih jagung 2022 ialah 352.070 unit yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan target 2021 sebesar 778.352 unit. Dari kelima provinsi, hanya DKI Jakarta yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

TABEL 67. PENYALURAN BENIH PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	10300	10300	2.97	2.95
DI YOGYAKARTA	PN	4000	4000	1.20	1.20
DKI JAKARTA	PN	230058	230000	94.26	93.68
JAWA BARAT	PN	71430	71430	19.85	19.49
JAWA TENGAH	PN	70000	70000	19.85	19.84
JAWA TIMUR	PN	82400	82400	21.73	20.15
TOTAL		468.188	468.130	159.86	157.32

TABEL 68. TERNAK RUMINANSIA, UNGGAS, DAN ANEKA TERNAK (EKOR) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
DI YOGYAKARTA	PN	31055	31055	16.97	16.89
JAWA BARAT	PN	79720	68380	120.86	61.91
JAWA TENGAH	PN	12750	12750	8.29	7.86
JAWA TIMUR	PN	48125	35625	14.62	13.92
TOTAL		171.650	147.810	160.73	100.57

TABEL 69. OPTIMALISASI REPRODUKSI (EKOR) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	2000	2000	0.49	0.48
DI YOGYAKARTA	PN	90000	90000	5.47	5.50
DKI JAKARTA	PN	601	1	2.95	2.58
JAWA BARAT	PN	120000	113038	8.41	8.06
JAWA TENGAH	PN	590000	611308	33.66	32.00
JAWA TIMUR	PN	1310900	1310900	68.06	67.09
TOTAL		2.113.501	2.127.247	119.03	115.71

4.II.B.2.iv. Penyaluran Benih Padi

Alokasi belanja output penyaluran benih padi 2022 sebesar 159,86 M mengalami penurunan 23% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 2% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 31% dibanding 2021.

Target output PN penyaluran benih padi 2022 ialah 468.188 unit yang tersebar pada 6 provinsi, menurun dibandingkan target 784.590 unit di 2021. Dari keenam provinsi, hanya DKI Jakarta yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.B.2.v. Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak

Alokasi belanja output Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak 2022 sebesar 160,73 M mengalami penurunan 45% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 37% menjadi 63% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan realisasi, capaian output menurun dibandingkan 2021 menjadi 86%. Penurunan ini disebabkan oleh merebaknya Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan.

Terjadi perubahan satuan target capaian output dari

kelompok masyarakat di 2021 menjadi ekor ternak di 2022. Target output PN Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak 2022 ialah 171.650 ekor yang tersebar pada 4 provinsi. Dari keempat provinsi, DKI Jawa Barta dan Jawa Timur belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.B.2.vi. Optimalisasi Reproduksi

Alokasi belanja output optimalisasi reproduksi 2022 sebesar 119,03 M mengalami penurunan 28% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 1% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output seperti 2021 stabil di angka 100%.

Target output PN optimalisasi reproduksi 2022 ialah 2.113.501 ekor yang tersebar pada 6 provinsi, menurun dibandingkan target 1.892.188 unit di 2021. Dari keenam provinsi, DKI Jakarta dan Jawa Barat belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.B.2.vii. Embung Pertanian

Alokasi belanja output embung pertanian 2022 sebesar 11,88 M mengalami penurunan 12% sedangkan realisasi belanja stabil di 99% sama dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 26% dibanding 2021.

TABEL 70. EMBUNG PERTANIAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	3	3	0.36	0.36
DI YOGYAKARTA	PN	6	6	0.72	0.72
JAWA BARAT	PN	25	25	3.12	3.12
JAWA TENGAH	PN	37	37	4.44	4.44
JAWA TIMUR	PN	27	27	3.24	3.16
TOTAL		98	98	11.88	11.80

TABEL 71. PENYULUH PERTANIAN (ORANG) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	545	539	3.08	3.05
DI YOGYAKARTA	PN	386	412	1.51	1.50
DKI JAKARTA	PN	1167	1169	4.28	4.23
JAWA BARAT	PN	2258	52	11.63	10.82
JAWA TENGAH	PN	4141	4141	16.05	15.88
JAWA TIMUR	PN	3594	3594	14.35	14.21
TOTAL		12.091	9.907	50.89	49.68

TABEL 72. IRIGASI PERPIPAAN DAN PERPOMPAAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	12	12	1.25	1.25
DI YOGYAKARTA	PN	9	9	0.94	0.93
DKI JAKARTA	PN	347	347	52.50	51.93
JAWA BARAT	PN	30	28	3.11	3.10
JAWA TENGAH	PN	26	26	2.71	2.66
JAWA TIMUR	PN	32	29	3.39	3.07
TOTAL		456	451	63.90	62.95

Target output PN embung pertanian 2022 ialah 98 unit yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan target 112 unit di 2021. Penurunan ini kemungkinan disebabkan capaian output tahun lalu hanya mencapai 83 unit. Dari kelima provinsi, seluruhnya telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.B.2.viii. Insentif Penyuluh Pertanian

Alokasi belanja output insentif penyuluh pertanian 2022 sebesar 50,89 M mengalami penurunan 16% sedangkan realisasi belanja stabil di angka 98% sama dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 18% menjadi 82% dibanding 2021.

Target output PN insentif penyuluh pertanian 2022 ialah 12.091 orang yang tersebar pada 6 provinsi, menurun dibandingkan target 9.907 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Jawa telah mencapai target output yang telah ditentukan kecuali Banten dan Jawa Barat.

4.II.B.2.ix. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan

Alokasi belanja output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 sebesar 63,90 M mengalami

kenaikan 104% sedangkan realisasi belanja stabil di 99% sama dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 17% dibanding 2021.

Target output PN output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 ialah 456 unit yang tersebar pada 6 provinsi, meningkat dibandingkan target 284 unit di 2021. Seluruh provinsi di Regional Jawa telah mencapai target output yang telah ditentukan kecuali Jawa Timur.

4.II.B.3. PENDIDIKAN

Output historis hasil dari kelompok pendidikan terdiri atas 3 output diantaranya 1) Bantuan Operasional Sekolah, 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag, 3) Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag.

4.II.B.3.i. Bantuan Operasional Sekolah

Alokasi belanja output BOS 2022 sebesar 8.456,12 M mengalami kenaikan 1% sedangkan realisasi belanja stabil 100% sama dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 70% menjadi 100% di 2021.

Target output PN output BOS 2022 ialah 7.879.166

TABEL 73. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ORANG) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	46197	45599.29	53.64	51.84
DI YOGYAKARTA	PN	26979	29168	36.98	36.78
DKI JAKARTA	PN	7152278	7153118	7,635.25	7,632.98
JAWA BARAT	PN	205963	199775	211.19	195.95
JAWA TENGAH	PN	189844	188548.	220.01	218.49
JAWA TIMUR	PN	257905	271394.	299.05	289.61
TOTAL		7.879.166	7.887.60	8.456,12	8.425,65

TABEL 74. KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) – KEMENAG (ORANG) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	942	942	10.40	10.40
DI YOGYAKARTA	PN	1092	1092	12.30	12.30
DKI JAKARTA	PN	9914	9914	156.82	156.66
JAWA BARAT	PN	2271	2271	25.11	25.11
JAWA TENGAH	PN	4834	4875	57.24	57.20
JAWA TIMUR	PN	5059	4977	65.28	64.39
TOTAL		24.112	24.071	327.15	326.06

TABEL 75. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) – KEMENAG 2022 (ORANG) 2022 DI REGIONAL JAWA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BANTEN	PN	20	20	0.02	0.02
DKI JAKARTA	PN	2169252	2169252	1,436.64	1,436.63
JAWA BARAT	PN	65	65	0.03	0.03
JAWA TENGAH	PN	80	80	0.05	0.05
JAWA TIMUR	PN	22	22	0.02	0.02
TOTAL		2.169.439	2.169.439	1.436,76	1.436,75

orang yang tersebar pada 6 provinsi, meningkat dibandingkan target 7.860.309 orang di 2021. Beberapa provinsi di Regional Jawa yang belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

4.II.B.3.ii. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag

Alokasi belanja output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 sebesar 327,15 M mengalami kenaikan 69% sedangkan realisasi belanja stabil 100% sama seperti tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 11% menjadi 100% dibanding 2021.

Target output PN output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 ialah 24.112 orang yang tersebar pada 6 provinsi, meningkat dibandingkan target 19.515 orang di 2021. Beberapa provinsi di Regional Jawa yang belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Jawa Timur.

4.II.B.3.iii. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag

Alokasi belanja output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 sebesar 1.436,76 M sama dengan

alokasi tahun lalu sedangkan realisasi belanja stabil di 100% sama dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 7% menjadi 100% dibanding 2021.

Target output PN output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 ialah 2.169.439 orang yang tersebar pada 5 provinsi, meningkat dibandingkan target 2.171.268 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Jawa sudah berhasil mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C. REGIONAL BALI NUSRA

Secara umum total alokasi pagu di regional Bali Nusra untuk ketiga kelompok output historis ini mengalami penurunan 19% dari 4.372,10 M menjadi 3.831,66 M dibandingkan 2021. Sedangkan rata-rata realisasi belanja mengalami kenaikan dari 96% menjadi 97% dengan rata-rata capaian output mengalami kenaikan dari 92% menjadi 98% yang mengindikasikan bahwa output yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya cenderung memiliki capaian lebih baik di tahun berikutnya. Selain itu pengisian capaian output yang tidak valid rendah pada Regional Bali Nusra.

TABEL 76. PEMBANGUNAN BENDUNGAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	2	2	424.14	424.06
NUSA TENGGARA BARAT	PN	3	3	1,477.39	1,477.39
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	3	3	892.60	892.60
TOTAL		8	8	2.794,13	2.794,05

TABEL 77. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	Non PN	0.0138888	0.0138888	7.48	7.48
	PN	1223	1223	56.11	56.11
NUSA TENGGARA BARAT	Non PN	0.2173611	0.2173611	30.00	27.82
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	11.768055	11.768055	409.34	341.23
TOTAL		1.235	1.235	502.92	432.64

TABEL 78. PEMBANGUNAN JEMBATAN (M) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	Non PN	7	7	6.07	6.07
	PN	143.58055	143.5805	66.42	66.42
NUSA TENGGARA BARAT	Non PN	162	0.2284722	8.00	8.00
TOTAL		312.58	150.81	80.49	80.49

4.II.C.1. INFRASTRUKTUR

Output hasil dari kelompok infrastruktur terdiri atas 4 output diantaranya 1) pembangunan bendungan, 2) pembangunan jalan, 3) pembangunan jembatan, dan 4) bantuan stimulan perumahan.

4.II.C.1.i. Pembangunan Bendungan

Alokasi belanja output bendungan 2022 sebesar 2.794,13 M mengalami penurunan 13% sedangkan realisasi belanja tetap stabil 100% sama dengan tahun sebelumnya. Kendati demikian, capaian output mengalami kenaikan sebesar 46% dibanding 2021.

Pada 2022, dari target 8 unit bendungan di 3 provinsi semuanya yang terselesaikan. Sedangkan tahun sebelumnya, dari target 11 bendungan, hanya 6 diantaranya yang berhasil diselesaikan. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan program pembangunan bendungan yang lebih baik di Regional Bali Nusra.

4.II.C.1.ii. Pembangunan Jalan

Alokasi belanja output jalan 2022 sebesar 502,92 M mengalami penurunan 24% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 14% menjadi 86%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 99% dan mengalami peningkatan di 2022 menjadi 100%.

Target output jalan di regional Bali Nusra ialah 1.235 km yang tersebar pada 3 provinsi. Dari ketiga provinsi tersebut, seluruh target output telah tercapai, baik yang tertagging PN maupun Non PN. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu target

pembangunan jalan meningkat drastis dari 108,23 km dengan capaian 107,5 km.

4.II.C.1.iii. Pembangunan Jembatan

Alokasi belanja output jembatan 2022 sebesar 80,49 M mengalami penurunan 64% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 6% menjadi 100%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 95%, namun pada 2022 capaian output menurun tajam menjadi 48%.

Target output jembatan di Regional Bali Nusra tahun 2022 ialah 312.58 meter yang tersebar pada 2 provinsi, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.670,39 m. Pada Provinsi NTB, capaian pembangunan jembatan Non PN sangat rendah walaupun pagu seluruhnya terealisasi sehingga perlu dikaji lebih jauh penyebabnya.

4.II.C.1.iv. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Alokasi belanja output bantuan perumahan 2022 sebesar 189,21 M mengalami penurunan 28% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 100%. Capaian output 2021 sebesar 59% mengalami kenaikan menjadi 100% di 2022.

Target output PN bantuan perumahan swadaya 2022 sebesar 9.428 unit yang tersebar pada 3 provinsi, turun dibandingkan target 13.160 unit dan capaian 7.789 unit di 2021. Capaian output di seluruh provinsi secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan kinerja penyaluran bantuan pembangunan perumahan yang lebih baik di Regional

TABEL 79. PEMBANGUNAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (UNIT) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	1260	1260	25.20	25.20
NUSA TENGGARA BARAT	PN	4312	4312	86.64	86.64
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	3856	3856	77.37	77.37
TOTAL		9.428	9.428	189.21	189.21

TABEL 80. KAWASAN PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	350	350	0.55	0.35
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	5000	5000	7.85	7.52
TOTAL		5.350	5.350	8.40	7.87

TABEL 81. OPTIMASI LAHAN (KM2) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
NUSA TENGGARA BARAT	PN	1.2118055	0.2118055	3.54	3.54
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	20	20	11.83	11.99
TOTAL		21,21	20,21	15.38	15.52

TABEL 82. PENYALURAN BENIH JAGUNG (UNIT) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	4.760	4.760	2.71	2.69

Bali Nusra dibandingkan tahun lalu.

4.II.C.2. KETAHANAN PANGAN

Output hasil dari kelompok ketahanan pangan terdiri atas 9 output, diantaranya 1) Kawasan Padi, 2) Optimasi Lahan, 3) Penyaluran Benih Jagung, 4) Penyaluran Benih Padi, 5) Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak, 6) Optimalisasi Reproduksi, 7) Embung Pertanian, 8) Insentif Penyuluh Pertanian, dan 9) Irigasi Perpipaian dan Perpompaaan

4.II.C.2.i. Kawasan Padi

Alokasi belanja output kawasan padi 2022 sebesar 8,4 M mengalami kenaikan 27% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 5% menjadi 94% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output stabil 100% sama dengan 2021.

Target output PN kawasan padi 2022 ialah 5.350 unit yang tersebar pada dua provinsi, menurun dibandingkan target 13.000 unit di 2021. Seluruh provinsi telah mampu mencapai target yang ditetapkan.

4.II.C.2.ii. Optimasi Lahan

Alokasi belanja output optimasi lahan 2022 sebesar 15,38 M mengalami penurunan 24% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 31% menjadi 101% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 30% dibanding 2021.

Target output PN optimasi lahan 2022 ialah 21,21 km2 yang tersebar pada 2 provinsi, menurun dibandingkan target 31,29 km2 di 2021. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena capaian output 2021 hanya mampu mencapai 20,29 unit (65%). Dari dua provinsi, NTB belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C.2.iii. Penyaluran Benih Jagung

Alokasi belanja output penyaluran benih jagung 2022 sebesar 2,71 M mengalami penurunan sangat signifikan 93% sejalan dengan penurunan realisasi belanja dari 100% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output tetap stabil di 100% sama dengan 2021.

Target output PN penyaluran benih jagung 2022 ialah 4.760 unit di NTT, menurun dibandingkan target 61.529 unit di 2021. Capaian target penyaluran benih jagung 2022 sepenuhnya tercapai.

4.II.C.2.iv. Penyaluran Benih Padi

Alokasi belanja output penyaluran benih padi 2022 sebesar 8,11 M mengalami penurunan 51% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 6% menjadi 94% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output stabil di angka 100%, sama dengan 2021.

Target output PN penyaluran benih padi 2022 ialah 25.000 unit yang tersebar pada tiga provinsi, menurun dibandingkan target 91.175 unit di 2021. Dari ketiga provinsi, seluruhnya telah mencapai target

TABEL 83. PENYALURAN BENIH PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	6500	6500	2.04	1.85
NUSA TENGGARA BARAT	PN	5000	5000	1.83	1.76
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	13500	13500	4.25	4.00
TOTAL		25.000	25.000	8.11	7.61

TABEL 84. TERNAK RUMINANSIA, UNGGAS, DAN ANEKA TERNAK (EKOR) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	41095	41095	35.28	32.84
NUSA TENGGARA BARAT	PN	100	99	1.38	1.38
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	500	503	5.92	4.39
TOTAL		41.695	41.697	42.59	38.62

TABEL 85. OPTIMALISASI REPRODUKSI (EKOR) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	70000	70000	1.60	1.41
NUSA TENGGARA BARAT	PN	110000	100950	7.54	7.49
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	7000	7000	1.55	1.53
TOTAL		187.000	177.950	10.69	10.42

TABEL 86. EMBUNG PERTANIAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	18	18	2.16	2.16
NUSA TENGGARA BARAT	PN	15	2.50625	1.80	1.80
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	17	29	2.04	2.04
TOTAL		50	49.51	6.00	6.00

yang ditentukan.

4.II.C.2.v. Ternak Ruminansia, Unggas, Dan Aneka Ternak

Alokasi belanja output optimalisasi reproduksi 2022 sebesar 42,59 M mengalami penurunan 34% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 9% menjadi 91% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 17% dibanding 2021.

Target output PN optimalisasi reproduksi 2022 ialah 41.697 ekor yang tersebar pada tiga provinsi. Terjadi perubahan satuan dan target caput ini dari 362 kelompok masyarakat unit di 2021. Dari ketiga provinsi, NTB belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C.2.vi. Optimalisasi Reproduksi

Alokasi belanja output optimalisasi reproduksi 2022 sebesar 10,69 M mengalami penurunan 40% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 20% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 5% dibanding 2021.

Target output PN optimalisasi reproduksi 2022 ialah 187.000 ekor yang tersebar pada 3 provinsi. Terjadi perubahan target output dari 175.789 kelompok

masyarakat di 2021. Dari ketiga provinsi, NTB belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C.2.vii. Embung Pertanian

Alokasi belanja output embung pertanian 2022 sebesar 6 M mengalami kenaikan 19% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan dibanding 2021.

Target output PN embung pertanian 2022 ialah 50 unit yang tersebar pada 3 provinsi, meningkat dibandingkan target 42 unit di 2021. Dari ketiga provinsi, NTB belum dapat mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C.2.viii. 8) Insentif Penyuluh Pertanian

Alokasi belanja output insentif penyuluh pertanian 2022 sebesar 22,88 M mengalami penurunan 6% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 7% dibanding 2021.

Target output PN insentif penyuluh pertanian 2022 ialah 3.864 orang yang tersebar pada 3 provinsi, menurun dibandingkan target 4.173 orang di 2021.

TABEL 87. PENYULUH PERTANIAN (ORANG) 2022 REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	484	484	2.66	2.64
NUSA TENGGARA BARAT	PN	1490	1490	7.26	7.25
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	1890	1890	12.96	12.89
TOTAL		3.864	3.864	21,88	21,88

TABEL 88. IRIGASI PERPIPAAN DAN PERPOMPAAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	15	15	1.76	1.68
NUSA TENGGARA BARAT	PN	17	17	1.92	1.89
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	46	62	6.67	6.53
TOTAL		78	94	10.35	10.10

TABEL 89. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ORANG) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	13036	13.291	14.10	13.84
NUSA TENGGARA BARAT	PN	35208	41.064	40.86	40.06
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	26184	28.188	31.53	31.24
TOTAL		74.428	82.544	86.49	85.14

TABEL 90. KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) – KEMENAG (ORANG) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
NUSA TENGGARA BARAT	PN	822	822	9.13	9.13
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	1270	1270	11.81	11.81
		2.092	2.092	20.95	20.95

Seluruh provinsi di Regional Bali Nusra telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C.2.ix. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan

Alokasi belanja output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 sebesar 10,35 M mengalami penurunan 10% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 1% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output yang terakumulasi tidak valid baik di 2021 maupun 2022 sehingga memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Target output PN output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 ialah 78 unit yang tersebar pada 3 provinsi, menurun dibandingkan target 87 unit di 2021. Seluruh provinsi di Regional Bali Nusra telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C.3. PENDIDIKAN

Output historis hasil dari kelompok pendidikan terdiri atas 3 output diantaranya 1) Bantuan Operasional Sekolah, 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag, 3) Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag.

4.II.C.3.i. Bantuan Operasional Sekolah

Alokasi belanja output BOS 2022 sebesar 86,49 M mengalami kenaikan 11 kali lipat sejalan dengan realisasi belanja mengalami kenaikan 3% menjadi

98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 64% menjadi 100% dibanding 2021.

Target output PN output BOS 2022 ialah 82.544 orang yang tersebar pada 3 provinsi, meningkat dibandingkan target 73.165 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Bali Nusra telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.C.3.ii. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag

Alokasi belanja output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 sebesar 20,95 M mengalami kenaikan 157% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 5% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 5% menjadi 100% dibanding 2021.

Target output PN output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 ialah 2.092 orang yang tersebar pada 2 provinsi, menurun dibandingkan target 23.641 orang di 2021. Kedua provinsi di Regional Bali Nusra tersebut telah mencapai target output yang ditentukan.

4.II.C.3.iii. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag

Alokasi belanja output Program Indonesia Pintar (PIP)

TABEL 91. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) – KEMENAG 2022 (ORANG) 2022 DI REGIONAL BALI NUSRA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
BALI	PN	2582	2678	23.39	23.36
NUSA TENGGARA BARAT	PN	235	235	2.48	2.30
NUSA TENGGARA TIMUR	PN	4830	4830	4.50	4.49
TOTAL		7.647	7.743	30.36	30.16

– Kemenag 2022 sebesar 30,36 M lima belas kali lipat sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 1% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 1% menjadi 101% dibanding 2021.

Target output PN output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 ialah 7.647 orang yang tersebar pada 3 provinsi, meningkat dibandingkan target 4.965 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Bali Nusra sudah berhasil mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.D. REGIONAL KALIMANTAN

Output historis Regional Kalimantan terdiri atas 16 output yang termasuk dalam tiga kelompok output yakni infrastruktur ketahanan pangan, dan pendidikan. Secara umum total alokasi pagu di regional Kalimantan untuk ketiga kelompok output historis ini mengalami kenaikan 52% dari 3.394,35 M menjadi 5.162,9 dibandingkan 2021. Sedangkan rata-rata realisasi belanja mengalami penurunan dari 98% menjadi 94%. Sementara itu, masih terdapat pengisian capaian output yang belum valid di beberapa daerah.

4.II.D.1. INFRASTRUKTUR

Output hasil dari kelompok infrastruktur terdiri atas 4 output diantaranya 1) pembangunan bendungan, 2) pembangunan jalan, 3) pembangunan jembatan, dan 4) bantuan stimulan perumahan.

4.II.D.1.i. Pembangunan Bendungan

Alokasi belanja output bendungan 2022 sebesar 413,9 M mengalami kenaikan 108% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 28% menjadi 72% dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, capaian output mengalami kenaikan sebesar 50% dibanding 2021.

Pada 2022, dari target 2 unit bendungan di provinsi Kalsel dan Kaltim, hanya 1 unit bendungan di Kaltim yang termasuk dalam PN terselesaikan sedangkan 1 bendungan Non PN di Provinsi Kalimantan Selatan tidak selesai sampai akhir tahun. Sedangkan tahun sebelumnya, dari target 2 bendungan, tidak satupun berhasil diselesaikan.

4.II.D.1.ii. Pembangunan Jalan

Alokasi belanja output jalan 2022 sebesar 3.315,08 M mengalami kenaikan 107% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 13% menjadi 87%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 71%, namun pada 2022 capaian output menjadi tidak valid karena terisi lebih dari 100%.

Target output jalan di Kalimantan tersebar pada 4 provinsi yakni Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan Utara. Dari lokasi tersebut, target output yang tercapai hanya ada di Kalimantan Utara. Capaian provinsi lainnya tidak mencapai target. Khusus di Kalimantan Timur, pembangunan jalan dengan tagging Non PN justru memiliki capaian lebih baik dari pada jalan dengan kode PN. Sedangkan di Kalbar, capaian dengan tagging PN memiliki capaian yang kurang baik. Selain itu, pada provinsi Kalimantan

TABEL 92. PEMBANGUNAN BENDUNGAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN SELATAN	Non PN	1	0	115.50	0.00
KALIMANTAN TIMUR	PN	1	1	298.40	298.40
TOTAL		2	1	413.90	298.40

TABEL 93. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	Non PN	0.0002	0.0002	73.99	73.99
	PN	3.561805556	1.293055556	465.46	390.43
KALIMANTAN TENGAH	PN	0.875694444	192215	93.33	84.28
KALIMANTAN TIMUR	Non PN	4801.129861	0.302083333	722.13	545.22
	PN	1.2375	1.20625	1,599.99	1,569.71
KALIMANTAN UTARA	PN	0.875694444	0.875694444	360.17	235.65
TOTAL		4807.680,75	192,218.68	3,315.08	2,899.28

TABEL 94. PEMBANGUNAN JEMBATAN (M) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	Non PN	984	984	172.04	171.42
	PN	1175.6875	900.8375	214.41	175.73
KALIMANTAN TENGAH	PN	1056	2685.147	123.84	120.78
KALIMANTAN TIMUR	Non PN	223.0590278	3969100069	156.70	66.79
	PN	330	283.9163	110.38	98.38
KALIMANTAN UTARA	PN	1357	1357	86.11	64.82
TOTAL		5.125.746,52	5.567.242,84	863.46	697.91

TABEL 95. PEMBANGUNAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (UNIT) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	6150	6150	123.00	123.00
KALIMANTAN SELATAN	PN	2184	2184	43.68	43.68
KALIMANTAN TENGAH	PN	1280	1280	25.60	25.60
KALIMANTAN TIMUR	PN	1488	1488	29.76	29.76
KALIMANTAN UTARA	PN	710	710	14.20	14.20
TOTAL		11.812	11.812	236.24	236.24

TABEL 96. KAWASAN PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	3300	3300	5.35	5.28
KALIMANTAN SELATAN	PN	5197	5197	10.14	9.82
KALIMANTAN TENGAH	PN	800	800	1.26	1.23
KALIMANTAN UTARA	PN	50	50	0.08	0.08
		9.347	9.347	16.83	16.41

Timur pengisian capaian tidak valid.

4.II.D.1.iii. Pembangunan Jembatan

Alokasi belanja output jembatan 2022 sebesar 453,3 M mengalami penurunan 9% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 9% menjadi 89%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 80%, namun pada 2022 capaian output menjadi tidak valid karena terisi lebih dari 100%.

Target output jembatan di Kalimantan tahun 2022 ialah 5.125.746,52 meter yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3.947,89 m. Masih terdapat pengisian capaian output yang tidak valid khususnya di Kalimantan Timur yang membutuhkan konfirmasi dari satker terkait.

4.II.D.1.iv. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Alokasi belanja output bantuan stimulan perumahan 2022 sebesar 236,24 M mengalami penurunan 17% sejalan dengan realisasi belanja mengalami kenaikan 10% menjadi hampir 100%. Capaian output 2021 stagnan di 100% seperti pada 2021.

Target output PN bantuan perumahan swadaya 2022 sebesar 11.812 yang tersebar pada 5 provinsi, meningkat dibandingkan target 14.212 unit di 2021. Capaian output di seluruh provinsi secara

umum sangat baik. Hal ini mengindikasikan kinerja pembangunan perumahan yang lebih baik di Regional Kalimantan dibandingkan tahun lalu.

4.II.D.2. KETAHANAN PANGAN

Output hasil dari kelompok ketahanan pangan terdiri atas 9 output, diantaranya 1) Kawasan Padi, 2) Optimasi Lahan, 3) Penyaluran Benih Jagung, 4) Penyaluran Benih Padi, 5) Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak, 6) Optimalisasi Reproduksi, 7) Embung Pertanian, 8) Insentif Penyuluh Pertanian, dan 9) Irigasi Perpipaan dan Perpompaan

4.II.D.2.i. Kawasan Padi

Alokasi belanja output kawasan padi 2022 sebesar 16,83 M mengalami penurunan 66% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 12% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 7% dibanding 2021. Target output PN kawasan padi 2022 ialah 9.347 unit yang tersebar pada 4 provinsi, menurun dibandingkan 35.835 unit di 2021. Dari kelima provinsi, seluruhnya telah mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.D.2.ii. Optimasi Lahan

Alokasi belanja output optimasi lahan 2022 sebesar 20,94 M mengalami penurunan 59% sedangkan

TABEL 97. OPTIMASI LAHAN (KM2) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	46	46	20.85	20.82
KALIMANTAN SELATAN	PN	1	0	0.05	0.05
KALIMANTAN TENGAH	PN	1	1	0.04	0.03
TOTAL		48	47	20.94	20.90

TABEL 98. PENYALURAN BENIH JAGUNG (UNIT) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN SELATAN	PN	2500	5	1.58	1.55

TABEL 99. PENYALURAN BENIH PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	3300	3300	5.35	5.28
KALIMANTAN SELATAN	PN	5197	5197	10.14	9.82
KALIMANTAN TENGAH	PN	800	800	1.26	1.23
KALIMANTAN UTARA	PN	50	50	0.08	0.08
TOTAL		9.347	9.347	16.83	16.41

TABEL 100. OPTIMALISASI REPRODUKSI (EKOR) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	18000	17586	2.55	2.49
KALIMANTAN SELATAN	PN	27000	27000	2.66	2.60
KALIMANTAN TENGAH	PN	2000	1074,926	0.73	0.67
KALIMANTAN TIMUR	PN	6000	6000	1.23	1.19
KALIMANTAN UTARA	PN	1000	1423	0.56	0.53
TOTAL		54.000	53.083	7.74	7.49

realisasi belanja mengalami stagnansi 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 2% dibanding 2021. Target output PN optimasi lahan 2022 ialah 48 km2 yang tersebar 3 provinsi, menurun dibandingkan 96 km2 di 2021. Dari keempat provinsi, hanya Kalimantan Selatan yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.D.2.iii. Penyaluran Benih Jagung

Alokasi belanja output penyaluran benih jagung 2022 sebesar 1,58 M mengalami penurunan sangat signifikan 97% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 2% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 97% dibanding 2021. Target output PN penyaluran benih jagung 2022 ialah 2.500 unit pada Kalimantan Selatan, menurun dibandingkan target 93.284 unit. Provinsi Kalsel belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.D.2.iv. Penyaluran Benih Padi

Alokasi belanja output penyaluran benih padi 2022 sebesar 16,83 M mengalami penurunan 43% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 11% menjadi 89% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 26% dibanding 2021. Target output PN penyaluran benih

padi 2022 ialah 9.347 unit yang tersebar pada 4 provinsi, menurun dibandingkan target 121.006 unit di 2021. Dari keempat provinsi, seluruhnya telah mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.D.2.v. Optimalisasi Reproduksi

Alokasi belanja output optimalisasi reproduksi 2022 sebesar 35,29 M mengalami penurunan 43% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 15% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 28% dibanding 2021. Target output PN optimalisasi reproduksi 2022 ialah 54.000 ekor yang tersebar pada 5 provinsi, meningkat dibandingkan target 41.598 ekor di 2021. Dari keempat provinsi, Kalimantan Barat dan Tengah belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.D.2.vi. Embung Pertanian

Alokasi belanja output embung pertanian 2022 sebesar 3,48 M mengalami kenaikan 7% sedangkan realisasi belanja stagnan 100% sama dengan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan menjadi 86%. Target output PN embung pertanian 2022 ialah 29 unit yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan target 26 unit di 2021. Dari kelima provinsi, hanya Kalsel yang belum mencapai target output yang telah ditentukan.

TABEL 101. EMBUNG PERTANIAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	8	8	0.96	0.96
KALIMANTAN SELATAN	PN	8	4	0.96	0.96
KALIMANTAN TENGAH	PN	5	5	0.60	0.60
KALIMANTAN TIMUR	PN	5	5	0.60	0.60
KALIMANTAN UTARA	PN	3	3	0.36	0.36
TOTAL		29	25	3.48	3.48

TABEL 102. PENYULUH PERTANIAN (ORANG) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	971	971	4.78	4.79
KALIMANTAN SELATAN	PN	1066	1066	5.42	5.40
KALIMANTAN TENGAH	PN	789	789	4.10	3.92
KALIMANTAN TIMUR	PN	605	605	3.25	3.23
KALIMANTAN UTARA	PN	163	163	1.05	1.05
TOTAL		3.594	3.594	18.61	18.39

TABEL 103. IRIGASI PERPIPAAN DAN PERPOMPAAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	13	13	1.50	1.50
KALIMANTAN SELATAN	PN	8	10	0.95	0.94
KALIMANTAN TENGAH	PN	7	6	0.88	0.85
KALIMANTAN TIMUR	PN	4	4	0.49	0.49
KALIMANTAN UTARA	PN	6	21.963	0.69	0.69
TOTAL		38	54,96	4.50	4.46

4.II.D.2.vii. Insentif Penyuluh Pertanian

Alokasi belanja output insentif penyuluh pertanian 2022 sebesar 18,61 M mengalami penurunan 11% sejalan dengan penurunan realisasi belanja 1% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 2% dibanding 2021. Target output PN insentif penyuluh pertanian 2022 ialah 3.594 orang yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan target 3.834 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Kalimantan yang telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.D.2.viii. Irigasi Perpipaan dan Perpompaan

Alokasi belanja output irigasi perpipaan dan perpompaan 2022 sebesar 4,5 M mengalami penurunan 38% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 1% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output 2022 masih belum valid sehingga dibutuhkan konfirmasi ke masing-masing satker. Target output PN output irigasi

perpipaan dan perpompaan 2022 ialah 38 unit yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan target 58 unit di 2021. Provinsi yang belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Kalimantan Tengah.

4.II.D.3. PENDIDIKAN

Output historis hasil dari kelompok pendidikan terdiri atas 3 output diantaranya 1) Bantuan Operasional Sekolah, 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag, 3) Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag.

4.II.D.3.i. Bantuan Operasional Sekolah

Alokasi belanja output BOS 2022 sebesar 647,83 M mengalami kenaikan 11% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 5% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 5% menjadi 100% dibanding 2021. Target output PN output BOS 2022

TABEL 104. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ORANG) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	29608	29241.51514	33.62	33.28
KALIMANTAN SELATAN	PN	73483	76219.62403	82.18	79.98
KALIMANTAN TENGAH	PN	28056	25968.77403	30.85	30.61
KALIMANTAN TIMUR	PN	18194	16953.88	21.01	20.58
KALIMANTAN UTARA	PN	2601	1779	3.27	3.07
TOTAL		151.942	150.162,79	170.93	167.54

TABEL 105. KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) – KEMENAG (ORANG) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	349	349	5.57	5.51
KALIMANTAN SELATAN	PN	493	493	7.95	7.95
KALIMANTAN TENGAH	PN	883	970	13.09	12.27
KALIMANTAN TIMUR	PN	318	318	5.06	5.06
TOTAL		2.043	2.130	31.66	30.78

TABEL 106. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) – KEMENAG 2022 (ORANG) 2022 DI REGIONAL KALIMANTAN

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
KALIMANTAN BARAT	PN	763	781	0.67	0.65
KALIMANTAN SELATAN	PN	40	40	0.01	0.01
KALIMANTAN TENGAH	PN	475	475	5.03	5.03
KALIMANTAN UTARA	PN	175	0	0.18	0.18
TOTAL		1.453	1.296	5.89	5.87

ialah 151.942 orang yang tersebar pada 5 provinsi, meningkat dibandingkan target 153.189 orang di 2021. Dari kelima provinsi tersebut, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang belum mencapai target yang ditentukan.

4.II.D.3.ii. Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag

Alokasi belanja output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 sebesar 31,66 M mengalami kenaikan 22% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 3% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output stabil melampaui target dibanding 2021. Target output PN output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 ialah 2.043 orang yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan target 2.226 orang di 2021. Seluruh provinsi di Kalimantan telah mencapai target yang ditentukan.

4.II.D.3.iii. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag

Alokasi belanja output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 sebesar 5,89 M mengalami kenaikan lima kali lipat sedangkan realisasi belanja stabil di 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 9% menjadi 89% dibanding 2021. Target output PN output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 ialah 1.453 orang yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan target 1.133 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Kalimantan sudah berhasil mencapai target output yang telah ditentukan kecuali Kalimantan Utara.

4.II.E. REGIONAL SULAWESI

Output historis regional Sulawesi terdiri atas 16 output yang termasuk dalam tiga kelompok output yakni infrastruktur ketahanan pangan, dan pendidikan. Secara umum total alokasi pagu di regional Sumatera

untuk ketiga kelompok output historis ini mengalami penurunan 18% dari 4.232,5 M menjadi 3.465,3 M dibandingkan 2021. Sedangkan rata-rata realisasi belanja mengalami kenaikan dari 90% menjadi 91% yang mengindikasikan bahwa output yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya cenderung memiliki capaian lebih baik di tahun berikutnya. Akan tetapi masih terdapat pengisian capaian output yang belum valid di beberapa daerah.

4.II.E.1. INFRASTRUKTUR

Output hasil dari kelompok infrastruktur terdiri atas 4 output diantaranya 1) pembangunan bendungan, 2) pembangunan jalan, 3) pembangunan jembatan, dan 4) bantuan stimulan perumahan.

4.II.E.1.i. Pembangunan Bendungan

Alokasi belanja output bendungan 2022 sebesar 2.067,49 M mengalami penurunan 24% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 7% menjadi 91% dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, capaian output mengalami penurunan menjadi 88% dibanding 2021.

Pada 2022, dari target 8 unit bendungan di 5 provinsi, hanya 7 unit bendungan yang terselesaikan dan 1 bendungan Non PN di Provinsi Sulawesi Selatan tidak selesai sampai akhir tahun. Sedangkan tahun sebelumnya, dari target 8 bendungan, seluruhnya berhasil diselesaikan. Hal ini terindikasi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan yang digunakan untuk pembangunan bendungan.

4.II.E.1.ii. Pembangunan Jalan

Alokasi belanja output jalan 2022 sebesar 269,71 M mengalami kenaikan 75% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 34% menjadi 64%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 41% dan naik menjadi 100% di 2022. Target output jalan di Sulawesi ialah 2.110 km yang tersebar pada 6 provinsi. Dari keenam provinsi tersebut, seluruh output tercapai sesuai

TABEL 107. PEMBANGUNAN BENDUNGAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	1	1	206.34	206.34
SULAWESI BARAT	PN	1	1	87.59	87.59
SULAWESI SELATAN	Non PN	1	0	182.02	11.52
	PN	1	1	254.70	254.66
SULAWESI TENGGARA	PN	2	2	687.94	687.94
SULAWESI UTARA	PN	2	2	648.91	631.84
TOTAL		8	7	2,067.49	1,879.88

TABEL 108. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	1075	1075	56.03	56.03
SULAWESI BARAT	PN	0.000694444	0	20.02	0.00
SULAWESI SELATAN	PN	1	0.58	67.45	54.07
SULAWESI TENGAH	PN	1027.713889	1027	64.29	1.34
SULAWESI TENGGARA	Non PN	6	6	32.18	32.05
	Non PN	1	1	8.10	8.10
	PN	0.045138889	0.045138889	21.65	21.65
TOTAL		2.110.75	2.109.63	269.71	173.24

TABEL 109. PEMBANGUNAN JEMBATAN (M) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	85	85	38.47	38.47
SULAWESI BARAT	PN	68	380988	14.93	14.93
SULAWESI SELATAN	Non PN	740	360380	27.81	27.81
SULAWESI TENGAH	PN	3.41875	3.41875	32.05	32.05
SULAWESI TENGGARA	Non PN	147	45551	65.25	64.31
	Non PN	146.6645833	146.6645833	11.88	11.35
	PN	1.738194444	1.738194444	36.47	36.47
TOTAL		1191.82	787,15	226.87	225.40

TABEL 110. PEMBANGUNAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (UNIT) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	3224	3224	64.48	64.48
SULAWESI BARAT	PN	1017	1017	20.34	20.34
SULAWESI SELATAN	PN	11769	11769	235.38	235.38
SULAWESI TENGAH	PN	5915	5915	118.30	118.70
SULAWESI TENGGARA	PN	2067	2067	41.34	41.34
SULAWESI UTARA	PN	1450	1450	29.00	29.00
TOTAL		25.442	25.442	508.84	509.24

dengan yang ditentukan.

4.II.E.1.iii. Pembangunan Jembatan

Alokasi belanja output jembatan 2022 sebesar 226,87 M mengalami kenaikan 35% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 99%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 53%, namun pada 2022 capaian output menjadi tidak valid karena terisi lebih dari 100%. Target output jembatan di Sulawesi tahun 2022 ialah 1.191.82 meter yang tersebar pada 6 provinsi, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.093,65 m. Pengisian capaian

output yang tidak valid masih terjadi di Sulawesi Barat, Sulsel, dan Sulteng sehingga membutuhkan konfirmasi dari satker terkait.

4.II.E.1.iv. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Alokasi belanja output bantuan perumahan 2022 sebesar 508,84 M mengalami penurunan 13% sedangkan dengan realisasi belanja mengalami kenaikan 5% menjadi 100%. Capaian output 2021 sebesar 36% mengalami kenaikan menjadi 100% di 2022.

TABEL 111. KAWASAN PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	548	548	0.75	0.74
SULAWESI SELATAN	PN	7000	7000	11.94	11.08
SULAWESI TENGAH	PN	1100	1080	1.90	1.80
SULAWESI TENGGARA	PN	1900	1900	3.15	3.12
SULAWESI UTARA	PN	600	600	1.03	0.99
TOTAL		11.148	11.128	18.77	17.73

TABEL 112. OPTIMASI LAHAN (KM2) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	1	1	0.11	0.02
SULAWESI BARAT	PN	1	0.013194444	0.04	0.01
SULAWESI SELATAN	PN	6	0	3.69	0.00
SULAWESI TENGAH	PN	36	36	11.66	11.37
SULAWESI TENGGARA	PN	1.169444444	0	2.09	2.09
SULAWESI UTARA	PN	4	4	1.85	1.84
TOTAL		49.17	41.01	19.44	15.33

TABEL 113. PENYALURAN BENIH JAGUNG (UNIT) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	1000	1500	0.63	0.63
SULAWESI SELATAN	PN	3000	3000	1.89	1.83
SULAWESI TENGAH	PN	1000	1000	0.63	0.63
SULAWESI TENGGARA	PN	1120	1120	0.63	0.63
SULAWESI UTARA	PN	3000	3000	1.89	1.82
TOTAL		9.120	9.620	5.67	5.54

Target output PN bantuan perumahan swadaya 2022 sebesar 25.442 unit yang tersebar pada 6 provinsi, meningkat dibandingkan target 29.391 unit di 2021. Capaian output di seluruh provinsi secara umum sangat baik. Hal ini mengindikasikan kinerja pembangunan perumahan yang lebih baik di Regional Sulawesi dibandingkan tahun lalu.

4.II.E.2. KETAHANAN PANGAN

Output hasil dari kelompok ketahanan pangan terdiri atas 9 output, diantaranya 1) Kawasan Padi, 2) Optimasi Lahan, 3) Penyaluran Benih Jagung, 4) Penyaluran Benih Padi, 5) Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak, 6) Optimalisasi Reproduksi, 7) Embung Pertanian, 8) Insentif Penyuluh Pertanian, dan 9) Irigasi Perpipaan dan Perpompaan

4.II.E.2.i. Kawasan Padi

Alokasi belanja output kawasan padi 2022 sebesar 18,77 M mengalami penurunan 13% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 1% menjadi 94% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 35% dibanding 2021.

Target output PN kawasan padi 2022 ialah 11.148 unit yang tersebar 6 provinsi, meningkat dibandingkan

16.569 unit di 2021. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena capaian output 2021 hanya mampu mencapai 10.760 unit (65%). Dari kelima provinsi, hanya Sulteng yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.E.2.ii. Optimasi Lahan

Alokasi belanja output optimasi lahan 2022 sebesar 19,44 M mengalami penurunan 36% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 3% menjadi 96% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 19% dibanding 2021.

Target output PN optimasi lahan 2022 ialah 49,17 km2 yang tersebar 6 provinsi, menurun dibandingkan 47,70 km2 di 2021. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena capaian output 2021 hanya mampu mencapai 20,86 unit (43,7%). Dari enam provinsi, Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.E.2.iii. Penyaluran Benih Jagung

Alokasi belanja output penyaluran benih jagung 2022 sebesar 5,67 M mengalami penurunan sangat signifikan 97% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 6% menjadi 98% dibandingkan tahun

TABEL 114. PENYALURAN BENIH PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	5100	5100	1.65	1.65
SULAWESI BARAT	PN	2500	2500	0.88	0.84
SULAWESI SELATAN	PN	40000	40000	11.75	11.49
SULAWESI TENGAH	PN	10300	10300	3.03	2.90
SULAWESI TENGGARA	PN	10650	10650	3.05	3.04
SULAWESI UTARA	PN	3400	3400	1.24	1.09
TOTAL		71.950	71.950	21.60	21.01

TABEL 115. OPTIMALISASI REPRODUKSI (EKOR) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	18000	1924260500	1.93	1.89
SULAWESI BARAT	PN	7000	7000	0.87	0.87
SULAWESI SELATAN	PN	70000	30	5.96	5.90
SULAWESI TENGAH	PN	20700	23805	2.48	2.34
SULAWESI TENGGARA	PN	12000	12000	1.94	1.93
SULAWESI UTARA	PN	7000	7000	1.31	1.29
TOTAL		134.700	1.924.310.335	14.48	14.21

TABEL 116. EMBUNG PERTANIAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	12	31	1.44	1.44
SULAWESI BARAT	PN	19	19	2.28	2.28
SULAWESI SELATAN	PN	48	7	5.76	0.76
SULAWESI TENGAH	PN	21	21	2.52	2.52
SULAWESI TENGGARA	PN	18	22	2.16	2.16
SULAWESI UTARA	PN	10	10	1.20	1.20
TOTAL		128	110	15.36	10.36

sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 69% dibanding 2021. Target output PN penyaluran benih jagung 2022 ialah 9.120 unit yang tersebar pada 5 provinsi, menurun dibandingkan target 318.087 unit di 2021. Dari kelima provinsi, seluruhnya telah mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.E.2.iv. Penyaluran Benih Padi

Alokasi belanja output penyaluran benih padi 2022 sebesar 21,6 M mengalami penurunan 60% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 4% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 20% dibanding 2021.

Target output PN penyaluran benih padi 2022 ialah 71.950 unit yang tersebar pada 6 provinsi, menurun dibandingkan target 220.640 unit di 2021. Dari keenam provinsi, seluruhnya telah mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.E.2.v. Optimalisasi Reproduksi

Alokasi belanja output optimalisasi reproduksi

2022 sebesar 14,48 M mengalami penurunan 36% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 47% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output tervalidasi 2021 ialah 52%, sedangkan capaian 2022 perlu divalidasi lebih lanjut. Target output PN optimalisasi reproduksi 2022 ialah 134.700 ekor yang tersebar pada 6 provinsi, meningkat dibandingkan target 169.075 kelompok masyarakat di 2021. Dari enam provinsi, pengisian capaian output yang tidak valid terjadi di Gorontalo. Selain itu, hanya Sulsel yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

4.II.E.2.vi. Embung Pertanian

Alokasi belanja output embung pertanian 2022 sebesar 15,36 M mengalami penurunan 7% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 28% menjadi 67% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 24% dibanding 2021. Target output PN embung pertanian 2022 ialah 128 unit yang tersebar pada 6 provinsi, menurun dibandingkan target 136 unit di 2021. Provinsi di Regional Sulawesi yang belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Sulawesi Selatan.

TABEL 117. INSENTIF PENYULUH PERTANIAN (ORANG) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	459	459	2.40	2.35
SULAWESI BARAT	PN	506	14.08194444	2.77	2.71
SULAWESI SELATAN	PN	2224	2224	15.70	15.65
SULAWESI TENGAH	PN	1185	1185	6.93	6.75
SULAWESI TENGGARA	PN	993	993	8.17	7.90
SULAWESI UTARA	PN	738	738	3.84	3.83
TOTAL		6.105	5.613,08	39.81	39.21

TABEL 118. IRIGASI PERPIPAAN DAN PERPOMPAAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	3	6	0.39	0.38
SULAWESI BARAT	PN	7	7	0.84	0.75
SULAWESI SELATAN	PN	22	4	2.50	0.89
SULAWESI TENGAH	PN	24	30	2.63	2.63
SULAWESI TENGGARA	PN	11	23	1.33	1.33
SULAWESI UTARA	PN	13	15	1.40	1.40
TOTAL		80	85	9.08	7.38

TABEL 119. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ORANG) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	10459	10614	12.56	11.85
SULAWESI BARAT	PN	6334	7722.89	7.79	7.58
SULAWESI SELATAN	PN	49328	58323.46042	58.91	57.67
SULAWESI TENGAH	PN	21195	22181.10111	24.31	23.08
SULAWESI TENGGARA	PN	24706	26965.63278	27.98	27.46
SULAWESI UTARA	PN	13604	21511.19819	15.43	15.23
TOTAL		125.626	147.318	146.99	142.88

4.II.E.2.vii. Insentif Penyuluh Pertanian

Alokasi belanja output insentif penyuluh pertanian 2022 sebesar 39,81 M mengalami penurunan 6% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 3% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami penurunan 17% dibanding 2021. Target output PN insentif penyuluh pertanian 2022 ialah 6.105 orang yang tersebar pada 6 provinsi, menurun dibandingkan target 6.918 orang di 2021. Selain pengisian capaian output yang belum valid di Sulawesi Barat, provinsi lainnya telah mampu mencapai target yang ditentukan.

4.II.E.2.viii. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan

Alokasi belanja output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 sebesar 9,08 M mengalami penurunan 58% sejalan dengan realisasi belanja mengalami penurunan 14% menjadi 81% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan menjadi >100% dibanding 2021. Target output PN output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 ialah 80 unit yang tersebar pada 6 provinsi, menurun dibandingkan target 193 unit di 2021. Seluruh provinsi di Regional Sulawesi telah mencapai target output yang telah ditentukan kecuali Sulawesi Selatan.

4.II.E.3. PENDIDIKAN

Output historis hasil dari kelompok pendidikan terdiri atas 3 output diantaranya 1) Bantuan Operasional Sekolah, 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag, 3) Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag.

4.II.E.3.i. Bantuan Operasional Sekolah

Alokasi belanja output BOS 2022 sebesar 146,99 M mengalami kenaikan 8% sejalan dengan realisasi belanja mengalami kenaikan 2% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 5% menjadi > 100% pada 2022. Target output PN BOS 2022 ialah 587.631 orang yang tersebar pada 10 provinsi, meningkat dibandingkan target 582.942 orang di 2021. Provinsi di Regional Sulawesi yang belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Sulawesi Tengah.

4.II.E.3.ii. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag

Alokasi belanja output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 sebesar 82,98M mengalami kenaikan 54% sejalanrealisasi belanja mengalami kenaikan 5% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami

TABEL 120. KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) – KEMENAG (ORANG) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
GORONTALO	PN	394	394	4.38	4.38
SULAWESI BARAT	PN	325	325	3.47	3.47
SULAWESI SELATAN	PN	3172	3220	45.61	45.60
SULAWESI TENGAH	PN	498	498	5.59	5.59
SULAWESI TENGGARA	PN	416	474	4.67	4.67
SULAWESI UTARA	PN	1235	1231	19.27	19.20
TOTAL		6.040	6.142	82.98	82.90

TABEL 121. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) – KEMENAG 2022 (ORANG) 2022 DI REGIONAL SULAWESI

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
SULAWESI BARAT	PN	126	126	0.13	0.13
SULAWESI SELATAN	PN	156	182	0.14	0.14
SULAWESI TENGAH	PN	508	508	0.34	0.32
SULAWESI TENGGARA	PN	118	118	0.07	0.07
SULAWESI UTARA	PN	405	405	0.39	0.37
TOTAL		1.313	1.339	1.06	1.02

kenaikan 5% menjadi 100% dibanding 2021. Target output PN output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 ialah 6.040 orang yang tersebar pada 16 provinsi, meningkat dibandingkan target 5.110 orang di 2021. Seluruh provinsi di regional ini telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

4.II.E.3.iii. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag

Alokasi belanja output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 sebesar 1,06 M mengalami penurunan 6% sejalan realisasi belanja mengalami penurunan 3% menjadi 96% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan menjadi lebih dari 100%. Target output PN output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 ialah 1.313 orang yang tersebar pada 5 provinsi, meningkat dibandingkan target 1.242 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Sulawesi sudah berhasil mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.F. REGIONAL PAPUA-MALUKU

Output historis Regional Maluku-Papua terdiri atas 16 output yang termasuk dalam tiga kelompok output yakni infrastruktur ketahanan pangan, dan pendidikan. Secara umum total alokasi pagu di Regional Maluku Papua untuk ketiga kelompok output historis ini mengalami penurunan 15% dari 3.309,89 M menjadi 2.797,92 dibandingkan 2021. Sedangkan rata-rata realisasi belanja mengalami penurunan dari 99% menjadi 90%. Masih terdapat pengisian capaian

output yang belum valid di beberapa daerah.

4.II.F.1. INFRASTRUKTUR

Output hasil dari kelompok infrastruktur terdiri atas 4 output diantaranya 1) pembangunan bendungan, 2) pembangunan jalan, 3) pembangunan jembatan, dan 4) bantuan stimulan perumahan.

4.II.F.1.i. Pembangunan Bendungan

Alokasi belanja output bendungan 2022 sebesar 367,12 M mengalami kenaikan 13% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, capaian output mengalami kenaikan menjadi 100%. Pada 2022, dari target 1 unit bendungan di Provinsi Maluku, seluruhnya telah terselesaikan sampai akhir tahun. Sedangkan tahun sebelumnya, dari target 2 bendungan, belum ada yang berhasil diselesaikan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kinerja di 2022 dibandingkan 2021.

4.II.F.1.ii. Pembangunan Jalan

Alokasi belanja output jalan 2022 sebesar 904,32 M mengalami penurunan 32% sejalan dengan realisasi belanja mengalami penurunan 21% menjadi 78%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 88%, naik 5% menjadi 93% di 2022. Target output jalan di Regional Maluku Papua ialah 20.986 km yang tersebar pada 4. Dari keempat lokasi tersebut, target output yang tercapai hanya ada di Aceh, Bengkulu, Kepri, dan Sumbar. Capaian provinsi lainnya tidak mencapai

TABEL 122. PEMBANGUNAN BENDUNGAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	1	1	367.12	367.12

TABEL 123. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	Non PN	0.045138889	0.045138889	5.69	5.69
	PN	3.465972222	3.045138889	155.16	28.84
MALUKU UTARA	PN	0.503472222	0.503472222	132.25	82.19
PAPUA	PN	20925.69236	19377.69236	276.14	251.93
PAPUA BARAT	PN	56.88	56.88	335.08	335.02
TOTAL		20.986	19.438	904.32	703.67

TABEL 124. PEMBANGUNAN JEMBATAN (M) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	41.15416667	39.4875	282.09	212.06
MALUKU UTARA	PN	349.7394444	349.7394444	82.83	55.55
PAPUA	Non PN	6177.876389	14623.94	93.00	92.65
	PN	387.0584722	255.97375	416.66	304.03
PAPUA BARAT	Non PN	60	2.870138889	3.72	3.72
	PN	690	690	285.37	285.37
TOTAL		7.705,82	15.962,01	1.163,66	953,38

TABEL 125. BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (UNIT) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	2118	2055	42.36	42.36
MALUKU UTARA	PN	1112	1112	22.24	22.24
PAPUA	PN	2847	2847	99.04	94.97
PAPUA BARAT	PN	1338	1337	50.17	50.17
TOTAL		7.415	7.351	213.81	209.74

target. Khusus di Sumatera Utara, pembangunan jalan di Papua dan Maluku dengan tagging PN belum berhasil memenuhi target capaian yang telah ditentukan.

4.II.F.1.iii. Pembangunan Jembatan

Alokasi belanja output jembatan 2022 sebesar 1.163,66 M mengalami kenaikan 1% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 17% menjadi 82%. Capaian output 2021 tervalidasi sebesar 62%, namun pada 2022 capaian output menjadi tidak valid karena terisi lebih dari 100%. Target output jembatan di Regional Sulawesi tahun 2022 ialah 7.705,82 meter yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 12.199,71 m. Pada Maluku Utara dan Papua Barat, capaian pembangunan jembatan PN telah mampu mencapai target. Di sisi lain, di lokasi lainnya masih ditemukan pengisian caput yang tidak valid sehingga perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

4.II.F.1.iv. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Alokasi belanja output bantuan perumahan 2022 sebesar 213,81 M mengalami penurunan 33% sedangkan realisasi belanja mengalami stagnan di 98% sama dengan 2021. Capaian output 2021 sebesar 52% mengalami kenaikan menjadi 99% di

2022. Target output PN bantuan perumahan swadaya 2022 sebesar 7.415 unit yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan target 12.580 unit di 2021. Provinsi yang belum mencapai target capaian output diantaranya Maluku dan Papua Barat.

4.II.F.2. KETAHANAN PANGAN

Output hasil dari kelompok ketahanan pangan terdiri atas 9 output, diantaranya 1) Kawasan Padi, 2) Optimasi Lahan, 3) Penyaluran Benih Jagung, 4) Penyaluran Benih Padi, 5) Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak, 6) Optimalisasi Reproduksi, 7) Embung Pertanian, 8) Insentif Penyuluh Pertanian, dan 9) Irigasi Perpipaan dan Perpompaan.

4.II.F.2.i. Kawasan Padi

Alokasi belanja output kawasan padi 2022 sebesar 3,14 M mengalami penurunan 75% sejalan dengan penurunan realisasi belanja sebesar 2% menjadi 96% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, capaian output mengalami kenaikan 17% dibanding 2021. Target output PN kawasan padi 2022 ialah 2.000 unit yang tersebar pada 2 provinsi, menurun dibandingkan 11.750 unit di 2021. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena capaian output 2021 hanya mampu mencapai 9.752 unit (83%). Seluruh provinsi telah berhasil mencapai target output yang telah ditentukan.

TABEL 126. KAWASAN PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	1000	1000	1.57	1.45
PAPUA BARAT	PN	1000	1000	1.57	1.57
TOTAL		2.000	2.000	3.14	3.02

TABEL 127. OPTIMASI LAHAN (KM2) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	1.1	1.047222222	1.17	1.16
PAPUA	PN	5	5	2.61	2.61
PAPUA BARAT	PN	1	1	0.28	0.12
TOTAL		7.1	7.05	4.06	3.89

TABEL 128. PENYALURAN BENIH JAGUNG (UNIT) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
PAPUA	PN	500	500	0.32	0.00

TABEL 129. PENYALURAN BENIH PADI (UNIT) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	2000	4	0.80	0.80
MALUKU UTARA	PN	4000	4000	1.28	1.28
PAPUA	PN	3000	3000	1.21	1.09
PAPUA BARAT	PN	1000	1000	0.83	0.83
TOTAL		10.000	8.004	4.11	3.99

TABEL 130. OPTIMALISASI REPRODUKSI (EKOR) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	2000	2000	1.03	1.03
MALUKU UTARA	PN	1500	1725	0.78	0.78
PAPUA	PN	1500	1500	1.94	1.93
PAPUA BARAT	PN	1300	1300	1.33	1.32
TOTAL		6.300	6.525	5.08	5.06

4.II.F.2.ii. Optimasi Lahan

Alokasi belanja output optimasi lahan 2022 sebesar 4,06 M mengalami penurunan 66% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 3% menjadi 96% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 37% dibanding 2021. Target output PN optimasi lahan 2022 ialah 7,1 km2 yang tersebar pada 3 provinsi, menurun dibandingkan 18,5 km2 di 2021. Dari ketiga provinsi, hanya Maluku yang belum mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.F.2.iii. Penyaluran Benih Jagung

Alokasi belanja output penyaluran benih jagung 2022 sebesar 0,32 M mengalami penurunan sangat signifikan 99% sejalan dengan realisasi belanja mengalami penurunan 99% menjadi 0% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 9% dibanding 2021. Target output PN penyaluran benih jagung 2022 ialah 500 unit dan hanya teralokasi pada Provinsi Papua dan sepenuhnya telah mencapai target output

yang telah ditentukan.

4.II.F.2.iv. Penyaluran Benih Padi

Alokasi belanja output penyaluran benih padi 2022 sebesar 4,11 M mengalami penurunan 65% sejalan dengan realisasi belanja mengalami penurunan 2% menjadi 97% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 28% dibanding 2021. Target output PN penyaluran benih padi 2022 ialah 10.000 unit yang tersebar pada 4 provinsi, menurun dibandingkan target 54.650 unit di 2021. Seluruh provinsi telah mampu mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.F.2.v. Optimalisasi Reproduksi

Alokasi belanja output optimalisasi reproduksi 2022 sebesar 5,08 M mengalami penurunan 42% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output stagnan diatas 100% dibandingkan 2021. Target output PN optimalisasi reproduksi 2022 ialah 6.300 ekor yang tersebar pada

TABEL 131. EMBUNG PERTANIAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	6	6	0.72	0.72
MALUKU UTARA	PN	7	12	0.84	0.84
PAPUA	PN	3	3	0.36	0.36
PAPUA BARAT	PN	5	40012	0.60	0.60
TOTAL		21	40	2.52	2.52

TABEL 132. PENYULUH PERTANIAN (ORANG) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	559	559	4.30	4.29
MALUKU UTARA	PN	481	481	3.08	3.07
PAPUA	PN	870	917700	6.48	5.55
PAPUA BARAT	PN	421	421	2.99	2.98
TOTAL		2.331	919,161	16.85	15.89

TABEL 133. IRIGASI PERPIPAAN DAN PERPOMPAAN (UNIT) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	17	17	2.47	2.47
MALUKU UTARA	PN	14	21.775	2.05	2.05
PAPUA	PN	8	8	1.21	1.21
PAPUA BARAT	PN	20	40,12	2.74	2.63
TOTAL		59	40,17	8.48	8.36

4 provinsi, meningkat dibandingkan target 8.084 kelompok masyarakat di 2021. Dari keempat provinsi, seluruhnya telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.F.2.vi. Embung Pertanian

Alokasi belanja output embung pertanian 2022 sebesar 2,52 M mengalami kenaikan 5% sedangkan realisasi belanja sama dengan tahun sebelumnya di angka 100%. Disisi lain, capaian output baik 2021 maupun 2022 > 100%. Target output PN embung pertanian 2022 ialah 21 unit yang tersebar pada 4 provinsi, menurun dibandingkan target 20 unit di 2021. Seluruh provinsi di Regional Maluku Papua telah mencapai target output yang telah ditentukan.

4.II.F.2.vii. Insentif Penyuluh Pertanian

Alokasi belanja output insentif penyuluh pertanian 2022 sebesar 16,85 M mengalami penurunan 5% sejalan dengan realisasi belanja mengalami penurunan 6% menjadi 94% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output 2022 sama dengan 2021 melampaui 100%. Target output PN insentif penyuluh pertanian 2022 ialah 2.331 orang yang tersebar pada 4 provinsi, menurun dibandingkan target 2.552 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Maluku Papua yang telah mencapai target output yang telah ditentukan ialah Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

4.II.F.2.viii. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan

Alokasi belanja output irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 sebesar 8,48 M mengalami

penurunan 2% sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan 1% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output sama dengan 2021 berada diatas 100%. Target output PN irigasi perpipaan dan perpompaaan 2022 ialah 59 unit yang tersebar pada 4 provinsi, sama dengan target 59 unit di 2021. Seluruh provinsi di Regional Maluku Papua telah mencapai target output yang ditentukan.

4.II.F.3. PENDIDIKAN

Output historis hasil dari kelompok pendidikan terdiri atas 3 output diantaranya 1) Bantuan Operasional Sekolah, 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kemenag, 3) Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag.

4.II.F.3.i. Bantuan Operasional Sekolah

Alokasi belanja output BOS 2022 sebesar 43,02 M mengalami penurunan 13% sedangkan realisasi belanja mengalami kenaikan 1% menjadi 99% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 7% menjadi 100% dibanding 2021. Target output PN output BOS 2022 ialah 38.055 orang yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan target 47.451 orang di 2021. Provinsi di Regional Maluku Papua yang belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Maluku.

4.II.F.3.ii. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag

Alokasi belanja output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 sebesar 33,32 M mengalami kenaikan 41% sedangkan realisasi belanja mengalami

TABEL 134. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ORANG) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	13860	13655.33236	15.18	15.12
MALUKU UTARA	PN	14563	16669.89	16.46	16.38
PAPUA	PN	3949	3951.711806	4.72	4.64
PAPUA BARAT	PN	5683	5689	6.66	6.54
TOTAL		38.055	39.965	43.02	42.68

TABEL 135. KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) – KEMENAG (ORANG) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	1003	614359	13.90	13.81
MALUKU UTARA	PN	250	250	4.13	4.13
PAPUA	PN	1056	1056	11.64	11.64
PAPUA BARAT	PN	340	340	3.66	3.66
TOTAL		2.649	616,005	33.32	33.23

TABEL 136. PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) – KEMENAG (ORANG) 2022 DI REGIONAL MALUKU PAPUA

Lokasi	Tagging PN	Target	Capaian	Pagu (M)	Real (M)
MALUKU	PN	410	410	0.35	0.30
MALUKU UTARA	PN	1426	1441	1.11	1.11
PAPUA	PN	1732	1762	1.57	1.57
PAPUA BARAT	PN	697	697	0.62	0.60
TOTAL		4.265	4.310	3.65	3.58

kenaikan 1% menjadi 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output 2022 masih perlu divalidasi. Target output PN output Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah – Kemenag 2022 ialah 2.649 orang yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan target 2.184 orang di 2021. Provinsi di Regional Maluku Papua belum mencapai target output yang telah ditentukan ialah Maluku.

4.II.F.3.iii. Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag

Alokasi belanja output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 sebesar 3,65 M mengalami penurunan 4% sejalan dengan penurunan realisasi belanja 1% menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, capaian output mengalami kenaikan 3% menjadi > 100% dibanding 2021. Target output PN output Program Indonesia Pintar (PIP) – Kemenag 2022 ialah 4.265 orang yang tersebar pada 4 provinsi, meningkat dibandingkan target 4.711 orang di 2021. Seluruh provinsi di Regional Maluku Papua sudah berhasil mencapai target output yang telah ditentukan.



BAB III

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL

1. OVERVIEW KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL

Bab ini membahas sektor-sektor yang menjadi unggulan beserta sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan pada setiap regional. Sektor unggulan didefinisikan sebagai sektor yang menguasai kelebihan secara komparatif sehingga mampu memberikan andil dan kontribusi dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi wilayah (Pamungkas dan Iriani, 2022). Untuk mendapatkan gambaran tentang kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian nasional, berikut disajikan data PDB Nasional tahun 2022 berdasarkan lapangan usaha.

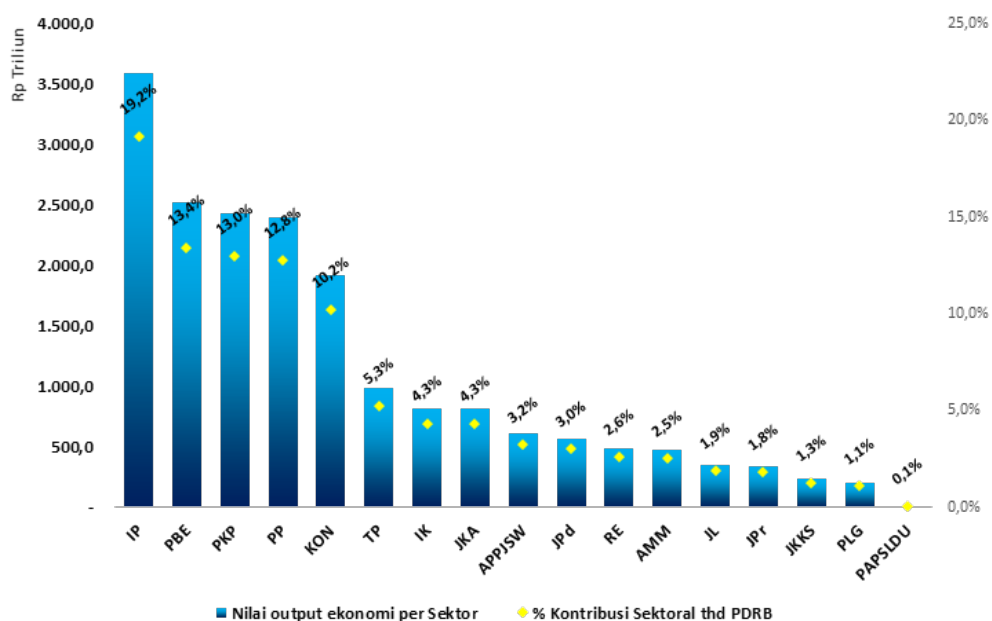
Secara nasional, terdapat lima besar sektor lapangan usaha yang cukup dominan memberikan kontribusi terhadap PDB (lebih dari 10 persen) dan dipandang sebagai sektor unggulan, yaitu: (i) Sektor Industri Pengolahan; (ii) Sektor Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (iv) Pertambangan dan Penggalian, dan (v) Sektor Konstruksi. Kelima sektor lapangan usaha tersebut menguasai total $\pm 68,60$ persen total PDB secara nasional. Besaran kontribusi setiap regional terhadap nilai total PDB sektoral pada keempat lapangan usaha unggulan di atas secara nasional sangat tergantung pada skala ekonomi, kondisi/karakteristik regional, serta keunggulan kompetitif atau sumber daya yang dimiliki masing-masing regional.

Dari sisi laju pertumbuhan sektoral di tingkat nasional, terlihat bahwa pada tahun 2022 seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif baik secara nominal maupun persentase. Hal tersebut tidak lepas dari dampak pemulihan ekonomi seiring dengan situasi pandemi yang mulai membaik serta



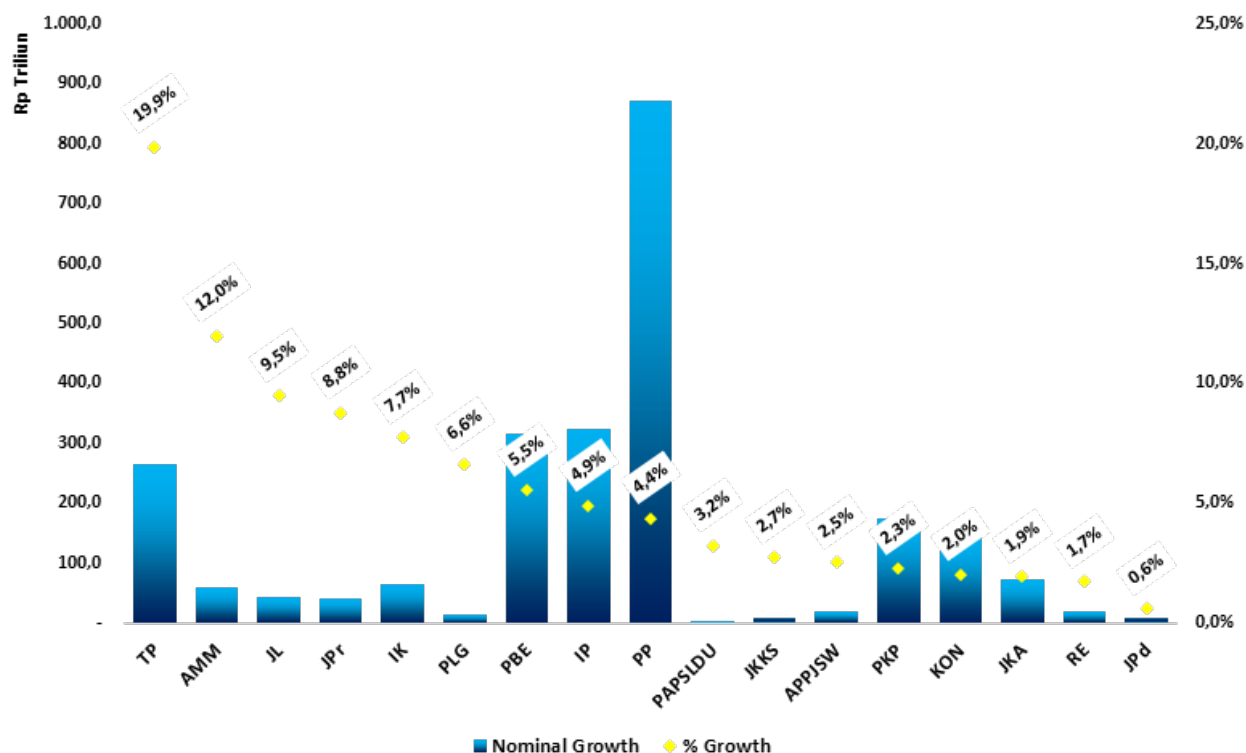
GAMBAR 84. PDB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA TAHUN 2022



Sumber: BPS, diolah

*Keterangan:

IP = Industri Pengolahan; PBE = Perdagangan Besar dan Eceran; PKP = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; KON = Konstruksi; PP = Pertambangan dan Penggalian; IK = Informasi dan Komunikasi; JKA = Jasa Keuangan dan Asuransi; APPJSW = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; TP = Transportasi dan Pergudangan; JPd = Jasa Pendidikan; AMM = Akomodasi dan Makan Minum; RE = Real Estate; JP r = Jasa Perusahaan; JL = Jasa Lainnya; JKKS = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; PLG = Pengadaan Listrik dan Gas; PAPSLDU = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

GAMBAR 85. LAJU PERTUMBUHAN PDB PER SEKTOR LAPANGAN USAHA DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022


Sumber: BPS, diolah

*Keterangan:

PP = Pertambangan dan Penggalian; JKKS = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; IP = Industri Pengolahan; KON = Konstruksi; PBE = Perdagangan Besar dan Eceran; IK = Informasi dan Komunikasi; PKP = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; PAP SLDU = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; JKA = Jasa Keuangan dan Asuransi; AMM = Akomodasi dan Makan Minum; PLG = Pengadaan Listrik dan Gas; TP = Transportasi dan Pergudangan; RE = Real Estate; JPd = Jasa Pendidikan; JPr = Jasa Perusahaan; JL = Jasa Lainnya; APP JSW = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

terkendali. Dilihat dari sisi persentase, maka Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19 yang memungkinkan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan PPKM. Bila kita perhatikan lagi, dengan mengacu pada besaran nilai laju lapangan usaha di tingkat nasional, maka selain sektor Transportasi dan Pergudangan, terdapat beberapa sektor yang dinilai cukup potensial untuk berkembang, antara lain: (i) Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman, (ii) Jasa Lainnya, (iii) Jasa Perusahaan, (iv) Informasi dan Komunikasi, serta (v) Pengadaan Listrik dan Gas.

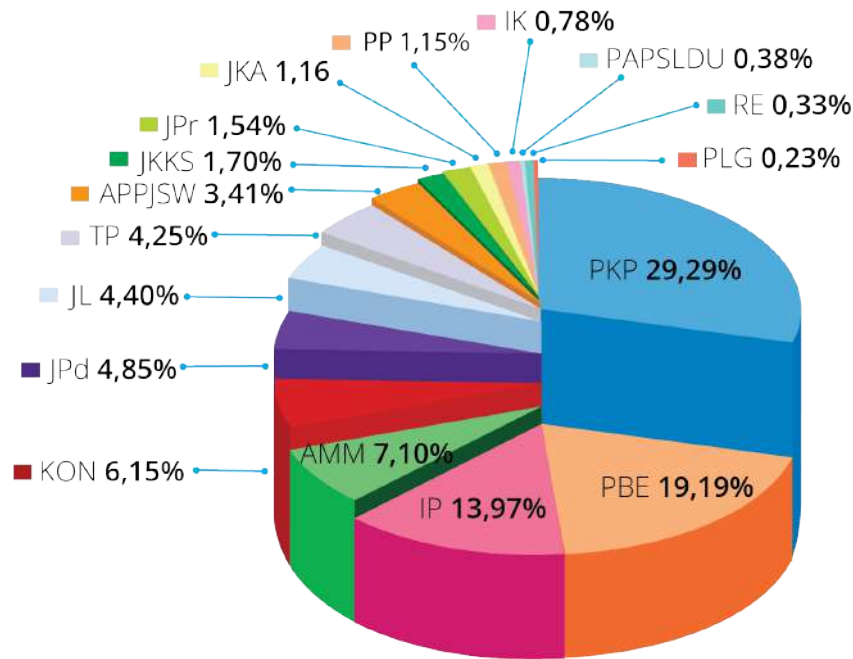
Pada tahun 2022, secara nasional, seluruh lapangan usaha yang ada dapat menyerap tenaga kerja sebesar 270,91 juta orang. Terdapat hubungan/korelasi positif antara sektor unggulan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di tingkat nasional. 3 (tiga) sektor utama atau unggulan di tingkat nasional dan kontributor terbesar PDB tahun 2022 yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, menjadi 3 (tiga) sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Secara keseluruhan, ketiga sektor yang menyumbangkan 45,60 persen PDB tahun 2022 tersebut menyerap total 169,18 juta orang tenaga kerja atau 62,40 persen dari total tenaga kerja terserap sektor lapangan usaha pada

tahun 2022. Detail rincian kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh setiap sektor lapangan usaha pada tahun 2022 dapat dilihat pada diagram Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Tingkat Nasional.

Pada level regional, alat analisis yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan dan sektor potensial pada masing-masing wilayah adalah analisis Location Quotient, Analisis Shift Share, dan Analisis Tipologi Klassen. Variabel yang digunakan adalah PDRB Provinsi masing-masing regional secara agregat Atas Dasar Harga Konstan periode tahun 2020 – 2022. Penjelasan atas masing-masing alat analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Location Quotient

Location Quotient merupakan analisis yang digunakan untuk menemukan sektor basis dan non basis dengan tujuan untuk mengetahui keunggulan komparatif atau bagaimana suatu daerah dalam menentukan sektor unggulannya (Pamungkas dan Iriani, 2022). Hasil dari perhitungannya dapat membantu untuk melihat kekuatan serta kelemahan suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (Nasional). Formula perhitungan LQ adalah

GAMBAR 86. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI TINGKAT NASIONAL

Sumber: BPS, diolah

*Keterangan:

PKP = Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; PBE = Perdagangan Besar dan Eceran; IP = Industri Pengolahan; AMM = Akomodasi dan Makan Minum; KON = Konstruksi; TP = Transportasi dan Pergudangan; JP = Jasa Perusahaan; PP = Pertambangan dan Penggalian; IK = Informasi dan Komunikasi; PAP SLDU = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; RE = Real Estate; PLG = Pengadaan Listrik dan Gas; JKA = Jasa Keuangan dan Asuransi.

sebagai berikut:

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t}$$

Keterangan :

LQ=Location Quotient

V_i =Nilai PDRB Sektor i pada level Regional

V_t =Total PDRB pada level Regional

Y_i =Nilai PDRB Sektor i pada level Nasional

Y_t =Total PDRB pada level Nasional

Setelah dihitung dengan menggunakan rumus tersebut maka akan ditemukan nilai LQ untuk menentukan apakah sektor tersebut merupakan sektor basis atau nonbasis. Tiga kemungkinan hasil dari analisis LQ, yaitu: $LQ > 1$ sektor tersebut merupakan sektor basis; $LQ = 1$ sektor tersebut pada suatu regional memiliki laju pertumbuhan yang sama dengan level nasional; serta $LQ < 1$ sektor tersebut merupakan sektor non basis.

2. Analisis Shift Share

Menurut Abidin (2015) pada dasarnya analisis shift-share menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar (provinsi/nasional). Analisis Shift-Share dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a **Proportional Share (PS)** Perhitungan ini menggambarkan total laju pertumbuhan nilai tambah sektor dibandingkan dengan seluruh sektor di tingkat nasional (Veransiska dan Imaningsih, 2022). Perhitungan ini dapat memungkinkan kondisi perekonomian daerah ini terkonsentrasi pada industri-industri yang lebih cepat dibanding perekonomian yang menjadi acuan (Arsyad, 2015).

$$PS = Q_{ij}^0 \left\{ \frac{Q_i^t}{Q_i^0} - \frac{Y_t}{Y_0} \right\}$$

Keterangan :

Y_t =Total PDRB Nasional tahun t

Y_0 =Total PDRB Nasional tahun dasar

Q_i^t =PDRB Nasional sektor i tahun t

Q_i^0 =PDRB Nasional sektor i tahun dasar

Q_{ij}^0 =PDRB Regional j pada sektor i tahun dasar

Ketika $PS < 0$ sektor ini relatif lambat di tingkat nasional, sebaliknya jika $PS > 0$ menandakan bahwa sektor tersebut relatif cepat di tingkat nasional

b **Potential Regional (PR)** yakni pola ekonomi di kawasan itu dengan mengukur berlandaskan pada model pengkajian didalam pergeseran secara sektoral perekonomian dipadankan pada pergeseran sektor yang sejenis di wilayah lain



(Arsyad, 2015).

$$PR = Q_{ij}^0 \left\{ \frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right\}$$

Keterangan :

Y_t = Total PDRB Nasional tahun t

Y_0 = Total PDRB Nasional tahun dasar

Q_{ij}^0 = PDRB Regional j pada sektor i tahun dasar

Jika nilai $PR < \Delta Q$, pertumbuhan proporsional diregional terkait cenderung mendorong pertumbuhan pada tingkat nasional. Sebaliknya jika nilai $PR > \Delta Q$, pertumbuhan proporsional di regional terkait cenderung menghambat pertumbuhan pada tingkat provinsi.

- c **Differential Share (DS)** yakni perhitungan yang dapat menggambarkan seberapa jauh sektor industri daerah (lokal) dengan daerah pembanding/acuan. Apabila sektor industri pada daerah lokal terjadi pergeseran diferensial dengan nilai positif maka sektor industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dari pada sektor industri yang sama pada daerah pembanding/acuan (Arsyad, 2015).

$$DS = Q_{ij}^0 \left\{ \frac{Q_{ij}^t}{Q_{ij}^0} - \frac{Q_i^t}{Q_i^0} \right\}$$

Keterangan :

Q_{ij}^0 = PDRB Provinsi j pada sektor i tahun dasar

Q_{ij}^t = PDRB Provinsi j pada sektor i tahun t

Q_i^t = PDRB Nasional sektor i tahun t

Q_i^0 = PDRB Nasional sektor i tahun dasar

Jika nilai $DS < 0$, daya saing sektor regional akan menurun dipadankan sektor yang sama pada ekonomi nasional. Sebaliknya jika nilai $DS > 0$, daya saing sektor lokal meningkat dipadankan sektor yang sama pada ekonomi nasional.

3. Analisis Tipologi Klassen

Menurut Arsyad (2015) untuk mengetahui pola serta struktur pertumbuhan ekonomi daerah digunakan dua indikator utama yakni pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Dengan menggunakan rata-rata PDRB per kapita, daerah yang diamati kemudian dapat dibagi ke dalam empat klasifikasi atau bidang kuadran, yaitu:

Kuadran 1: sektor yang tumbuh maju dengan pesat (sektor unggulan);

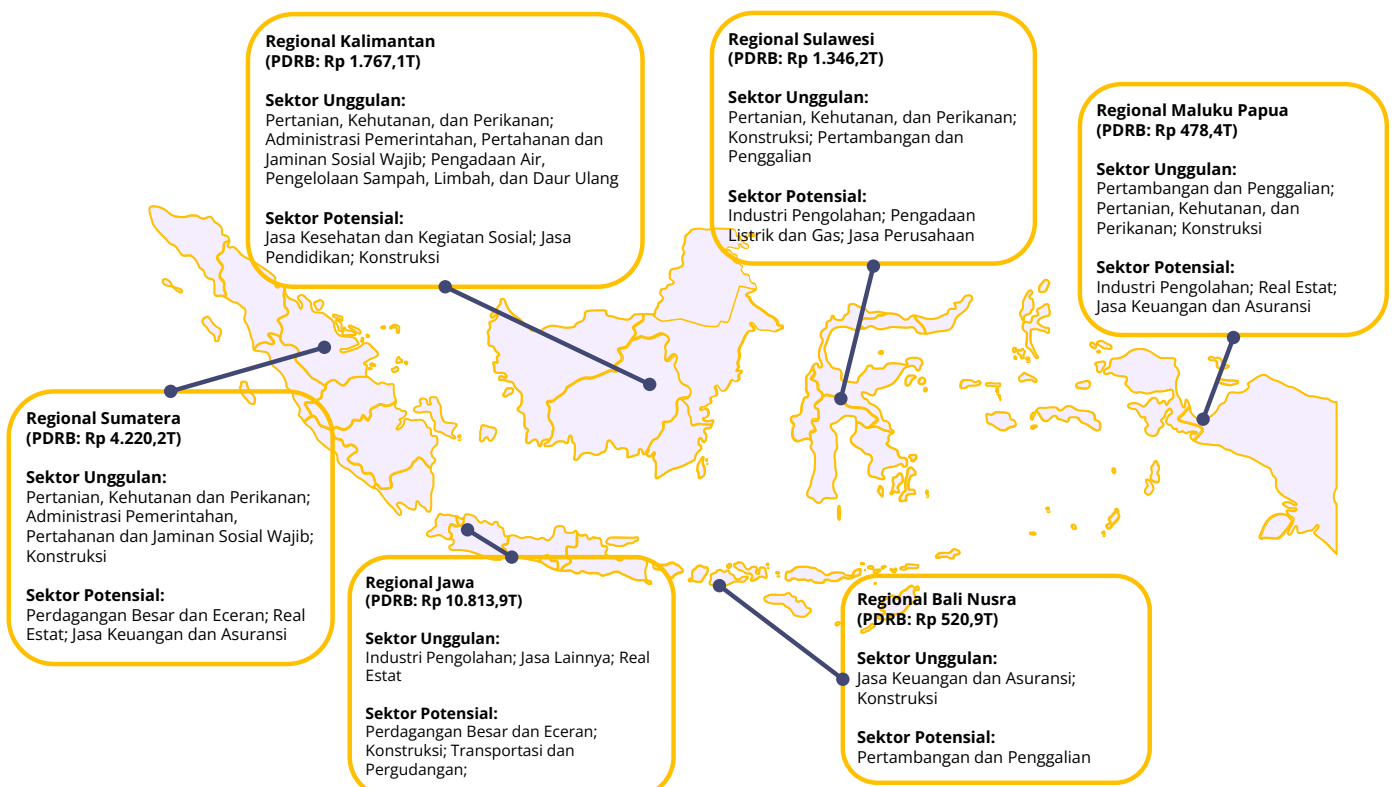
Kuadran 2: sektor maju tapi tertekan;

Kuadran 3: sektor potensial dan masih dapat berkembang;

Kuadran 4: sektor relatif tertinggal (Rangraeni, 2021).

Berdasarkan analisis menggunakan ketiga metode di atas, berhasil dipetakan sektor unggulan dan potensial pada masing-masing regional. Terdapat beberapa sektor yang dominan antara lain Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

GAMBAR 87. PETA SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL PER REGIONAL TAHUN 2022



Sumber: BPS, diolah

yang menjadi sektor unggulan di empat regional (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua). Disamping itu, sektor lain yang juga cukup dominan adalah sektor Konstruksi yang juga menjadi sektor unggulan di empat regional berbeda (Sumatera, Sulawesi, Bali Nusra, dan Maluku Papua), dan sektor potensial di dua regional (Jawa dan Kalimantan). Gambaran detail hasil pemetaan sektor unggulan dan potensial di setiap wilayah regional dapat dilihat dalam Peta Sektor Unggulan dan Potensial Per Regional Tahun 2022.

2. SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR POTENSIAL WILAYAH

2.1. REGIONAL SUMATERA

2.1.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA

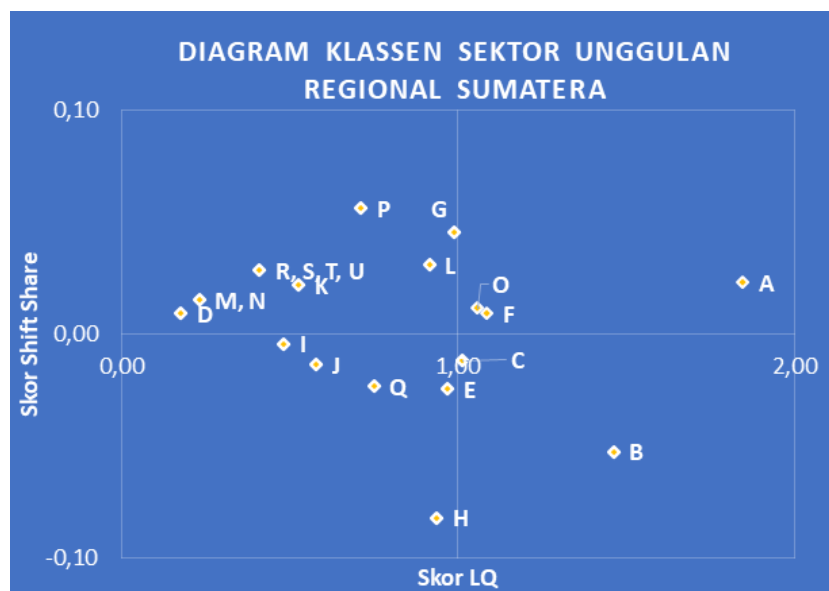
Hasil analisis pada diagram Klasen menunjukkan terdapat tiga sektor lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan di Regional Sulawesi. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; F - Konstruksi; dan O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada sektor A dan F mengingat kedua sektor tersebut memiliki porsi kontribusi yang besar terhadap PDRB regional Sumatera tahun 2022.

Kontribusi ketiga sektor unggulan terhadap total PDRB regional Sumatera tahun 2022 mencapai 35,75 persen dengan nilai kontribusi sebesar Rp1.508,82 triliun. Sektor A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor unggulan utama di regional Sumatera pada tahun 2022. Sektor ini berkontribusi sebesar 21,74 persen terhadap total PDRB regional Sumatera dengan nilai kontribusi sebesar Rp917,33 triliun. Adapun Sektor F - Konstruksi berkontribusi terhadap total PDRB regional Sumatera sebesar 10,75 persen dengan nilai kontribusi sebesar Rp453,69 triliun.

Secara umum, perubahan paling mencolok dari kontribusi sektor unggulan terhadap total PDRB terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Nilai PDRB pada sektor tersebut pada tahun 2022 naik Rp95,59 triliun atau tumbuh 11,6 persen dibandingkan tahun 2021. Kendati demikian, persentase kontribusinya terhadap total PDRB Sumatera tercatat mengalami penurunan dari 22,36 persen pada tahun 2021 menjadi 21,74 persen di 2022. Adapun pada sektor Konstruksi juga menunjukkan kenaikan nilai PDRB, namun persentase kontribusinya

GAMBAR 88. DIAGRAM KLASSEN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA



Sektor Lapangan Usaha
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian
C Industri Pengolahan
D Pengadaan Listrik dan Gas
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
F Konstruksi
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi
K Jasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estat
M, N Jasa Perusahaan
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R, S, T, U Jasa Lainnya

Sumber: BPS, diolah

TABEL 137. KONTRIBUSI PDRB SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2022

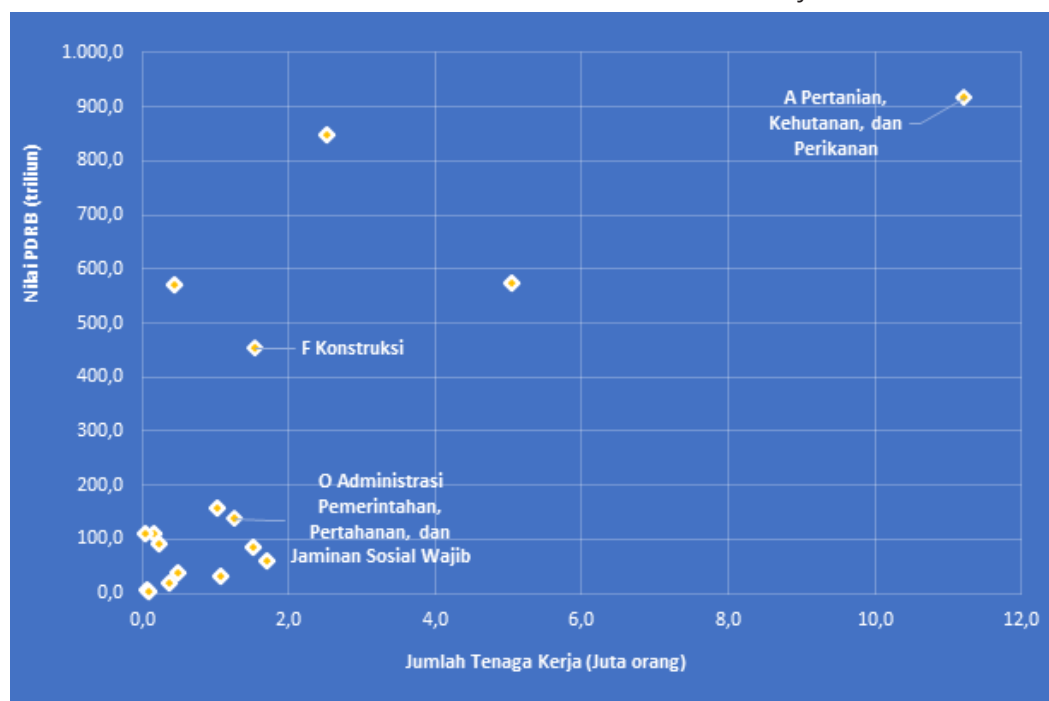
Sektor Unggulan	Kontribusi thd PDRB	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	917,33	21,74%
Konstruksi	453,69	10,75%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	137,81	3,27%
Total Sektor Unggulan	1.508,82	35,75%

Sumber : BPS, diolah

TABEL 138. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN UTAMA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2021 DAN 2022

Sektor Unggulan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	821,73	22,36%	917,33	21,74%
Konstruksi	414,90	11,29%	453,69	10,75%
Total Sektor Unggulan	1.236,64	33,65%	1.371,02	32,49%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 89. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB SUMATERA TAHUN 2022


Sumber: BPS, diolah

terhadap total PDRB Sumatera justru menurun. Hal ini mengindikasikan terjadi pertumbuhan nilai PDRB yang cukup tinggi pada sektor usaha lainnya.

Pada tahun 2022, kedua sektor unggulan lapangan usaha berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dua sektor unggulan tersebut menyerap 14,03 juta orang tenaga kerja atau 48,6 persen dari seluruh tenaga kerja di regional Sumatera. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 11,21 juta orang atau 38,86 persen. Adapun sektor unggulan Konstruksi menyerap sebanyak 1,54 juta tenaga kerja atau 5,35 persen. Dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerjanya, terdapat sektor usaha lain yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sektor-sektor tersebut di antaranya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor yang menyerap 5,05 juta tenaga kerja atau 17,52 persen, serta sektor Industri Pengolahan yang menyerap 2,53 juta tenaga kerja 8,77 persen.

2.I.A.1. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

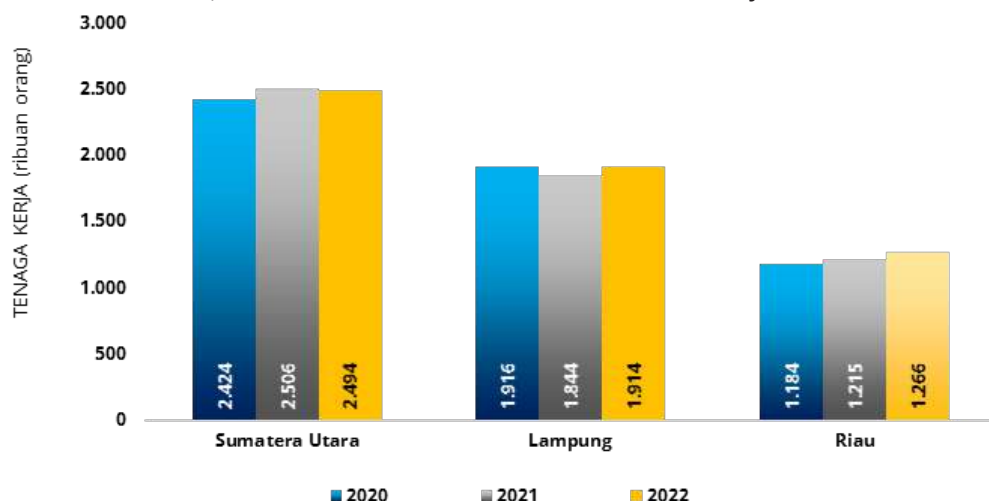
Pembangunan sektor pertanian salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya para petani melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan (BPS, 2021). Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi dominan terhadap PDRB seluruh sektor regional Sumatera. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap perekonomian regional Sumatera tahun 2020-2022 selalu berada di atas 20 persen dengan rata-rata 22,18 persen. Pada 2022, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan,

TABEL 139. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB SEKTOR TERKAIT DI SUMATERA TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Riau	25,78%	27,11%	26,69%
2	Sumatera Utara	22,92%	23,06%	23,96%
3	Lampung	13,90%	12,81%	12,60%
4	7 Provinsi Lainnya	37,40%	37,02%	36,75%
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan thd Total PDRB Sumatera		22,46%	22,36%	21,74%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 90. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN DI PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN LAMPUNG TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA DI SUMATERA TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

dan Perikanan terhadap PDRB regional Sumatera mencapai Rp917,33 triliun atau 21,74 persen. Pada tahun 2022, sektor ini mampu menyerap 11,21 juta tenaga kerja atau 38,86 persen dari total tenaga kerja yang diserap di regional Sumatera (BPS tahun 2020-2022).

Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Lampung merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2020-2022. Rata-rata kontribusi PDRB sektor tersebut di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Lampung selama periode 2020-2022, masing-masing sebesar Rp220,76 triliun (26,53 persen); Rp194,12 triliun (23,31 persen); dan Rp108,59 triliun (13,10 persen).

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 di Provinsi Riau berkontribusi sebesar Rp244,86 triliun (26,69 persen) terhadap total PDRB sektor tersebut di regional Sumatera. Adapun sub sektor yang menjadi unggulan pada sektor tersebut antara lain sub sektor Tanaman Perkebunan, sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan, sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu, serta sub sektor Perikanan (KFR Provinsi Riau, 2023). Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB di regional Sumatera, kemampuan sektor unggulan ini terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau masih lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara dan Lampung, yaitu menyerap sebanyak 1,27 juta tenaga kerja pada tahun 2022. Hal ini berkaitan dengan jenis perkebunan yang paling menonjol adalah perkebunan sawit yang relatif lebih sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan beberapa jenis pertanian/perkebunan lainnya. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia, yaitu mencapai 2,86 juta hektar (BPS; dataindonesia.id, 2022).

Di Provinsi Sumatera Utara, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp219,80 triliun (23,96 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sumatera. Subsektor yang menjadi unggulan pada sektor tersebut adalah subsektor Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (KFR Provinsi Sumatera Utara, 2023). Produktivitas padi di Provinsi Sumatera Utara adalah yang terbesar ketiga di Sumatera dengan tingkat produksi mencapai 2,09 juta ton pada tahun 2022 (BPS, 2022). Kondisi ini juga berperan penting pada tingginya penyerapan tenaga kerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 2,49 juta tenaga kerja atau 22,24 persen dari total regional Sumatera di sektor tersebut, dan menjadi yang tertinggi di regional Sumatera.

Di Provinsi Lampung, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp115,54 triliun (12,60 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sumatera. Subsektor yang menjadi unggulan pada sektor tersebut yaitu subsektor usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (KFR Provinsi Lampung, 2023). Komoditas tanaman pangan berkontribusi diatas 40 persen terhadap subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Adapun Tanaman Perkebunan berkontribusi di atas 20 persen (KFR Provinsi Lampung, 2023). Sektor unggulan ini mampu menyerap 1,91 juta tenaga kerja atau 17,07 persen dari total regional Sumatera di sektor tersebut, dan tertinggi ketiga di regional Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Guna mendukung sektor Pertanian, pemerintah daerah menjalankan program Kartu Petani Berjaya (KPB) untuk meningkatkan pendapatan petani dengan mengatasi permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi dengan memanfaatkan sistem teknologi (KFR Provinsi Lampung, 2023).

TABEL 140. KONTRIBUSI SEKTOR KONSTRUKSI PER PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB SEKTOR TERKAIT DI SUMATERA TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Sumatera Utara	28,21%	27,90%	27,82%
2	Riau	18,07%	18,20%	18,73%
3	Sumatera Selatan	14,59%	14,19%	13,88%
4	7 Provinsi Lainnya	39,13%	39,71%	39,57%
Kontribusi PDRB Sektor Konstruksi thd Total PDRB Sumatera		11,61%	11,29%	10,75%

Sumber : BPS, diolah

2.I.A.2. SEKTOR KONSTRUKSI

Konstruksi merupakan suatu kegiatan dengan hasil akhir berupa bangunan/konstruksi yang menjadi satu dengan lahan lokasinya dibangun, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang pekerjaan utama, yaitu konstruksi gedung, konstruksi sipil, dan konstruksi khusus. Sektor Konstruksi berada di urutan ke lima sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB di regional Sumatera. Kontribusi sektor Konstruksi terhadap perekonomian regional Sumatera tahun 2020-2022 selalu berada di atas 10 persen, nilainya terus meningkat, meskipun secara porsi menunjukkan sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2022, kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB regional Sumatera mencapai Rp262,55 triliun atau 10,75 persen. Pada tahun 2022, sektor ini mampu menyerap 1,54 juta tenaga kerja atau 5,35 persen dari total tenaga kerja yang diserap di regional Sumatera (BPS tahun 2020-2022).

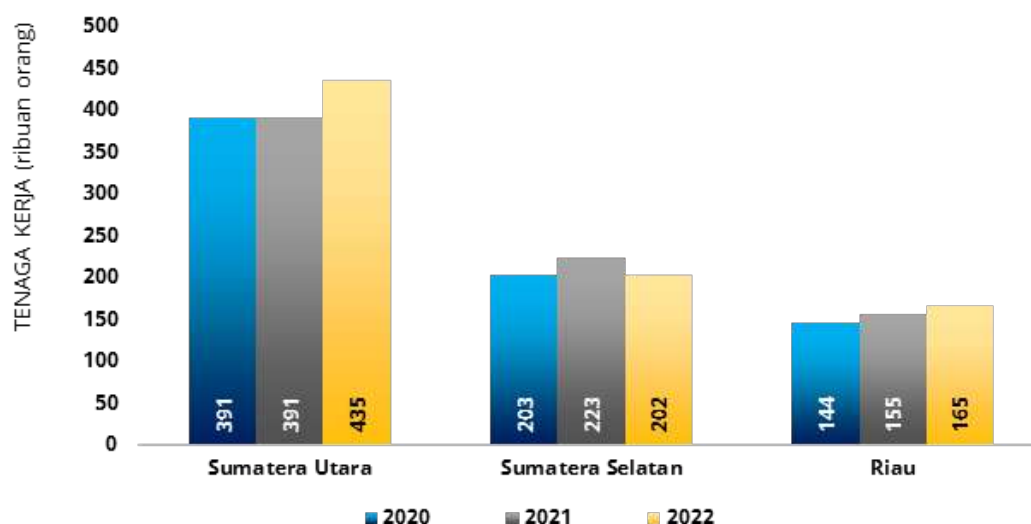
Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar di sektor Konstruksi berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2020-2022. Rata-rata kontribusi PDRB sektor tersebut di Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan selama periode 2020-2022, masing-masing sebesar Rp117,38 triliun (27,98 persen); Rp77,01 triliun (18,33 persen); dan Rp59,60 triliun (14,22 persen).

PDRB sektor Konstruksi tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara berkontribusi sebesar Rp126,23 triliun (27,82 persen) terhadap total PDRB sektor tersebut di regional Sumatera. Perkembangan sektor Konstruksi di Provinsi Sumatera Utara ditopang oleh kenaikan signifikan di berbagai bidang pekerjaan baik konstruksi gedung, sipil maupun khusus (KFR Provinsi Sumatera Utara, 2023). Di antara tiga provinsi dengan kontribusi PDRB sektor Konstruksi terbesar, Provinsi Sumatera Utara mampu menyerap paling banyak tenaga kerja pada tahun 2022, yaitu mencapai 435 ribu tenaga kerja.

Di Provinsi Riau, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar Rp84,97 triliun (18,73 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sumatera. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kontribusinya termasuk yang tertinggi di regional Sumatera, ternyata sektor Konstruksi bukan merupakan sektor unggulan di Provinsi Riau (KFR Provinsi Riau, 2023). Kendati demikian, sektor Konstruksi di Provinsi Riau mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja pada tahun 2022, yaitu mencapai 164,96 ribu tenaga kerja atau 10,69 persen dari total regional Sumatera di sektor tersebut.

Di Provinsi Sumatera Selatan, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp62,95 triliun (13,88 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sumatera. Serupa dengan Provinsi Riau, meskipun memiliki kontribusi yang cukup besar,

GAMBAR 91. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI DI PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN LAMPUNG TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA DI SUMATERA TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

sektor Konstruksi bukan merupakan sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terlihat pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk ke dalam kelompok sektor maju namun tertekan (KFR Provinsi Sumatera Selatan, 2023). Kendati demikian, sektor Konstruksi di Provinsi Sumatera Selatan mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja pada tahun 2022, yaitu mencapai 201,84 ribu tenaga kerja atau 13,08 persen dari total regional Sumatera di sektor tersebut.

2.I.B. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SUMATERA

Untuk regional Sumatera, berdasarkan analisis Klassen, ditetapkan 3 (tiga) sektor potensial, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Real Estate. Dari 7 (tujuh) sektor potensial yang ada di regional Sumatera, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki rata-rata kontribusi tahun 2020-2022 paling tinggi, yaitu 13,64 persen dan berada di peringkat ketiga dari seluruh sektor di regional Sumatera. Selain itu, sektor tersebut juga memiliki rata-rata laju pertumbuhan positif sebesar 3,21 persen.

2.I.B.1. SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Kamus Pembakuan Statistik memberikan pengertian tentang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meliputi kegiatan ekonomi/ lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan

eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan.

Berdasarkan data BPS, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor telah berkontribusi sebesar Rp574,73 triliun pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2020-2022, tingkat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian regional relatif stabil, yaitu pada kisaran 13 persen, serta mengalami peningkatan nilai selama tiga tahun terakhir.

Jika dilihat dari Tabel "Rata-Rata Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Per Provinsi Tahun 2020-2022", terdapat tiga provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB provinsi melalui sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Bangka

TABEL 141. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SUMATERA

Uraian	Rata-Rata Laju Pertumbuhan 2020-2022	Rank Laju Pertumbuhan	Rata-rata % Kontribusi terhadap PDRB 2020-2022	Rank % Kontribusi terhadap PDRB
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,21%	4	13,64%	3
Real Estate	2,70%	7	2,80%	8
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,55%	9	2,22%	10
Jasa Pendidikan	2,64%	8	2,17%	11
Jasa Lainnya	1,81%	12	0,75%	14
Jasa Perusahaan	2,19%	11	0,47%	15
Pengadaan Listrik dan Gas	4,80%	3	0,18%	16

Sumber : BPS, diolah

TABEL 142. KONTRIBUSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TAHUN 2020-2022

Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Regional Sumatera	2020	2021	2022	Rata-rata
Persentase	13,75%	13,54%	13,62%	13,64%
Nilai (triliun)	462,35	497,69	574,73	511,59

Sumber : BPS, diolah

TABEL 143. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI TAHUN 2020-2022

Provinsi	Rata-Rata Laju Pertumbuhan 2020-2022	Rata-rata % Kontribusi terhadap PDRB Provinsi 2020-2022
Aceh	1,75%	14,32%
Bengkulu	1,83%	14,29%
Jambi	2,60%	12,43%
Kepulauan Bangka Belitung	4,00%	15,28%
Kepulauan Riau	0,65%	8,49%
Lampung	5,67%	12,03%
Riau	3,29%	9,99%
Sumatera Barat	3,19%	16,04%
Sumatera Selatan	4,95%	13,38%
Sumatera Utara	2,77%	18,93%

Sumber : BPS, diolah

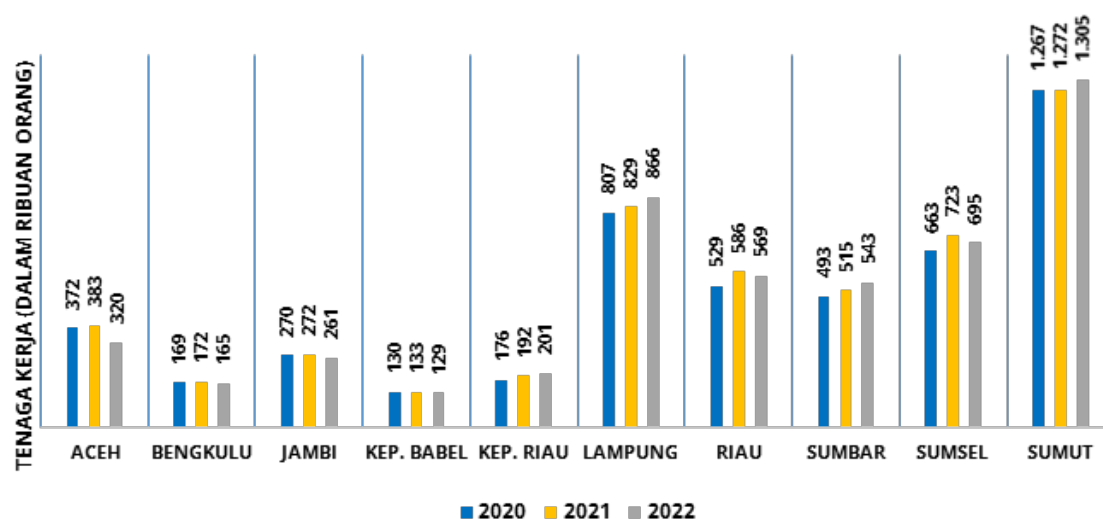
Belitung. Masing-masing rata-rata kontribusinya selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar 18,93 persen, 16,04 persen, dan 15,28 persen. Kontribusi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sedangkan kontribusi Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan pada tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022. Sebaliknya, rata-rata kontribusi di 7 (tujuh) provinsi lain mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022.

Selain berdampak pada kontribusi regional, sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga merupakan sektor potensial pada ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2022. Laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tertinggi selama tiga tahun terakhir berada di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 5,67 persen. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung meningkat cukup signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan kinerja konsumsi rumah

tangga dan investasi pada tahun 2022 seiring dengan terkendalinya penyebaran Covid-19 dan peningkatan mobilitas masyarakat. Rerata mobilitas masyarakat pada triwulan I 2022 tumbuh 17,85 persen lebih tinggi terhadap rerata Januari 2020 (Laporan Perekonomian BI, 2022).

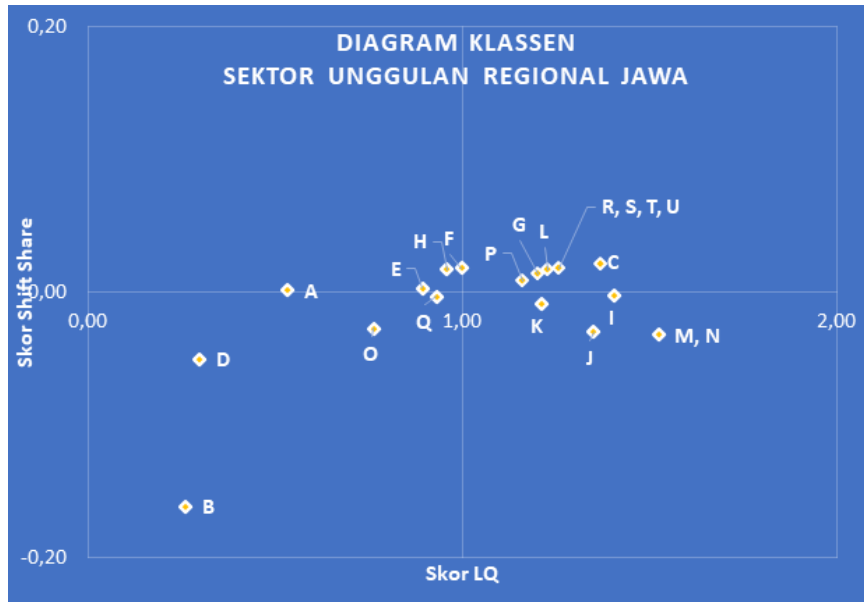
Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, sektor ini juga membantu perekonomian melalui peran penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi namun serapan tenaga kerja mengalami penurunan, semula 5.078 tenaga kerja pada tahun 2021 menjadi 5.054 tenaga kerja pada tahun 2022. Meskipun serapan tenaga kerja secara total mengalami penurunan pada tahun 2022, serapan tenaga kerja di 4 (empat) provinsi menunjukkan peningkatan, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sedangkan provinsi lainnya mengalami laju perkembangan penyerapan tenaga kerja yang sama, yaitu meningkat pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022.

GAMBAR 92. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 93. DIAGRAM KLASSEN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL JAWA



Sektor Lapangan Usaha
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian
C Industri Pengolahan
D Pengadaan Listrik dan Gas
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
F Konstruksi
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi
K Jasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estat
M,N Jasa Perusahaan
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya

Sumber: BPS, diolah

2.II. REGIONAL JAWA

2.II.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL JAWA

Hasil analisis pada diagram Klassen menunjukkan terdapat lima sektor lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan di Regional Jawa. Kelima sektor tersebut yaitu sektor C - Industri Pengolahan; R,S,T,U - Jasa Lainnya; L - Real Estate; G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan P - Jasa Pendidikan. Selanjutnya, analisis akan dilakukan pada dua sektor unggulan dengan kontribusi terhadap PDRB tertinggi pada tahun 2022, yaitu sektor C dan G.

Kontribusi kelima sektor unggulan terhadap total PDRB regional Jawa tahun 2022 mencapai 53,42

persen dengan nilai kontribusi Rp5.777,00 triliun. Sektor C - Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan utama di regional Jawa pada tahun 2022. Sektor ini berkontribusi sebesar 28,00 persen terhadap total PDRB regional Jawa dengan nilai kontribusi sebesar Rp3.027,67 triliun. Adapun sektor G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 16,03 persen dengan nilai kontribusi Rp1.733,94 triliun.

Secara umum, perubahan paling mencolok dari kontribusi sektor unggulan terhadap total PDRB, terdapat pada sektor Industri Pengolahan. Nilai PDRB pada sektor tersebut pada tahun 2022 naik sebesar Rp279,48 triliun dibandingkan tahun 2021. Kendati demikian, persentase kontribusinya terhadap total PDRB Jawa tercatat sedikit menurun dari 28,02 persen pada tahun 2021 menjadi 28,00

TABEL 144. KONTRIBUSI PDRB SEKTOR UNGGULAN REGIONAL JAWA TAHUN 2022

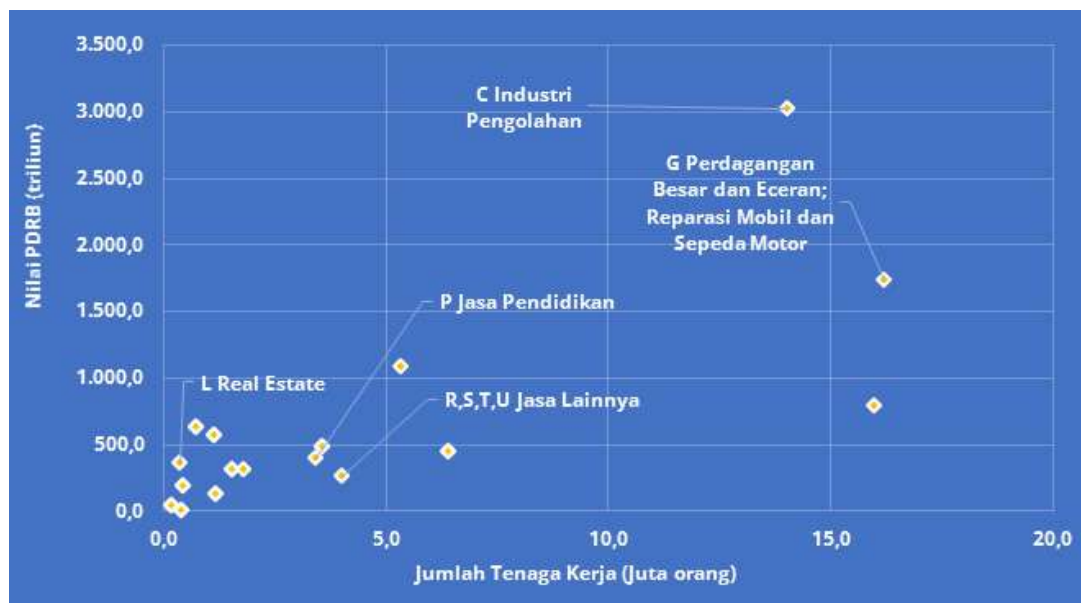
Sektor Unggulan	Kontribusi thd PDRB	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Industri Pengolahan	3.027,67	28,00%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.733,94	16,03%
Jasa Pendidikan	401,90	3,72%
Real Estat	356,23	3,29%
Jasa Lainnya	257,24	2,38%
Total Sektor Unggulan	5.777,00	53,42%

Sumber : BPS, diolah

TABEL 145. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN UTAMA REGIONAL JAWA TAHUN 2021 DAN 2022

Sektor Unggulan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Industri Pengolahan	2.748,19	28,02%	3.027,67	28,00%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.556,33	15,87%	1.733,94	16,03%
Total Sektor Unggulan	4.304,52	43,89%	4.761,61	44,03%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 94. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB JAWA TAHUN 2022


Sumber: BPS, diolah

persen di 2022. Adapun pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan kenaikan nilai dan juga kenaikan persentase kontribusi terhadap total PDRB Jawa.

Pada tahun 2022, seluruh sektor unggulan lapangan usaha berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kelima sektor unggulan di regional Jawa mampu menyerap 38,02 juta orang tenaga kerja atau 49,69 persen dari seluruh tenaga kerja di regional Jawa. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 16,21 juta orang atau 21,18 persen dari total tenaga kerja di Jawa, dan merupakan yang paling tinggi di antara seluruh sektor usaha. Adapun sektor Industri Pengolahan mampu menyerap sebanyak 14,03 juta tenaga kerja atau 18,33 persen dari total tenaga kerja di Jawa. Dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerjanya, terdapat sektor usaha lain yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyerap 16,01 juta tenaga kerja (20,92 persen).

2.II.A.1. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

BPS mendefinisikan industri pengolahan sebagai kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi, dan/

atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir (website BPS). Sektor Industri Pengolahan berkontribusi dominan terhadap PDRB seluruh sektor regional Jawa. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap perekonomian regional Jawa tahun 2020-2022 selalu berada di atas 27 persen dengan rata-rata 27,86 persen. Pada 2022, kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB regional Jawa mencapai Rp3.027,67 triliun atau 28,00 persen. Pada tahun 2022, sektor ini mampu menyerap 14,03 juta tenaga kerja atau 18,33 persen dari total tenaga kerja yang diserap di regional Jawa (BPS tahun 2020-2022).

Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar di sektor Industri Pengolahan berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2020-2022. Rata-rata kontribusi PDRB sektor tersebut di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah selama periode 2020-2022, masing-masing sebesar Rp933,69 triliun (33,62 persen); Rp764,91 triliun (27,55 persen); dan Rp493,53 triliun (17,79 persen).

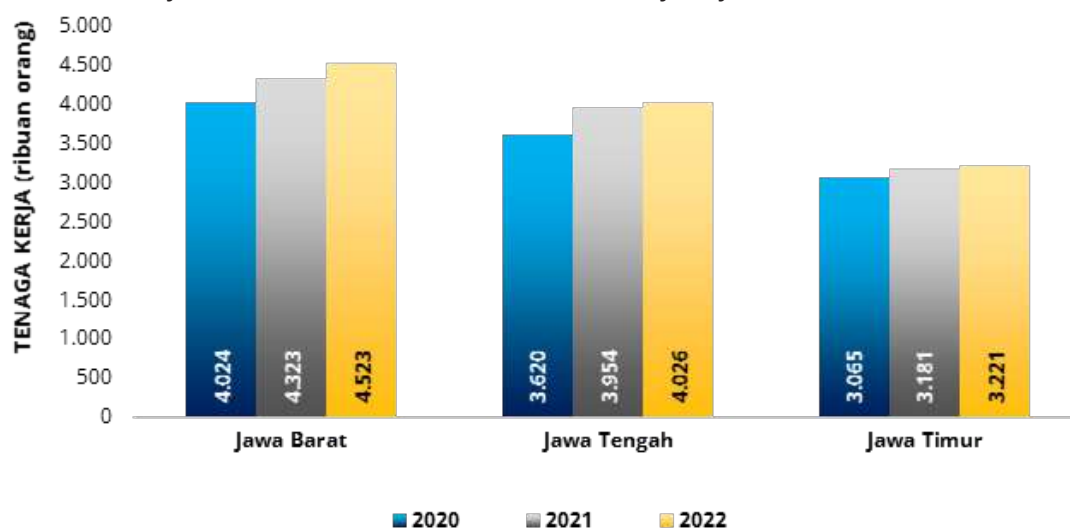
PDRB sektor Industri Pengolahan tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar Rp1.023,40 triliun (33,80 persen) terhadap total PDRB sektor tersebut di regional Jawa. Adapun subsektor yang

TABEL 146. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN PER PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB SEKTOR TERKAIT DI JAWA TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Jawa Barat	33,53%	33,53%	33,80%
2	Jawa Timur	27,62%	27,43%	27,60%
3	Jawa Tengah	18,17%	17,72%	17,49%
4	3 Provinsi Lainnya	20,68%	21,32%	21,10%
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan thd Total PDRB Jawa		27,57%	28,02%	28,00%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 95. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA DI JAWA TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

memiliki kontribusi besar pada sektor tersebut antara lain industri alat angkutan, industri barang dari logam, industri tekstil dan pakaian jadi, dan industri makanan dan minuman (KFR Provinsi Jawa Barat, 2023). Sektor tersebut juga mampu menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat, yaitu mencapai 4,52 juta tenaga kerja pada tahun 2022. Jumlah tersebut tumbuh 4,26 persen dibandingkan tahun 2021, yang didorong oleh pelonggaran pembatasan mobilitas dari negara mitra dagang yang berdampak pada meningkatnya permintaan ekspor barang dan jasa.

Di Provinsi Jawa Timur, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp835,71 triliun (27,60 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Jawa. Subsektor yang menjadi pendorong pada sektor tersebut adalah subsektor industri makanan dan minuman, industri kulit, industri tekstil, dan industri barang galian bukan logam (KFR Provinsi Jawa Timur, 2023). Di sisi lain, industri tembakau masih mengalami tekanan karena adanya kenaikan cukai tembakau. Sektor tersebut juga mampu menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat, yaitu mencapai 3,22 juta tenaga kerja pada tahun 2022, atau tumbuh 1,3 persen dibandingkan tahun 2021.

Di Provinsi Jawa Tengah, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp529,61 triliun (17,49 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut

di regional Jawa. Sektor unggulan ini mampu menyerap 4,03 juta tenaga kerja, atau tumbuh 1,8 persen dibandingkan tahun 2021. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah adalah melalui dikeluarkannya Perpres Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Di Provinsi Jawa Tengah.

2.II.A.2. SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

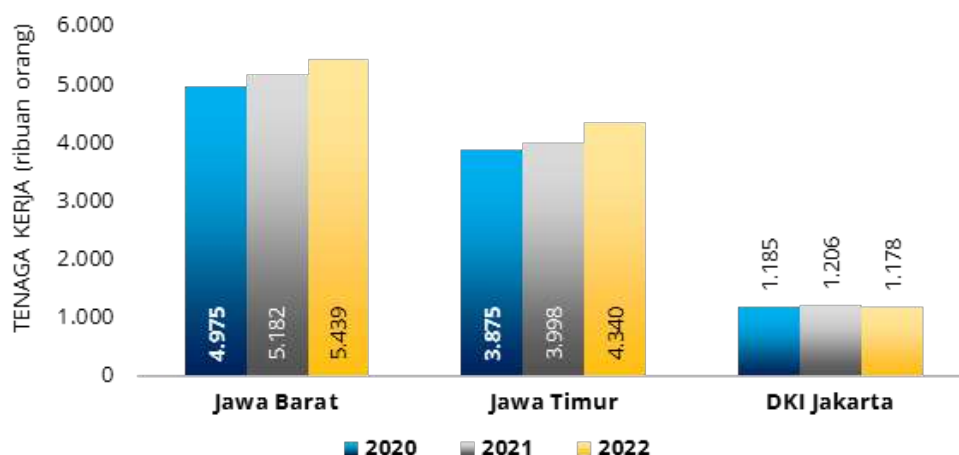
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terdiri dari aktivitas perdagangan skala besar ke pengecer, dari pengecer ke konsumen, termasuk perdagangan barang/jasa terkait aktivitas reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor tersebut berada di urutan kedua sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi (setelah sektor Industri Pengolahan) terhadap PDRB di regional Jawa. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian regional Jawa tahun 2020-2022 selalu berada di atas 15 persen. Pada tahun 2022, kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB regional Jawa mencapai Rp1.733,94 triliun atau 16,03 persen. Pada tahun 2022, sektor ini mampu menyerap 16,21 juta tenaga kerja atau 21,18 persen

TABEL 147. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB SEKTOR TERKAIT DI JAWA TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	DKI Jakarta	31,67%	31,52%	32,04%
2	Jawa Timur	28,36%	29,09%	29,41%
3	Jawa Barat	20,92%	20,53%	20,13%
4	3 Provinsi Lainnya	19,05%	18,86%	18,42%
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor thd Total PDRB Jawa		15,69%	15,87%	16,03%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 96. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TIMUR, DAN DKI JAKARTA TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA DI JAWA TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

dari total tenaga kerja yang diserap di regional Jawa (BPS tahun 2020-2022).

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2020-2022. Rata-rata kontribusi PDRB sektor tersebut di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat selama periode 2020-2022, masing-masing sebesar Rp502,11 triliun (31,75 persen); Rp458,21 triliun (28,95 persen); dan Rp324,15 triliun (20,53 persen).

PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta berkontribusi sebesar Rp555,57 triliun (32,04 persen) terhadap total PDRB sektor tersebut di regional Jawa. Meskipun nilai kontribusinya tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di regional Jawa, penyerapan tenaga kerja tahun 2022 pada sektor tersebut di Provinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 hanya menyerap 1,18 juta tenaga kerja atau 7,27 persen dari total tenaga kerja sektor tersebut di regional Jawa. Hal ini didorong oleh kelompok usaha perdagangan besar yang lebih dominan dan secara alami lebih sedikit menyerap tenaga kerja.

Di Provinsi Jawa Timur, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar Rp509,94 triliun (29,41 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Jawa. Besarnya jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan perdagangan di Jawa Timur (KFR Provinsi Jawa Timur, 2023). Sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, yaitu mencapai 4,34 juta tenaga kerja atau 26,78 persen dari total regional Jawa di sektor

tersebut.

Di Provinsi Jawa Barat, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp349,00 triliun (20,53 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Jawa. Meskipun nilai kontribusi sektor tersebut terus meningkat, namun porsinya terhadap total PDRB Jawa Barat terus menurun (KFR Provinsi Jawa Barat, 2023). Sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, yaitu mencapai 5,44 juta tenaga kerja atau 33,56 persen dari total tenaga kerja regional Jawa di sektor tersebut.

2.II.B. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL JAWA

Dilihat dari metode analisis Klassen berdasarkan data yang dirilis oleh BPS selama tiga tahun terakhir, sektor-sektor yang termasuk kuadran III untuk regional Jawa adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Konstruksi, dan Transportasi dan Penggudangan. Sektor-sektor tersebut termasuk dalam klasifikasi sektor potensial. Dari seluruh sektor potensial tersebut, sektor Konstruksi memiliki rata-rata kontribusi terbesar, yaitu sebesar 10,05 persen terhadap PDRB regional Jawa dengan nilai kontribusi pada tahun 2022 sebesar Rp1.080,92 triliun.

2.II.B.1. SEKTOR KONSTRUKSI

Menurut kamus BPS, sektor Konstruksi mencakup kegiatan pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan. Pendirian bangunan atau struktur fabrikasi di lokasi proyek atau yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi juga mencakup pembangunan proyek konstruksi untuk bangunan gedung, sipil, dan khusus dengan menggabungkan semua unsur keuangan, teknik dan fisik untuk mewujudkan proyek

TABEL 148. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SUMATERA

Uraian	Rata-Rata Laju Pertumbuhan 2020-2022	Rank Laju Pertumbuhan	Rata-rata % Kontribusi terhadap PDRB 2020-2022	Rank % Kontribusi terhadap PDRB
Konstruksi	0,60%	14	10,05%	3

Sumber : BPS, diolah

TABEL 149. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL JAWA

Provinsi	Rata-Rata Laju Pertumbuhan 2020-2022	Rata-rata % Kontribusi terhadap PDRB Provinsi 2020-2022
Banten	4,26%	11,99%
D.I. Yogyakarta	0,00%	9,90%
DKI Jakarta	-1,26%	11,19%
Jawa Barat	0,02%	8,42%
Jawa Tengah	1,81%	10,91%
Jawa Timur	1,85%	9,14%

Sumber : BPS, diolah

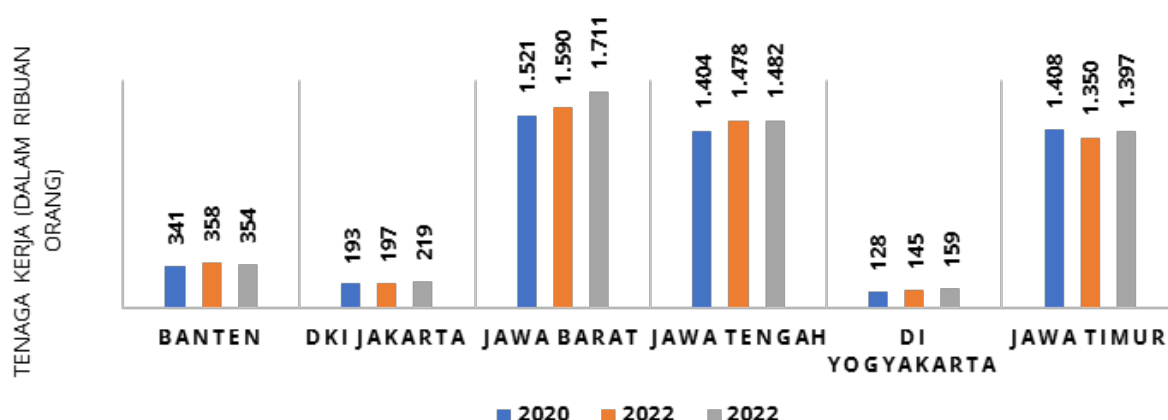
konstruksi untuk dijual.

Rata-rata laju pertumbuhan tertinggi pada sektor Konstruksi tahun 2020-2022 terdapat pada Provinsi Banten (4,26 persen), Jawa Timur (1,85 persen), dan Jawa Tengah (1,81 persen). Sementara itu rata-rata kontribusi terhadap PDRB provinsi terbesar terdapat pada Provinsi Banten sebesar 11,99 persen. Berdasarkan Tabel "Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Potensial Regional Jawa", dapat terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan sektor Konstruksi di DI Yogyakarta selama 3 tahun terakhir adalah 0,00 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor Konstruksi di DI Yogyakarta sudah mulai berangsur pulih pada tahun 2022 setelah mengalami penurunan laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar -15,62 persen pada tahun 2020. Meskipun begitu, sektor Konstruksi tetap merupakan sektor potensial di wilayah DI Yogyakarta dan memberikan kontribusi sebesar 9,92 persen terhadap perekonomian DI Yogyakarta pada tahun 2022 atau senilai Rp16,44 triliun, serta mampu tumbuh sebesar 4,81 persen dibandingkan tahun 2021 (KFR Provinsi DI Yogyakarta, 2023).

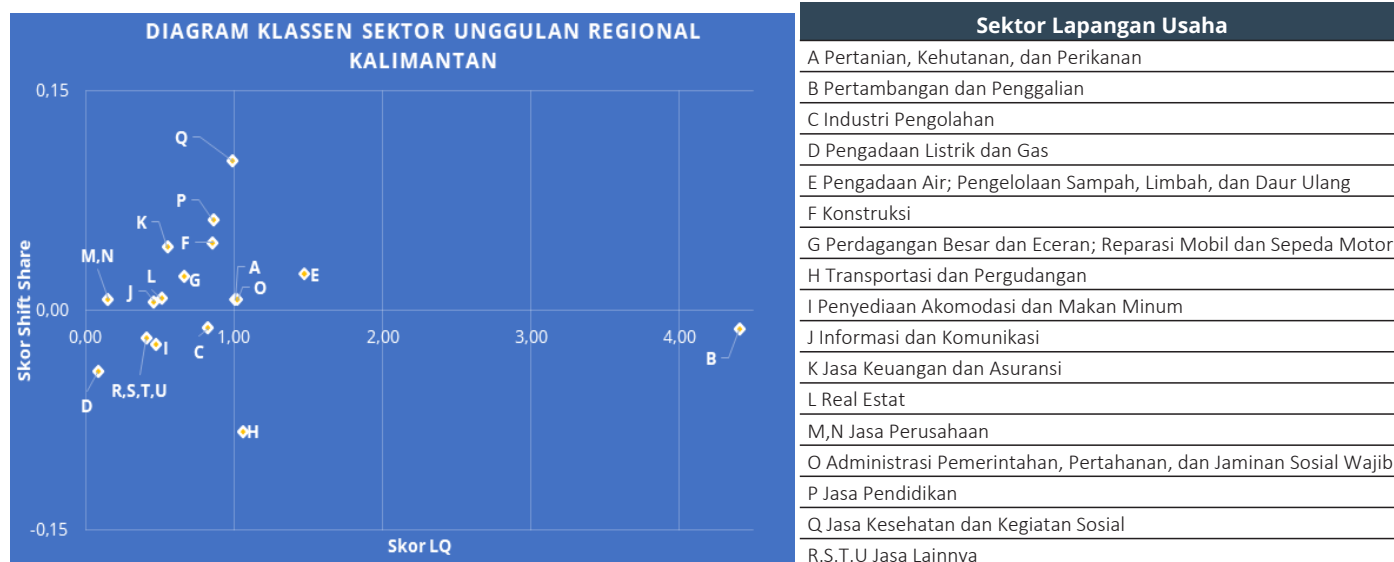
Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi regional Jawa mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Namun bila menilik penyerapan tenaga kerja per provinsi, sebagaimana tergambar pada Gambar "Tren Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Per Provinsi Regional Jawa Tahun 2020-2022", dapat dilihat bahwa setiap provinsi memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang beragam. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta menunjukkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor ini di Banten mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Untuk perkembangan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2022.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

2.III.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN

GAMBAR 97. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI PER PROVINSI REGIONAL JAWA TAHUN 2020-2022

Sumber: BPS, diolah

**GAMBAR 98. DIAGRAM KLASSEN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN**

Sumber: BPS, diolah

Hasil analisis pada diagram Klassen menunjukkan terdapat tiga sektor lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan di Regional Kalimantan. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan E - Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Selanjutnya, analisis akan dilakukan pada sektor unggulan dengan kontribusi terhadap PDRB tertinggi pada tahun 2022, yaitu A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kontribusi ketiga sektor unggulan terhadap total PDRB regional Kalimantan tahun 2022 mencapai 15,22 persen dengan nilai kontribusi Rp268,86 triliun. Sektor A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor unggulan utama di regional Kalimantan pada tahun 2022, dengan kontribusi 11,77 persen terhadap total PDRB regional Kalimantan dengan nilai sebesar Rp207,93 triliun. Kendati demikian masih terdapat sektor B - Pertambangan dan Penggalan yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap PDRB, yaitu sebesar 37,97 persen dengan nilai Rp670,97

triliun. Sektor B bukan menjadi unggulan karena berdasarkan analisis tipologi Klassen, sektor tersebut tergolong maju namun tertekan pada tahun 2022.

Nilai PDRB pada sektor unggulan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 naik Rp17,11 triliun atau tumbuh 8,97 persen dibandingkan tahun 2021. Kendati demikian, persentase kontribusinya terhadap total PDRB Kalimantan tercatat sedikit menurun dari 13,57 persen pada tahun 2021 menjadi 11,77 persen di 2022.

Pada tahun 2022, sektor unggulan lapangan usaha khususnya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan. Ketiga sektor unggulan di regional Kalimantan mampu menyerap 3,39 juta orang tenaga kerja atau 41,90 persen dari seluruh tenaga kerja di regional Kalimantan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mampu menyerap sebanyak 2,92 juta tenaga kerja atau 36,05 persen dari total tenaga kerja di Kalimantan, dan merupakan yang paling tinggi di antara seluruh

TABEL 150. KONTRIBUSI PDRB SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2022

Sektor Unggulan	Kontribusi thd PDRB	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	207,93	11,77%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	59,08	3,34%
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,85	0,10%
Total Sektor Unggulan	268,86	15,22%

Sumber : BPS, diolah

TABEL 151. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN UTAMA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2021 DAN 2022

Sektor Unggulan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	190,82	13,57%	207,93	11,77%
Total Sektor Unggulan	190,82	13,57%	207,93	11,77%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 99. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB KALIMANTAN TAHUN 2022

Sumber: BPS, diolah

sektor usaha.

2.III.A.1. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor ketiga dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB seluruh sektor regional Kalimantan. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap perekonomian regional Kalimantan tahun 2020-2022 selalu berada di atas 10 persen dengan rata-rata 13,06 persen. Pada 2022, kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB regional Kalimantan mencapai Rp207,93 triliun atau 11,77 persen. Pada tahun 2022, sektor ini mampu menyerap 2,92 juta tenaga kerja atau 36,05 persen dari total tenaga kerja yang diserap di regional Kalimantan (BPS tahun 2020-2022).

Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2020-2022. Rata-rata kontribusi PDRB sektor tersebut di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah selama periode 2020-2022, masing-masing sebesar Rp59,15 triliun (30,99

persen); Rp49,31 triliun (25,84 persen); dan Rp37,18 triliun (19,47 persen).

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi sebesar Rp64,89 triliun (31,21 persen) terhadap total PDRB sektor tersebut di regional Kalimantan. Produk unggulan pada sektor tersebut yaitu tanaman perkebunan khususnya produksi kelapa sawit (KFR Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Kendati demikian, hasil analisis menunjukkan sektor unggulan di provinsi Kalimantan Timur utamanya yaitu sektor pertambangan dan penggalian (KFR Provinsi Kalimantan Timur, 2023), atau sedikit berbeda dengan sektor unggulan regional Kalimantan secara keseluruhan. Adapun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kalimantan Timur mampu menyerap 349,45 ribu tenaga kerja pada tahun 2022. Jumlah tersebut turun 2,53 persen dibandingkan tahun 2021.

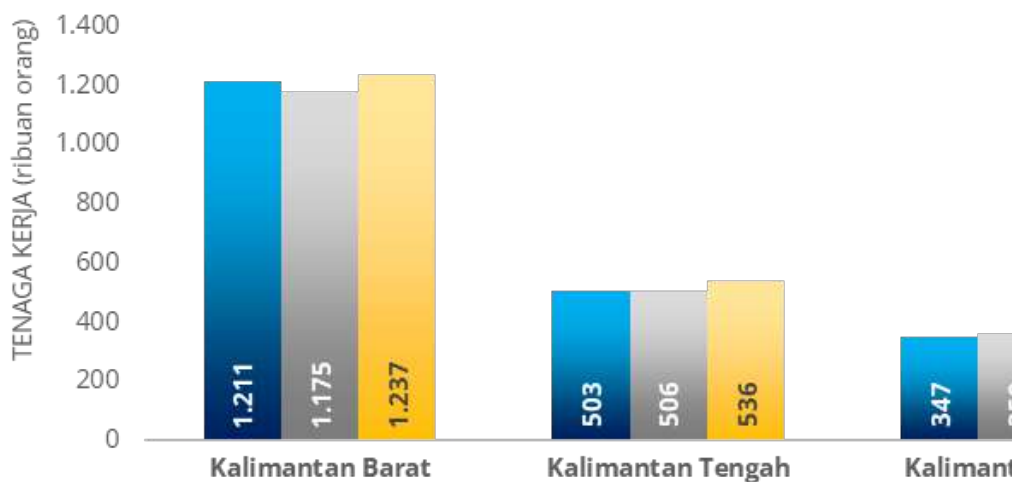
Di Provinsi Kalimantan Barat, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp53,98 triliun (25,96 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Kalimantan. Produk unggulan pada sektor ini di antaranya Washed Bauksit, CPO dan turunannya, Ikan Red Arwana, Sarang Burung Walet, serta Kelapa dan Turunannya (KFR Provinsi Kalimantan Barat,

TABEL 152. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB SEKTOR TERKAIT DI KALIMANTAN TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Kalimantan Timur	30,80%	30,97%	31,21%
2	Kalimantan Barat	25,77%	25,79%	25,96%
3	Kalimantan Tengah	19,04%	19,68%	19,68%
4	Kalimantan Selatan	14,86%	14,08%	13,77%
5	Kalimantan Utara	9,53%	9,48%	9,38%
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan thd Total PDRB Kalimantan		13,85%	13,57%	11,77%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 100. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN BARAT, DAN KALIMANTAN TENGAH TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA DI KALIMANTAN TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

2023). Sektor tersebut juga mampu menyerap 1,24 juta tenaga kerja di Kalimantan Barat pada tahun 2022, atau tumbuh 5,26 persen dibandingkan 2021.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp40,92 triliun (19,68 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Kalimantan. Sektor unggulan ini menyerap 536,71 ribu tenaga kerja, atau tumbuh 5,95 persen dibandingkan tahun 2021. Sektor tersebut juga merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar setiap tahunnya dan sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang sangat sesuai untuk bercocok tanam.

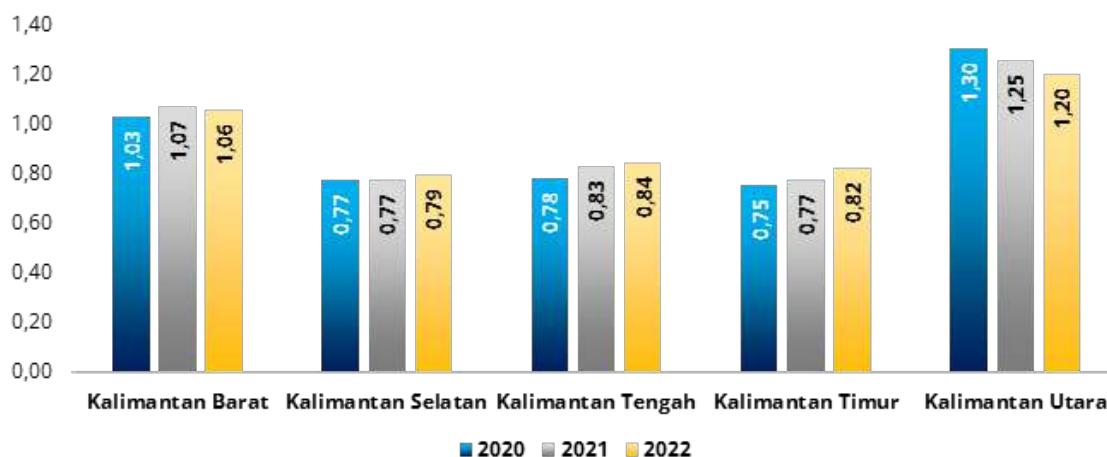
2.III.B. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL KALIMANTAN

Berdasarkan tipologi Klassen, sektor potensial merupakan sektor non basis namun memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan

dengan sektor yang sama pada tingkat nasional. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data PDRB sektoral dan PDB rentang 2020 s/d 2022, salah satu sektor potensial di regional Kalimantan adalah sektor Konstruksi. Sektor Konstruksi merupakan sektor dengan nilai LQ (Location Quotient) sebesar 0,86 dan nilai DS (Differential Shift) sebesar +4,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor Konstruksi di regional Kalimantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Pada Gambar "Nilai Location Quotient Sektor Konstruksi Regional Kalimantan" dapat terlihat bahwa sektor Konstruksi merupakan salah satu sektor basis (LQ > 1) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara serta berkembang menjadi sektor potensial (non basis namun menunjukkan adanya kenaikan dalam beberapa tahun terakhir) di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu

GAMBAR 101. NILAI LOCATION QUOTIENT SEKTOR KONSTRUKSI REGIONAL KALIMANTAN



Sumber: BPS, diolah

TABEL 153. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR KONSTRUKSI TAHUN 2022 PER PROVINSI

Provinsi	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Terhadap PDRB
Kalimantan Barat	0,82%	12,53%
Kalimantan Selatan	4,33%	6,87%
Kalimantan Tengah	5,01%	8,37%
Kalimantan Timur	7,79%	7,70%
Kalimantan Utara	-2,02%	10,82%

Sumber : BPS, diolah

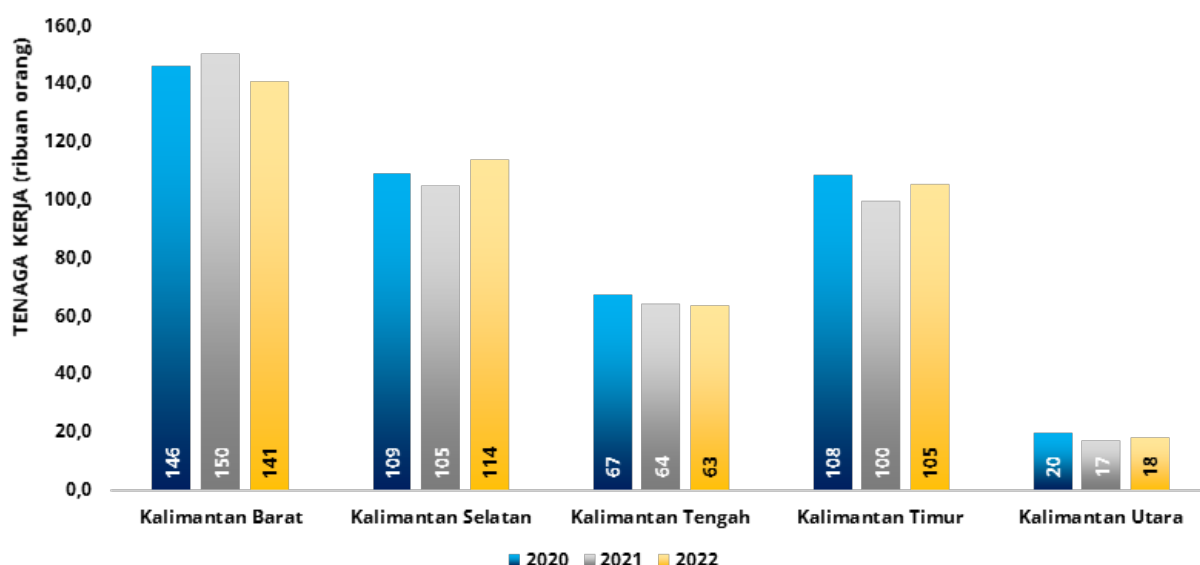
dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, jaringan listrik dan komunikasi, dan lain-lain (Badan Pusat Statistik, 2022). Selama tiga tahun terakhir, sektor Konstruksi di regional Kalimantan memiliki rata-rata kontribusi terhadap perekonomian regional atas dasar harga berlaku relatif besar, yaitu berada di kisaran 9,53 persen. Selain itu, sektor Konstruksi juga memiliki laju pertumbuhan yang progresif pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,73 persen.

Salah satu indikator yang digunakan pada sektor Konstruksi adalah Indeks Nilai Konstruksi yang Diselesaikan. Indeks ini menggambarkan realisasi fisik pekerjaan konstruksi yang diselesaikan dalam satu triwulan pada suatu wilayah. Berdasarkan publikasi BPS (2022), Indeks Nilai Konstruksi yang Diselesaikan di regional Kalimantan pada triwulan IV tahun 2022 menunjukkan adanya pertumbuhan dibanding triwulan IV tahun 2021.

Keberadaan sektor Konstruksi sebagai sektor potensial di regional Kalimantan tidak lepas dari efek kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya berada di DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan

Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa. Saat ini pembangunan IKN memasuki fase pembangunan tahap awal yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024. Pada fase ini, infrastruktur dasar dan sarana utama di Kawasan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dibangun, termasuk inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas. Selain itu, berbagai pembangunan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka mendukung IKN seperti Refinery Development Master Project (RDMP) RU V (pengembangan kilang minyak dan petrokimia) di Balikpapan, Bendungan Sepaku Semoi, jembatan, dermaga, bandara, dan berbagai proyek infrastruktur jalan menjadikan kinerja lapangan usaha sektor Konstruksi di Kalimantan Timur pada tahun 2022 tumbuh sebesar 7,79 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 3,94 persen (Laporan Perekonomian BI, 2023).

Selain pembangunan IKN di Kalimantan Timur, peningkatan kinerja lapangan usaha sektor Konstruksi di sepanjang tahun 2022 juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang masif di wilayah Kalimantan serta keberlanjutan konstruksi proyek-proyek pemerintah dan swasta secara multiyears.

GAMBAR 102. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI PER PROVINSI REGIONAL KALIMANTAN

Sumber: BPS, diolah

Pembangunan jembatan, perbaikan jalan nasional dan daerah; lintas kota dan lintas provinsi, pelebaran jalan, pembangunan beberapa sekolah negeri, rehabilitasi sarana dan prasarana umum, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan alternatif, pembangunan jalan perbatasan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), serta berlanjutnya proyek swasta seperti pembangunan smelter nikel di Kabupaten Tanah Bumbu, dan pembangunan kawasan industri alumunium smelter dan petrokimia di Kalimantan Utara juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kinerja lapangan usaha sektor Konstruksi.

Sebagai sektor potensial, kontribusi penyerapan tenaga kerja lapangan usaha sektor Konstruksi di Kalimantan cukup lumayan. Sektor ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 441.170 orang atau sekitar 5,45 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Kalimantan. Secara umum, tingkat penyerapan tenaga kerja sektor Konstruksi di seluruh provinsi di regional Kalimantan sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, akan tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022.

2.IV. REGIONAL SULAWESI

2.IV.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SULAWESI

Hasil analisis pada diagram Klassen menunjukkan terdapat enam sektor lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan di Regional Sulawesi. Keenam sektor tersebut yaitu sektor A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; F - Konstruksi; B - Pertambangan dan Penggalan; O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P - Jasa Pendidikan; dan Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selanjutnya, analisis akan dilakukan pada dua

sektor unggulan dengan kontribusi terhadap PDRB tertinggi pada tahun 2022, yaitu sektor A dan F.

Kontribusi keenam sektor unggulan terhadap total PDRB regional Sulawesi tahun 2022 mencapai 53,70 persen dengan nilai kontribusi Rp722,95 triliun. A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor unggulan utama di regional Sulawesi pada tahun 2022. Sektor ini berkontribusi sebesar 22,03 persen terhadap total PDRB regional Sulawesi dengan nilai kontribusi sebesar Rp296,63 triliun. Adapun sektor F - Konstruksi berkontribusi sebesar 11,93 persen dengan nilai kontribusi Rp160,63 triliun.

Kedua sektor unggulan utama yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Konstruksi menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi pada tahun 2022. Nilai PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 naik sebesar Rp24,95 triliun dari tahun 2021. Adapun nilai PDRB sektor Konstruksi pada tahun 2022 naik sebesar Rp12,53 triliun dari tahun 2021.

Pada tahun 2022, seluruh sektor unggulan lapangan usaha berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Keenam sektor unggulan di regional Sulawesi mampu menyerap 5,80 juta orang tenaga kerja atau 59,29 persen dari seluruh tenaga kerja di regional Sulawesi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 3,66 juta orang atau 37,41 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi, dan merupakan yang paling tinggi di antara seluruh sektor usaha. Adapun sektor Konstruksi mampu menyerap sebanyak 572,33 ribu tenaga kerja atau 5,85 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi. Dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerjanya, terdapat sektor usaha lain yang juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyerap 1,71 juta tenaga kerja (17,46 persen).

GAMBAR 103. DIAGRAM KLASSEN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

TABEL 154. KONTRIBUSI PDRB SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2022

Sektor Unggulan	Kontribusi thd PDRB	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	296,63	22,03%
Konstruksi	160,63	11,93%
Pertambangan dan Penggalian	122,64	9,11%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	61,99	4,60%
Jasa Pendidikan	53,37	3,96%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,69	2,06%
Total Sektor Unggulan	722,95	53,70%

Sumber : BPS, diolah

TABEL 155. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN UTAMA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2021 DAN 2022

Sektor Unggulan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)	Nilai (triliun)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	271,67	23,24%	296,63	22,03%
Konstruksi	148,10	12,67%	160,63	11,93%
Total Sektor Unggulan	419,77	35,91%	457,26	33,97%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 104. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB SULAWESI TAHUN 2022

Sumber: BPS, diolah

2.IV.A.1. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi dominan terhadap PDRB seluruh sektor regional Sulawesi. Kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian regional Sulawesi tahun 2020-2022 selalu berada di atas 22 persen dengan rata-rata 27,96 persen. Pada tahun 2022, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB regional Sulawesi mencapai Rp296,63 triliun atau 22,03 persen. Pada tahun 2022, sektor ini mampu menyerap 3,66 juta tenaga kerja atau 37,41

persen dari total tenaga kerja yang diserap di regional Sulawesi (BPS tahun 2020-2022).

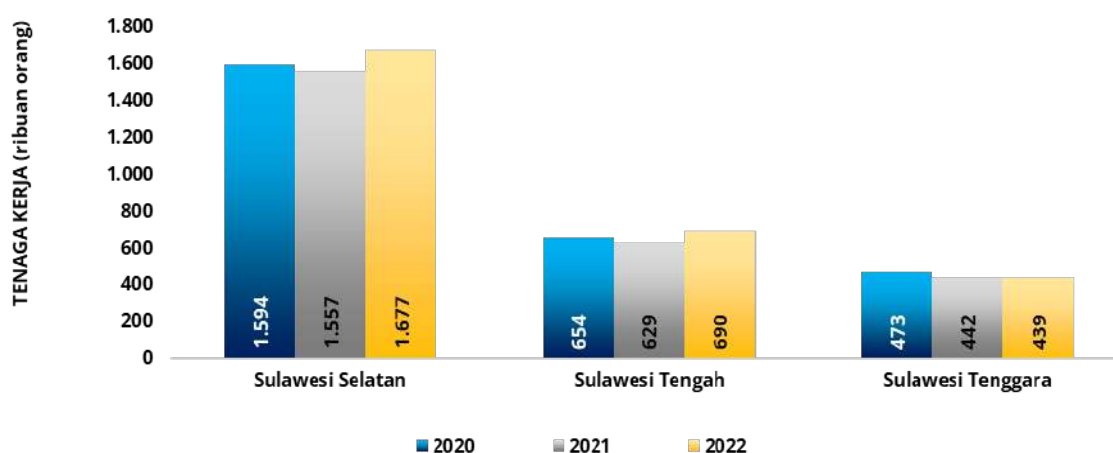
Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2020-2022. Rata-rata kontribusi PDRB sektor tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara selama periode 2020-2022, masing-masing sebesar Rp122,04 triliun (44,80 persen); Rp46,89 triliun (17,22 persen); dan Rp33,74 triliun (12,40 persen).

TABEL 156. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB SEKTOR TERKAIT DI SULAWESI TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Sulawesi Selatan	44,07%	45,25%	45,08%
2	Sulawesi Tengah	17,30%	17,12%	17,26%
3	Sulawesi Tenggara	12,64%	12,12%	12,45%
4	3 Provinsi Lainnya	26,00%	25,52%	25,21%
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan thd Total PDRB Sulawesi		23,61%	23,24%	22,03%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 105. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGAH, DAN SULAWESI TENGGARA TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA DI SULAWESI TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar Rp133,72 triliun (45,08 persen) terhadap total PDRB sektor tersebut di regional Sulawesi. Adapun subsektor yang memiliki kontribusi besar pada sektor tersebut yaitu subsektor usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, namun terus mengalami penurunan (KFR Provinsi Sulawesi Selatan, 2023). Selain itu, subsektor usaha perikanan merupakan kontributor terbesar kedua yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan (KFR Provinsi Sulawesi Selatan, 2023). Sektor tersebut juga mampu menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 1,68 juta tenaga kerja pada tahun 2022. Jumlah tersebut tumbuh 7,72 persen dibandingkan tahun 2021.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar Rp51,21 triliun (17,26 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sulawesi. Sektor tersebut masih menjadi kontributor terbesar kedua setelah sektor Industri Pengolahan, namun kontribusinya cenderung menurun (KFR Provinsi Sulawesi Tengah, 2023). Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan justru terus tumbuh dan semakin menjadi unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyerap cukup banyak tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 689,62 ribu tenaga kerja pada

tahun 2022, atau tumbuh 9,57 persen dibandingkan tahun 2021.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp36,92 triliun (12,45 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sulawesi. Sektor tersebut juga menunjukkan tren penurunan kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara (KFR Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023). Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan produksi dan minimnya pengembangan produk untuk meningkatkan nilai jualnya (KFR Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023). Sektor unggulan ini menyerap 438,50 ribu tenaga kerja, atau turun 0,88 persen dibandingkan tahun 2021.

2.IV.A.2. SEKTOR KONSTRUKSI

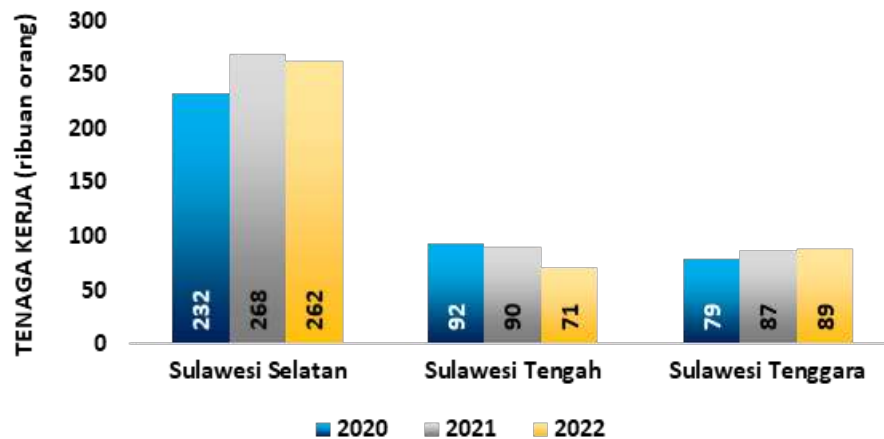
Sektor Konstruksi berada di urutan ke tiga sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB di regional Sulawesi. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian regional Sulawesi tahun 2020-2022 selalu berada di atas 11 persen dengan rata-rata 12,41 persen. Pada tahun 2022, kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB regional Sulawesi mencapai Rp160,63 triliun atau 11,93 persen. Pada tahun 2022, sektor ini mampu menyerap 572,33 ribu tenaga kerja atau 5,85 persen dari total tenaga kerja yang diserap di regional Sulawesi (BPS tahun 2020-2022).

TABEL 157. KONTRIBUSI SEKTOR KONSTRUKSI PER PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB SEKTOR TERKAIT DI SULAWESI TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Sulawesi Selatan	54,52%	53,05%	52,75%
2	Sulawesi Tengah	15,08%	16,23%	16,94%
3	Sulawesi Tenggara	13,30%	13,67%	13,39%
4	3 Provinsi Lainnya	17,11%	17,06%	16,93%
Kontribusi PDRB Sektor Konstruksi thd Total PDRB Sulawesi		12,63%	12,67%	11,93%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 106. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGAH, DAN SULAWESI TENGGARA TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA DI SULAWESI TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar di sektor Konstruksi berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2020-2022. Rata-rata kontribusi PDRB sektor tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara selama periode 2020-2022, masing-masing sebesar Rp78,57 triliun (53,44 persen); Rp23,76 triliun (16,08 persen); dan Rp19,80 triliun (13,45 persen).

PDRB sektor Konstruksi tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar Rp84,73 triliun (52,75 persen) terhadap total PDRB sektor tersebut di regional Sulawesi. Meskipun nilai kontribusinya naik dibandingkan tahun 2021, persentase kontribusinya justru menurun. Sektor tersebut mampu menyerap 262,16 ribu tenaga kerja atau 45,81 persen dari total tenaga kerja sektor tersebut di regional Sulawesi, serta mengalami kontraksi sebesar 2,33 persen dibandingkan penyerapan tenaga kerja tahun 2021 sebanyak 268,41 ribu tenaga kerja.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar Rp27,21 triliun (16,94 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sulawesi. Besaran kontribusi dari segi nilai maupun porsi terhadap PDRB mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Nilai kontribusinya meningkat 3,18 triliun, sedangkan porsinya naik 0,71 persen. Pada tahun 2022, sektor tersebut mampu menyerap 70,99 ribu tenaga kerja atau 12,40 persen dari total tenaga kerja Sulawesi di sektor tersebut.

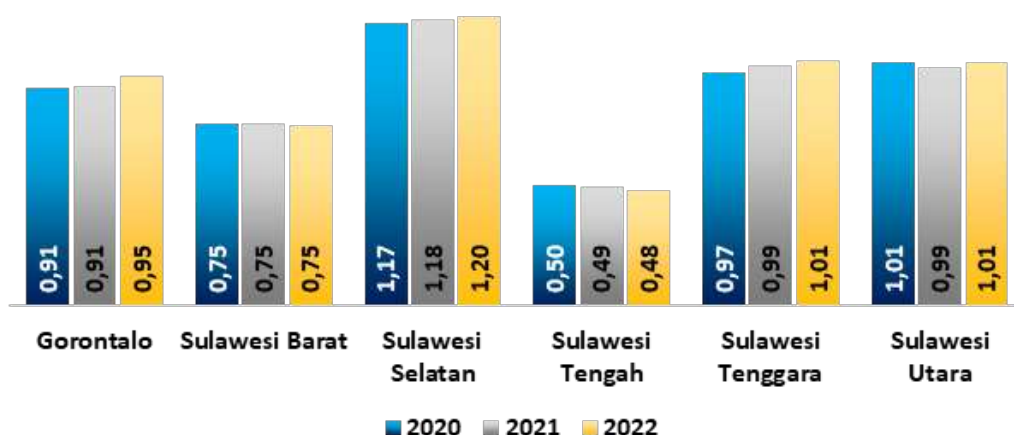
Di Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor unggulan ini berkontribusi sebesar Rp21,51 triliun (13,39 persen) terhadap total PDRB tahun 2022 sektor tersebut di regional Sulawesi. Besaran nilai kontribusi terhadap PDRB Sulawesi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, yaitu meningkat 1,27 triliun. Di sisi lain, porsi kontribusinya justru mengalami penurunan sebesar 0,28 persen. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor konstruksi bukan menjadi sektor

unggulan utama di Provinsi Sulawesi Tenggara, namun pada tahun 2022, sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor yang maju namun tertekan (KFR Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023). Pada tahun 2022, sektor tersebut mampu menyerap 88,80 ribu tenaga kerja atau 15,51 persen dari total tenaga kerja Sulawesi di sektor tersebut.

2.IV.B. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SULAWESI

Berdasarkan tipologi Klassen, sektor potensial merupakan sektor non basis namun memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat nasional. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data PDRB sektoral dan PDB rentang 2020 s/d 2022, salah satu sektor potensial di regional Sulawesi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan nilai LQ (Location Quotient) sebesar 0,97 dan nilai DS (Differential Shift) sebesar +3,88. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di regional Sulawesi memiliki pertumbuhan yang lebih cepat serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, serta berkembang menjadi sektor potensial di Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pada Gambar "Nilai Location Quotient Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Regional Sulawesi", dapat terlihat bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu sektor basis ($LQ > 1$) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara serta berkembang menjadi sektor potensial di Gorontalo dan Sulawesi Barat.

GAMBAR 107. NILAI LOCATION QUOTIENT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR REGIONAL SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

TABEL 158. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TAHUN 2022 PER PROVINSI

Provinsi	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Terhadap PDRB
Gorontalo	9,26%	13,08%
Sulawesi Barat	1,68%	9,91%
Sulawesi Selatan	6,55%	14,64%
Sulawesi Tengah	11,44%	5,71%
Sulawesi Tenggara	7,68%	12,81%
Sulawesi Utara	7,54%	13,32%

Sumber : BPS, diolah

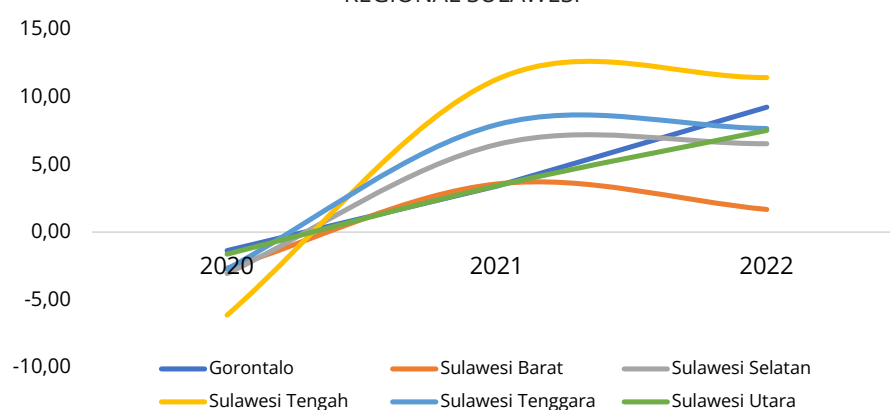
Selama tiga tahun terakhir, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di regional Sulawesi memiliki rata-rata kontribusi terhadap perekonomian regional atas dasar harga berlaku relatif besar, yaitu berada di kisaran 12,14 persen. Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga memiliki laju pertumbuhan yang progresif pada tahun 2022, yaitu sebesar 7,26 persen.

Secara umum, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di regional Sulawesi secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2022 setelah mengalami penurunan pada

tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

Pertumbuhan di sektor ini dapat dilihat dari indeks mobilitas penduduk ke lokasi-lokasi yang berkaitan dengan lapangan usaha perdagangan. Indeks mobilitas ini menurun signifikan pada tahun 2020 dikarenakan adanya lockdown wilayah akibat pandemi Covid-10. Namun, sejak adanya pelonggaran pembatasan sosial pada tahun 2021 dan pelonggaran PPKM pada tahun 2022, aktivitas dan mobilitas masyarakat di lokasi toko, apotik, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, taman bermain, serta penyelenggaraan kegiatan dan perayaan festival, keagamaan, maupun kebudayaan terus mengalami

GAMBAR 108. LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR REGIONAL SULAWESI



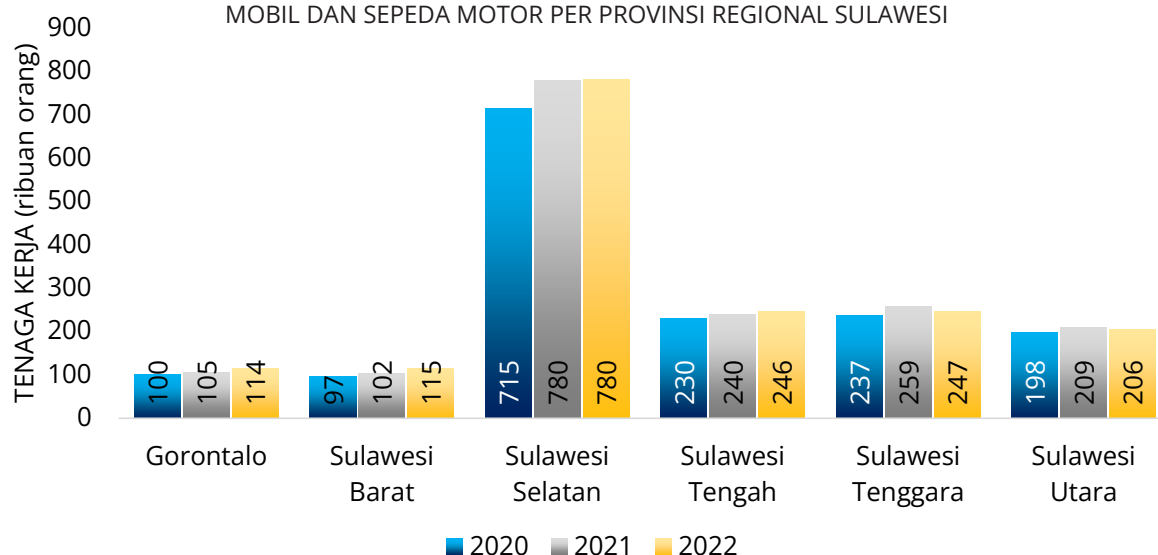
Sumber: BPS, diolah

TABEL 159. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN UTAMA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2021 DAN 2022

Provinsi	Indeks Penjualan Riil (IPR)			Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Medan	171,1	193,6	252,1	57,7	83,7	90,7
Makassar	184,5	173,6	195,9	72,0	115,3	122,2
Manado	242,3	260,7	293,5	84,8	124,2	126,0

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 109. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

peningkatan.

Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat tersebut memberi ruang gerak bagi pelaku perdagangan maupun konsumen sehingga mampu mendorong aktivitas jual beli secara umum serta pemulihan permintaan domestik yang kemudian mendorong penguatan kinerja dan pertumbuhan di sektor ini. Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat tersebut kemudian membuat Indeks Penjualan Riil (IPR) barang retail pada tahun 2022 di regional Sulawesi tumbuh sebesar 30,22 persen (yoy) (Medan), 12,85 persen (yoy) (Makassar) dan 12,58 persen (yoy) (Manado).

Selain itu, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai melakukan pembelian barang tahan lama sebagaimana tercermin dari Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) yang juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemulihan aktivitas dan daya beli masyarakat mendorong peningkatan permintaan dan penjualan komoditas yang kemudian mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2022, kontribusi penyerapan tenaga kerja lapangan usaha sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dapat

menyerap tenaga kerja sebanyak 1.708.401 orang atau sekitar 17,46 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Sulawesi. Secara umum, tingkat penyerapan tenaga kerja sektor ini di regional Sulawesi menunjukkan peningkatan pada tahun 2022.

Pencabutan PPKM di Indonesia pada Januari 2023, peningkatan frekuensi penyelenggaraan kegiatan dan event domestik maupun internasional, serta peningkatan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat diharapkan dapat membuat kinerja sektor ini tumbuh positif.

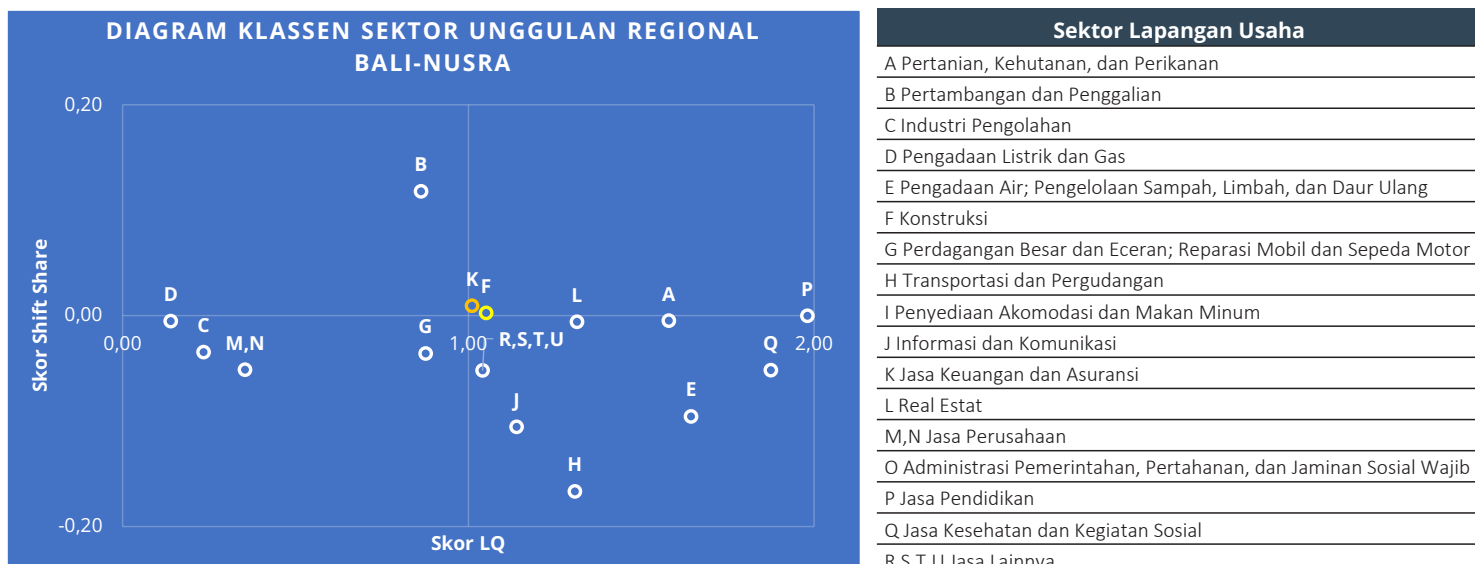
2.V. REGIONAL BALI-NUSRA

2.V.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI-NUSRA

Pada tahun 2022, regional Bali-Nusra menyumbang 2,66 persen dari total PDB Indonesia. Provinsi penyumbang PDRB terbesar di regional Bali-Nusra adalah Provinsi Bali sebesar 47,08 persen, diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 30,13 persen, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 22,79 persen. Hasil analisis pada diagram Klassen menunjukkan bahwa sektor unggulan di



GAMBAR 110. DIAGRAM KLASSEN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI NUSRA



Sumber: BPS, diolah

TABEL 160. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2022

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi terhadap PDRB (triliun)	% Kontribusi terhadap PDRB
Konstruksi	52,38	10,05%
Jasa Keuangan dan Asuransi	23,35	4,48%
Total Kontribusi Sektor Unggulan	75,73	14,51%

Sumber : BPS, diolah

regional Bali-Nusra adalah sektor F - Konstruksi dan sektor K - Jasa Keuangan dan Asuransi. Kontribusi kedua sektor unggulan terhadap total PDRB regional Bali-Nusra tahun 2022 mencapai 14,51 persen dengan nilai kontribusi sebesar Rp75,73 triliun.

Pada tahun 2022, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 10,05 persen terhadap total PDRB regional Sumatera dengan nilai kontribusi sebesar Rp52,38 triliun. Adapun sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi terhadap total PDRB regional Sumatera sebesar 4,48 persen dengan nilai kontribusi sebesar Rp23,35 triliun. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki kontribusi terhadap PDRB yang relatif rendah, namun sektor tersebut merupakan sektor pendukung dari sektor-sektor yang lain. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada sektor Konstruksi mengingat sektor tersebut memiliki porsi kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB regional Bali-Nusra tahun 2022.

2.V.A.1. SEKTOR KONSTRUKSI

Jika dilihat dari laju pertumbuhan dan rata-rata

kontribusi selama tiga tahun terakhir, sektor Konstruksi memiliki rata-rata persentase laju pertumbuhan sebesar -0,90 persen. Meskipun begitu, laju pertumbuhan sektor Konstruksi pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 persen dari tahun 2021, namun kenaikan tersebut masih lebih kecil dari penurunan laju pertumbuhan sektor Konstruksi pada tahun 2020 sebesar -7,81 persen. Sementara itu, rata-rata kontribusi sektor ini terhadap PDRB Bali-Nusra adalah sebesar 10,16 persen.

Pada tahun 2022, kontribusi sektor Konstruksi terhadap PDRB regional Bali-Nusra adalah sebesar Rp52,38 miliar atau 10,05 persen. Selain itu, seluruh provinsi di regional Bali-Nusra memiliki kontribusi sektor Konstruksi yang hampir sama terhadap total PDRB per provinsi, yaitu berada pada kisaran 9-10 persen.

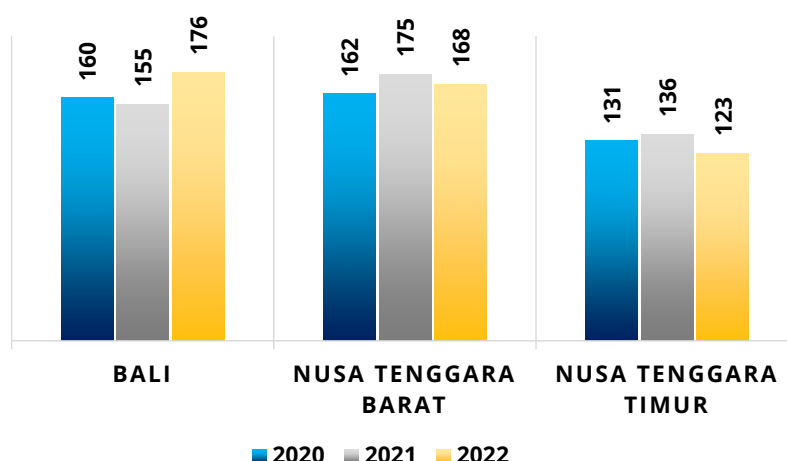
Secara total, penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2022 peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja paling tinggi

TABEL 161. KONTRIBUSI SEKTOR KONSTRUKSI TERHADAP TOTAL PDRB PER PROVINSI TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Bali	10,52%	10,97%	10,66%
2	Nusa Tenggara Barat	9,09%	9,75%	9,00%
3	Nusa Tenggara Timur	9,82%	10,36%	10,20%
Kontribusi Total Sektor Konstruksi Terhadap PDRB Regional Bali-Nusra		9,95%	10,46%	10,05%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 111. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

terdapat pada Provinsi Bali.

Kontribusi sektor Konstruksi di Provinsi Bali tidak terlepas dari banyaknya proyek dengan skala besar atau mega proyek yang sedang dibangun dalam rangka persiapan gelaran KTT G20 di Bali pada bulan November 2022. Adapun proyek-proyek besar lain yang sedang dilaksanakan di Bali, yaitu pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Shortcut Singaraja-Mengtawai yang rencananya selesai tahun 2023, pembangunan Segi Tiga Emas di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida dan Bia Manjul di Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung, pembangunan Pusat Kebudayaan (PKB) Bali di Kabupaten Klungkung, Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali, pembangunan Bendungan Sidandi Badung, pembangunan Bendungan Tablang di Buleleng, Pembangunan Stadion Dipta di Gianyar, pembangunan Pasar Seni Sukawati Blok A, B, dan C di Gianyar, pembangunan Bali Maritime Tourism Hub di Pelabuhan Benoa, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar dan pembangunan Turyapda Tower. Sebagian besar pembangunan tersebut telah dimulai sebelum tahun 2022 dan dengan target selesai pada tahun 2022. Hal ini selaras dengan penyerapan tenaga kerja Provinsi Bali yang meningkat pada tahun 2022.

Sektor Konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh keikutsertaan provinsi tersebut dalam daftar program Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah. Program – program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN. Program-program PSN yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuha

Bajo, pembangunan dalam rangka pengendalian banjir di beberapa kabupaten di Kupang, perbaikan jalan, serta pembangunan pengembangan Sistem Proyek Air Minum (SPAM).

Sedangkan pembangunan yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, serta Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain itu, pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang telah diresmikan pada bulan Januari 2022 juga diharapkan membawa dampak bagi PDRB Nusa Tenggara Barat. Dioperasikannya bendungan tersebut diharapkan dapat melayani 6.600 hektar daerah irigasi dan dapat memberikan layanan air baku sebesar 550 liter per detik. Selain itu, bendungan Bintang Bano juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 8,8 megawatt dan mereduksi banjir Kota Taliwang sebesar 25 persen.

3.2.5.2. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL BALI-NUSRA

Berdasarkan tipologi Klassen, sektor potensial merupakan sektor non basis namun memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat nasional. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data PDRB sektoral dan PDB rentang 2020 s/d 2022, salah satu sektor potensial di regional Bali-Nusra adalah sektor Pertambangan dan Penggalan. Sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan sektor dengan nilai LQ (Location Quotient) sebesar 0,86 dan nilai DS (Differential Shift) sebesar +11,79. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalan di regional Bali-Nusra memiliki pertumbuhan yang lebih cepat serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Sektor

TABEL 162. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN TAHUN 2022 PER PROVINSI

Provinsi	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Terhadap PDRB
Bali	4,60 persen	0,94 persen
Nusa Tenggara Barat	22,62 persen	20,37 persen
Nusa Tenggara Timur	2,10 persen	1,06 persen

Sumber : BPS, diolah

ini merupakan salah satu sektor unggulan di Nusa Tenggara Barat serta memiliki laju pertumbuhan positif di regional Bali-Nusra.

Sektor Pertambangan dan Penggalan mencakup kegiatan ekonomi dan/atau lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalan di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat (Badan Pusat Statistik, 2022).

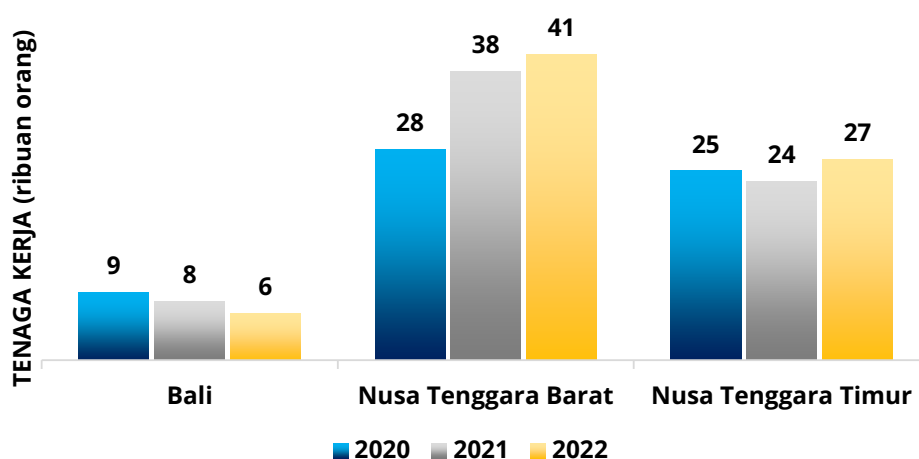
Selama tiga tahun terakhir, sektor Pertambangan dan Penggalan memiliki rata-rata kontribusi terhadap perekonomian regional atas dasar harga berlaku relatif besar, yaitu berada di kisaran 6,13 persen. Selain itu, sektor Pertambangan dan Penggalan juga memiliki laju pertumbuhan yang progresif pada tahun 2022, yaitu sebesar 20,41 persen.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki laju pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalan serta kontribusi terhadap PDRB terbesar, yaitu 22,62 persen dan 20,37 persen. Dari tabel "Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan Tahun 2022 Per Provinsi" tersebut juga dapat dilihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalan ini bukan merupakan sektor yang

potensial di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan setiap provinsi di kawasan regional Bali-Nusra memiliki ciri geografis yang berbeda. Meskipun begitu, sektor Pertambangan dan Penggalan di Bali dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan laju pertumbuhan yang positif pada tahun 2022.

Sektor Pertambangan dan Penggalan di provinsi Nusa Tenggara Barat bergantung pada penambangan emas, perak, tembaga, besi, mangan dan titanium. Potensi kandungan mineral logam ini berada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Pada saat pandemi Covid-19, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang tetap tumbuh positif. Selain itu, investasi asing yang masuk ke Nusa Tenggara Barat juga terkonsentrasi di sektor Pertambangan dan Penggalan. Sektor ini juga menyumbang tingginya ekspor di provinsi Nusa Tenggara Barat. Bea keluar yang disetor ke Kas Negara juga mayoritas berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalan di Pulau Sumbawa sebesar Rp1,34 triliun pada tahun 2022. Selain bea keluar, sektor Pertambangan dan Penggalan di Nusa Tenggara Barat juga berkontribusi cukup besar terhadap PBB dan pajak minerba (KFR Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023).

Secara umum, tingkat penyerapan tenaga kerja sektor Pertambangan dan Penggalan di seluruh provinsi di regional Bali-Nusra menunjukkan peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, kontribusi penyerapan tenaga kerja lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 73.737 orang atau sekitar 0,89 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Bali-Nusra. Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan

GAMBAR 112. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PER PROVINSI REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2020-2022


dan Penggalian di regional Bali-Nusra mengalami kenaikan dibandingkan dengan masa pandemi di mana terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja yang signifikan akibat adanya pembatasan sosial.

Pembangunan smelter di Sumbawa diharapkan dapat semakin banyak menyerap tenaga kerja yang terlibat di sektor Pertambangan dan Penggalian (KFR Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023). Selain itu, untuk mendukung tumbuhnya sektor ini ke depannya, perlu dilakukan usaha intensifikasi melalui strategi modernisasi/digitalisasi dan penguatan keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor hilir seperti sektor pengolahan hasil tambang.

2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

2.VI.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL MALUKU-PAPUA

Pada tahun 2022, regional Maluku-Papua menyumbang 2,44 persen dari total PDB Indonesia. Adapun provinsi penyumbang PDRB terbesar di regional Maluku-Papua adalah Provinsi Papua sebesar 54,9 persen, disusul provinsi Papua Barat dengan kontribusi sebesar 19,1 persen, Maluku sebesar 14,82 persen, dan Maluku Utara sebesar 11,22 persen. Hasil analisis pada diagram Klassen menunjukkan

terdapat empat sektor lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan di Regional Maluku-Papua. Keempat sektor tersebut yaitu sektor A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B - Pertambangan dan Penggalian, F - Konstruksi; dan O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Kontribusi keempat sektor unggulan terhadap total PDRB regional Maluku-Papua tahun 2022 mencapai 62,36 persen dengan nilai kontribusi sebesar Rp298,33 triliun. Berdasarkan tabel "Kontribusi Sektor Unggulan Regional Bali-Nusra Tahun 2022" terlihat bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalian dominan menjadi sektor unggulan utama penggerak perekonomian di regional Maluku-Papua dengan kontribusi terhadap total PDRB mencapai 27,56 persen dan nilai kontribusi sebesar Rp131,85 triliun. Adapun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi terhadap total PDRB regional Maluku-Papua sebesar 12,41 persen dengan nilai kontribusi sebesar Rp59,37 triliun. Secara parsial, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor unggulan pada regional Maluku, sementara sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor unggulan pada regional Papua.

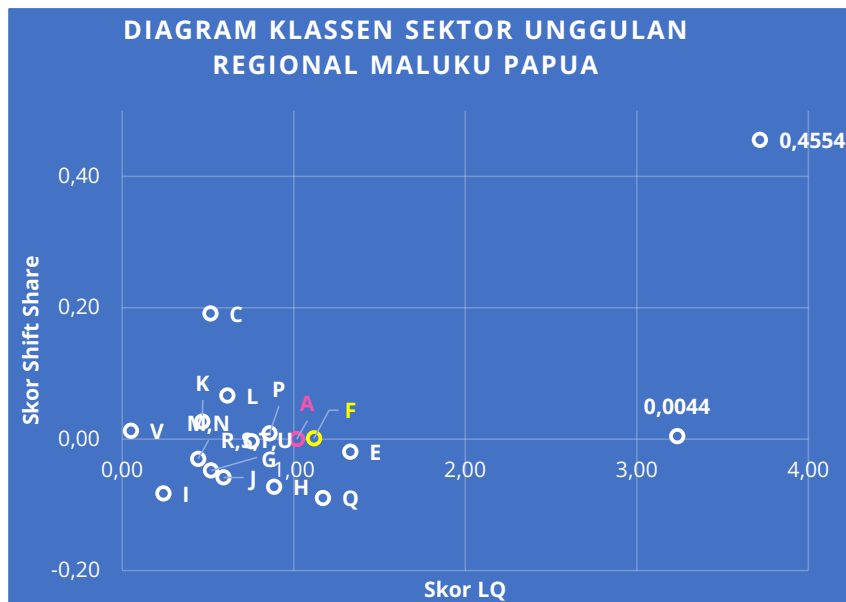
Secara umum, kontribusi setiap sektor tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2021. Nilai PDRB seluruh sektor unggulan mengalami kenaikan dari tahun 2021, akan tetapi apabila dilihat dari persentase

TABEL 163. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2022

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi terhadap PDRB (triliun)	% Kontribusi terhadap PDRB
Pertambangan dan Penggalian	131,85	27,56%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	59,37	12,41%
Konstruksi	56,16	11,74%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	50,96	10,65%
Total Kontribusi Sektor Unggulan	298,33	62,36%

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 113. DIAGRAM KLASSEN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL MALUKU PAPUA



Sektor Lapangan Usaha
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian
C Industri Pengolahan
D Pengadaan Listrik dan Gas
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
F Konstruksi
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi
K Jasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estat
M,N Jasa Perusahaan
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya

Sumber: BPS, diolah

TABEL 164. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2021 DAN 2022

Sektor Unggulan	2021			2022		
	Nilai (triliun)	Kontri- busi (%)	Rank Kontri- busi	Nilai (triliun)	Kontri- busi (%)	Rank Kontri- busi
Pertambangan dan Penggalian	110,60	26,23%	1	131,85	27,56%	1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55,57	13,18%	2	59,37	12,41%	2
Konstruksi	52,29	12,40%	3	56,16	11,74%	3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	48,73	11,56%	4	50,96	10,65%	4

Sumber : BPS, diolah

kontribusinya terhadap PDRB regional Maluku-Papua, terjadi penurunan persentase kontribusi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara itu, persentase kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan di tahun 2022.

Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada sektor A dan B mengingat kedua sektor tersebut memiliki porsi kontribusi yang besar terhadap PDRB regional Maluku-Papua tahun 2022.

2.VI.A.1. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Selama tahun 2020-2022, rata-rata kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap perekonomian regional Maluku-Papua cukup besar, yaitu berada di kisaran 24,80 persen. Provinsi dengan kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terbesar pada PDRB regional Maluku-Papua adalah Provinsi Papua (34,54 persen), Papua Barat (17,75 persen), Maluku Utara (14,58 persen) dan Maluku (2,41 persen). Secara keseluruhan, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap total PDRB regional Maluku-Papua mengalami peningkatan selama periode 2020-2022. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan produksi tambang bawah tanah di Kabupaten Mimika, permintaan ekspor konsentrat yang terjaga, dan harga produk tambang di pasar Internasional yang tinggi.

Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor unggulan di Provinsi Papua karena konsentrasi mineral logam pertambangan diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan

mineral logam maupun non logam yang besar dengan potensi terbesar pada pertambangan emas. Selain itu, bagian barat Papua memiliki kandungan minyak, gas, mineral logam (tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, cobalt, corum dan besi), serta mineral industri dan golongan C (bahan konstruksi, batu gamping, marmer, asbes, dan gypsum) yang berlimpah dan menjadi objek utama dalam investasi sektor Pertambangan.

Sebagai sektor unggulan, penyerapan tenaga kerja sektor Pertambangan dan Penggalian relatif kecil, yaitu hanya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 58.083 orang atau sekitar 1,52 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Regional Maluku-Papua pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan sektor Pertambangan dan Penggalian bersifat padat modal sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dan lebih banyak ditopang dengan peralatan berat. Meskipun begitu, secara umum, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor ini pada tahun 2022. Tren penyerapan tenaga kerja terlihat mengalami kenaikan pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sementara pada Provinsi Papua, penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan pada tahun 2022 setelah sebelumnya mengalami peningkatan pada tahun 2021.

2.VI.A.2. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

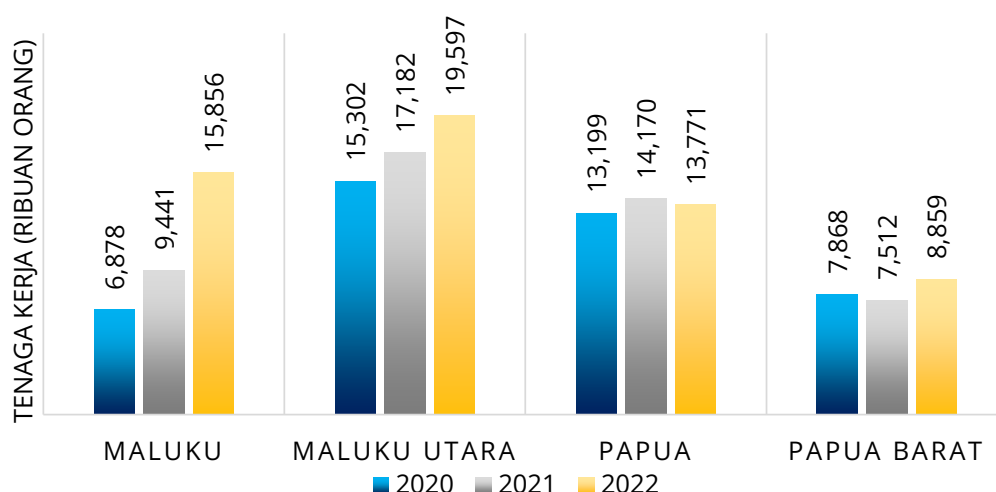
Selama tahun 2020-2022, rata-rata kontribusi sektor ini terhadap PDRB regional Maluku-Papua adalah sebesar 13,33 persen. Kontribusi sektor ini mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa walaupun hingga saat ini sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi sektor unggulan di

TABEL 165. KONTRIBUSI SEKTOR KONSTRUKSI TERHADAP TOTAL PDRB PER PROVINSI TAHUN 2020-2022

No.	Provinsi	2020	2021	2022	Rata-Rata
1.	Maluku	2,20%	2,42%	2,63%	2,41%
2.	Maluku Utara	11,56%	14,64%	17,55%	14,58%
3.	Papua	28,21%	36,82%	38,60%	34,54%
4.	Papua Barat	17,30%	17,69%	18,25%	17,75%
Kontribusi total Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Regional Maluku-Papua		20,62%	26,23%	27,56%	24,80%

Sumber : BPS, diolah

**GAMBAR 114. TREN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU-PAPUA
TAHUN 2020-2022**



Sumber: BPS, diolah

**TABEL 166. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TERHADAP TOTAL PDRB PER PROVINSI
TAHUN 2020-2022**

No.	Provinsi	2020	2021	2022	Rata-Rata
1.	Maluku	24,00%	23,19%	23,56%	23,58%
2.	Maluku Utara	21,03%	17,97%	14,29%	17,76%
3.	Papua	12,28%	10,83%	10,30%	11,14%
4.	Papua Barat	10,85%	10,98%	10,45%	10,76%
Kontribusi total sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Regional Sulawesi		14,41%	13,18%	12,41%	13,33%

Sumber : BPS, diolah

regional Maluku-Papua, namun perlahan terdapat pergeseran perluasan produksi dari sektor lainnya.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis di seluruh provinsi di regional Maluku-Papua, khususnya pada provinsi Maluku yang menjadi sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di regional tersebut. Pada kurun waktu 2020 - 2022, provinsi dengan kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terbesar di Regional Maluku-Papua adalah Maluku (23,58%), Maluku Utara (17,76%), Papua (11,14%), dan Papua Barat (10,76%). Dari persentase kontribusi tersebut dapat terlihat bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di provinsi Maluku dan Maluku Utara utamanya berasal dari sub sektor pertanian dan tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Selain itu, produksi komoditas tanaman pala, kelapa, kakao, dan cengkeh pada subsektor perkebunan tidak hanya meningkatkan perekonomian di regional ini, tetapi juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan di level nasional. Sementara itu, subsektor peternakan yang dikembangkan pada regional Maluku berupa sapi,

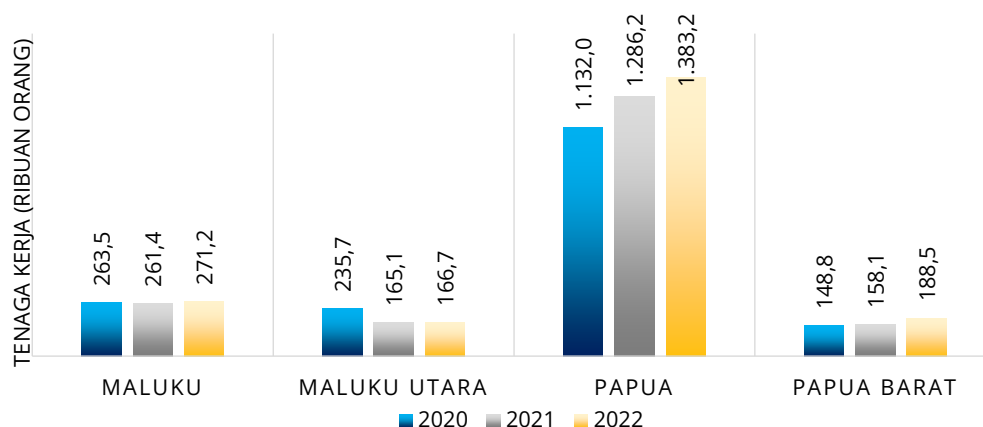
kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam petelur, dan itik.

Pada subsektor perikanan, produksi sektor ini didukung dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan perikanan budidaya didukung dengan beragamnya lahan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya seperti di perairan laut, di tambak air payau, di kolam/air tawar, di sawah, dan di perairan umum. Komoditi unggulan yang dihasilkan berupa lobster, udang, ikan kerapu, ikan nila, ikan mas, dan rumput laut yang merupakan komoditi dominan pada produksi perikanan di regional Maluku.

Selain kontribusinya terhadap PDRB regional Maluku-Papua, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sebanyak 2.009.682 orang tenaga kerja terdapat pada sektor ini. Secara umum, penyerapan tenaga kerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di regional Maluku-Papua terlihat mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan tenaga kerja terjadi di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Sedangkan, pada Provinsi Maluku Utara, terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja pada tahun

GAMBAR 115. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2020-2022



Sumber: BPS, diolah

2021 dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2022.

2.VI.B. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL MALUKU-PAPUA

Berdasarkan tipologi Klassen, sektor potensial merupakan sektor non basis namun memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat nasional. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data PDRB sektoral dan PDB rentang 2020 s/d 2022, salah satu sektor potensial di regional Maluku-Papua adalah sektor Industri Pengolahan. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan nilai LQ (Location Quotient) sebesar 0,51 dan nilai DS (Differential Shift) sebesar +19,13. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan di regional Maluku-Papua memiliki pertumbuhan yang lebih cepat serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Sektor ini merupakan salah satu sektor basis ($LQ > 1$) di Maluku Utara dan Papua Barat serta berkembang menjadi sektor potensial di Maluku dan Papua.

Selama tiga tahun terakhir, sektor Industri Pengolahan memiliki rata-rata kontribusi terhadap perekonomian regional atas dasar harga berlaku relatif besar, yaitu berada di kisaran 9,67 persen. Selain itu, sektor Industri Pengolahan juga memiliki laju pertumbuhan yang progresif pada tahun 2022, yaitu sebesar 17,94 persen. Berdasarkan Tabel "Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022 Per Provinsi", Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat

memiliki kontribusi terbesar, yaitu 29,21 persen dan 26,84 persen.

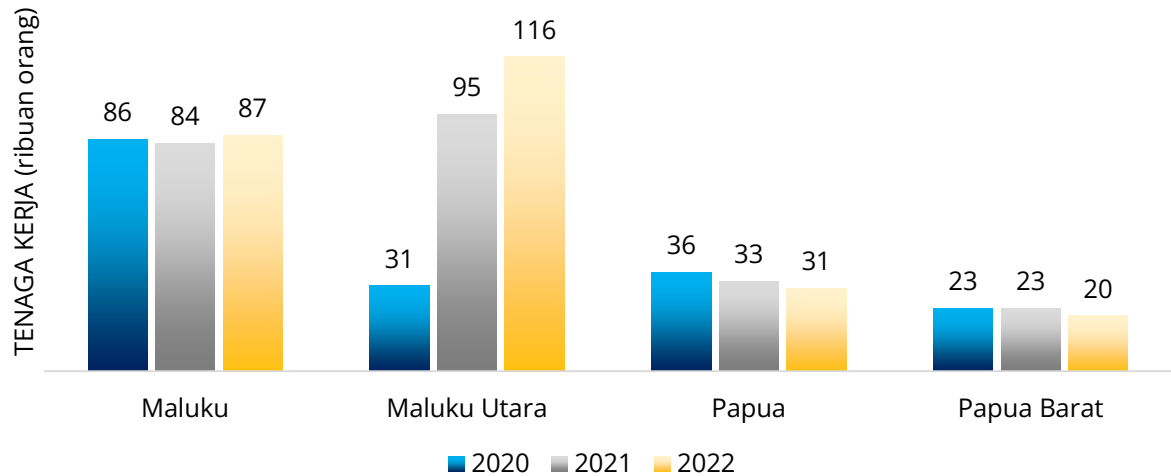
Industri Pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling) (Badan Pusat Statistik, 2022).

Potensi Industri Pengolahan di wilayah Maluku-Papua berasal dari berbagai daerah dan berbagai skala industri, dari mulai kecil hingga besar. Di Maluku Utara, potensi Industri Pengolahan berasal dari sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral nikel (smelter) di wilayah Halmahera Tengah, termasuk smelter hidrometalurgi dan pirometalurgi di wilayah Halmahera Selatan. Selain itu, peraturan terkait pelarangan ekspor bijih nikel juga dapat mendorong pertumbuhan sektor Industri Pengolahan. Hingga tahun 2022 terdapat 17 (tujuh belas) unit smelter di Maluku Utara yang telah beroperasi, melakukan aktivitas produksi, serta ekspor ke luar negeri. Hingga saat ini Maluku Utara secara aktif mengeksport produk olahan berupa feronikel maupun Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) ke Tiongkok yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan baku aneka industri seperti baterai, komponen elektronik, industri antariksa, turbin gas, dan bahan baku untuk beragam produk lainnya (Laporan Perekonomian BI dan KFR Provinsi Maluku Utara, 2023). Sementara

TABEL 167. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2022

Provinsi	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Terhadap PDRB
Maluku	9,06 persen	5,08 persen
Maluku Utara	77,27 persen	29,21 persen
Papua	0,08 persen	1,69 persen
Papua Barat	2,92 persen	26,84 persen

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 116. PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU-PAPUA

Sumber: BPS, diolah

itu, di Kabupaten/Kota lain di Maluku Utara, potensi sektor Industri Pengolahan berasal dari pengolahan hasil pertanian dan perikanan, misalnya kelapa, cengkeh, pala, kakao, kayu, hingga ikan asap (KFR Provinsi Maluku Utara, 2023).

Di Provinsi Maluku, potensi sektor Industri Pengolahan terutama berasal dari Industri Karet, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu. Industri Karet di Maluku menyumbang PDRB sebesar Rp770 miliar atau 32,06 persen dari PDRB Sektor Pengolahan. Industri Kayu di Maluku mengolah kayu yang didapat dari hutan menjadi kayu olahan yang siap dijadikan furniture. Sementara itu, industri Makanan dan Minuman berpusat di Kota Ambon dan menyumbang Rp622 miliar atau 37,20 persen dari PDRB Industri Pengolahan (KFR Provinsi Maluku, 2023).

Di Provinsi Papua Barat, potensi sektor Industri Pengolahan berasal dari produksi migas, yaitu keberadaan sumber daya gas alam cair Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh di Teluk Bintuni yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Papua Barat. Seiring dengan beroperasinya Train III LNG Tangguh di Teluk Bintuni pada tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi LNG menjadi 1,5 kali dari kapasitas produksi semula. Selain pengolahan migas, di Papua Barat juga terdapat potensi dari produksi non migas seperti produksi CPO yang berpengaruh terhadap pertumbuhan subsektor industri Makanan dan Minuman, serta pengembangan industri pengalengan ikan tuna dan cakalang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong (KFR Provinsi Papua Barat, 2023).

Sementara itu, di Provinsi Papua, Industri Pengolahan hanya berkontribusi sebesar 1,69 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua. Saat ini kegiatan perekonomian di Papua masih didominasi oleh kegiatan pertambangan sebesar 38,60 persen. Minimnya kontribusi sektor Industri Pengolahan

terhadap pembentukan PDRB di Provinsi Papua menunjukkan bahwa potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola sebagai input produksi belum berfungsi optimal. Meskipun begitu, terdapat potensi Industri Pengolahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah Papua, yaitu Industri Makanan dan Minuman sebagai hilirisasi hasil komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan seperti kopi arabica di pegunungan Papua dan pati sagu sehingga akan mendorong peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan (KFR Provinsi Papua, 2023).

Minimnya infrastruktur pendukung di Maluku dan Papua merupakan salah satu penghambat dalam peningkatan Sektor Industri Pengolahan saat ini. Masalah aksesibilitas, konektivitas, infrastruktur, dan keamanan masih menjadi kendala utama dalam menarik minat investor untuk datang dan berinvestasi di Maluku dan Papua.

Sebagai sektor potensial, Industri Pengolahan di regional Maluku-Papua dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 253.986 orang atau sekitar 6,66 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Maluku dan Papua pada tahun 2022. Dari Gambar "Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Per Provinsi Regional Maluku-Papua" dapat terlihat bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan di Maluku dan Maluku Utara mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan sektor Industri Pengolahan di kedua provinsi tersebut. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan di Papua dan Papua Barat mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan belum optimalnya pertumbuhan Industri Pengolahan di Papua. Sementara itu, meskipun Industri Pengolahan di Papua Barat berkontribusi sebesar 26,84 persen, rendahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor ini disebabkan oleh Industri Pengolahan yang berkembang lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar Provinsi Papua.



BAB IV

HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

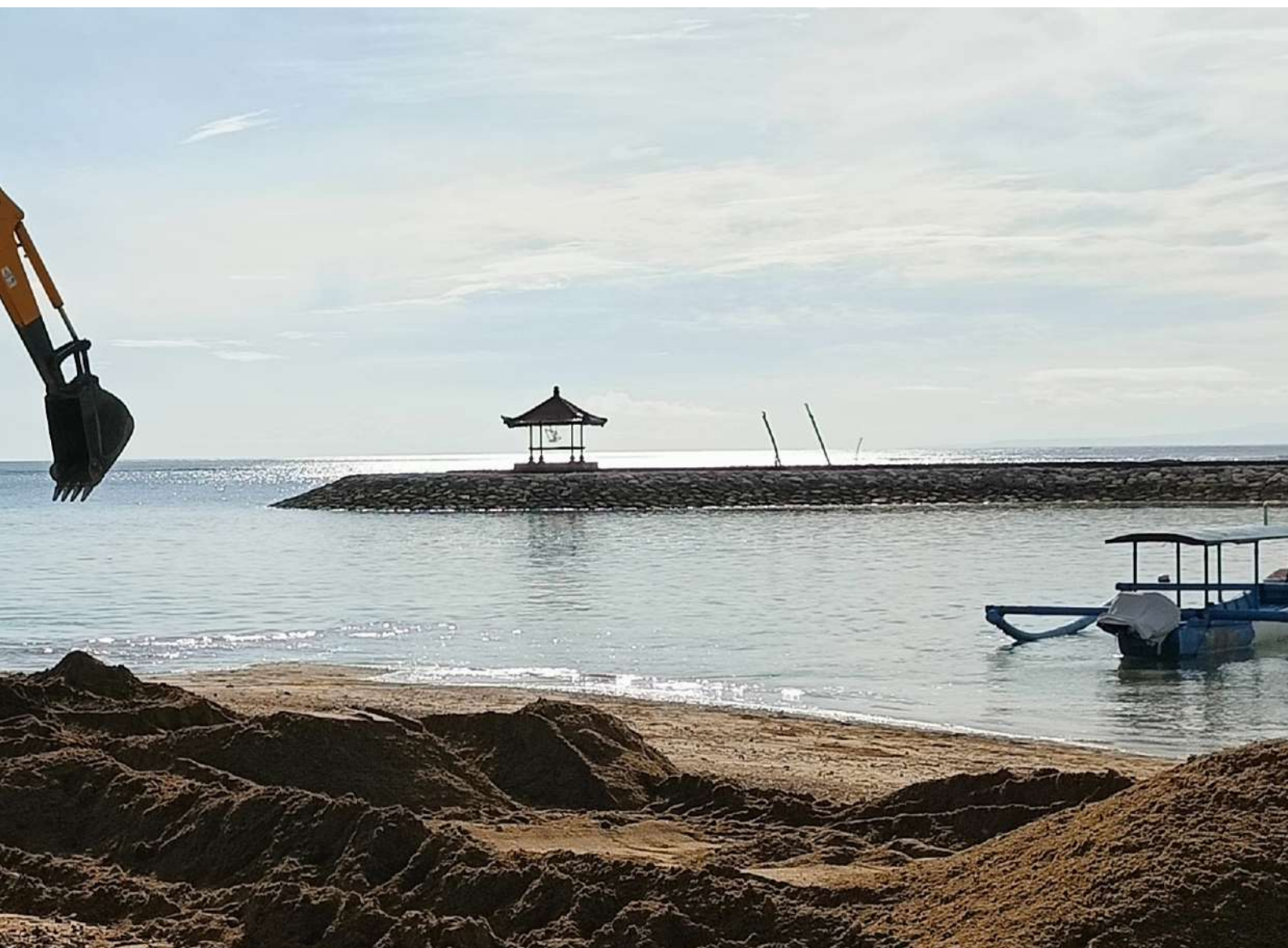
Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural merupakan tema APBN tahun 2022. APBN tersebut ditujukan untuk memantapkan serta melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk mengembalikan stabilitas perekonomian. Fokus utama belanja juga diarahkan pada penanganan pada sektor kesehatan, penguatan program perlindungan sosial, serta berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional lainnya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.115 tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan kebijakan belanja negara tahun 2022 dapat mencapai target 15,17% PDB. Kebijakan tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 10,87% Produk Domestik Bruto (PDB) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 4,30 persen dari PDB.

Salah satu upaya dalam melaksanakan fokus pembangunan di atas, Pemerintah melakukan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD terutama DAK fisik. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah

berperan penting dalam memperkuat keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah. Pemerintah dituntut untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat (K/L) maupun Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dalam PP No. 17 Tahun 2017, diatur bahwa sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional merupakan proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Sinkronisasi dilakukan dengan tetap mengacu pada penganggaran berbasis kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran dapat lebih berkualitas dan efektif.

Harmonisasi belanja pusat dan daerah terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu



pilarnya adalah harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah merupakan hal yang penting di tengah naiknya belanja negara setiap tahunnya. Kenaikan alokasi tersebut perlu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas, perbaikan tata kelola serta harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip value for money.

Sinergi fiskal dan nasional menjadi salah satu fokus utama dalam UU HKPD. Penyelarasan kebijakan level pusat dan daerah dilakukan dengan mensinergikan atau mengharmonisasikan kebijakan pembangunan dan fiskal melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), arahan Presiden dan peraturan perundang-undangan. Dalam RPJMN dan RKP mempertimbangkan berbagai usulan program strategis daerah. Selanjutnya, penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah dilakukan melalui

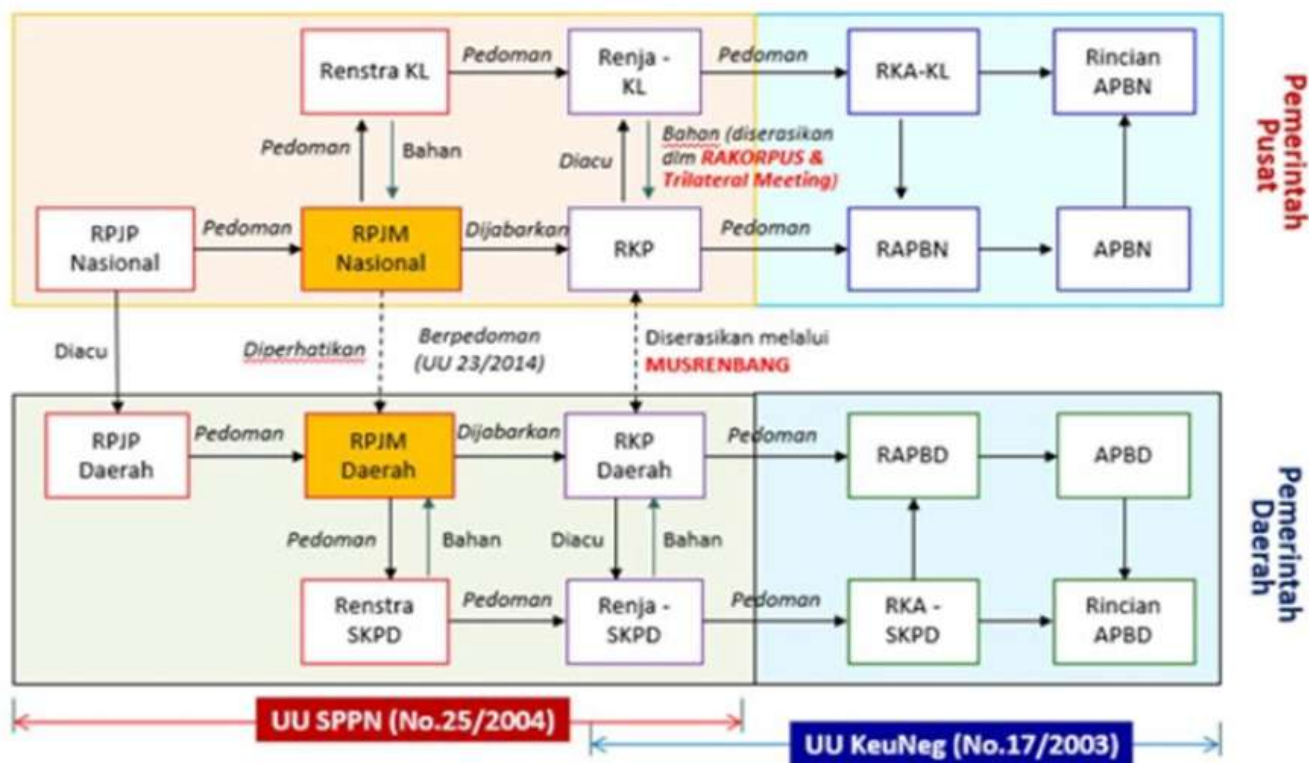
penyelarasan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah dengan prioritas nasional (Kementerian Keuangan, 2022).

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2022. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Mengacu pada RKP tahun 2022, pemerataan pembangunan antarwilayah akan dilakukan dengan



GAMBAR 117. SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Sumber: Kementerian Keuangan

meningkatkan kemudahan akses dan kualitas standar pelayanan minimal atau pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan didukung dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya di kawasan dan daerah yang relatif Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang didukung dengan kebijakan afirmatif sehingga terjalin dengan pusat kawasan pertumbuhan. Fokus pemerataan pembangunan pada tahun 2022 adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan wilayah kepulauan.

Menindaklanjuti fokus pembangunan tahun 2022 di atas, harmonisasi belanja Pemerintah Pusat dari pagu Belanja K/L dan TKDD dari Belanja DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Desa. Pembagian DAK menjadi fisik dan non fisik dimulai sejak tahun 2016. DAK Fisik secara prinsip untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, sedangkan DAK Non Fisik DAK Fisik berfokus pada pada layanan (soft skill) dan operasional layanan publik di daerah. Namun demikian, baik DAK Fisik dan Non Fisik difokuskan pada penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya.

Secara khusus, kebijakan DAK Fisik tahun 2022 diarahkan agar semakin mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak

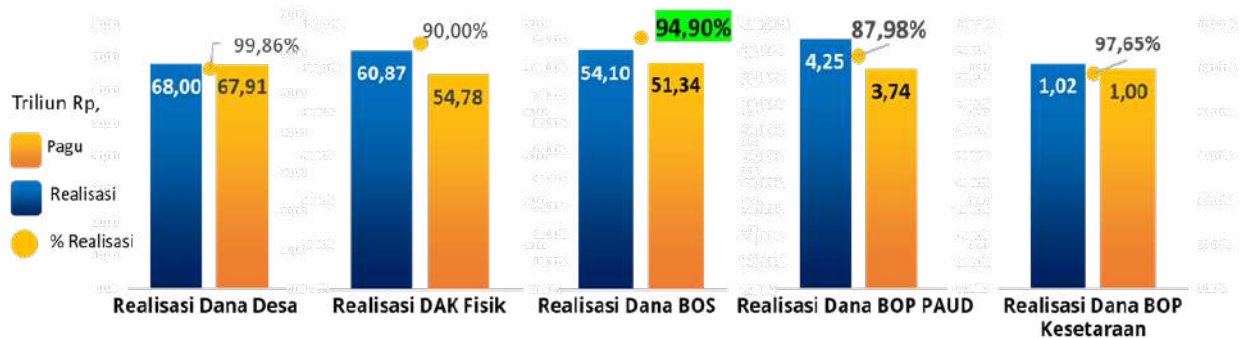
pandemi Covid-19. Selain itu, DAK Fisik juga ditujukan agar dapat meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah, mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM, Food Estate dan Sentra Produksi Pangan dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif). DAK Fisik juga diarahkan agar dapat dilakukan refocusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah, termasuk mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional serta memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (Kementerian Keuangan, 2022).

Dalam paparan Kementerian Desa pada Bimbingan Teknis, Dana Non Fisik dan Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk percepatan aksi SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Secara spesifik, untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa mengarah pada penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan usaha/ekonomi perdesaan. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa di antaranya diarahkan pada pengembangan desa wisata, ketahanan pangan, pencegahan stunting termasuk pengembangan desa inklusif.

Selanjutnya, dalam rangka melihat keterkaitan

GAMBAR 118. KINERJA BELANJA DAK FISIK, DANA DESA, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, BOP PAUD DAN BOP PENDIDIKAN KESETERAAN TAHUN 2022 SECARA NASIONAL (PER 30 DESEMBER 2022)

Jenis	2021			2022			Growth
	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	Persentase	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	Persentase	
Dana Desa	72.000,00	71.853,71	99,80%	68.000,00	67.906,14	99,86%	-5,49%
DAK Fisik	63.500,52	57.063,00	89,86%	60.874,00	54.783,95	90,00%	-3,99%
BOS	53.459,11	52.572,21	98,34%	54.108,31	51.349,28	94,90%	-3,44%
BOP PAUD	-	-	-	4.254,85	3.743,41	87,98%	-
BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	1.022,24	998,21	97,65%	-
TOTAL	188.959,63	181.488,92	96,05%	188.259,40	178.780,99	94,97%	-1,49%



BOP Kesetaraan				DAK Fisik				BOP PAUD			
Jenis	PAGU	REAL	%	Jenis	PAGU	REAL	%	Jenis	PAGU	REAL	%
Reguler	1,022	0,998	97,65%	Reguler	42,42	42,698	90,04%	Reguler	4,254	3,743	87,98%
Total	1,022	0,998	97,65%	Penugasan	13,453	12,085	89,83%	Total	4,254	3,743	87,98%
				Total	60,874	54,783	90,00%				

Dana Desa				BOS			
Jenis	PAGU	REAL	%	Jenis	PAGU	REAL	%
BLT Desa	26,948	26,943	99,98%	Reguler	53,387	50,706	95,13%
Non BLT Desa	41,051	40,963	99,78%	Affirmasi	-	-	-
Total	68,00	67,906	99,86%	Kinerja	0,721	0,642	89,12%
				Total	54,108	51,349	94,90%

Sumber: Kementerian Keuangan

alokasi belanja baik dari alokasi Belanja K/L, DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Desa, maka kajian ini berfokus pada harmonisasi alokasi belanja pada infrastruktur jalan, irigasi, dan SPAM Air Bersih serta sektor pendidikan. Pemilihan empat sektor tersebut dikarenakan keterbatasan data pendukung.

Mengacu pada UU No.2 tahun 2022, Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel). Penyelenggaraan jalan harus mengacu pada asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuandan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan

dan keseimbangan keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.

Pada tahun 2022, secara nasional harmonisasi belanja infrastruktur jalan ditunjukkan dari alokasi belanja K/L yang mencapai Rp39.950,6 miliar. Alokasi tersebut diperuntukkan pada pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan termasuk penerangan umum. Pada alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dialokasikan Rp12.165,2 miliar dengan porsi terbesar untuk jalan reguler dan jalan pengembangan food estate serta sentra produksi pangan. Pada alokasi Dana Desa, alokasi jalan mencapai Rp7.881,2 miliar yang diperuntukkan pada pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan desa, jalan usaha tani termasuk permukiman. Tingginya belanja infrastruktur jalan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan produktifitas, konektivitas dan mobilitas



masyarakat.

Infrastruktur irigasi memiliki peran penting di sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris tentunya membutuhkan pengelolaan irigasi yang tepat tentunya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006, irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Untuk pengelolaan infrastruktur irigasi tentu memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun 2022, belanja K/L telah dialokasikan anggaran infrastruktur irigasi mencapai Rp20.430,5 miliar untuk pembangunan/pemeliharaan bendungan, irigasi, embung, perpipaan irigasi. DAK Fisik Bidang Irigasi secara nasional mencapai Rp1.500 miliar untuk pengembangan food estate dan sentra produksi pangan. Dana Desa mencapai Rp1.031,9 miliar terutama untuk pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. SPAM ditujukan untuk menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha dan tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum (PP No.122 tahun 2015). Alokasi belanja K/L untuk infrastruktur SPAM mencapai Rp3.952,7 miliar diperuntukkan pada bendungan/jaringan air baku, infrastruktur air minum termasuk pembangunan dan peningkatan SPAM. Alokasi Belanja DAK Fisik Bidang Air Minum mencapai Rp3.000 miliar. Sedangkan, alokasi Dana Desa untuk SPAM sebesar Rp546,4 miliar untuk pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi).

Pada sektor pendidikan, harmonisasi belanja K/L dan DAK Non Fisik difokuskan pada alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), BOP Kesetaraan dan BOP Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Dana BOS merupakan dana operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dana BOS dibagi menjadi BOS Reguler dan Kinerja. Dana BOS Reguler adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS Kinerja adalah dana yang digunakan untuk

peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik. Secara nasional, alokasi Dana BOS dari Belanja K/L tahun 2022 mencapai Rp9.551,4 miliar dengan target 8,9 juta siswa. Dana BOS dari alokasi DAK Non Fisik mencapai Rp54.108,3 miliar.

Dana BOP PAUD merupakan dana untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Secara nasional, alokasi Dana BOP PAUD tahun 2022 mencapai Rp122,7 miliar sedangkan BOP Kesetaraan mencapai Rp34,8 miliar. Pemerintah melalui belanja K/L telah mengalokasikan anggaran BOPTN sebesar Rp747 miliar di Kementerian Agama dan Rp3.239,9 miliar di Kemendikbud Ristek Dikti. BOPTN ditujukan untuk meringankan mahasiswa yang kurang mampu di perguruan tinggi negeri. Bagi perguruan tinggi, dana ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan biaya operasional belajar mengajar. Dengan demikian, kegiatan aktivitas pembelajaran di perguruan tinggi menjadi lebih lancar dan mutu pendidikan diharapkan dapat meningkat.

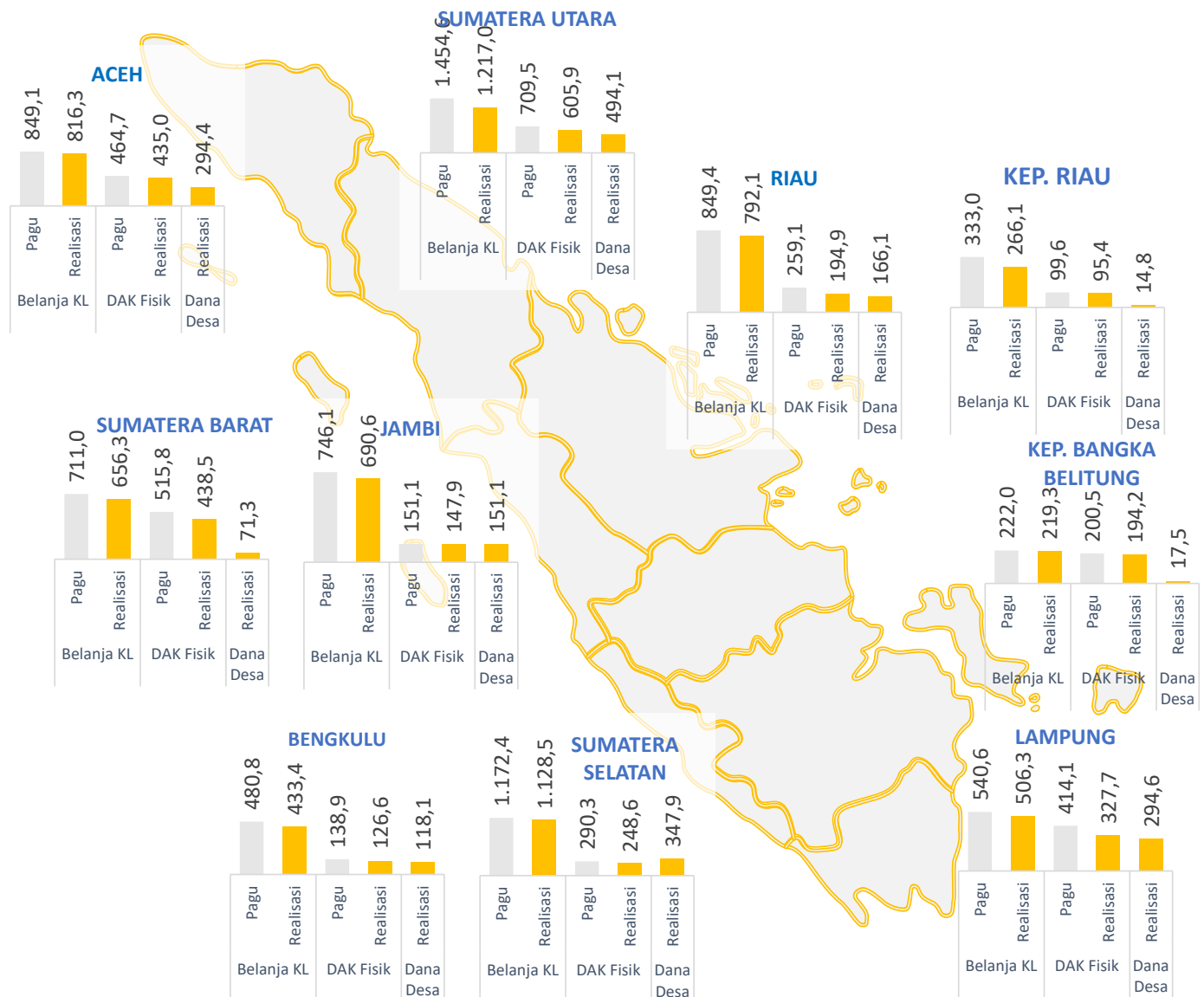
1. REGIONAL SUMATERA

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pengembangan regional Sumatera fokus pada optimalisasi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan khususnya di wilayah Pesisir Timur Sumatera. Regional Sumatera diharapkan menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional pangan nasional. Percepatan pemulihan industri, pariwisata dan investasi dan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera dan daerah rawan bencana juga menjadi target Pemerintah regional Sumatera.

1.1. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN

1.1.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.572,4 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan di regional Sumatera melalui alokasi pada Belanja K/L, DAK Fisik dan Dana Desa. Proporsi pada Belanja K/L mencapai Rp7.358,9 miliar (58,5%), diikuti DAK Fisik sebesar Rp3.243,5 (25,8%) dan Dana Desa Rp1.970,0 (15,7%). Alokasi terbesar untuk pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan

GAMBAR 119. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN REGIONAL SUMATERA (MILIAR RUPIAH)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

berada di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp2.658,2 miliar (21,1%) dari total anggaran regional Sumatera, selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.810,5 miliar (14,4%) dan Provinsi Aceh sebesar Rp1.608,2 miliar (12,8%).

Alokasi Belanja K/L di Provinsi Sumatera Utara dimanfaatkan untuk pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai proyek strategis termasuk sebagai bentuk dukungan pada Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) mencapai Rp1.122,4 miliar, di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp436,3 miliar dan di Provinsi Aceh sebesar Rp375,4 miliar. Pemerintah juga melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk menjaga kondisi tetap terjaga dengan baik, aman dan layak untuk digunakan telah dialokasikan anggaran di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp156,3 miliar, Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp110,1 miliar dan di Provinsi Aceh sebesar Rp147,3 miliar.

Selain dukungan Belanja K/L, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur jalan dari sumber DAK Fisik Bidang Jalan di regional Sumatera. Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp709,5 miliar, di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp515,8 miliar dan Provinsi Aceh sebesar Rp464,6 miliar.

Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan di Provinsi Sumatera Utara tersebut diperuntukkan pada jalan reguler sebesar Rp428,4 miliar, jalan untuk mendukung Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan sebesar Rp174,6 miliar dan penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) sebesar Rp106,5 miliar. Pada Provinsi Sumatera Barat, alokasi anggaran untuk jalan reguler

mendapat porsi yang besar mencapai Rp335,9 miliar, Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi



Pangan sebesar Rp134 miliar dan dan penguatan DPP SIKM sebesar Rp45,9 miliar. Selanjutnya di Provinsi Aceh mendapatkan alokasi anggaran pada jalan reguler sebesar Rp339,4 miliar dan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan sebesar Rp125,3 miliar.

1.I.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Selain pendanaan dari Belanja K/L dan DAK Fisik Bidang Jalan, Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai infrastruktur jalan maupun jembatan desa. Dana Desa yang dialokasikan telah direalisasikan di regional Sumatera mencapai Rp1.970,0 miliar. Provinsi Sumatera telah merealisasikan sebesar Rp494,1 miliar, Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp347,9 miliar dan Provinsi Lampung sebesar Rp294,6 miliar. Realisasi Dana Desa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk rehabilitasi/peningkatan/pengerasan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain). Selain itu, Dana Desa tersebut juga digunakan untuk pembuatan

rambu-rambu di jalan desa, pemeliharaan jalan pemukiman, jalan usaha tani termasuk pemeliharaan jembatan desa.

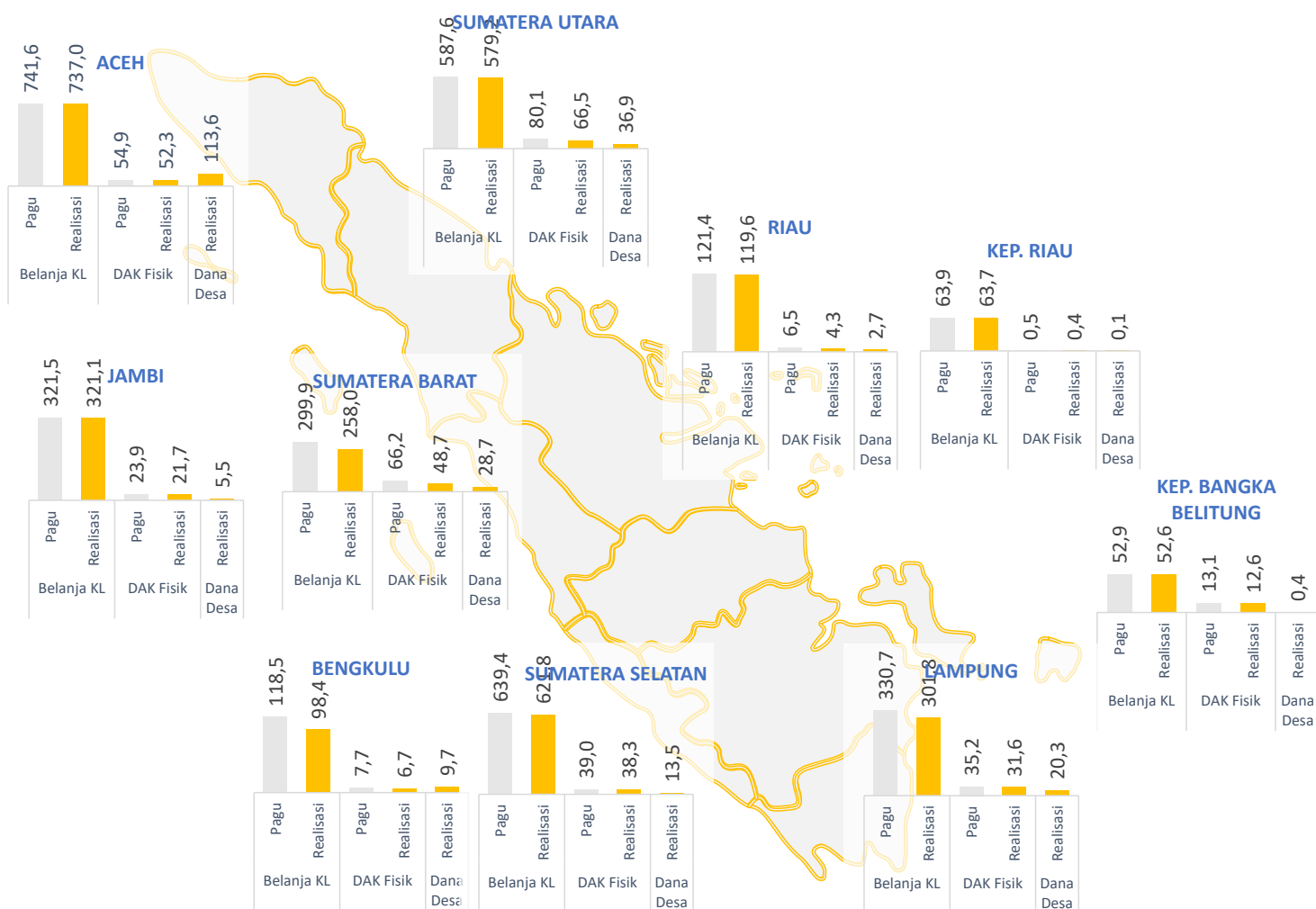
1.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI

1.II.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Pada infrastruktur irigasi di regional Sumatera, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Belanja K/L, DAK Fisik Bidang Irigasi dan Dana Desa untuk irigasi secara total mencapai Rp3.835,9 miliar. Alokasi Belanja K/L untuk infrastruktur irigasi merupakan proporsi terbesar mencapai Rp3.277,3 miliar (85,4%), DAK Fisik sebesar Rp327,2 miliar (8,5%) dan Dana Desa sebesar Rp231,4 miliar (6%).

Alokasi untuk irigasi tertinggi di Provinsi Aceh mencapai Rp741,6 miliar, selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp639,4 miliar dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp587,6 miliar. Alokasi infrastruktur irigasi

GAMBAR 120. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI REGIONAL SUMATERA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

di Aceh terbesar untuk pembangunan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie sebesar Rp244,1 miliar dan Bendungan Keureuto. Kedua bendungan tersebut merupakan bagian dari proyek strategi nasional. Bendungan di atas difungsikan sebagai pengendali banjir. Bendungan Rukoh diharapkan dapat mengairi lahan seluas 11.950 ha dan Bendungan Keureuto dapat dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi seluas 9.420 ha. Manfaat utama bendungan juga diharapkan dapat meningkatkan volume tanam lebih dari 1 kali dalam setahun. Selain itu, bendungan difungsikan untuk penyediaan air baku sekaligus sebagai pembangkit listrik tenaga air.

Belanja K/L untuk infrastruktur irigasi di Provinsi Sumatera Selatan terbesar untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji. Bendungan ini merupakan bendungan pertama di Sumatera Selatan diharapkan dapat mengairi lahan pertanian seluas 18.219 ha. Bendungan ini juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas rumah tangga, peternakan, perikanan serta irigasi. Pada Provinsi Sumatera Utara, terdapat pembangunan sarana bidang sumber daya alam dan irigasi berupa Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah mengalokasikan dari Belanja K/L sebesar Rp335,7 miliar. Selain fungsi irigasi, bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi air baku dan pengendalian banjir terutama di lokasi sekitar pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Pada DAK Fisik Bidang Irigasi, seluruh provinsi di regional Sumatera dialokasikan untuk Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan. Alokasi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp80,1 miliar, Sumatera Barat Rp66,2,2 miliar dan Provinsi Aceh Rp54,9 miliar.

1.II.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk irigasi dari Dana Desa selain dari Belanja K/L dan DAK Fisik Bidang Irigasi. Realisasi tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana. Jaringan irigasi tersier difungsikan sebagai prasarana air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Realisasi anggaran Dana Desa untuk irigasi perdesaan di Regional Sumatera mencapai Rp231,4 miliar. Dari realisasi tertinggi, Provinsi Aceh telah merealisasikan Dana Desa untuk pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana sebesar Rp113,6 miliar, Sumatera Utara sebesar 36,9 miliar dan Sumatera Barat sebesar Rp28,7 miliar. Alokasi Dana Desa sebagai pelengkap atas alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik sehingga peran Pemerintah Desa dapat melakukan perbaikan sisi mikro atau pemeliharaan

sarana dan prasarana irigasi di level desa.

1.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH

1.III.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Pengembangan SPAM menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan pengembangan SPAM adalah menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

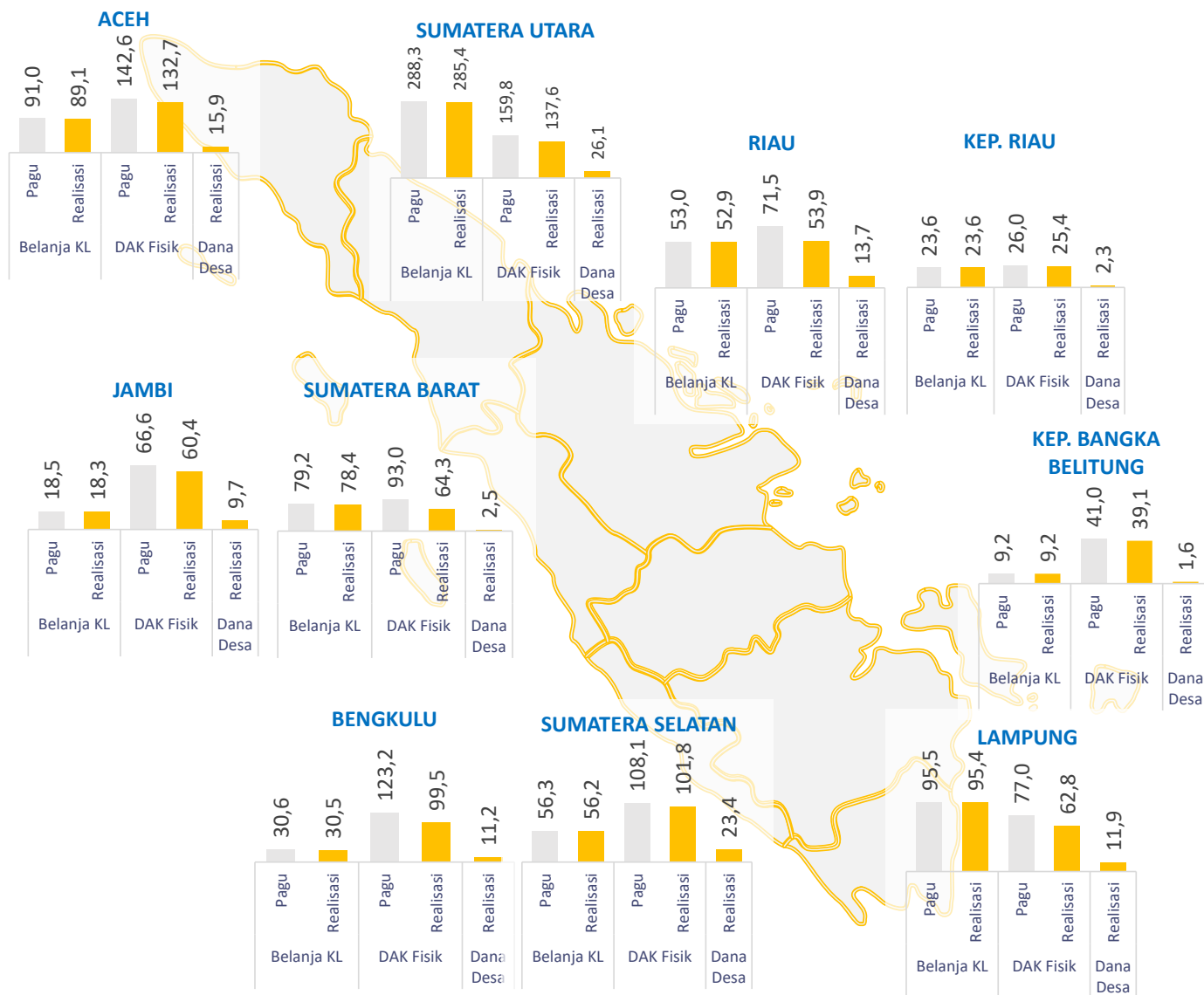
Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kecukupan atau ketersediaan air bersih di masyarakat dengan mengalokasikan Belanja K/L, DAK Fisik Bidang Air Bersih dan Dana Desa. Alokasi tahun 2022 untuk pengembangan SPAM air bersih mencapai Rp1.772,4 miliar dengan porsi Belanja K/L sebesar Rp745,2 miliar (42,0%), DAK Fisik Bidang Air Bersih sebesar Rp98,9 miliar (51,3%) dan Dana Desa sebesar Rp118,3 miliar (6,7%).

Alokasi Belanja K/L pengembangan SPAM tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp288,3 miliar, Provinsi Lampung sebesar Rp95,5 miliar dan Provinsi Aceh sebesar Rp91 miliar. Salah satu pengembangan SPAM di Provinsi Lampung berupa pembangunan prasarana air baku Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu sebesar Rp40 miliar. Bendungan ini dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih, pengendalian banjir, irigasi, pariwisata dan potensi ekonomi lainnya yang bermafaat untuk Provinsi Lampung.

Pada Belanja DAK Fisik, Pemerintah mengalokasikan anggaran pengembangan SPAM air bersih pada Bidang Air Minum di Regional Sumatera sebesar Rp908,9 miliar. Alokasi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp159,8 miliar, selanjutnya Provinsi Aceh sebesar Rp142,6 miliar dan Provinsi Bengkulu sebesar Rp123,2 miliar.

1.III.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan SPAM di perdesaan dengan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sumber air bersih milik desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor) dengan total di Regional Sumatera sebesar Rp118,3 miliar. Dana Desa direalisasikan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp26,1 miliar, Provinsi Sumatera Selatan

**GAMBAR 121. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH REGIONAL SUMATERA (MILIAR RUPIAH)**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

sebesar Rp23,4 miliar dan Provinsi Aceh sebesar Rp15,9 miliar.

1.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN

1.IV.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOS

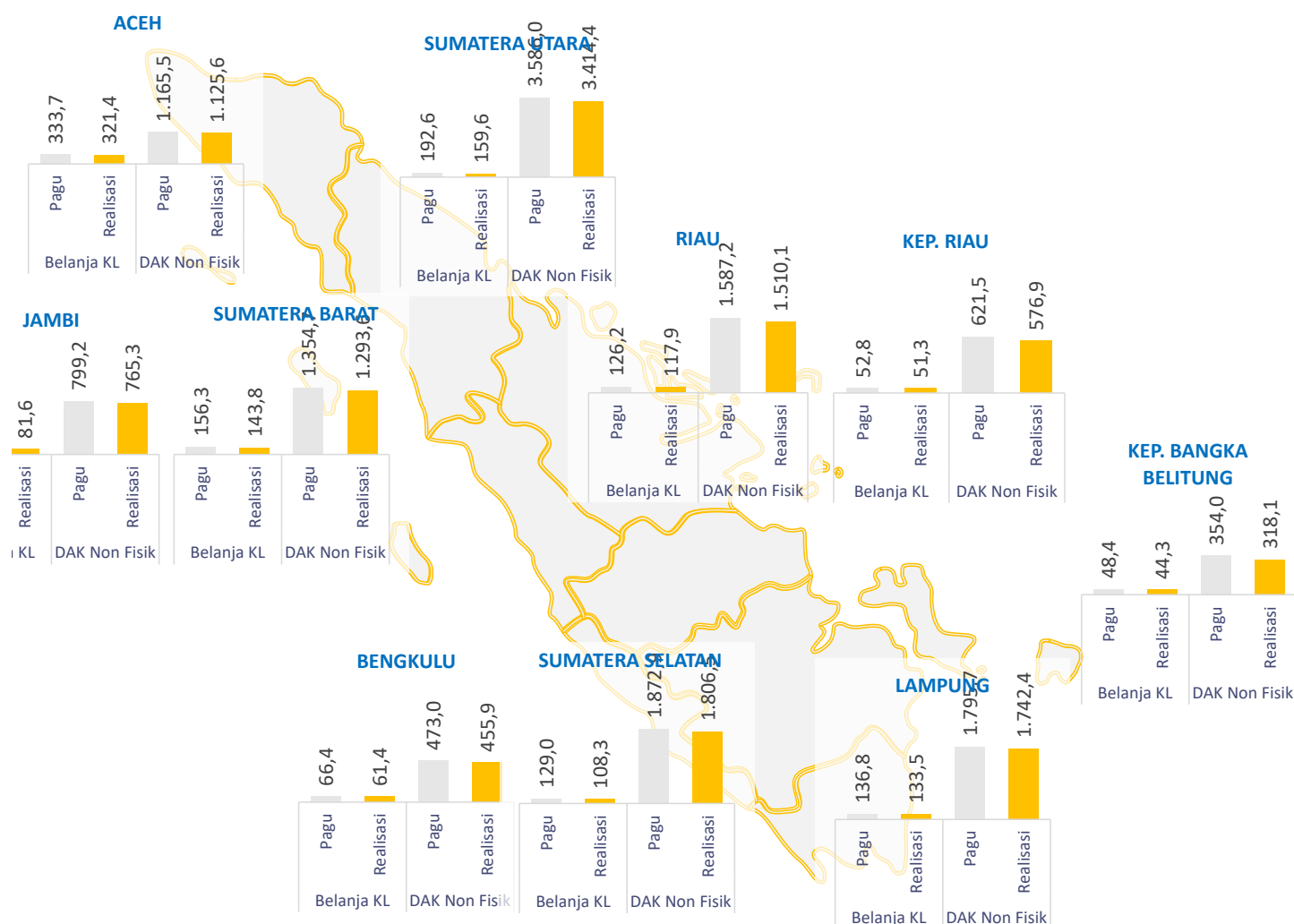
Sesuai amanat Undang-Undang, Pemerintah senantiasa meningkatkan kualitas sektor pendidikan di Indonesia dengan instrumen APBN berupa alokasi dari belanja K/L maupun DAK Non Fisik. Salah satu kebijakan anggaran pendidikan berupa bantuan pendidikan dasar dan menengah yaitu alokasi BOS pada sekolah keagamaan yang dikelola Kementerian Agama dan DAK Non Fisik BOS yang dikelola Kemendikbud Ristek. Tahun 2022, alokasi pagu Belanja K/L BOS mencapai Rp647,8 miliar dengan

target sebesar 587.631 siswa yang ditujukan kepada siswa sekolah keagamaan.

Alokasi tertinggi di Provinsi Aceh mencapai Rp178,6 miliar dengan target 175.684 siswa. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp121,5 miliar dengan target 107.224 siswa dan Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp107,2 miliar dengan target 92.380 siswa.

Alokasi Belanja DAK Non Fisik berupa BOS di regional Sumatera mencapai Rp12.662,9 miliar yang terdiri atas BOS Reguler sebesar Rp12.491,2 miliar dan BOS Kinerja Rp171,7 miliar. BOS Reguler tersebut diperuntukkan kepada 31,98 juta siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 160.366. BOS Kinerja diberikan kepada 594.983 siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 1.829. Provinsi penerima Reguler terbesar yaitu di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp3.353,6 miliar dengan jumlah siswa sebanyak 8,5 juta anak didik dan jumlah sekolah 42.376. Provinsi

GAMBAR 122. ALOKASI ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN REGIONAL SUMATERA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

ini juga menerima BOS kinerja terbesar mencapai Rp45,2 miliar dengan jumlah sekolah 467 dan jumlah siswa sebanyak 156.264 anak didik.

1.IV.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOP

Dalam Belanja DAK Non Fisik, Pemerintah mengalokasikan BOP Paud yang diberikan kepada 2,29 juta siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 73.100 dan total alokasi sebesar Rp743,4 miliar. Sama halnya dengan penerima BOS terbesar, penerima BOP Paud juga diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp146,7 miliar dengan jumlah sekolah sebanyak 13.610 dan jumlah siswa sebanyak 429.408 anak didik.

Pada BOP Kesetaraan diberikan kepada 3.122 sekolah dengan total alokasi mencapai Rp203,5 miliar. Alokasi terbesar berada di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp40,5 miliar dengan jumlah sekolah sebanyak 556. Penerima terbesar selanjutnya adalah Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp29,9 miliar dengan jumlah sekolah sebanyak 391.

Dukungan Pemerintah dari sisi Belanja K/L dengan mengalokasikan BOPTN sebesar 679,1 miliar dengan target 150 lembaga di Regional Sumatera. Alokasi BOPTN tertinggi di Provinsi Aceh mencapai Rp155,1 miliar dengan target 56 lembaga. Provinsi Riau mencapai Rp84,4 miliar dengan target 12 lembaga dan Sumatera Selatan dengan alokasi pagu Rp78,2 miliar untuk 11 lembaga.

2. REGIONAL JAWA

Pembangunan di Regional Jawa yang merupakan pusat perekonomian di Indonesia tetap terus berlanjut. Fokus utama pembangunan diarahkan untuk memantapkan kawasan utara Regional Jawa dalam rangka mendorong industrialisasi. Terdapat pembangunan kawasan khusus industri dan sentra perekonomian yang dicanangkan sebagai motor penggerak perekonomian seperti KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung, KI Terpadu Batang, KI Subang, KEK Lido, dan KEK Gresik. Selain itu, pengembangan daerah perkotaan dan sektor pariwisata juga menjadi prioritas. Terdapat dua Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) di Regional Jawa yaitu, DPP Borobudur dan Bromo-Tengger



Semeru serta daerah pariwisata lain seperti Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran. Pemerintah juga berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan menjadikan pengembangan di wilayah selatan Regional Jawa sebagai prioritas pembangunan Regional Jawa. Dukungan atas upaya tersebut dilakukan melalui instrumen APBN dan APBD.

Terdapat kondisi khusus dalam pencatatan dukungan fiskal APBN, Belanja K/L, di Regional Jawa. Realisasi dukungan Belanja K/L di Regional Jawa akan lebih besar dibandingkan dengan regional lain. Hal ini disebabkan karena Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak. Selain itu, terdapat pencairan yang dilakukan secara terpusat di Provinsi DKI Jakarta, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia, sehingga realisasi akan tercatat di Regional Jawa.

2.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN

2.I.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

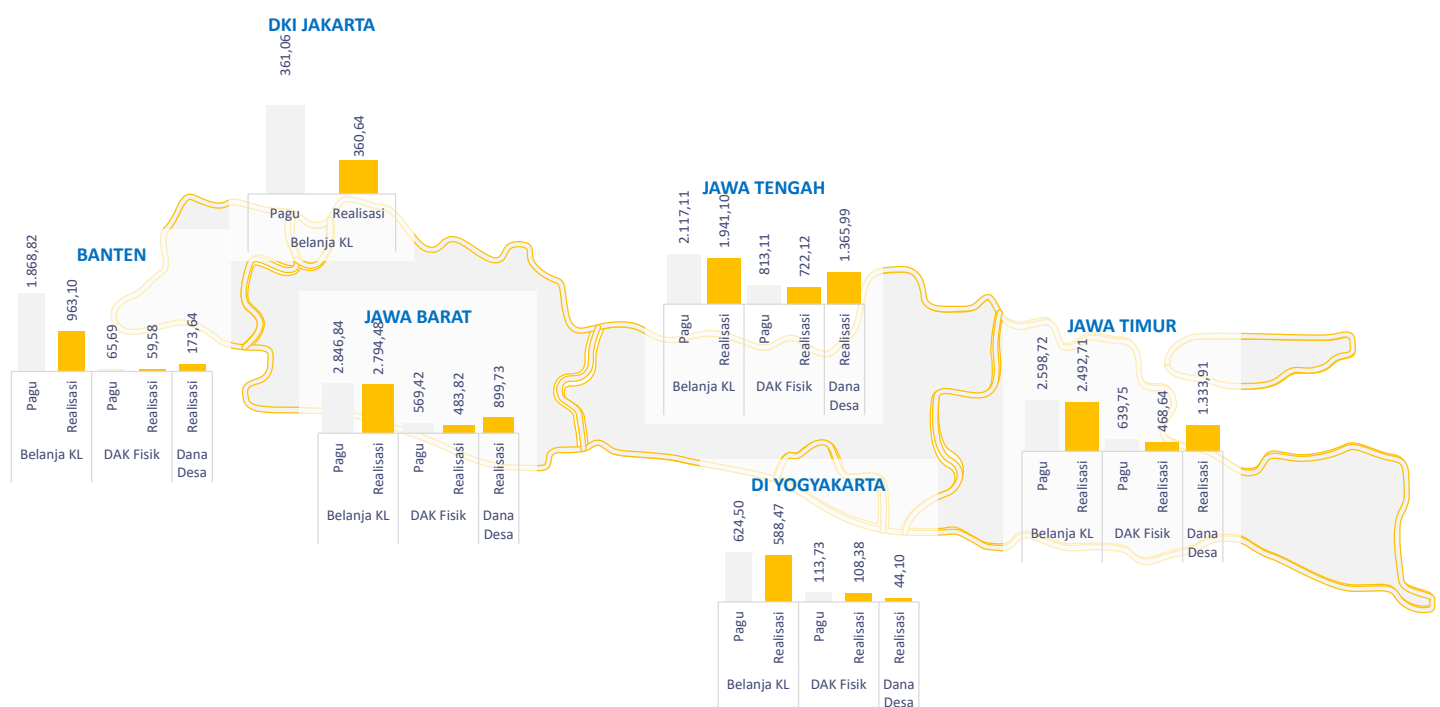
Alokasi belanja negara untuk infrastruktur Jalan di Regional Jawa sebesar Rp12.618,74 miliar. Alokasi tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp10.417,04 miliar (82,55 persen) dan DAK Fisik sebesar Rp2.201,70 miliar (17,45 persen). Total realisasi belanja negara untuk infrastruktur jalan sebesar Rp12.259,59 miliar atau 97,15 persen. Realisasi tersebut ditujukan

untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk untuk pemeliharaan jalan KSPN super prioritas. Selain itu, belanja negara turut digunakan untuk penguatan konektivitas jalan utama kabupaten/kota, jalan kabupaten/kota terhadap DPP dan SIKM, serta jalan/kabupaten kota terhadap sentra produksi pangan.

Alokasi Belanja K/L terbesar terdapat pada tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat utamanya ditujukan untuk pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) dengan realisasi sebesar Rp1.099,67 miliar 39,35 persen dari total realisasi infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Tengah pembangunan infrastruktur jalan diantaranya digunakan untuk pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak dengan realisasi Rp270,41 miliar (76,57 persen) dari alokasi Rp353,18 miliar dan untuk dukungan konektivitas KI Batang berupa pembangunan jalan dan jembatan dengan realisasi sebesar Rp411,06 miliar. Adapun di Provinsi Jawa Timur, realisasi belanja digunakan untuk pembangunan jalan strategis nasional sebesar Rp690,69 miliar.

Pada tiga provinsi lain, juga terdapat pembangunan infrastruktur jalan penting untuk tujuan pembangunan Regional Jawa. Pada Provinsi Banten, terdapat pembangunan berupa jalan bebas hambatan Serang-Panimbang, tetapi dengan realisasi yang masih rendah sebesar Rp551,967 miliar (38,39 persen) dari alokasi anggaran Rp1.437,71 miliar. Pembangunan tersebut untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan dengan wilayah selatan Provinsi

GAMBAR 123. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN REGIONAL JAWA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Banten. Adapun di Provinsi DI Yogyakarta realisasi belanja diantaranya digunakan untuk pembangunan jalan strategis nasional sebesar Rp309,273 miliar serta untuk pemeliharaan jalan untuk akses ke lokus KSPN super prioritas, Borobudur, sebesar Rp6,62 miliar. Sementara itu, di Provinsi DKI Jakarta terdapat realisasi anggaran terpusat untuk penerangan jalan umum tenaga surya yang merupakan proyek lanjutan (on going project). Pada tahun 2022 realisasi belanja penerangan jalan umum tenaga surya sebesar Rp360,64 miliar untuk 26.503 titik/lokasi di wilayah satu dan dua Indonesia.

Realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari DAK Fisik sebesar Rp1.842,54 miliar. Realisasi digunakan untuk konektivitas jalan kabupaten/kota ataupun dengan jalan nasional. Sebanyak Rp1.173,88 miliar atau 63,71 persen realisasi digunakan untuk jalan reguler kabupaten/kota. Selain itu, terdapat realisasi belanja DAK Fisik untuk penguatan DPP dan SIKM sebesar Rp206,71 miliar serta pengembangan sentra produksi pangan sebesar Rp461,95 miliar selaras dengan status Regional Jawa sebagai penghasil komoditas beras terbesar di Indonesia.

2.I.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Realisasi anggaran Dana Desa untuk pengembangan infrastruktur jalan desa di Regional Jawa sebesar Rp3.817,37 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan desa, jalan permukiman/gang, jalan tani, serta sarana dan prasarana jalan desa. Adapun realisasi terbesar terdapat pada komponen jalan tani dengan realisasi sebesar Rp1.322,38 miliar merefleksikan upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan untuk mendukung pertanian di Desa Regional Jawa. Selanjutnya, realisasi Dana Desa untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan desa sebesar Rp1.184,83 miliar.

Realisasi belanja negara untuk infrastruktur jalan menunjukkan upaya pemerintah melakukan pembangunan pada berbagai jenjang. Pembangunan dilakukan untuk level jalan nasional, kabupaten/kota, sampai dengan jalan desa. Skema pembangunan tersebut diharapkan dapat menghasilkan konektivitas yang baik dari jalan nasional sampai dengan perdesaan dengan kualitas yang baik.

2.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI

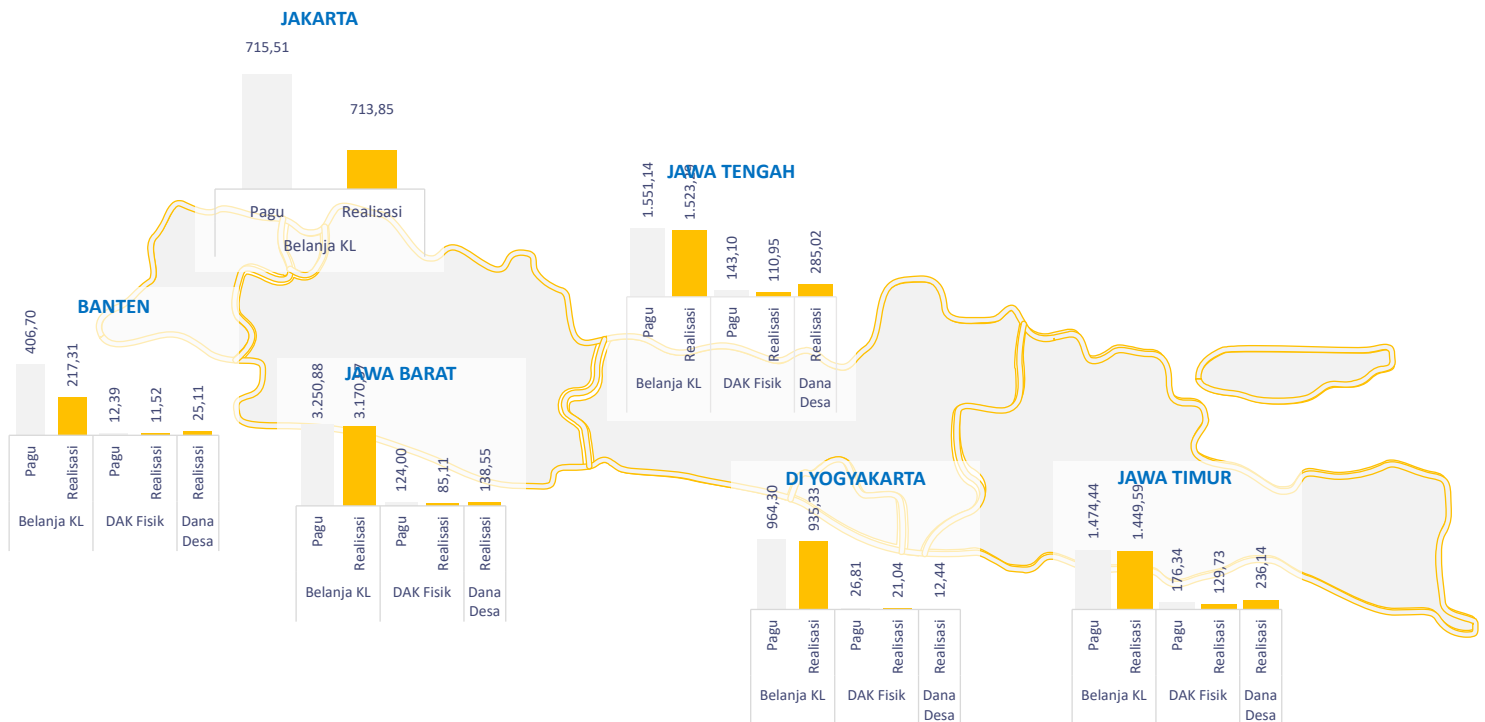
2.II.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Berbeda dengan regional lainnya, sektor yang menjadi basis/berkontribusi paling besar dalam perekonomian Regional Jawa adalah sektor industri. Pada tahun 2022, sektor industri berkontribusi sebesar 28,00 persen bagi perekonomian Jawa. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 7,26 persen bagi perekonomian Regional Jawa. Namun, meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif kecil bagi perekonomian Regional Jawa, Regional Jawa tetap menjadi penghasil terbesar pada komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan tertentu. Oleh karena itu, di tengah maraknya alih lahan pertanian dan perkebunan, pemerintah tetap berupaya mendorong produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Regional Jawa, khususnya sebagai upaya dalam meningkatkan komoditas beras, pala, cengkeh, kopi, tebu, dan kakao dengan tetap melakukan pembangunan dan pemeliharaan irigasi.

Alokasi belanja negara yang bersumber dari Belanja K/L dan DAK Fisik untuk infrastruktur irigasi pada tahun 2022 di Regional Jawa sebesar Rp8.845,60 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Rp8.362,96 miliar (94,54 persen) Belanja K/L dan Rp482,4 miliar (5,46 persen) DAK Fisik. Total realisasi anggaran dari alokasi tersebut sebesar Rp8.368,29 miliar atau 94,60 persen. Realisasi tersebut ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi, bendungan, dan embung baik yang bersifat PN, maupun non PN. Sebagian realisasi Belanja K/L infrastruktur irigasi digunakan untuk pembangunan 13 bendungan dan pemeliharaan 204 bendungan sebesar Rp5.440,99 miliar. Adapun lokus bendungan yang dibangun terdapat di Provinsi Banten satu bendungan, Provinsi DKI Jakarta satu bendungan, Provinsi Jawa Barat enam bendungan, Provinsi Jawa Tengah lima bendungan, dan Provinsi Jawa Timur dua bendungan. Realisasi terbesar digunakan untuk pembangunan bendungan Sadawarna di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp773,99 miliar, bendungan Semantok di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp727,53 miliar, dan bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp663,65 miliar yang masih on going.

Tujuan lain dari realisasi Belanja K/L untuk infrastruktur irigasi adalah pembangunan dan pemeliharaan irigasi sebesar Rp2.440,65 miliar. Sebagian besar realisasi digunakan untuk pemeliharaan irigasi sepanjang 272.315,75 km. Realisasi terbesar untuk pemeliharaan irigasi terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp529,44 miliar untuk 266.202,23 km irigasi. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat tiga irigasi yang dibangun dengan total realisasi mencapai Rp116,80 miliar. Irigasi yang dibangun antara lain Irigasi Slinga di Provinsi Jawa Tengah serta Irigasi Bajulmati dan Nipah di Provinsi Jawa Timur yang masih on going.

Alokasi anggaran yang bersumber dari DAK Fisik untuk infrastruktur irigasi sebesar Rp482,64 miliar. Total realisasi dari alokasi anggaran tergolong

**GAMBAR 124. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI REGIONAL JAWA (MILIAR RUPIAH)**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

rendah, mencapai Rp358,34 miliar atau 74,24 persen. Berbeda dengan Belanja K/L, seluruh realisasi DAK Fisik untuk infrastruktur irigasi khusus ditujukan untuk pengembangan sentra produksi pangan pada 66 kabupaten kota.

2.II.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Realisasi Dana Desa untuk infrastruktur irigasi pada tahun 2022 sebesar Rp697,27 miliar. Realisasi Dana Desa digunakan untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan di daerah perdesaan. Kontribusi terbesar realisasi berasal dari pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier/ sederhana di desa sebesar Rp664,33 atau 95,28 persen dari total realisasi Dana Desa untuk infrastruktur irigasi. Selain itu, realisasi juga digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan embung desa sebesar Rp32,94 miliar.

2.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM

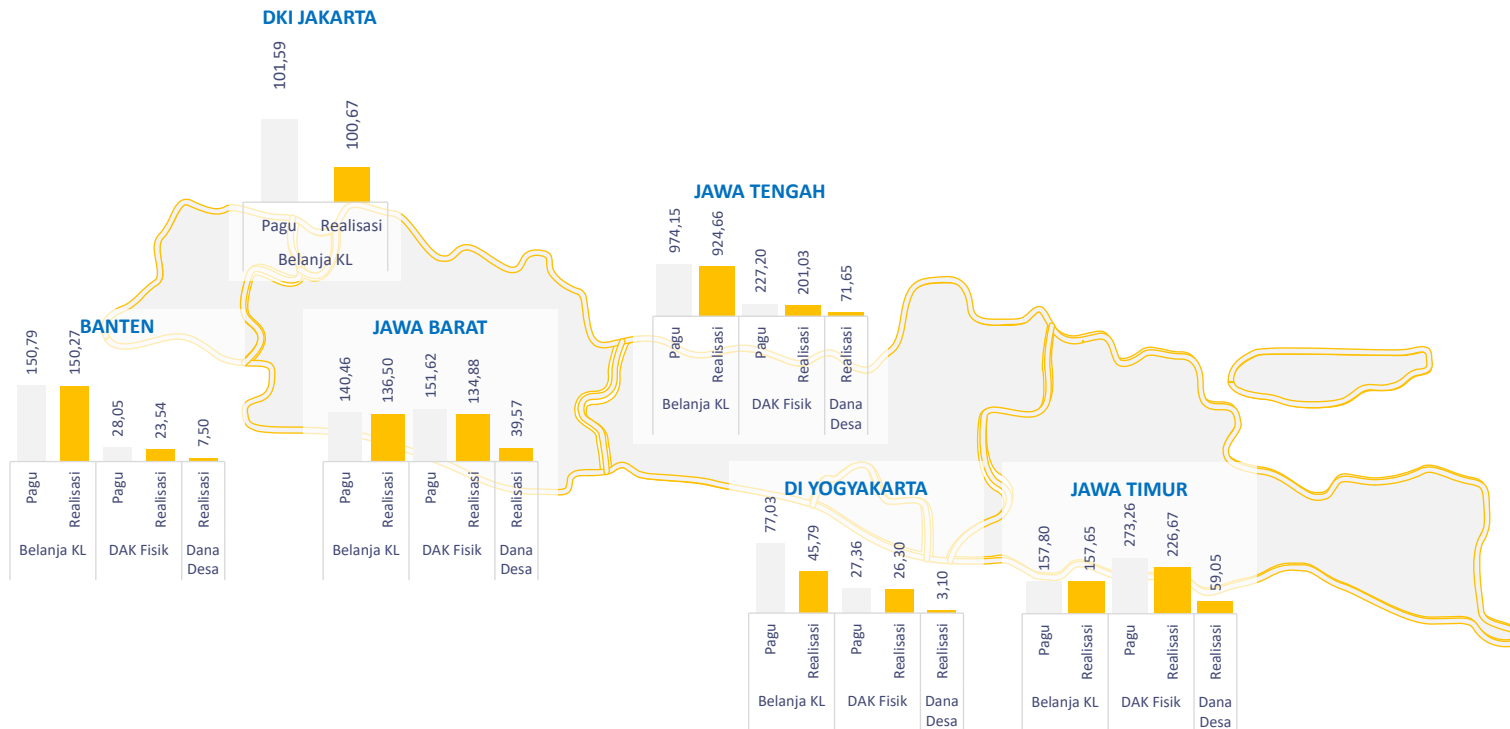
2.III.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Secara umum, aksesibilitas rumah tangga terhadap air minum layak di Regional Jawa relatif lebih baik dibandingkan dengan regional lainnya. Pada tahun 2022, tingkat persentase rumah tangga untuk

mengakses air minum layak di seluruh provinsi Regional Jawa di atas 90 persen dengan tingkat akses terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 92,71 persen. Namun, apabila dilihat lebih rinci berdasarkan perdesaan dan perkotaan, masih terdapat provinsi dengan tingkat aksesibilitas di bawah 90 persen seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Tingkat aksesibilitas terendah di wilayah perdesaan juga terdapat di Provinsi Banten dengan tingkat akses sebesar 79,74 persen. Adapun target nasional pada tahun 2024, tingkat aksesibilitas terhadap air minum layak mencapai 100 persen. Oleh karena itu, masih terdapat ruang perbaikan aksesibilitas terhadap air minum layak di Regional Jawa.

Pada tahun 2022, alokasi belanja negara untuk infrastruktur air bersih/minum yang bersumber dari Belanja K/L dan DAK Fisik sebesar Rp2.309,30 miliar. Nilai tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp1.601,81 miliar (69,39 persen) dan DAK Fisik sebesar Rp707,49 miliar (30,61 persen). Realisasi atas alokasi tersebut mencapai Rp2.127,97 miliar atau 92,15 persen untuk infrastruktur air minum, pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM, serta bendungan/ jaringan air baku.

Kontribusi terbesar realisasi infrastruktur air bersih/minum yang bersumber dari Belanja K/L digunakan untuk bendungan/jaringan air baku dengan realisasi sebesar Rp632,19 miliar atau 36,29 persen. Setidaknya terdapat pembangunan atau peningkatan atas sebelas bendungan/jaringan air baku pada tahun 2022 di Regional Jawa. Adapun bendungan/

GAMBAR 125. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH REGIONAL JAWA (MILIAR RUPIAH)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

jaringan air baku dengan serapan anggaran terbesar terdapat pada proyek Air Baku Sumber Urang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan realisasi sebesar Rp272,85 miliar sepanjang 12 km. Adapun bendungan/jaringan air baku lainnya antara lain: Air Baku Jonggol dan Klapanunggal di Provinsi DKI Jakarta, Pontang Tanara di Provinsi Banten, Kuningan di Provinsi Jawa Barat, serta Gongseng, Tukul, Pidekso, Banyukuwung, Bendo, Kesiguhan, dan Gogodalam di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu realisasi untuk pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM sebesar Rp592,57 miliar untuk level kabupaten/kota dan regional. Pembangunan dan peningkatan SPAM dilakukan terhadap 901 unit, sedangkan perluasan SPAM dilakukan terhadap 39.017 unit. Selanjutnya, realisasi untuk infrastruktur air minum yang layak direalisasikan sebesar Rp290,78 miliar.

Realisasi infrastruktur air minum yang bersumber dari DAK Fisik seluruhnya ditujukan untuk air minum layak sebesar Rp612,43 miliar. Realisasi tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur seiring dengan jumlah kabupaten/kota yang menjadi lokus penyediaan infrastruktur lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Terdapat 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi lokus penyediaan infrastruktur air minum yang layak.

2.III.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Realisasi Dana Desa untuk penyediaan infrastruktur

air minum di Regional Jawa sebesar Rp180,88 miliar. Realisasi terbesar terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp71,65 miliar. Selain karena cakupan wilayah dan jumlah penduduk, tingginya realisasi pembangunan infrastruktur air minum di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain di Regional Jawa selaras dengan rendahnya aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber air minum di perdesaan. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga di perdesaan untuk mengakses air minum layak di Provinsi Jawa Tengah baru mencapai 89,56 persen. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas air minum tersebut melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sumber air bersih di desa sebesar Rp45,39 miliar serta pembuatan dan pemeliharaan sambungan air bersih (pipanisasi) sebesar Rp24,80 miliar. Adapun wilayah perdesaan di Provinsi Banten yang memiliki aksesibilitas air minum layak di Regional Jawa, telah merealisasikan Dana Desa untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sumber air bersih di desa sebesar Rp5,76 miliar serta pembuatan dan pemeliharaan sambungan air bersih (pipanisasi) sebesar Rp1,73 miliar

2.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN

Pemerintah senantiasa berupaya untuk terus melakukan pembangunan sektor pendidikan, termasuk di Regional Jawa. Kondisi pendidikan di Regional Jawa relatif lebih baik dibandingkan regional lainnya. Oleh karena itu, fokus pembangunan sektor



pendidikan di Regional Jawa adalah pendidikan menengah dan tinggi. Pemerintah berupaya mempersiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing, serta mampu berinovasi, sehingga mampu menjadi katalis dalam mendorong produktivitas nasional.

2.IV.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOS

Regional Jawa memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga jumlah siswa di Regional Jawa menjadi yang terbesar di Indonesia. Selaras dengan kondisi tersebut, realisasi BOS di Regional Jawa lebih tinggi daripada regional lainnya, yaitu sebesar Rp34.232,90 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp 8.425,65 miliar (24,61 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp25.807,25 miliar (75,39 persen). BOS yang berasal dari Belanja K/L disalurkan oleh Kementerian Agama dengan jumlah penerima manfaat 7,89 juta orang dengan rincian 45.599 orang di Provinsi Banten, 29.168 orang di Provinsi DI Yogyakarta, 7,15 juta orang di Provinsi DKI Jakarta, 199.775 orang di Provinsi Jawa Barat, 188.548 orang di Provinsi Jawa Tengah dan 271.394 orang di Provinsi Jawa Timur.

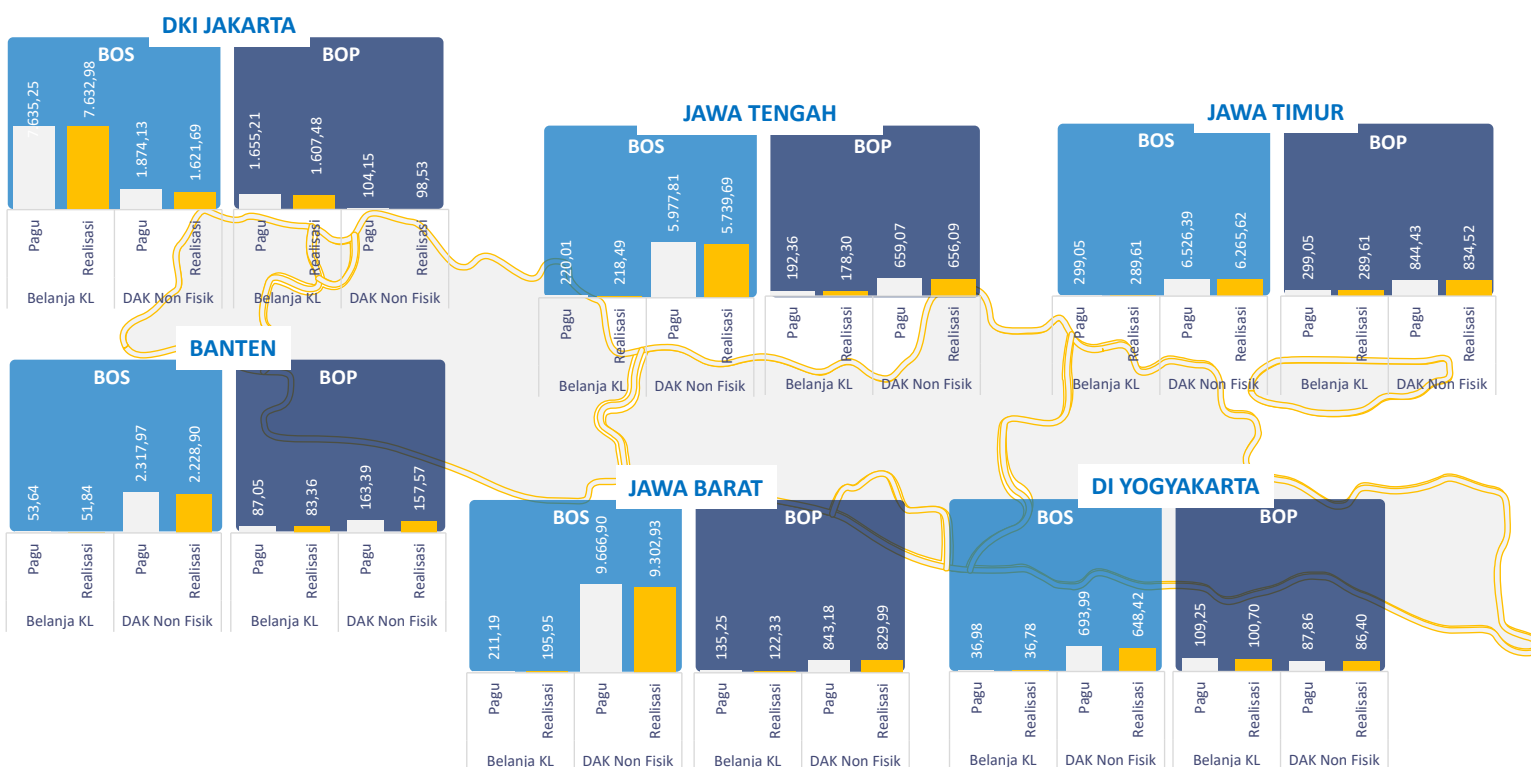
Jumlah penerima BOS di Provinsi DKI Jakarta terlihat sangat besar karena terdapat pencairan BOS secara terpusat dengan penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencairan tersebut dilakukan melalui DIPA Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik. Terdapat sebanyak

7,11 juta orang siswa penerima manfaat BOS dengan pencairan terpusat untuk jenjang yang setara dengan SD, SMP, dan SMA. Penerima manfaat terbanyak terdapat pada siswa setara SD dengan jumlah 3,44 juta orang dan total penyaluran sebesar Rp3.110,25 miliar. Selain itu, untuk siswa setara SMP telah disalurkan sebesar Rp2.858,07 miliar untuk 2,60 juta orang dan setara SMA sebesar Rp1.613,44 miliar untuk 1,07 juta orang.

BOS yang berasal dari DAK Non Fisik disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyaluran BOS dilakukan melalui BOS Reguler untuk 65,98 juta orang siswa di 287.053 sekolah dengan realisasi sebesar Rp25.515,02 miliar dan BOS Kinerja untuk 1,21 juta orang siswa di 3.353 sekolah dengan realisasi Rp292,23 miliar. Jumlah penerima BOS terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dengan penerima manfaat sejumlah 24,13 juta orang. Adapun pada provinsi lainnya jumlah penerima manfaat BOS sebanyak 6,08 juta orang di Provinsi Banten, 4,19 juta orang di Provinsi Jakarta, 15,46 juta orang di Provinsi Jawa Tengah, 1,72 juta orang di Provinsi DI Yogyakarta, dan 15,62 juta orang di Provinsi Jawa Timur.

Penyaluran BOS yang bersumber dari Belanja K/L dan DAK Non Fisik memiliki sasaran yang berbeda. Oleh karena itu, penyaluran BOS dapat menjangkau sekolah-sekolah yang terdapat di Regional Jawa. Penyaluran BOS diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan

GAMBAR 126. ALOKASI ANGGARAN BOS DAN BOP REGIONAL JAWA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

menengah untuk mempersiapkan SDM pada pendidikan tinggi.

2.IV.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOP

Alokasi anggaran untuk BOP pada tahun 2022 di Regional Jawa sebesar Rp5.161,45 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp2.459,38 miliar (47,65 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp2.702,08 miliar (42,35 persen). Realisasi anggaran atas alokasi BOP sebesar Rp5.016,42 miliar atau 97,19 persen. Kedua instrumen belanja memiliki tujuan yang berbeda dalam penyalurannya. BOP yang berasal dari Belanja K/L ditujukan untuk pendidikan tinggi dan disalurkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, BOP yang berasal dari DAK Non Fisik ditujukan untuk pendidikan anak usia dini dan kesetaraan yang seluruhnya disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Alokasi anggaran BOPTN ditujukan untuk 900 lembaga pendidikan tinggi. Namun, tidak seluruh lembaga tinggi terdapat di Regional Jawa karena dari 742 lembaga pendidikan tinggi yang dilakukan pencairan di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 730 lembaga tinggi yang penyalurannya dilakukan secara terpusat melalui Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, serta Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jumlah realisasi BOPTN Kementerian Agama sebesar Rp295,84 miliar, sedangkan BOPTN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp2.057,48 miliar. Besarnya realisasi BOP untuk pendidikan tinggi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan menyediakan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Realisasi BOP yang bersumber dari DAK Non Fisik disalurkan untuk PAUD sebesar Rp2.116,35 miliar dan untuk kesetaraan sebesar Rp546,76 miliar. BOP disalurkan untuk 214.093 sekolah dengan rincian 207.623 unit sekolah PAUD dan 6.470 unit sekolah kesetaraan. Kontribusi BOP kesetaraan terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar Rp263,83 miliar untuk 2.808 unit sekolah kesetaraan yang memiliki capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,78 tahun. Sementara itu, penerima BOP Paud terbesar terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan realisasi sebesar Rp749,20 miliar untuk 2,30 juta orang siswa pada 72.972 sekolah. Adapun realisasi BOP Paud di Provinsi Banten sebesar Rp112,39 miliar untuk 362.883 orang siswa, Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp67,68 miliar untuk 186.875

orang siswa, Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp75,90 miliar untuk 236.018 orang siswa, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp566,16 miliar untuk 1,76 juta orang siswa, dan Provinsi Jawa Tengah Rp545,00 miliar untuk 1,73 juta siswa. BOP Paud memiliki peranan esensial dalam mempersiapkan SDM yang unggul karena PAUD dapat menjadi pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

3. REGIONAL KALIMANTAN

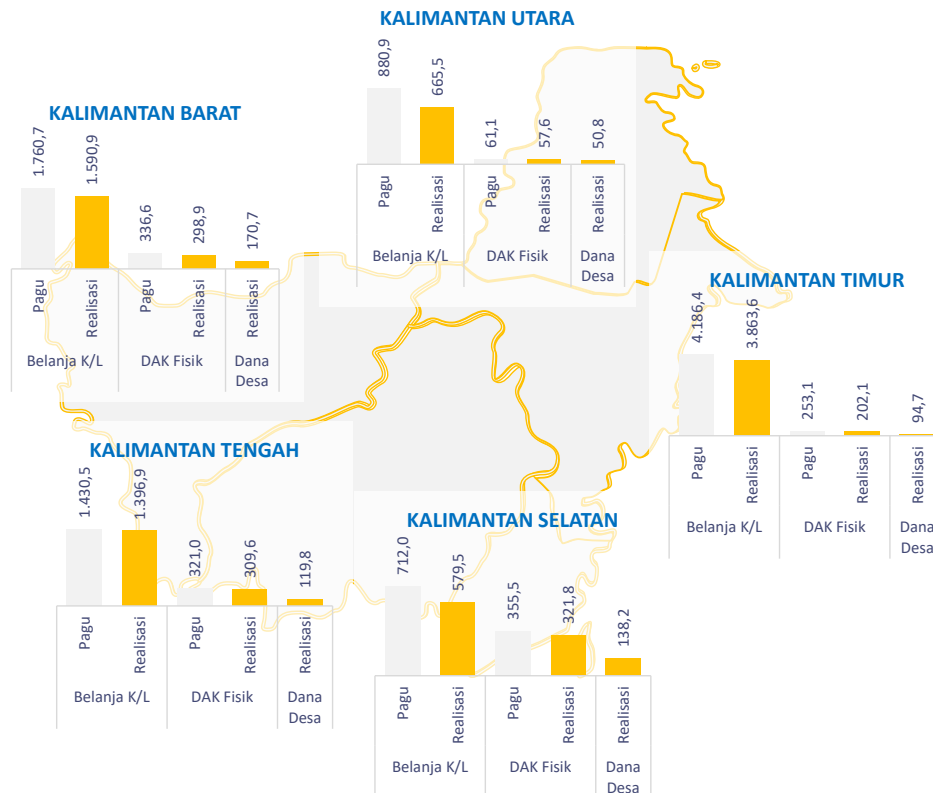
Pengembangan Wilayah Kalimantan tahun 2022 diarahkan untuk menjaga perannya sebagai paru-paru dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi nasional. Selain itu, sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengembangan Wilayah Kalimantan difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara terutama di wilayah perbatasan. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru serta pengembangan sentra produksi pangan (food estate) dan komoditas unggulan (sawit, karet, dan perikanan) menjadi salah satu strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi di Wilayah Kalimantan.

3.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan di Wilayah Kalimantan sebesar Rp10.872,3 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari belanja K/L Rp8.970,6 miliar (82,5 persen), DAK Fisik Rp1.327,4 miliar (12,2 persen) dan Dana Desa Rp574,3 miliar (5,3 persen). Secara umum, belanja infrastruktur jalan yang bersumber dari ketiga belanja tersebut menunjukkan keselarasan. Pembangunan infrastruktur jalan pada belanja K/L fokus pada pembangunan dan rehabilitasi jalan nasional dan jembatan. Sedangkan DAK Fisik ditujukan untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka konektivitas intra dan antar wilayah, pengembangan food estate, penguatan DPP dan SIKM, serta konektivitas perdesaan.

3.I.A. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

Sebagian besar atau sebesar 41,7 persen anggaran infrastruktur jalan di Wilayah Kalimantan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur yang berfokus pada penguatan konektivitas antar daerah, Kawasan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Peningkatan konektivitas transportasi jalan antar wilayah dari IKN, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan sekitarnya menuju Bandara APT

**GAMBAR 127. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN REGIONAL KALIMANTAN (MILIAR RUPIAH)**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Pranoto berupa pembangunan jalan akses baru sepanjang 11,4 km pada ruas jalan kawasan Sempaja menuju Batu Cermin dan Batu Besaung, hingga tembus Bandara APT Pranoto dan jalan akses jalur ringroad selatan dan utara. Alokasi pada tahun 2022 difokuskan pada rencana pembebasan lahan seluas 90,4 Ha. Provinsi selanjutnya yang mendapatkan alokasi jalan terbesar kedua adalah Kalimantan Barat yakni sebesar 20,9 persen. Di Kalimantan Barat, alokasi dari belanja K/L digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 60,60 km dan pemeliharaan jalan lebih dari 2.000 km. Sedangkan pengerjaan jalan yang menggunakan DAK Fisik dihasilkan sepanjang 98,19 km.

Selanjutnya, alokasi belanja untuk pembangunan jalan di Kalimantan Tengah difokuskan pada peningkatan kualitas konektivitas darat antar daerah antar provinsi, dukungan program Prioritas Nasional, dan pembangunan konektivitas lokal kabupaten. Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan cenderung diarahkan untuk mendukung akses ke wilayah IKN dan pengembangan akses di wilayah Kalimantan Tengah bagian tengah. Sedangkan pembangunan konektivitas darat pada masing-masing wilayah kabupaten telah dialokasikan melalui belanja DAK Fisik yang berupa rekonstruksi/ peningkatan kapasitas struktur jalan kabupaten sebesar Rp308,3 miliar untuk jalan kabupaten sepanjang 57,7 km. Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda dan memiliki alokasi terkecil, pembangunan infrastruktur jalan digunakan untuk Pembangunan

jalan baru dan preservasi serta pemeliharaan jalan dengan capaian output sepanjang 980,54 km dengan realisasi belanja sebesar Rp614,62 miliar, salah satunya untuk Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) sepanjang 41,69 km di wilayah perbatasan. Selanjutnya dukungan DAK Fisik bidang jalan sebesar 109,16 miliar untuk penanganan jalan (reguler dan tematik ekonomi berkelanjutan) sepanjang 20,11 km.

3.I.B. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DANA DESA

Selain pendanaan dari belanja K/L dan DAK Fisik, dukungan pembangunan infrastruktur jalan juga didanai dari Dana Desa khususnya untuk pembangunan akses jalan desa. Di Kalimantan Barat, pembangunan jalan desa sebesar Rp92,1 miliar dan pemeliharaan jalan desa mencapai Rp41,6 miliar. Dana desa di Kalimantan Utara sebesar Rp15,28 miliar telah dialokasikan dalam mendukung output Prasarana dan Pemeliharaan Jalan Desa dan Prasarana Jalan Desa sepanjang 28,1 kilometer. Dengan jalan yang layak di desa maka mobilitas warga desa, arus barang dan produk pertanian dapat berjalan lancar.

Dengan ruang lingkup pembangunan yang terbatas pada desa terkait serta level desa yang berbeda dengan level pemerintahan pusat, maka dapat dipastikan tidak terdapat tumpang tindih pembangunan antara penggunaan dana desa dan belanja K/L. Sebaliknya, Dana Desa dapat dioptimalkan untuk menutup

celah jangkauan pemerintah daerah sebagai level pemerintahan di atasnya, akibat adanya keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

3.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI

Anggaran untuk irigasi di Wilayah Kalimantan dialokasikan sebesar Rp1.162,0 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari belanja K/L Rp969,7 miliar (83,4 persen), DAK Fisik Rp172,8 miliar (14,9 persen) dan Dana Desa Rp19,5 miliar (1,7 persen). Secara umum, belanja irigasi yang bersumber dari ketiga belanja tersebut menunjukkan keselarasan dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Belanja K/L untuk irigasi difokuskan untuk pembangunan bendungan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi di kelima provinsi. DAK Fisik ditujukan untuk irigasi dalam rangka pengembangan food estate dan sentra produksi pangan. Sedangkan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier/ sederhana.

3.II.A. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

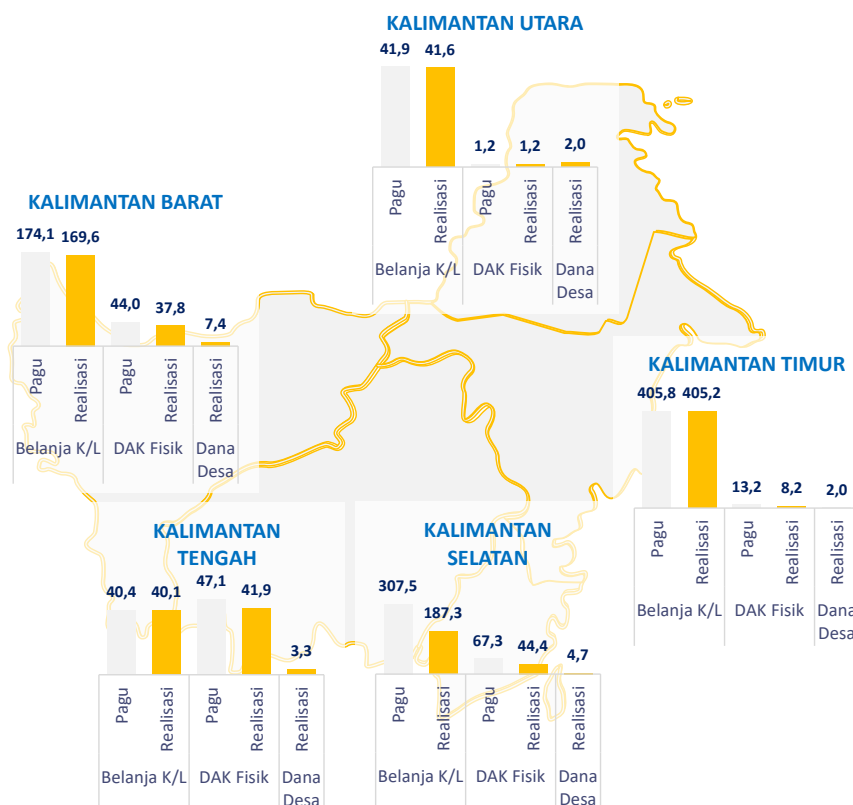
Alokasi pembangunan irigasi dan bendungan di Kalimantan sebagian besar difokuskan di Kalimantan

Timur (36,2 persen) dan Kalimantan Selatan (32,7 persen) dengan alokasi masing-masing Rp421,0 miliar dan 379,5 miliar. Di Kalimantan Timur, alokasi terbesar dari belana K/L digunakan untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoi sebesar Rp298,4 miliar. Sedangkan di Kalimantan Selatan, alokasi terbesar juga digunakan untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebesar Rp115,5 miliar dan pembangunan daerah irigasi Tapin sebesar Rp61,4 miliar.

Di Kalimantan Barat, alokasi anggaran dari belanja K/L digunakan untuk Irigasi sepanjang 142,25 km. Pengerjaan irigasi dengan menggunakan DAK Fisik digunakan untuk mengairi 3.322,32 Hektar lahan. Meski terdapat perbedaan pengukuran capaian output yaitu km untuk dana yang berasal dari Belanja K/L dan hektar untuk dana yang berasal dari DAK Fisik, namun demikian pembangunan irigasi telah selaras antara Belanja K/L dan DAK Fisik.

Di Kalimantan Tengah, terdapat dua kegiatan belanja K/L untuk infrastruktur irigasi yang bersifat strategis. Pertama, pembangunan dan rehabilitasi Pintu Air D.I.R. Dadahup sebanyak 14 unit sebesar Rp66,3 miliar, yang merupakan bagian dari suboutput Food Estate di kawasan eks PLG Kalimantan Tengah (PEN) sebagai salah satu Program Prioritas Nasional. Kedua, Rehabilitasi D.I.R Katingan sepanjang 1 km dengan menggunakan dana SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project) sebesar Rp83,8 miliar. Pada bidang irigasi DAK Fisik, jenis kegiatan lebih difokuskan pada rehabilitasi

GAMBAR 128. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI REGIONAL KALIMANTAN (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023



jaringan irigasi yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan food estate. Kegiatan ini tersebar pada sembilan Pemda untuk rehabilitasi 6.312,8 Ha jaringan irigasi dengan realisasi Rp43,5 miliar.

3.II.B. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DANA DESA

Pembangunan dan pemeliharaan irigasi di Wilayah Kalimantan, sebagian besar telah didukung oleh pembangunan irigasi tersier di pedesaan yang dialokasikan dari Dana Desa. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana berkontribusi besar dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di pedesaan. Kalimantan Barat dengan alokasi Dana Desa bidang irigasi terbesar mampu menghasilkan 72,4 juta meter pembangunan irigasi tersier dan pemeliharaan sepanjang 1.554 meter.

3.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH

Anggaran untuk SPAM di Wilayah Kalimantan dialokasikan sebesar Rp913,2 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari belanja K/L Rp486,6 miliar (53,3 persen), DAK Fisik Rp370,4 miliar (40,6 persen) dan Dana Desa Rp56,1 miliar (6,1 persen). Secara umum, keselarasan juga ditunjukkan pada hasil

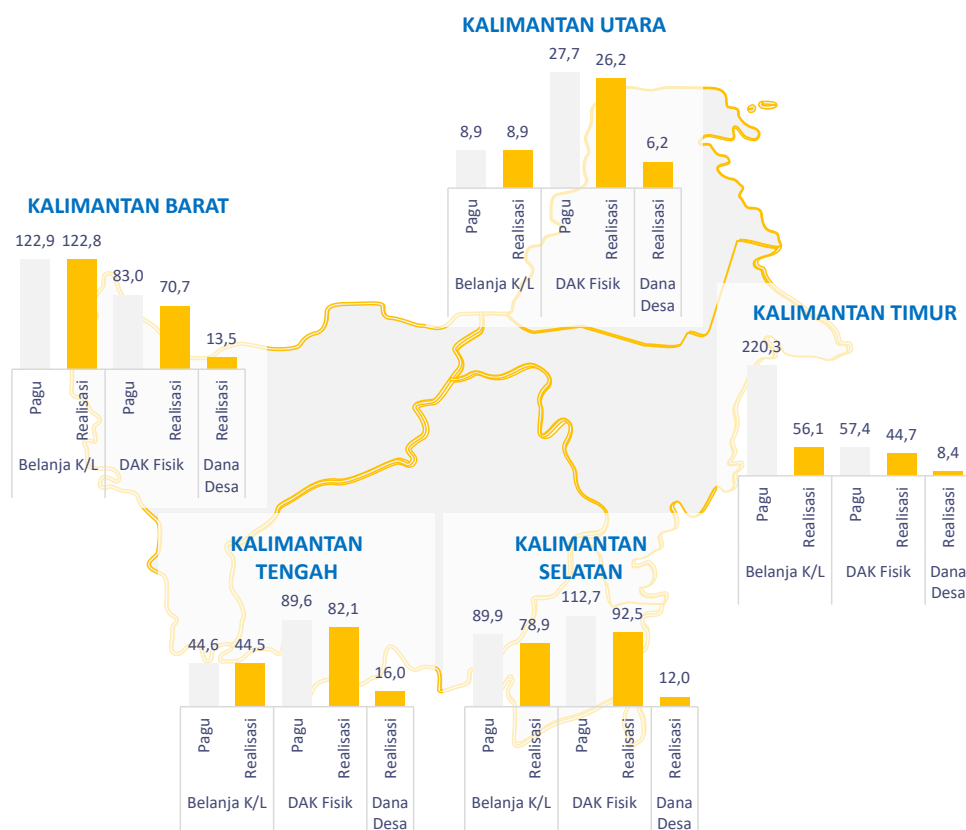
reviu harmonisasi di bidang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Kalimantan. Belanja K/L untuk SPAM difokuskan untuk Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan air baku serta pembangunan dan peningkatan SPAM kabupaten/kota. DAK Fisik ditujukan untuk perluasan dan peningkatan SPAM. Sedangkan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) serta pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa.

3.III.A. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

Alokasi SPAM atau Air Bersih di Wilayah Kalimantan cukup merata kecuali di Kalimantan Utara yang hanya dialokasikan sebesar Rp42,0 miliar atau hanya 4,7 persen dari total alokasi. Provinsi dengan alokasi tertinggi adalah Kalimantan Timur (31,3 persen), diikuti Kalimantan Barat (24,0 persen), Kalimantan Selatan (23,5 persen) dan Kalimantan tengah (16,4 persen).

Di Kalimantan Timur, anggaran SPAM dari belanja K/L terbesar dialokasikan untuk pembangunan SPAM kabupaten/kota sebesar Rp166,3 miliar. Output tersebut dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta mendukung pemenuhan air bersih lintas kab/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat, penyediaan

GAMBAR 129. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH REGIONAL KALIMANTAN (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

jaringan air minum yang dilaksanakan oleh Belanja K/L berhasil menyambung 13.045 unit dengan nilai Rp98,8 miliar. Sedangkan DAK Fisik berhasil menyambung 12.155 Sambungan Rumah (SR) dengan anggaran Rp77,5 miliar.

Di Kalimantan Tengah, anggaran SPAM dari belanja K/L sebagian besar difokuskan pada pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat sebanyak 4.800 unit dengan anggaran sebesar Rp13,5 miliar. Sedangkan pada belanja DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum sebesar Rp85,3 miliar digunakan untuk: (1) pembangunan 1.061 SR Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Pembangunan Broncaptering/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi; dan (2) Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Pembangunan Broncaptering/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi sebanyak 200 SR; dan (3) pengembangan jaringan distribusi sebanyak 11.828 SR.

3.III.B. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DANA DESA

Dukungan Dana Desa yang digunakan untuk air bersih di Wilayah Kalimantan sebagian besar untuk pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga (pianisasi). Sebagai contoh Di Kalimantan Barat, Dana Desa untuk air bersih sebesar Rp13,5 miliar digunakan untuk: (1) pembangunan dan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga masing-masing sebanyak 34.713 meter dan 223.212 meter; dan (2) pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa masing-masing sebanyak 2.437 unit dan 1.013 unit.

3.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN

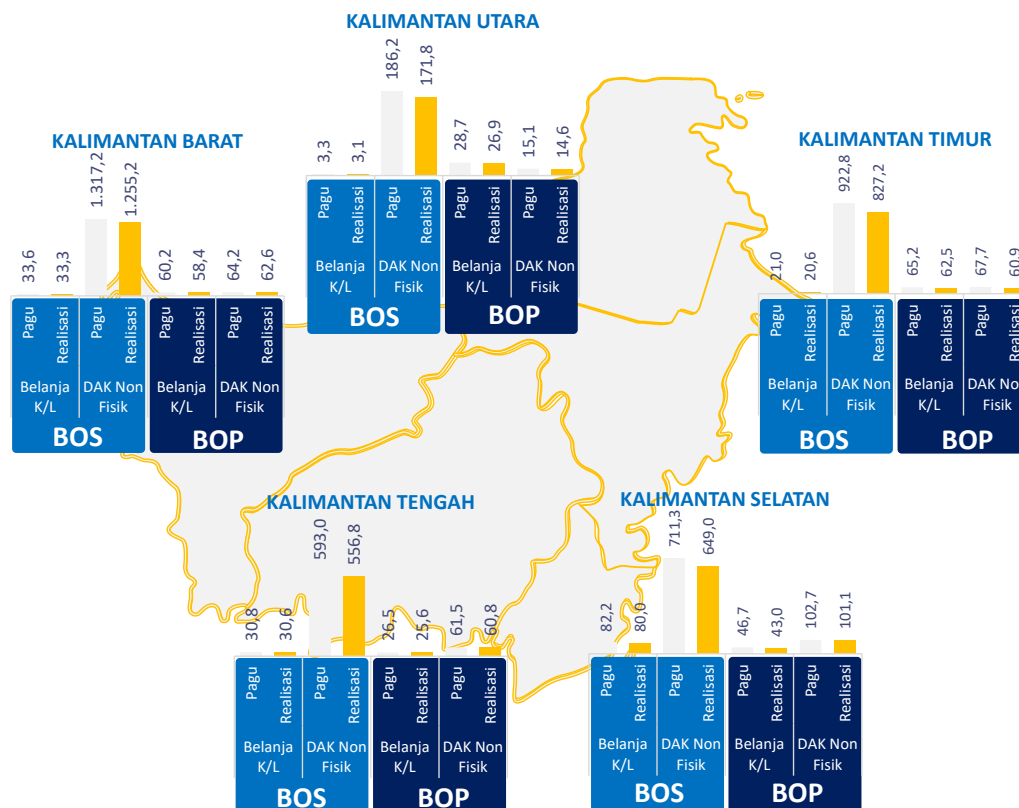
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar mampu memberikan daya saing yang tinggi untuk mewujudkan sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju dengan target PDB terbesar ke 5 di dunia. Persoalan Pendidikan tidak hanya pada pencapaian target peningkatan kualitas pendidikan, namun juga pada peningkatan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Dimensi Wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara lain dan beberapa daerah hanya bisa dijangkau dengan transportasi khusus menjadikan wilayah ini memiliki beberapa daerah yang tergolong 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan sektor pendidikan, termasuk di Wilayah Kalimantan. Komitmen tersebut tertuang dalam salah satu langkah strategi pemerataan intrawilayah Kalimantan yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan dasar di bidang Pendidikan.

3.IV.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOS

Tahun 2022, anggaran BOS yang dialokasikan di Wilayah Kalimantan adalah sebesar Rp4.128,8 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp398,2 miliar (9,6 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp3.730,6 miliar (90,4 persen). BOS yang berasal dari K/L disalurkan oleh Kementerian Agama untuk bantuan operasional sekolah pada sekolah madrasah dan sekolah keagamaan lainnya yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Jumlah penerima manfaat BOS yang berasal dari Belanja K/L sebanyak 150.163 siswa. Jumlah penerima BOS terbesar adalah Provinsi Kalimantan Selatan yakni sebanyak 76.220 siswa, Kalimantan Barat 29.242 siswa, Kalimantan Tengah 25.954 siswa, Kalimantan Timur 16.954 siswa dan Kalimantan Utara 1.779 siswa.

BOS yang berasal dari DAK Non Fisik disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekolah yang menerima BOS ini adalah sekolah yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terdapat 8,76 juta siswa (53.196 sekolah) penerima BOS Reguler dari DAK Non Fisik dengan rincian 3,02 juta siswa pada 19.247 sekolah di Provinsi Kalimantan Barat, 2,11 juta siswa pada 8.638 sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, 1,77 juta siswa pada 11.548 sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan, 1,44 juta siswa pada 11.481 sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah dan 417.444 siswa pada 2.282 sekolah di Kalimantan Utara. Selain BOS Reguler, terdapat BOS Kinerja yang dialokasikan dari DAK Non Fisik yang ditujukan untuk siswa/sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah yang memiliki kinerja tertentu. Realisasi BOS Kinerja di Wilayah Kalimantan sebesar Rp46,0 miliar untuk 42.036 siswa di Provinsi Kalimantan Barat, 36.585 siswa di Provinsi Kalimantan Selatan, 29.648 siswa di Provinsi Kalimantan Tengah, 25.714 siswa di Provinsi Kalimantan Timur, dan 9.761 siswa di Provinsi Kalimantan Utara.

Perbedaan penerima manfaat antara BOS yang bersumber dari Belanja K/L dengan DAK Non FISIK menunjukkan bahwa tidak terdapat tumpang tindih dalam penyaluran BOS. Penyaluran bersifat komplementer untuk siswa pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah yang lebih memilih bersekolah di sekolah keagamaan dengan sekolah reguler. Adapun penggunaan dana BOS ditentukan oleh masing-masing sekolah untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi sejumlah komponen, yaitu Penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah.

GAMBAR 130. ALOKASI ANGGARAN BOS DAN BOP REGIONAL KALIMANTAN (MILIAR RUPIAH)


Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

3.IV.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOP

Pada tahun 2022, alokasi anggaran untuk BOP di Wilayah Kalimantan sebesar Rp538,6 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp227,3 miliar (42,2 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp216,5 miliar (57,8 persen). Namun, masing-masing sumber anggaran memiliki sasaran yang berbeda. BOP yang berasal dari DAK Non Fisik seluruhnya disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terdapat dua komponen BOP yang bersumber dari DAK Non Fisik, yaitu BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan. BOP PAUD terealisasi sebesar Rp228,7 miliar dan BOP Pendidikan Kesetaraan telah direalisasikan sebesar Rp71,4 miliar. BOP Pendidikan Kesetaraan diberikan untuk sekolah Paket A, Paket B dan Paket C. Tujuan dari BOP Kesetaraan adalah untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum sempat mengenyam pendidikan pada masa usia yang seharusnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan angka melek huruf masyarakat terutama di daerah yang jauh dari akses pendidikan formal.

BOP yang bersumber dari Belanja K/L memiliki sasaran penerima yang berbeda dengan DAK Non Fisik. BOP yang dialokasikan dari belanja K/L adalah BOPTN yang disalurkan melalui dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. BOPTN

adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

BOPTN yang direliaksikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp183,4 miliar atau 96,4 persen dari total BOPTN Kemendikbud di Wilayah Kalimantan. BOPTN tersebut disalurkan untuk 15 Perguruan Tinggi Negeri yang terdiri dari 5 Universitas Negeri, 9 Politeknik Negeri Negeri dan 1 Institut di Wilayah Kalimantan. Sedangkan BOPTN yang direliaksikan oleh Kementerian Agama sebesar Rp33,0 miliar atau terserap 89,3 persen dari total BOPTN Kemenag di Wilayah Kalimantan. BOPTN tersebut disalurkan untuk 4 Universitas Islam Negeri, 1 Institut Agama Kristen Negeri dan 1 Institut Agama Hindu Negeri.

Sasaran yang berbeda antara Belanja K/L dengan DAK Non Fisik mengindikasikan terdapat redundansi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan BOP. BOP yang bersumber dari DAK Non Fisik lebih diarahkan untuk memenuhi kualitas Pendidikan Dasar hingga menengah sedangkan BOPTN ditujukan membantu meningkatkan kualitas Pendidikan tingkat lanjut.

4. REGIONAL SULAWESI

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai

hub dan pintu utama kawasan timur untuk jalur perdagangan internasional sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, Wilayah Sulawesi juga diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui transformasi perekonomian wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan pariwisata serta diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, dan kelapa sawit untuk sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; hasil perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan seperti aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi terus dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian Wilayah Sulawesi.

Dalam rangka memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan pariwisata, beberapa langkah strategi yang dilakukan diantaranya dengan mempercepat realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan industri KEK/KI Palu dan KEK Bitung, serta kawasan pariwisata unggulan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selaya. Masih dalam rangka mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, dilakukan pengembangan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Makassar dan Manado. Pengembangan difokuskan pada transportasi massal, drainase perkotaan, akses energi, perumahan, ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan, dan disertai pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mencegah urban sprawl. Untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur difokuskan untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya.

4.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan di wilayah Sulawesi sebesar Rp6.651,7 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari belanja K/L Rp3.883,0 miliar (58,38 persen), DAK Fisik Rp2.030,4 miliar (30,5 persen) dan Dana Desa Rp738,3 miliar (11,1 persen). Secara umum, belanja infrastruktur jalan yang bersumber dari ketiga belanja tersebut menunjukkan keselarasan. Pembangunan infrastruktur jalan pada belanja K/L fokus pada pembangunan dan rehabilitasi jalan nasional dan jembatan. Sedangkan DAK Fisik ditujukan untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan

jembatan dalam rangka konektivitas intra dan antar wilayah, pengembangan food estate, penguatan DPP dan SIKM, serta konektivitas perdesaan.

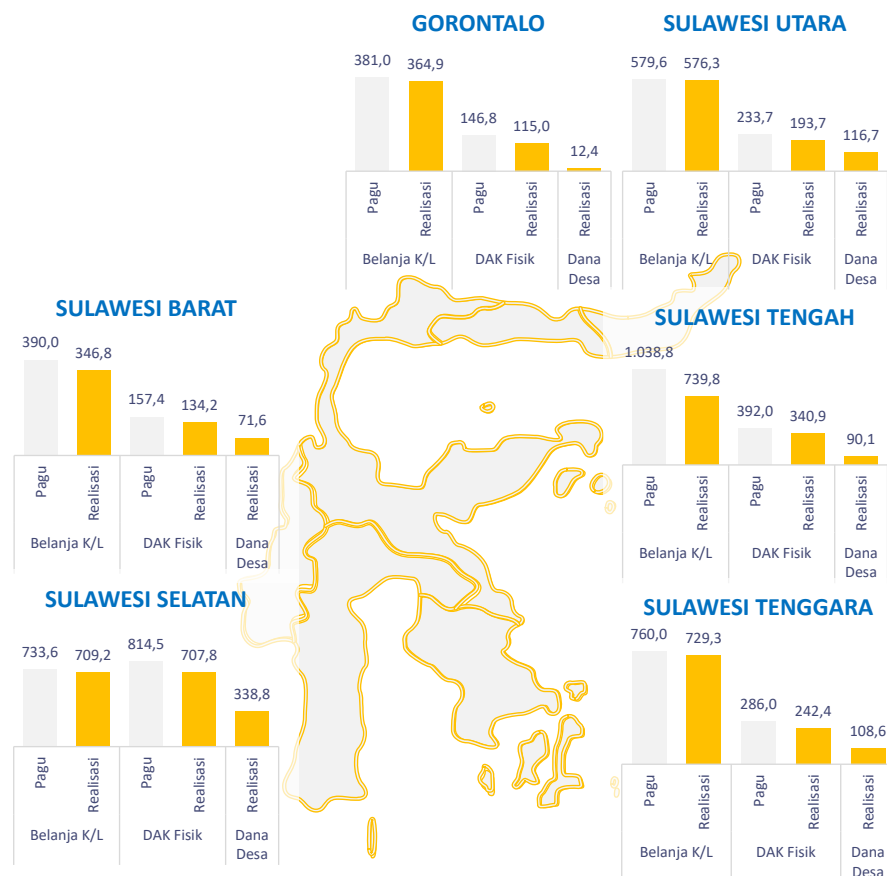
4.I.A. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

Provinsi yang mendapatkan alokasi belanja infrastruktur terbesar dari belanja K/L adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan alokasi terbesar dari DAK Fisik ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 40,1 persen dari total alokasi DAK Fisik di Sulawesi sehingga jika ditotal dari tiga sumber dana, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki porsi alokasi terbesar mencapai 28,4 persen.

Alokasi anggaran infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah difokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan strategis masing-masing sebesar Rp601,4 miliar dan 32,0 miliar. Selain itu alokasi belanja K/L juga digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan masing-masing Rp287,1 miliar dan Rp74,5 miliar. Besarnya anggaran untuk pembangunan jalan di Sulawesi Tengah cukup beralasan mengingat provinsi ini memiliki luas wilayah terluas di Sulawesi dan merupakan wilayah yang berhubungan langsung dengan 4 provinsi lainnya. Di Sulawesi Selatan, anggaran dari DAK Fisik untuk infrastruktur jalan paling besar dibandingkan provinsi lainnya. Anggaran tersebut difokuskan pada subbidang jalan regular sebesar Rp550,7 miliar dan jalan untuk pengembangan food estate dan sentra produksi pangan sebesar Rp251,6 miliar. Sedangkan anggaran dari belanja K/L lebih banyak difokuskan pada rehabilitasi dan preservasi jalan.

Di Sulawesi Tenggara, alokasi belanja K/L untuk infrastruktur jalan dilaksanakan untuk pembangunan dan rehabilitasi atas jalan nasional yang menghubungkan jalan antar provinsi sepanjang 1.448,7 km. Di Gorontalo, belanja K/L untuk infrastruktur jalan dilaksanakan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, yang diantaranya berupa perlengkapan jalan sebanyak 5 unit, jalan akses simpul transportasi sepanjang 2,54 Km, dan pembangunan jalan strategis sepanjang 9,28 Km. Di Sulawesi Barat, belanja K/L sebagian besar difokuskan pada pembangunan jalan strategis yang mencapai Rp257,0 miliar. Sebaliknya di Sulawesi Utara, belanja K/L lebih banyak ditujukan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Secara umum, dukungan DAK Fisik bidang jalan di Wilayah Sulawesi dilaksanakan untuk membiayai proyek pembangunan/pemeliharaan jalan reguler serta mendukung pembangunan jalan dalam

**GAMBAR 131. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN REGIONAL SULAWESI (MILIAR RUPIAH)**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

rangka pemenuhan target tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan serta tematik penguatan DPP dan SIKM. Pembangunan dan pemeliharaan jalan regular dari DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak terdapat tumpang tindih dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional yang dianggarkan dari belanja K/L.

4.I.B. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DANA DESA

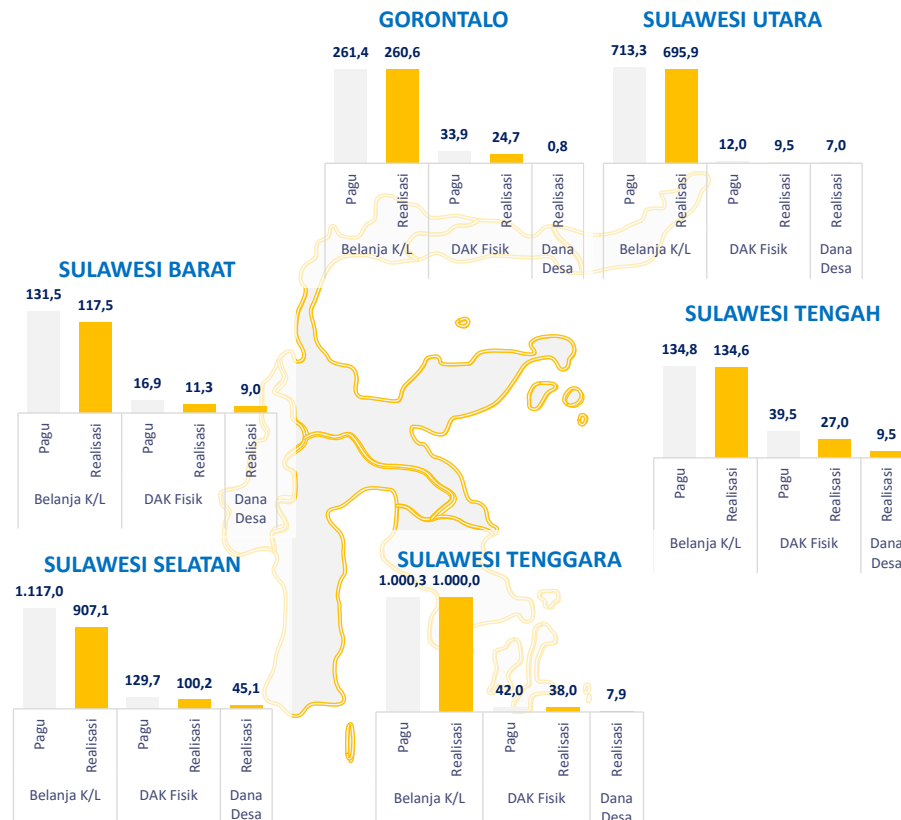
Selain pendanaan dari belanja K/L dan DAK Fisik, dukungan pembangunan infrastruktur jalan juga didanai dari Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan/pengerasan jalan desa, jalan usaha tani dan jalan lingkungan permukiman/gang. Di Sulawesi Tengah, belanja jalan dari Dana Desa menghasilkan capaian output sebesar 665,6 ribu meter dengan anggaran Rp80,1 miliar dan jembatan desa sebanyak 95 unit. Capaian peningkatan jalan desa/pertanian di Sulawesi Tenggara sepanjang 31,9 km dengan realisasi anggaran sebesar Rp6,27 miliar. Untuk jembatan desa yang dibangun melalui dana desa merupakan jembatan penghubung antar desa ataupun sebagai konektivitas jalan penghubung dengan sentra ekonomi masyarakat yang dilihat dari kondisi sebelumnya memang tidak terdapat

jembatan ataupun merupakan pengembangan dan peningkatan jembatan yang sudah ada.

Dengan ruang lingkup pembangunan yang terbatas hanya pada desa terkait dan lingkup pembangunan jalan nasional yang fokus pada interkoneksi antar provinsi, maka dapat dipastikan tidak terdapat tumpang tindih pembangunan antara penggunaan dana desa dan belanja K/L. Sebaliknya, Dana Desa dapat dioptimalkan untuk menutup celah jangkauan pemerintah pusat/daerah yang selama ini tidak menyentuh sampai ke level jalan desa.

4.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI

Anggaran untuk irigasi di Wilayah Sulawesi dialokasikan sebesar Rp3.711,5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari belanja K/L Rp3.358,4 miliar (90,5 persen), DAK Fisik Rp274,0 miliar (7,4 persen) dan Dana Desa Rp79,2 miliar (2,1 persen). Secara umum, belanja irigasi yang bersumber dari ketiga belanja tersebut menunjukkan keselarasan dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Belanja K/L untuk irigasi sebagian besar difokuskan untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan, serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi di keenam provinsi. DAK Fisik bidang irigasi sebagian besar

GAMBAR 132. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI REGIONAL SULAWESI (MILIAR RUPIAH)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

merupakan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi utamanya untuk menuju ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas tanaman pangan penduduk. Sedangkan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier/ sederhana. Sedangkan untuk belanja

4.II.A. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

Alokasi infrastruktur irigasi dan bendungan di Wilayah Sulawesi sebagian besar berada di Provinsi Sulawesi Selatan (34,8 persen), Sulawesi Tenggara (28,3 persen) dan Sulawesi Utara (19,7 persen). Di Sulawesi Tenggara, alokasi terbesar belanja K/L untuk irigasi digunakan untuk pembangunan Bendungan Ameroro sebesar Rp674,6 miliar dan pembangunan daerah irigasi Wawotobi-Ameroro sebesar Rp173,0 miliar. Sedangkan DAK Fisik bidang irigasi dilaksanakan pada 10 Pemda dengan total nilai anggaran sebesar Rp42,0 miliar. Output yang dihasilkan dari proyek yang didanai DAK Fisik tersebut adalah jumlah pertanian yang dilayani oleh irigasi yang dibangun adalah sebesar 1.523,77 hektar.

Di Sulawesi Selatan, alokasi terbesar dari belanja K/L digunakan untuk pembangunan bendungan Pamukkulu Jenelata DAM masing-masing sebesar Rp254,7 miliar dan Rp182,0 miliar. Selain itu juga

ditujukan untuk pembangunan Daerah irigasi Baliase dan Gilireng sebesar Rp441,1 miliar. Di Sulawesi Utara, alokasi anggaran dari belanja K/L digunakan untuk pembangunan bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak masing-masing sebesar Rp487,2 miliar dan 161,8 miliar. Di Gorontalo, belanja K/L difokuskan untuk pembangunan bendungan Bulango Ulu sebesar Rp206,3 miliar. Di Sulawesi Barat, pembangunan bendungan Budong-Budong sebesar Rp87,6 miliar. Sedangkan dukungan DAK Fisik bidang irigasi lebih difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan masing-masing daerah dalam rangka mendukung food estate dan Sentra

4.II.B. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DANA DESA

Pembangunan dan pemeliharaan irigasi di Wilayah Sulawesi, sebagian besar telah didukung oleh pembangunan irigasi tersier di pedesaan yang dialokasikan dari Dana Desa. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana berkontribusi besar dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di pedesaan. Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan realisasi belanja infrastruktur irigasi terbesar yang bersumber Dana Desa yakni mencapai Rp45,1 miliar yang digunakan untuk pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 104.070 meter. Sedangkan Gorontalo



sebagai provinsi dengan realisasi terendah yakni Rp0,78 miliar mampu menghasilkan pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 1.876 meter.

4.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM

Anggaran untuk SPAM di Wilayah Sulawesi dialokasikan sebesar Rp1.131,7 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari belanja K/L Rp625,2 miliar (55,2 persen), DAK Fisik Rp457,3 miliar (40,4 persen) dan Dana Desa Rp49,2 miliar (4,3 persen). Secara umum, keselarasan juga ditunjukkan pada hasil revidu harmonisasi di bidang infrastruktur SPAM di Wilayah Sulawesi. Belanja K/L untuk SPAM difokuskan untuk Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan air baku serta pembangunan dan peningkatan SPAM kabupaten/kota. DAK Fisik ditujukan untuk perluasan dan peningkatan SPAM. Sedangkan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) serta pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa.

4.III.A. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

Anggaran untuk SPAM atau Air Bersih di Wilayah Sulawesi sebagian besar dialokasikan pada dua provinsi terluas yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dengan porsi anggaran masing-masing sebesar 36,0 persen dan 23,6 persen. Sedangkan dua provinsi termuda yaitu Gorontalo dan Sulawesi Barat masing-masing memiliki porsi 5,0 persen dan 6,8 persen. Di Sulawesi Selatan, anggaran SPAM dari belanja K/L terbesar dialokasikan untuk pembangunan air baku Bendungan Karalloe dan Paselloreng dengan alokasi masing-masing Rp60,0 miliar (realisasi Rp49,8 miliar) dan Rp80,0 miliar (realisasi Rp66,4 miliar). Anggaran terbesar berikutnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat Rp51,8 miliar dan Rp50,0 miliar. Sedangkan dukungan dari DAK Fisik untuk air minum adalah sebesar Rp104,8 miliar.

Di Sulawesi Tengah, belanja K/L untuk SPAM sebagian besar dialokasikan untuk peningkatan SPAM Regional sebesar Rp99,8 miliar. Berikutnya, digunakan untuk pembangunan/perluasan SPAM kabupaten/kota Rp27,1 miliar berupa pembangunan pipa dan jaringan perpipaan SPAM IKK Bora untuk Kawasan Huntap korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yakni di area Huntap Tondo 1 dan 2 dan Talise kota Palu serta Huntap Pombewe di Sigi. Sedangkan untuk output kegiatan belanja DAK Fisik berupa penambahan sumur dalam, bangunan penangkap mata air broncaptering dan pengembangan jaringan

distribusi air minum dan sambungan rumah penduduk di perdesaan.

Di Sulawesi Tenggara, pembangunan yang dilaksanakan menggunakan belanja K/L sebesar Rp57,5 miliar, adalah infrastruktur SPAM dan sambungannya sebanyak 7.200 SR. Sedangkan untuk proyek/kegiatan yang dilaksanakan melalui dana DAK Fisik sebesar Rp 82,4 miliar adalah untuk pembuatan sumur dan sambungan air bersih pada kawasan yang tidak dapat dijangkau sistem SPAM dengan capaian 11.471 SR.

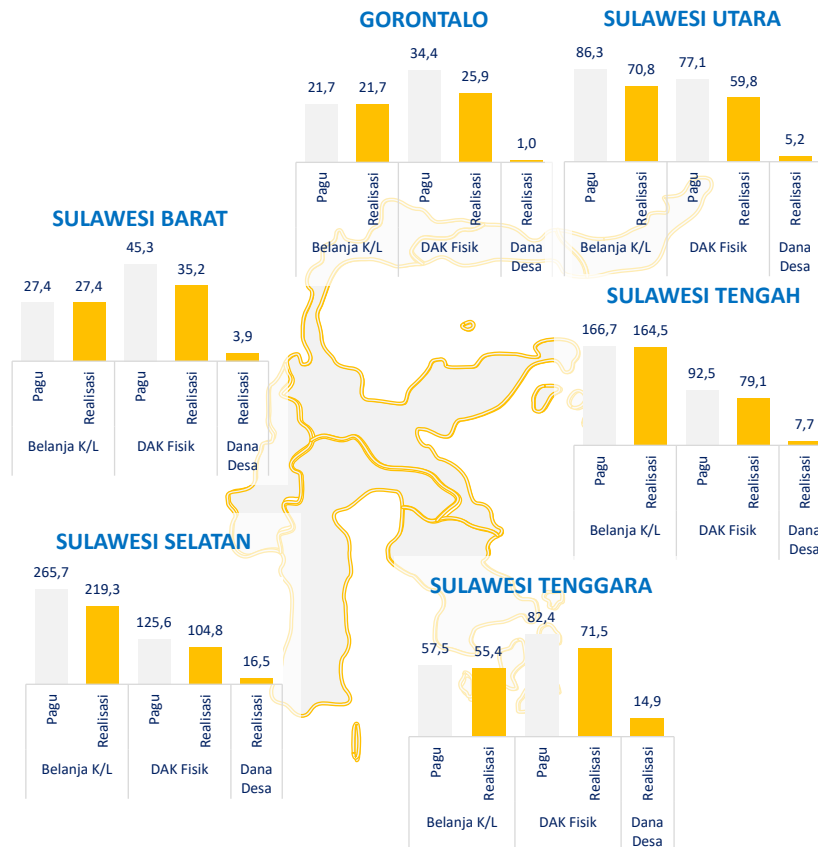
4.III.B. HARMONISASI BELANJA K/L DAN DANA DESA

Dukungan Dana Desa yang digunakan untuk air bersih di Regional Sulawesi sebagian besar untuk pembangunan dan pemeliharaan sambungan/sumber air bersih ke rumah tangga (pipanisasi). Sebagai contoh Di Sulawesi Selatan, Dana Desa untuk air bersih sebesar Rp16,5 miliar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga masing-masing sebanyak 52.008 meter dan 25.481 meter serta pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa masing-masing sebanyak 17.277 unit dan 653 unit.

Pembangunan SPAM di Sulawesi Tenggara dari belanja Dana Desa sebesar Rp14,9 miliar dengan capaian pembangunan dan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga sebanyak 55.293 meter dan pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa sebanyak 11.235 unit. Capaian ini terdiri dari kegiatan pemeliharaan sumber air bersih, pemeliharaan sambungan air bersih, rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga/pipanisasi air bersih. Pembangunan dan pemeliharaan SPAM skala nasional seperti pembangunan bendungan dan jaringan air baku yang dibiayai dari belanja K/L saling terkoneksi dengan pembangunan dan pemeliharaan sambungan sumber air bersih di desa.

4.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar mampu memberikan daya saing yang tinggi untuk mewujudkan sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju dengan target PDB terbesar ke 5 di dunia. Persoalan Pendidikan tidak hanya pada pencapaian target peningkatan kualitas pendidikan, namun juga pada peningkatan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Dimensi Regional Sulawesi yang berbatasan langsung dengan negara lain dan beberapa daerah hanya bisa dijangkau dengan transportasi khusus menjadikan Regional

GAMBAR 133. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH REGIONAL SULAWESI (MILIAR RUPIAH)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

ini memiliki beberapa daerah yang tergolong 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan sektor pendidikan, termasuk di Regional Sulawesi. Komitmen tersebut tertuang dalam salah satu langkah strategi pemerataan intraRegional Sulawesi yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan dasar di bidang Pendidikan.

4.IV.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOS

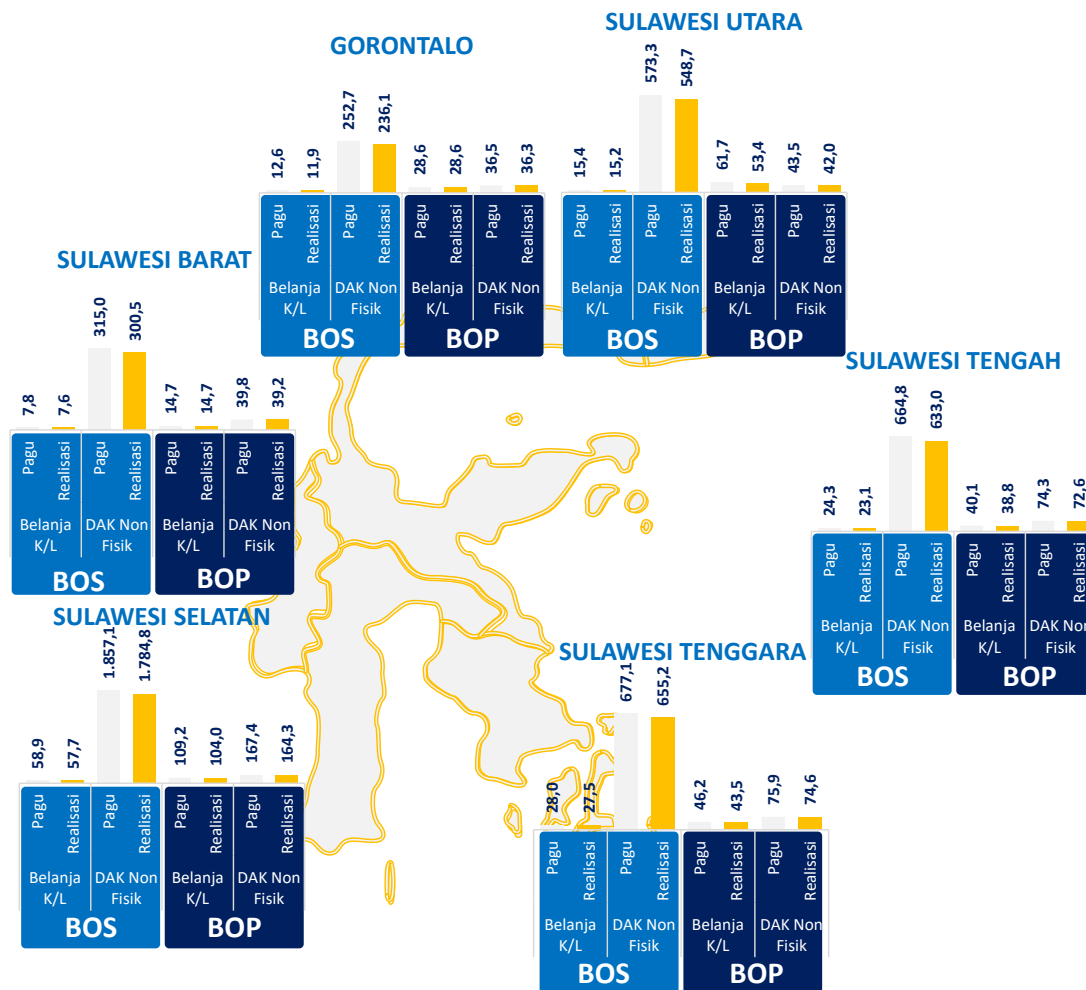
Tahun 2022, anggaran BOS yang dialokasikan di Regional Sulawesi adalah sebesar Rp4.487,0 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp147,0 miliar (3,3 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp4.340,0 miliar (96,7 persen). BOS yang berasal dari K/L disalurkan oleh Kementerian Agama untuk bantuan operasional sekolah pada sekolah madrasah dan sekolah keagamaan lainnya yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Jumlah penerima manfaat BOS yang berasal dari Belanja K/L sebanyak 147.318 siswa. Jumlah penerima BOS terbesar adalah Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebanyak 58.323 siswa, Sulawesi Tenggara 26.966 siswa, Sulawesi Tengah 22.181 siswa, Sulawesi Utara 21.511 siswa, Gorontalo 10.614 siswa dan Sulawesi Barat 7.723 siswa.

BOS yang berasal dari DAK Non Fisik disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekolah yang menerima BOS ini adalah sekolah yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terdapat 10,6 juta siswa (70.725 sekolah) penerima BOS Reguler dari DAK Non Fisik dengan rincian 4,69 juta siswa pada 27.263 sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan, 1,64 juta siswa pada 12.539 sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah, 1,63 juta siswa pada 10.915 sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara, 1,28 juta siswa pada 10.029 sekolah di Provinsi Sulawesi Utara, 770.937 siswa pada 5.794 sekolah di Sulawesi Barat dan 612.653 siswa pada 4.185 sekolah di Gorontalo. Selain BOS Reguler, terdapat BOS Kinerja yang dialokasikan dari DAK Non Fisik yang ditujukan untuk siswa/sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah yang memiliki kinerja tertentu. Realisasi BOS Kinerja di Regional Sulawesi sebesar Rp65,9 miliar untuk 88.416 siswa di Provinsi Sulawesi Selatan, 34.899 siswa di Provinsi Sulawesi Tengah, 24.123 siswa di Provinsi Sulawesi Tenggara, 19.232 siswa di Provinsi Sulawesi Utara, 16.139 siswa Gorontalo dan 12.557 siswa di Provinsi Sulawesi Barat.

Perbedaan penerima manfaat antara BOS yang bersumber dari Belanja K/L dengan DAK Non FISIK menunjukkan bahwa tidak terdapat tumpang tindih dalam penyaluran BOS karena sifatnya komplementer antara siswa sekolah umum dan sekolah keagamaan.



GAMBAR 134. ALOKASI ANGGARAN BOS DAN BOP REGIONAL SULAWESI (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

4.IV.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOP

Pada tahun 2022, alokasi anggaran untuk BOP di Regional Sulawesi sebesar Rp737,9 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp300,6 miliar (40,7 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp437,3 miliar (59,3 persen). BOP dari masing-masing sumber anggaran tersebut memiliki sasaran penerima yang berbeda. BOP yang berasal dari DAK Non Fisik seluruhnya disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan. BOP PAUD terealisasi sebesar Rp320,0 miliar dan BOP Pendidikan Kesetaraan telah direalisasikan sebesar Rp109,2 miliar. BOP Pendidikan Kesetaraan diberikan untuk sekolah Paket A, Paket B dan Paket C. Tujuan dari BOP Kesetaraan adalah untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum sempat mengenyam pendidikan pada masa usia yang seharusnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan angka melek huruf masyarakat terutama di daerah yang jauh dari akses pendidikan formal.

BOP yang bersumber dari Belanja K/L memiliki

sasaran penerima yang berbeda dengan DAK Non Fisik. BOP yang dialokasikan dari belanja K/L adalah BOPTN yang disalurkan melalui dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

BOPTN yang direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp191,7 miliar atau 94,0 persen dari total pagu BOPTN Kemendikbudristek di Regional Sulawesi. BOPTN tersebut disalurkan untuk 8 Universitas Negeri, 4 Politeknik Negeri dan 1 Institut Negeri di Sulawesi. BOPTN yang direalisasikan oleh Kementerian Agama sebesar Rp91,2 miliar atau 94,3 persen dari total pagu BOPTN Kemenag. BOPTN tersebut disalurkan untuk 9 Universitas Islam Negeri dan 2 Institut Agama Kristen Negeri.

Sasaran yang berbeda antara Belanja K/L dengan DAK Non Fisik mengindikasikan terdapat redundansi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan BOP. Bahkan

dalam pelaksanaan BOP antar Kementerian yang bersumber dari belanja K/L disalurkan berdasarkan jenis universitas negeri yang terbagi atas universitas umum dan keagamaan.

5. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Melanjutkan RKP tahun 2021, pengembangan Nusa Tenggara tahun 2022 fokus pada memacu transformasi perekonomian untuk menguatkan peran di sektor pariwisata alam dan budaya yang unik. Pengembangan wilayah ini juga didukung dengan percepatan pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, serta penuntasan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara. Transformasi perekonomian Nusa Tenggara berbasis pada sektor-sektor perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan kopi, pertambangan tembaga dan emas, serta pariwisata untuk memperkuat daya saing wilayah (keunggulan kompetitif).

5.1. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN

5.1.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

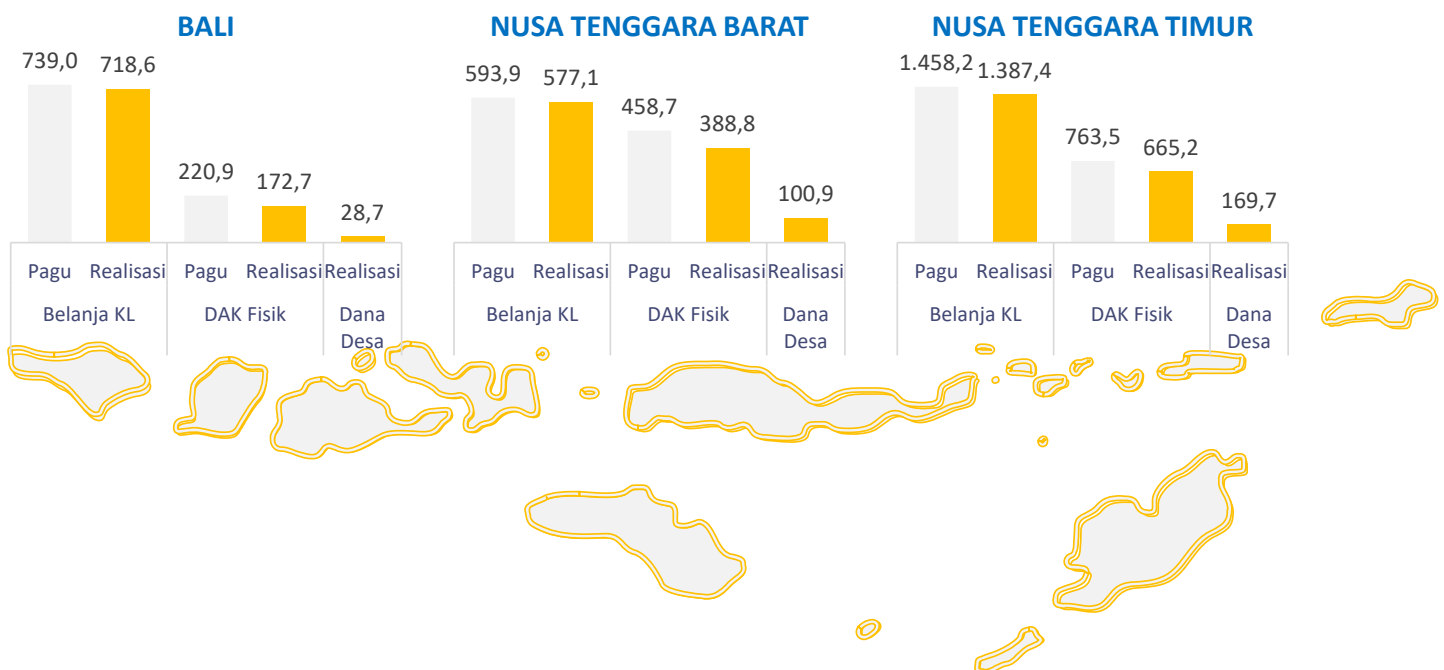
Pada tahun 2022 Pemerinta Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.533,5 Miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan di regional Bali Nusa Tenggara (Bali-Nusra) melalui alokasi pada Belanja K/L, DAK Fisik dan Dana

Desa. Proporsi pada Belanja K/L mencapai Rp2.791,2 miliar (62%), diikuti DAK Fisik sebesar Rp1.443,1 miliar (32%) dan Dana Desa Rp50,5 miliar (7%). Alokasi terbesar untuk pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp2.291,4 miliar (52,7%) dari total anggaran regional Bali-Nusa Tenggara. Tingginya alokasi tersebut untuk konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat keterhubungan transportasi dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai hub pariwisata dengan Provinsi Bali.

Alokasi Belanja K/L di Provinsi Nusa Tenggara Timur di antaranya dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses simpul transportasi yang merupakan proyek prioritas nasional sebesar Rp599,3 miliar, termasuk dukungan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mencapai Rp430,9 miliar. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, alokasi terbesar untuk mendukung KSPN sebesar Rp353,6 miliar dan jalan strategis prioritas nasional mencapai Rp110,1 miliar. Pada Provinsi Bali, alokasi Belanja K/L dimanfaatkan untuk preservasi rekonstruksi dan rehabilitasi jalan termasuk pemeliharaan rutin mencapai Rp497,5 miliar, sedangkan alokasi untuk jalan strategis prioritas nasional mencapai Rp208 miliar.

Selain dukungan Belanja K/L, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur jalan dari sumber DAK Fisik Bidang Jalan di wilayah Bali Nusra mencapai Rp1.443,1 miliar. Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp763,5 miliar, sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp458,7 miliar dan Provinsi Bali sebesar Rp220,9 miliar.

GAMBAR 135. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023



Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan di Regional Bali-Nusra terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut diperuntukkan pada jalan untuk konektivitas kawasan dan pembangunan inklusif sebesar Rp329,6 miliar, jalan reguler sebesar Rp249,4 miliar. Selain itu, alokasi DAK Fisik juga dimanfaatkan untuk jalan tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan sebesar Rp132,5 miliar serta mendukung jalan tematik program Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) sebesar Rp52,1 miliar.

5.I.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Selanjutnya, Pemerintah secara konsisten juga mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai infrastruktur jalan maupun jembatan. Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi penerima Dana Desa terbesar di regional Bali-Nusra dengan realisasi mencapai Rp169,7 miliar. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah merealisasikan Dana Desa untuk infrastruktur jalan sebesar Rp100,9 miliar dan Provinsi Bali merealisasikan sebesar Rp28,7 miliar. Realisasi Dana Desa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk rehabilitasi/peningkatan/pengerasan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain); jalan pemukiman, jalan usaha tani termasuk pemeliharaan jembatan desa.

5.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR

IRIGASI

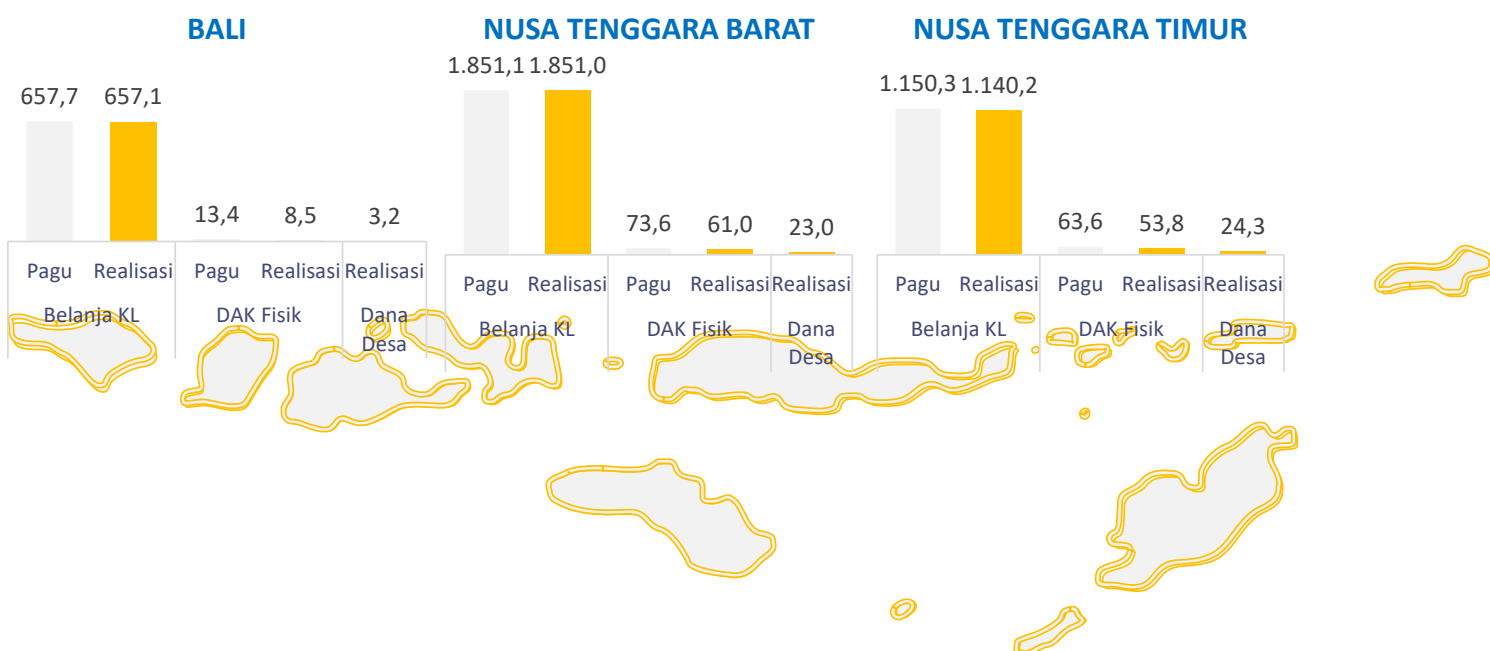
5.II.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Harmonisasi belanja pemerintah dan DAK Fisik ditunjukkan pada infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pengelolaan irigasi juga untuk meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Pada infrastruktur irigasi di Regional Bali-Nusra, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Belanja K/L, DAK Fisik Bidang Irigasi dan Dana Desa untuk irigasi secara total mencapai Rp3.659,2 miliar.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, alokasi belanja K/L terbesar dimanfaatkan untuk pembangunan Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bendungan ini diharapkan dapat mengairi daerah irigasi seluas 4.500 ha. Bendungan Temef juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi banjir, menyediakan air baku dan potensi energi listrik. Selain itu, Pemerintah juga membangun Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang sebesar Rp97,5 miliar dan Bendungan Mbay di Kabupaten Nageko sebesar Rp78 miliar di tahun 2022.

Di Provinsi Bali, alokasi belanja K/L terbesar dimanfaatkan untuk pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng sebesar Rp284,5 miliar diharapkan dapat mensuplai kebutuhan air irigasi seluas 588 ha. Alokasi anggaran untuk Bendungan Sidan di Kabupaten Badung sebesar Rp1397 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan irigasi dan embung dalam rangka

GAMBAR 136. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

mendukung sektor pertanian.

Pada belanja DAK Fisik Bidang Irigasi, Regional Bali-Nusra mendapatkan alokasi sebesar Rp150,6 miliar. Alokasi DAK Fisik tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan food estate dan sentra produksi pangan. Alokasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp73,6 miliar. Selanjutnya, alokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp63,6 miliar dan Provinsi Bali sebesar Rp13,4 miliar. Pengembangan food estate ini sebagai upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus untukantisipasi naiknya jumlah penduduk di Indonesia antisipasi perubahan iklim.

5.II.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Selain dukungan infrastruktur dari Belanja K/L dan DAK Fisik Bidang Irigasi, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk irigasi dari Dana Desa. Realisasi tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana. Jaringan irigasi tersier difungsikan sebagai prasarana air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Realisasi anggaran Dana Desa untuk irigasi perdesaan di Regional Bali-Nusra mencapai Rp50,5 miliar. Realisasi dana tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp24,3 miliar. Selanjutnya, alokasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp23 miliar dan Provinsi Bali sebesar Rp3,2 miliar.

5.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH

5.III.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

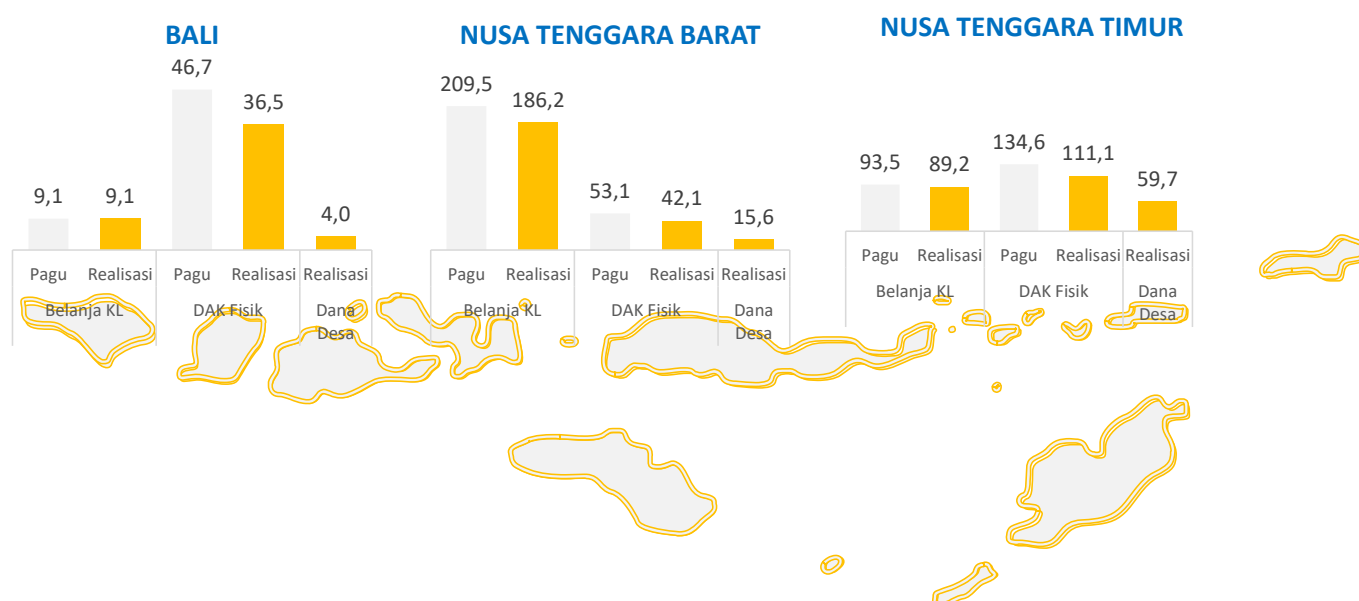
Pengembangan SPAM menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan pengembangan SPAM adalah menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui instrumen APBN terus berusaha meningkatkan ketersediaan air minum bersih sekaligus akses bagi masyarakat untuk mendapatkan air minum tersebut. Pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan Belanja K/L, DAK Fisik Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Dana Desa untuk infrastruktur SPAM air bersih sebesar Rp625 miliar. Alokasi tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp287,8 miliar. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi Rp278,2 miliar dan Provinsi Bali sebesar Rp59,8 miliar.

Alokasi tertinggi Belanja K/L di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp209,5 miliar. Belanja K/L di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimanfaatkan untuk pembangunan dan perluasan/peningkatan SPAM dengan alokasi sebesar Rp50,7 miliar. Pemerintah membangun peyediaan air baku Bendungan Pengga untuk (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika di Kab. Lombok Tengah sebesar Rp130,2 miliar. Selain itu, Pemerintah membangun prasarana air baku di Kabupaten Dompu berupa Bendungan Tanju Rp25 miliar Bendungan Mila sebesar Rp3,7 miliar. Bendungan tersebut diharapkan menjadi bendungan yang multifungsi di antaranya untuk irigasi dan penyediaan air baku.

Belanja K/L untuk pengembangan SPAM di Nusa

GAMBAR 137. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023



Tenggara Timur di antaranya dimanfaatkan untuk pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp50,7 miliar dan target sebanyak 80 unit. Selain itu, dilakukan perluasan SPAM dan infrastruktur air minum sebesar Rp39,2 miliar. Pemerintah juga mengalokasikan Belanja K/L untuk pembangunan Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bendungan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk ketersediaan air dikarenakan rendahnya curah hujan di wilayah tersebut. Sedangkan di Provinsi Bali, Pemerintah mengalokasikan Belanja K/L untuk air infrastruktur air minum berbasis masyarakat mencapai Rp9,1 miliar dengan target 3.200 unit dan alokasi tersebut diharapkan semakin meningkatnya ketersediaan air bersih di masyarakat.

Pada Belanja DAK Fisik, Pemerintah mengalokasikan anggaran pengembangan SPAM air bersih pada Bidang Air Minum di Regional Bali-Nusra sebesar Rp234,4 miliar. Alokasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp134,6 miliar, selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp53,1 miliar dan Provinsi Bali sebesar Rp46,7 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan SPAM di perdesaan dengan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sumber air bersih milik desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor) dengan total di Regional Bali-Nusra sebesar Rp79,3 miliar. Dana Desa direalisasikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp59,7 miliar. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp15,6 miliar dan Provinsi Bali sebesar Rp4 miliar.

5.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN

5.IV.A. HARMONISASI BELANJA K/L

DENGAN DAK NON FISIK: BOS

Tahun 2022, alokasi Belanja K/L dan DAK Non Fisik mencapai Rp253,5 miliar, dengan rincian untuk BOS sebesar Rp86,5 miliar dan DAK Non Fisik BOS mencapai Rp3.667,1 miliar. Alokasi BOS K/L tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp40,9 miliar dengan target 35.208 siswa. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alokasi Rp31,5 miliar dengan target 26.184 siswa dan Provinsi Bali sebesar RpRp14,1 miliar dan target 13.036 siswa.

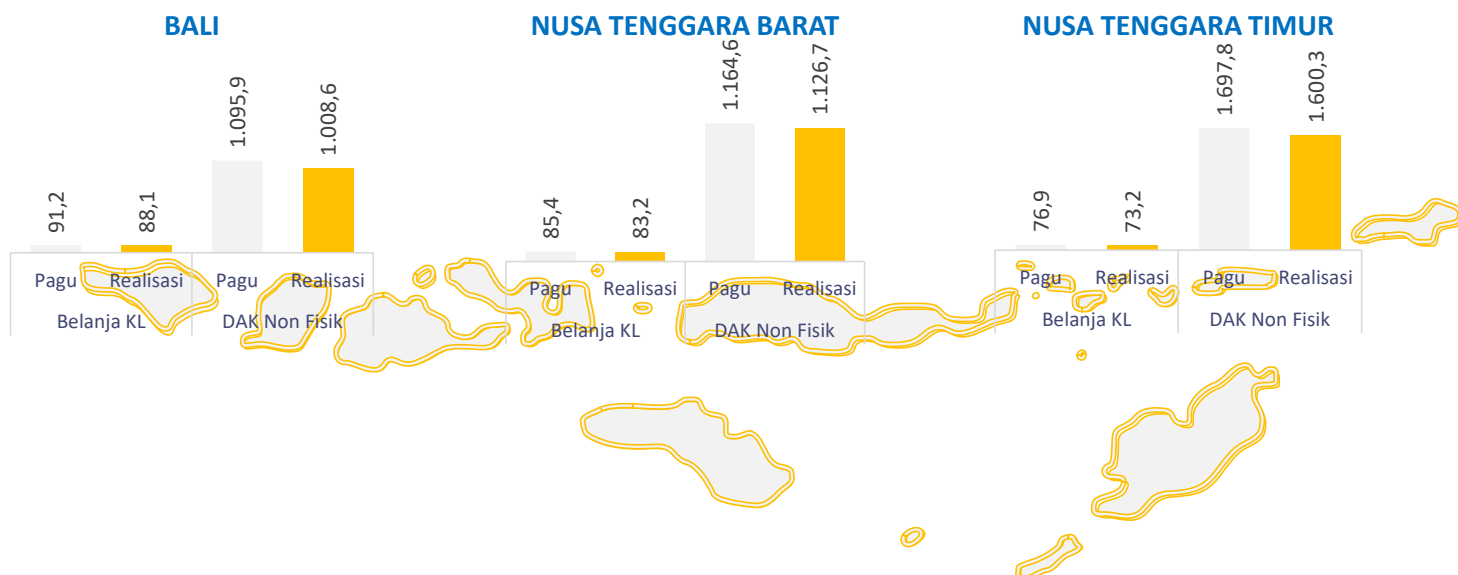
Alokasi Belanja DAK Non Fisik berupa BOS di regional Bali-Nusra mencapai Rp3.667,1 miliar yang terdiri atas BOS Reguler sebesar Rp3.614,1 miliar dan BOS Kinerja Rp52,98 miliar. BOS Reguler tersebut diperuntukkan kepada 8,7 juta siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 47.064. BOS Kinerja diberikan kepada 164.561 siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 556. Provinsi penerima BOS Reguler tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp1,6 miliar yang ditujukan kepada 3,9 juta siswa di 23.163 sekolah. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga penerima BOS kinerja tertinggi mencapai Rp26,2 miliar yang diberikan kepada 57.322 siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 251 sekolah.

5.IV.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOP

Selain itu, terdapat BOP Paud yang diberikan kepada 761.189 siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 21.120 dan total alokasi sebesar Rp251,7 miliar. Penerima BOP Paud tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp121,1 miliar yang diberikan kepada 8.985 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 389.385 anak didik.

Pada BOP Kesetaraan diberikan kepada 759 sekolah

GAMBAR 138. ALOKASI ANGGARAN BOS DAN BOP REGIONAL MALUKU-PAPUA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

dengan total alokasi mencapai Rp39,4 miliar. Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima BOS Kesetaraan dengan nilai tertinggi di antara provinsi lainnya di Regional Bali Nusa yang mencapai Rp22,8 miliar dengan jumlah sekolah sebanyak 459 sekolah. Tingginya alokasi belanja pendidikan baik dari Belanja K/L maupun DAK Fisik merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

6. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan dan perekonomian. Berbagai program dilaksanakan pemerintah untuk menutup gap pembangunan dan perekonomian di Regional Maluku-Papua dengan wilayah lain. Pada prinsipnya aksentuasi pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pusat perekonomian dengan pusat produksi di daerah. Infrastruktur konektivitas dengan wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam terus dikejar agar distribusi dan pemerataan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dasar terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Regional Maluku-Papua. Dukungan pendanaan yang berkualitas dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis untuk mewujudkan pembangunan yang optimal.

6.I. HARMONISASI INFRASTRUKTUR JALAN

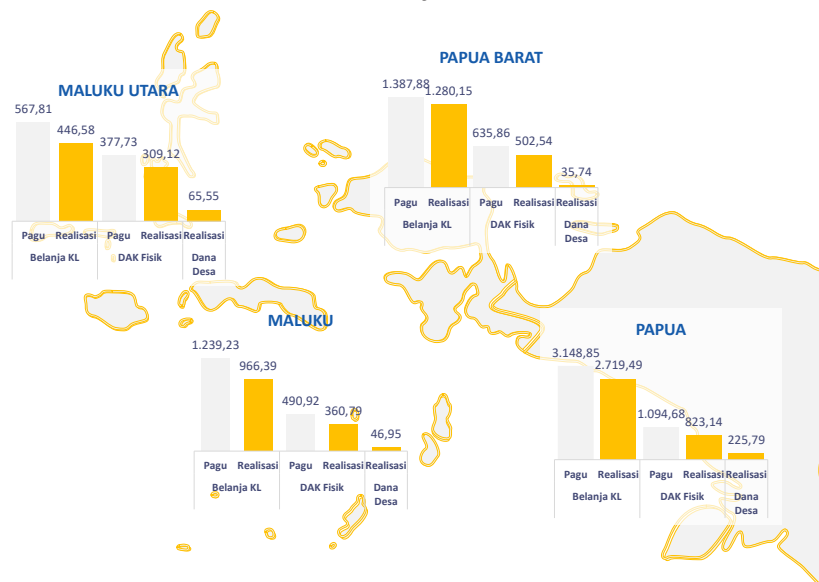
6.I.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Pada tahun 2022 pemerintah pusat dan daerah telah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.942,97 miliar melalui instrumen belanja K/L dan DAK Fisik. Jumlah tersebut terdiri dari Rp6.343,78 miliar (70,94 persen) belanja K/L dan Rp2.599,19 miliar (29,06 persen) DAK Fisik untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka konektivitas intra dan antar wilayah, pengembangan food estate, penguatan DPP dan SIKM, serta konektivitas perdesaan.

Alokasi anggaran terbesar yang bersumber dari Belanja K/L dan DAK Fisik untuk pengembangan infrastruktur jalan di Regional Maluku-Papua berada di Provinsi Papua. Sebesar Rp4.243,54 miliar (47,45 persen) anggaran infrastruktur dialokasikan di Provinsi Papua. Besarnya alokasi anggaran di Provinsi Papua merefleksikan upaya akselerasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua selaras dengan program Prioritas Nasional. Alokasi anggaran tersebut salah satunya ditujukan untuk jalan trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Barat, Merauke-Sorong, berupa pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemeliharaan jembatan. Realisasi anggaran yang bersumber dari Belanja K/L untuk jalan Merauke-Sorong di Provinsi Papua sebesar Rp1.690,79 miliar dan Papua Barat sebesar Rp804,75 miliar. Selain itu, terdapat alokasi anggaran untuk program jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdalam di Provinsi Papua sebesar Rp45,51 miliar dalam rangka pemeliharaan jalan sepanjang 0,55 Km pada ruas jalan Adoki-Samber (Kp. Baru), Kabupaten Biak Numfor. Adapun dukungan lain untuk pengembangan konektivitas darat Provinsi Papua dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp692,41 miliar serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan sebesar Rp290,77 miliar. Realisasi DAK Fisik untuk konektivitas dengan jalur utama pada 22 kabupaten/kota sebesar Rp501,68 miliar dengan 21 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah afirmasi. Konektivitas dan transportasi dengan perdesaan pada 29 kabupaten/

GAMBAR 139. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN REGIONAL MALUKU-PAPUA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023



kota sebesar Rp247,83 miliar, konektivitas dengan kawasan food estate pada lima kabupaten/kota sebesar Rp54,98 miliar, dan konektivitas dengan DPP di Kabupaten Biak-Numfor yang merupakan wilayah dengan potensi perikanan dan pariwisata sebesar Rp18,65 miliar.

Pembangunan infratraktur jalan di pulau Papua menghadapi tantangan dari karakteristik topografi wilayah. Topografi pulau Papua sangat bervariasi mulai dari dataran rendah, tinggi, serta berbukit/bergunung terjal. Selain itu, pulau Papua memiliki hutan lindung terluas di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendukung konektivitas antar wilayah, memastikan kelancaran distribusi logistik, dan mendorong aktivitas perekonomian wilayah, pemerintah membangun dan mengembangkan bandar udara melalui belanja K/L. Pemerintah membangun bandar udara baru berupa Bandar Udara Nabire Baru di Provinsi Papua dan Bandar Udara Siboru Fak-fak dengan realisasi anggaran di tahun 2022 sebesar Rp460,67 miliar. Selain itu dilakukan pengembangan terhadap bandar udara lain seperti Bandar Udara Mozes Kilangin, Tanah Merah, Wamena dan Kapi di Provinsi Papua serta Bandar Udara Anggi, Babo, Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, dan Rendani di Papua Barat. Konektivitas udara tersebut didukung dengan layanan angkutan udara perintis, baik untuk penumpang, maupun kargo.

Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara berfokus pada daerah tertinggal dan dukungan terhadap pembangunan pusat pertumbuhan baru. Realisasi anggaran dari Belanja K/L untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi Maluku sebesar Rp966,39 miliar dan untuk Provinsi Maluku Utara sebesar Rp446,58 miliar. Realisasi tersebut salah satunya ditujukan untuk 18 pulau tertinggal, teluar, dan terdepan di Provinsi Maluku sebesar Rp622,72 miliar, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp27,65 miliar. Selain itu, terdapat anggaran pembangunan pusat pertumbuhan baru untuk pembentukan kota baru Sofifi dan kota sedang Ternate di Provinsi Maluku Utara serta pembentukan kota sedang Ambon dan kota kecil Tual di Provinsi Maluku. Realisasi DAK Fisik untuk pembangunan jalan untuk konektivitas dengan jalur utama di Provinsi Maluku sebesar Rp235,67 miliar untuk sebelas kabupaten/kota, sembilan diantaranya merupakan daerah afirmasi. Sementara itu, di Provinsi Maluku Utara realisasi DAK Fisik sebesar Rp173,00 miliar untuk sepuluh kabupaten/kota, enam diantaranya merupakan daerah afirmasi. Selain itu, Realisasi DAK Fisik juga ditujukan untuk konektivitas dengan food estate yang telah terealisasi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp51,91 miliar untuk tujuh kabupaten/kota dan Rp46,14 miliar untuk enam kabupaten/kota. Total terdapat tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang

menjadi sentra produksi pangan.

6.I.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Realisasi Dana Desa untuk pembangunan dan pengembangan jalan desa di Regional Maluku-Papua sebesar Rp374,03 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa untuk menyediakan jalan yang terhubung dengan jalan besar dan untuk menyediakan sarana untuk jalan tani sebesar Rp211,90 miliar. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk jalan lingkungan permukiman/gang untuk penyediaan aksesibilitas warga desa menuju jalan desa yang terealisasi sebesar Rp60,56 miliar. Selaras dengan DAK Fisik, alokasi terbesar Dana Desa untuk jalan terdapat di Provinsi Papua. Tujuan pembangunan jalan di desa menunjukkan integrasi antara jalan yang dibangun dengan Belanja K/L dan DAK Fisik.

Pengembangan infrastruktur jalan terus dilakukan untuk menjaga kontinuitas pembangunan infrastruktur yang bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah dituntut untuk menyusun strategi yang tepat untuk menentukan prioritas pembangunan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode. Selain itu, pengembangan infrastruktur jalan yang terintegrasi dan berjalan harmonis antara Belanja K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa sangat penting dan menentukan. Pembangunan yang kontinu dan harmonis diharapkan dapat memberikan layanan semakin baik kepada masyarakat, peningkatan investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6.II. HARMONISASI INFRASTRUKTUR IRIGASI

6.II.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Regional Maluku-Papua. Pada tahun 2022 kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,41 persen terhadap PDRB Regional Maluku-Papua. Kontribusi tersebut hanya lebih rendah dari sektor Pertambangan dan Penggalan yang berkontribusi sebesar 27,56 persen. Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui penyediaan infrastruktur irigasi. Program tersebut diharapkan dapat mendorong produktivitas

komoditas kakao, kopi, pala, cengkeh, buah merah, dan ubi jalar.

Pada tahun 2022, realisasi penyediaan infrastruktur irigasi yang bersumber dari Belanja K/L dan DAK Fisik di Regional Maluku-Papua sebesar Rp771,69 miliar atau 95,62 persen dari alokasi sebesar Rp807,06 miliar. Jumlah realisasi tersebut tersebut terdiri dari Rp692,52 miliar (89,74 persen) Belanja K/L dan Rp79,17 miliar (10,26 persen) DAK Fisik. Realisasi Belanja K/L ditujukan untuk pembangunan serta pemeliharaan irigasi dan bendungan, dan embung pertanian. Sementara itu, dari sisi DAK Fisik berfokus pada irigasi daerah yang menjadi sentra produksi pangan.

Alokasi terbesar terdapat di Provinsi Maluku seiring dengan penyelesaian pembangunan bendungan multifungsi Way Apu. Pembangunan bendungan Way Apu terletak di Kabupaten Buru, merupakan proyek lanjutan dari tahun sebelumnya yang ditargetkan selesai di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2022 bersumber dari Belanja K/L sebesar Rp367,12 miliar atau 86,78 persen dari total realisasi Belanja K/L di Provinsi Maluku. Pembangunan Bendungan Way Apu dilakukan untuk mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan serta memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata, sehingga dapat menggerakkan perekonomian lokal. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR (2022), dalam hal pertanian, Bendungan Way Apu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Maluku terutama untuk ketersediaan air irigasi seluas 10.000 hektar. Sementara itu, dari sumber DAK Fisik, dukungan diberikan dalam bentuk penunjang operasionalisasi Way Apu guna meningkatkan fungsi Bendungan Way Apu dalam pengendalian banjir

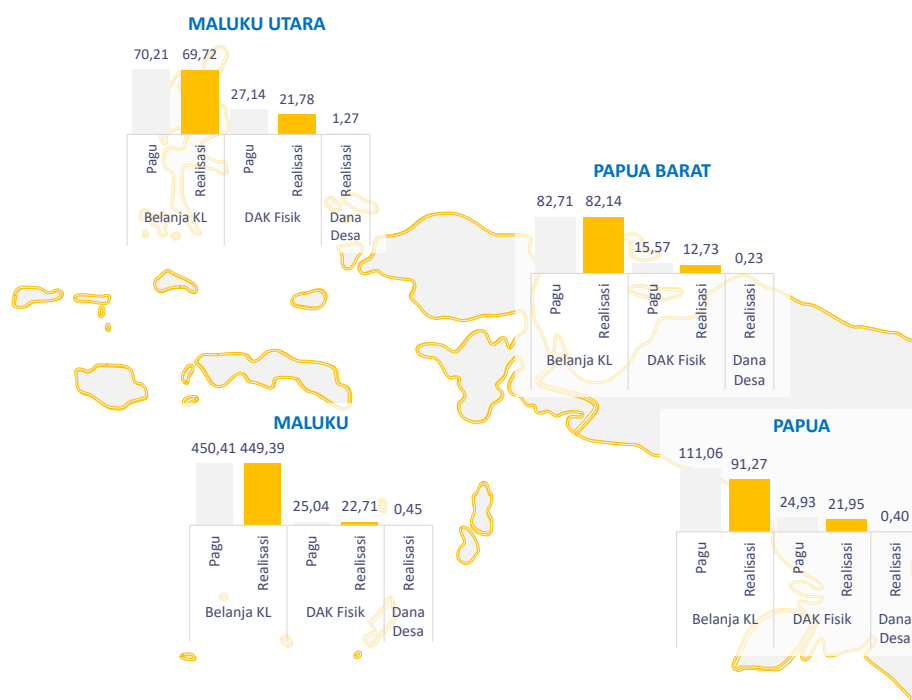
dengan realisasi sebesar Rp11,12 miliar.

Program prioritas lain dari pemerintah untuk penyediaan infrastruktur irigasi, terdapat di Provinsi Papua, berupa dukungan terhadap Major Project Pengembangan Food Estate di Kabupaten Merauke. Dukungan berasal dari DAK Fisik yang terealisasi sebesar Rp6,34 miliar (86,70 persen) dari total alokasi Rp7,31 miliar. Adapun realisasi pengembangan food estate di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 sebesar 17,39 miliar. Selain itu, terdapat dukungan pemeliharaan irigasi di Kabupaten Merauke yang berasal dari Belanja K/L dengan realisasi sebesar Rp23.79 miliar.

6.II.B. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DANA DESA

Realisasi Dana Desa untuk penyediaan infrastruktur irigasi di Regional Maluku-Papua sebesar Rp2,34 miliar. Alokasi terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp1,27 miliar. Realisasi Dana Desa digunakan untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan di daerah perdesaan. Realisasi tersebut digunakan untuk pembangunan irigasi tersier/ sederhana di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp1,20 miliar. Pembangunan irigasi tersier sederhana tersebar di delapan kabupaten kota Provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku, serta Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara. Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk pembangunan embung pada seluruh provinsi di Regional Maluku-Papua dengan realisasi sebesar

GAMBAR 140. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR IRIGASI REGIONAL MALUKU-PAPUA (MILIAR RUPIAH)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023



Rp0,54 miliar. Adapun selebihnya digunakan untuk pemeliharaan irigasi dan embung milik desa dengan realisasi sebesar Rp0,61 miliar.

Penyediaan infrastruktur irigasi saling melengkapi dengan dukungan yang diberikan oleh Belanja K/L dan DAK Fisik. Dukungan Dana Desa ditujukan untuk daerah perdesaan pada lokus yang lebih spesifik dan belum terjangkau oleh Belanja K/L dan DAK Fisik. Oleh karena itu, kelompok tani dengan skala yang lebih kecil di level perdesaan memperoleh infrastruktur yang dapat mendorong produktivitas pertanian dan perkebunan.

6.III. HARMONISASI INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH

6.III.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan esensial manusia untuk memenuhi standar kehidupan secara sehat. Rendahnya aksesibilitas terhadap air bersih dapat memengaruhi penyerapan gizi dan dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan mikroorganisme seperti patogen dan bakteri E. Coli. Oleh karena itu, pada RPJMN 2019-2024 pemerintah menargetkan akses terhadap air minum layak mencapai 100 persen.

Sampai dengan tahun 2022, persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum layak pada provinsi di Regional Maluku-Papua masih belum mencapai target nasional. Tercatat persentase rumah tangga untuk mengakses sumber air minum layak paling tinggi berada di Provinsi Maluku sebesar 92,10 persen, sedangkan terendah di Provinsi Papua yang baru mencapai 65,39 persen. Sementara itu, aksesibilitas Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat masih di bawah 90 persen, yaitu masing-masing sebesar 88,10 persen dan 81,57 persen.

Rendahnya aksesibilitas pada tiga provinsi di Regional Maluku-Papua menjadi salah satu yang memengaruhi masih tingginya prevalensi stunting di ketiga provinsi tersebut. Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa stunting yang disebabkan oleh tidak adanya air bersih dan sanitasi buruk mencapai 60 persen, lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh malnutrisi yang mencapai 40 persen. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan SDM berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045, salah satu bentuk dukungan pemerintah diarahkan untuk penyediaan infrastruktur air minum bersih dan layak.

Alokasi untuk penyediaan infrastuktur air minum bersih dan layak yang bersumber dari Belanja K/L dan DAK Fisik pada tahun 2022 sebesar Rp503,16 miliar.

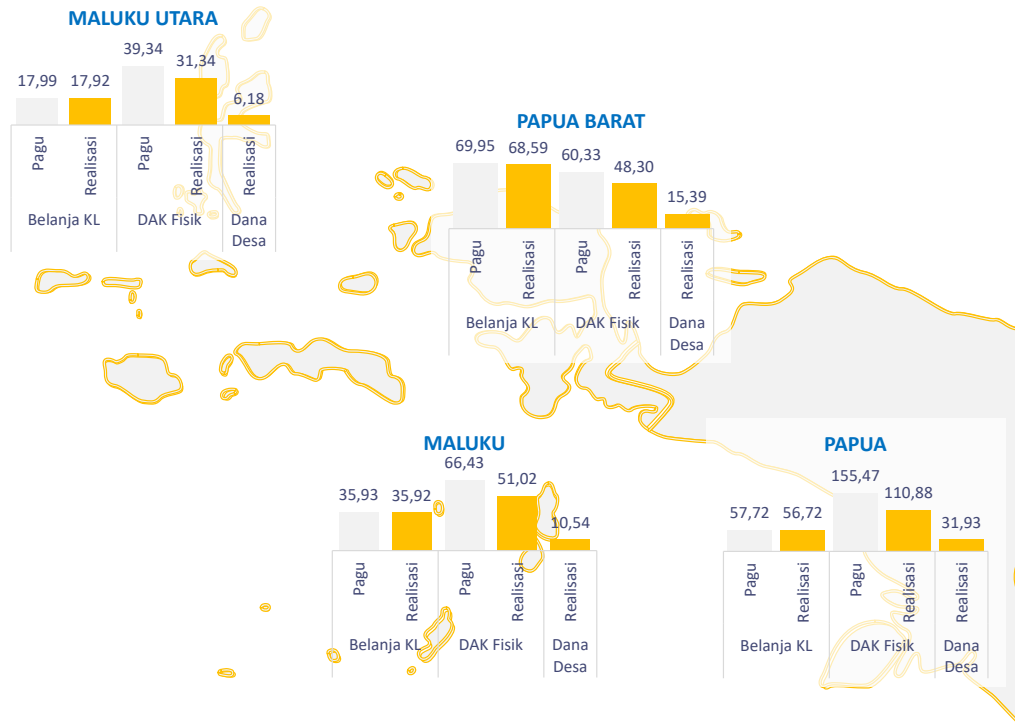
Alokasi tersebut berasal dari Rp181,59 miliar (36,09 persen) Belanja K/L dan DAK Fisik sebesar Rp321,57 miliar (63,91 persen). Realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp420,67 miliar atau 83,61 persen. Realisasi Belanja K/L ditujukan untuk infrastruktur air minum sebesar Rp64,16 miliar, pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar Rp7,63 miliar, perluasan SPAM sebesar Rp16,66 miliar, serta bendungan/jaringan air baku sebesar Rp90,68 miliar. Sementara itu, realisasi DAK Fisik seluruhnya ditujukan untuk infrastruktur air minum.

Rendahnya aksesibilitas rumah tangga terhadap air minum layak yang disertai tingginya prevalensi di Provinsi Papua, menjadi salah satu prioritas dalam penyediaan infrastruktur air minum di Regional Maluku-Papua. Hal ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi besaran alokasi penyediaan infrastruktur air minum di Provinsi Papua dibandingkan dengan provinsi lain dalam regional yang sama. Realisasi DAK Fisik untuk infrastruktur air minum di Provinsi Papua sebesar Rp110,88 miliar lebih tinggi dua sampai tiga kali lipat dibandingkan realisasi di provinsi lain. Realisasi tersebut didukung oleh Belanja K/L berupa penyediaan infrastruktur air minum di permukiman sebesar Rp19,48 miliar, perluasan SPAM pada tingkat kabupaten/kota sebesar Rp14,80 miliar, dan pembangunan serta peningkatan jaringan air baku sebesar Rp22,43 miliar.

Realisasi belanja penyediaan infrastruktur air minum tertinggi dari Belanja K/L terdapat pada Provinsi Papua Barat. Alokasi anggaran sebesar Rp69,95 miliar telah terealisasi sebesar Rp68,59 miliar (98,04 persen). Anggaran tersebut digunakan sebagai upaya pemerintah menyediakan infrastruktur pendukung di KEK Sorong berupa pembangunan air baku dengan realisasi sebesar Rp29,42 miliar. Sementara itu, realisasi infrastruktur air minum yang bersumber dari DAK Fisik di Kabupaten Sorong sebesar Rp8,00 miliar.

D.II. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

Realisasi Dana Desa untuk penyediaan infrastruktur air minum di Regional Maluku-Papua sebesar Rp64,04 miliar. Alokasi terbesar terdapat di Provinsi Papua sebesar Rp31,93 miliar dan Papua Barat sebesar Rp15,39 miliar. Tingginya realisasi pembangunan infrastruktur air minum di kedua provinsi tersebut dibandingkan dua provinsi lain selaras dengan rendahnya aksesibilitas rumah tangga terhadap sumber air minum di perdesaan. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga di perdesaan untuk mengakses air minum layak di Provinsi Papua baru mencapai 56,54 persen, sedangkan Provinsi Papua Barat baru mencapai 72,93 persen. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas air minum tersebut melalui pembangunan dan pemeliharaan saluran air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) di Provinsi Papua sebesar Rp10,49 miliar

GAMBAR 141. ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR SPAM AIR BERSIH REGIONAL MALUKU-PAPUA (MILIAR RUPIAH)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

dan Papua Barat sebesar Rp5,00 miliar. Selain itu, anggaran juga ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa dengan realisasi di Provinsi Papua sebesar Rp21,44 miliar dan Papua Barat sebesar Rp10,39 miliar.

Pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Maluku dan Maluku Utara ditujukan untuk kepentingan yang sama. Di Provinsi Maluku, Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa sebesar Rp7,55 miliar serta pembangunan dan pemeliharaan saluran air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) sebesar Rp2,99 miliar. Sementara itu, realisasi pemeliharaan saluran air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp2,99 miliar dan pembangunan dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa sebesar Rp4,18 miliar.

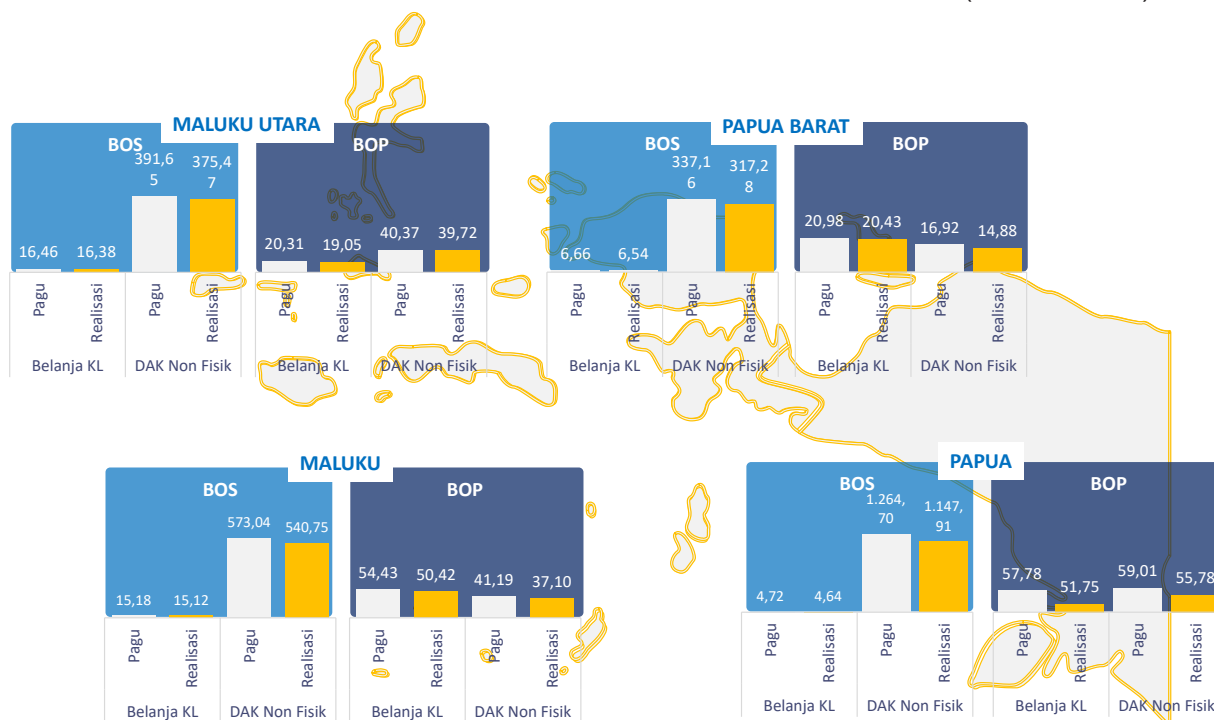
6.IV. HARMONISASI BELANJA PENDIDIKAN

Sektor pendidikan memiliki peranan penting dalam menjaga momentum reformasi struktural guna meningkatkan daya saing melalui penguatan SDM yang unggul. Berbagai program dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan SDM yang unggul di Regional Maluku-Papua. Di antara program sektor pendidikan, terdapat program BOS dan BOP yang dialokasikan pada Belanja K/L dan DAK Non Fisik.

6.IV.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK NON FISIK: BOS

Alokasi anggaran untuk BOS di Regional Maluku-Papua pada tahun 2022 sebesar Rp2.720,05 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp153,49 miliar (5,64 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp2.566,55 miliar (94,36 persen). BOS yang berasal dari K/L disalurkan oleh Kementerian Agama, sehingga siswa penerima merupakan siswa yang bersekolah di sekolah yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Jumlah penerima manfaat BOS yang berasal dari Belanja K/L sebanyak 39.965 orang dengan rincian 13.655 orang di Provinsi Maluku, 16.669 orang di Provinsi Maluku Utara, 5.689 orang di Provinsi Papua Barat, dan 3.951 orang di Provinsi Papua.

BOS yang berasal dari DAK Non Fisik disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Siswa penerima merupakan siswa yang bersekolah di sekolah yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terdapat 4,56 juta orang siswa penerima BOS Reguler dari DAK Non Fisik dengan rincian 1,16 juta orang pada 8.545 sekolah di Provinsi Maluku, 774.088 orang pada 6.531 sekolah di Provinsi Maluku Utara, 1,96 juta orang pada 10.498 sekolah di Provinsi Papua, dan 663.455 orang dan 4.666 sekolah di Provinsi Papua Barat. Selain itu, dari sumber dana DAK Non Fisik, terdapat penyaluran BOS Kinerja yang ditujukan untuk siswa/sekolah yang memiliki kinerja tertentu. Realisasi BOS Kinerja tahun 2022 sebesar

GAMBAR 142. ALOKASI ANGGARAN BOS DAN BOP REGIONAL MALUKU-PAPUA (MILIAR RUPIAH)


Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Rp27,96 miliar untuk 12.613 orang di Provinsi Maluku, 25.201 orang di Provinsi Maluku Utara, 23.540 orang di Provinsi Papua, serta 12.580 orang di Provinsi Papua Barat. BOS diberikan untuk siswa jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah.

Perbedaan penerima manfaat antara BOS yang bersumber dari Belanja K/L dengan DAK Non FISIK menunjukkan tidak terdapat redundansi dalam penyaluran. Penyaluran bersifat komplementer untuk siswa pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah yang lebih memilih bersekolah di sekolah keagamaan dengan sekolah reguler.

E.II. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Non Fisik: BOP

Pada tahun 2022, alokasi anggaran untuk BOP di Regional Maluku-Papua sebesar Rp232,23 miliar. Jumlah tersebut berasal dari Belanja K/L sebesar Rp74,74 miliar (32,18 persen) dan DAK Non Fisik sebesar Rp157,49 miliar (67,82 persen). Namun, masing-masing sumber anggaran memiliki sasaran yang berbeda.

BOP yang berasal dari DAK Non Fisik seluruhnya disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terdapat dua komponen BOP yang bersumber dari DAK Non Fisik, yaitu BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Tahun 2022, BOP PAUD terealisasi sebesar Rp114,76 miliar (93,64 persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp122,66 miliar. Adapun BOP Pendidikan Kesetaraan telah direalisasikan sebesar Rp32,72 miliar (93,94 persen) dari total alokasi Rp34,83 miliar. BOP

Pendidikan Kesetaraan ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum sempat mengenyam pendidikan pada masa usia yang seharusnya. Hal ini selaras dengan RLS yang masih rendah di Regional Maluku-Papua, yang mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang belum sempat mengenyam pendidikan dasar dan menengah sebelumnya.

Berbeda dengan BOP yang bersumber dari DAK Non Fisik, BOP yang bersumber dari Belanja K/L disalurkan oleh dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. BOP dari Belanja K/L juga memiliki sasaran yang berbeda dengan DAK Non Fisik karena ditujukan untuk BOPTN. BOPTN yang direalisasikan oleh Kementerian Agama sebesar Rp23,20 miliar atau 16,38 persen dari total BOPTN di Regional Maluku-Papua. Angka tersebut dialokasikan untuk enam lembaga pendidikan yaitu IAIN Ambon, IAKN Ambon, IAIN Ternate, IAIN Fattahul Muluk Papua, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, dan IAIN Sorong. Adapun BOPTN yang direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp118,44 miliar atau 83,62 persen dari total BOPTN di Regional Maluku-Papua. Nilai realisasi tersebut dialokasikan untuk 35 lembaga pendidikan dengan rincian sebelas lembaga pendidikan di Provinsi Maluku, empat di Provinsi Maluku Utara, sembilan di Provinsi Papua, dan delapan di Provinsi Papua Barat.

Sasaran yang berbeda antara Belanja K/L dengan DAK Non Fisik mengindikasikan terdapat redundansi dalam pelaksanaan BOP. BOP yang bersumber dari

DAK Non Fisik lebih diarahkan untuk mempersiapkan SDM agar dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah yang lebih berkualitas serta memastikan seluruh jenjang usia dapat memperoleh pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, BOP yang bersumber dari belanja K/L ditujukan membentuk SDM yang berdaya saing dan siap untuk menghasilkan inovasi serta melaksanakan pekerjaan yang lebih berkualitas.



BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI



1. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan umum dan analisis yang telah diulas pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mampu menunjukkan pemulihan dan tumbuh secara positif di tengah kondisi pelemahan global. Pada tahun 2022, Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,31 persen (c-to-c), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen (c-to-c). Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan pada tahun 2011 hingga 2022 sebesar 4,57 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung dengan capaian positif perekonomian yang hamper terjadi di seluruh daerah. Pertumbuhan tertinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua yang mencatatkan pertumbuhan tahun 2022 (c-to-c) berturut-turut sebesar 22,94 persen, 15,17

persen, dan 8,97 persen. Sementara itu, terdapat provinsi dengan pertumbuhan paling rendah yaitu provinsi Papua Barat dengan capaian sebesar 2,01 persen 2022 (c-to-c).

2. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2022 mencapai Rp19.588,4 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp16.970,8 triliun. PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta, sehingga Indonesia masih masuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country).

Perekonomian nasional terus pulih sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan pemulihan perekonomian global. Kinerja ekonomi tahun 2023 diperkirakan tetap meningkat dengan melanjutkan tren positif yang terjadi di 2022. Keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi serta peredaman tekanan ekonomi global menjadi kunci untuk



mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi pandemi Covid19 di Indonesia semakin terkendali seiring turunnya kasus harian dan tingginya tingkat vaksinasi serta dengan adanya kebijakan Pencabutan PPKM.

Momentum perbaikan pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global saat ini melalui perbaikan indikator pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat.

Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman.

3. Sejalan dengan perekonomian yang mengalami peningkatan, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan, diantaranya :

- a. Angka IPM menunjukkan peningkatan kondisi

kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 72,29 menjadi 72,91.

- b. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,71 persen menjadi sebesar 9,57 persen.

- c. Tingkat ketimpangan berada dalam posisi 0,381

- d. Tingkat pengangguran turut mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,49 persen menjadi sebesar 5,86 persen.

4. Perbaikan kondisi perekonomian juga turut meningkatkan capaian pendapatan negara. Pendapatan Negara tumbuh sebesar 27,03% dari sebesar Rp 2.011,41 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2.555.199,45 triliun pada tahun 2022. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 1.964.987,90 triliun atau tercapai sebesar 130,04%.



Kontribusi komponen penerimaan perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 masih lebih besar dibandingkan kontribusi komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meskipun kontribusi komponen PNBP mengalami tren peningkatan terbesar.

Realisasi Penerimaan Perpajakan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 43,56% setelah pada tahun 2021 sebesar 20,45%. Sedangkan, Realisasi PNBP tahun 2022 tercapai sebesar 229,19% dari target atau tercapai sebesar Rp 433.879,08 triliun dari target APBN sebesar Rp189.308,60 triliun.

Belanja Negara pada tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan sebesar 10,66% dari sebesar Rp 2.786.411,35 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 3.083.446,80 triliun pada tahun 2022.

Peningkatan realisasi belanja sebagian besar berasal dari kenaikan belanja pemerintah pusat yaitu dari sebesar Rp2.000.703,77 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2.269.737,60 triliun pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 13,44%. Optimalisasi belanja utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja barang dan belanja modal untuk percepatan pembayaran beberapa program pemulihan ekonomi nasional dan realisasi proyek infrastruktur dasar atau konektivitas, dan pengadaan peralatan dan mesin. Belanja APBN telah menjalankan peran sebagai instrumen countercyclical yang dikelola secara pruden, sehingga dapat menjaga perekonomian dari potensi pelemahan yang dalam dengan risiko yang tetap terkendali.

Realisasi defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp464,30 triliun atau mencapai 2,38% dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2021 sebesar Rp775,10 triliun atau mencapai 4,57% dari PDB. Realisasi defisit tahun 2022 lebih rendah dari target sebesar Rp868,00 triliun atau dari target sebesar 4,58% dari PDB seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP yang melampaui target.

Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2022 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit di bawah 3%, lebih cepat satu tahun dalam pencapaian defisit maksimal 3% dari PDB sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020. Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Kinerja APBD tahun 2022 masih peningkatan dari sisi pendapatan daerah selaras dengan target

pendapatan APBD 2022 mengalami kenaikan sebesar 63.615 M (5,78%). Realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 1,60% (y-o-y). Sementara itu, dari sisi belanja, alokasi pagu mengalami kenaikan sebesar 29.368 M (2,40%), tetapi berbanding terbalik dengan peningkatan alokasi pagu, realisasi belanja mengalami kontraksi sebesar 1,60% dibandingkan tahun lalu. Adapun alokasi dana untuk menutupi surplus/defisit APBD mengalami kenaikan sebesar 1.400 M (1,97%), nilai realisasi turut mengalami pertumbuhan sebesar 54,71% (yoy). Dalam kurun waktu 2020 - 2022, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat kondisi perekonomian yang belum pulih kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19. Realisasi belanja daerah Tahun 2022 tercatat 1.192,18 triliun atau mencapai 95,26% dari target belanja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Persentase capaian belanja ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun lalu (97,45%). Berdasarkan komposisi, belanja operasi merupakan jenis belanja APBD 2022 terbesar dengan realisasi mencapai Rp805,53 T atau 67,57% dari seluruh belanja. Pada posisi kedua dan ketiga, belanja modal dan transfer terealisasi sebesar 17,03% dan 15,06% atau sebesar Rp202,98 T dan Rp179,58 T. Selain ketiga belanja ini, terdapat belanja tidak terduga yang terealisasi sebesar 0,34% atau setara Rp4,08 T. Realisasi defisit APBD Tahun 2022 sebesar Rp33,00 triliun. Defisit anggaran tahun 2022 dibiayai terutama melalui penggunaan SiLPA. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pembiayaan tahun 2022 difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terutama digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19, seperti pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung penguatan reformasi. Persentase SiLPA mengalami pertumbuhan dari sebelumnya turun Rp0,81 T di 2021 menjadi Rp73,82 T di 2022.

6. Perbedaan karakteristik dan geografis daerah, serta kultur masyarakat di masing-masing regional menghasilkan potensi daerah yang berbeda antara satu regional dengan regional lainnya. Adapun sektor potensial masing-masing regional adalah sebagai berikut:
 - a. Regional Sumatera, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Real Estate;
 - b. Regional Jawa, sektor Konstruksi, Transportas dan Perdagangan Besar dan Eceran;
 - c. Regional Kalimantan, sektor Kesehatan, kegiatan social, Pendidikan dan Konstruksi;
 - d. Regional Sulawesi, sektor industri Pengolahan serta pengadaan listrik dan gas;

e. Regional Bali-Nusa Tenggara, sektor pertambangan dan penggalan; dan

f. Regional Maluku-Papua, sektor pengolahan, real estate, jasa keuangan dan asuransi.

Laju pertumbuhan sektor potensial di masing-masing regional pada tahun 2022 menunjukkan seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif baik secara nominal maupun persentase. Hal tersebut tidak lepas dari dampak pemulihan ekonomi seiring dengan situasi pandemi yang mulai membaik serta terkendali.

7. Secara umum belanja pemerintah pusat dan daerah yang dilihat dari belanja K/L dengan TKDD pada komponen DAK Fisik, Dak non Fisik, dan Dana Desa telah berjalan selaras. Tidak terdapat tumpang tindih antara belanja K/L dengan TKDD. Keduanya saling mendukung dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan. Selain itu, harmonisasi antara belanja pusat dan daerah juga dilihat implementasi dukungan terhadap pencapaian Major Project. Harmonisasi belanja pusat dan daerah terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu pilarnya adalah harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah merupakan hal yang penting di tengah naiknya belanja negara setiap tahunnya. Kenaikan alokasi tersebut perlu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas, perbaikan tata kelola serta harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip value for money.
8. APBN sebagai instrumen fiskal berperan penting dalam upaya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh regional, salah satunya adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan diantaranya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. APBN dirancang untuk mendukung pembangunan tersebut agar tercipta lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, serta agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, APBN melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mendukung penguatan sektor ketenagakerjaan melalui berbagai program, diantaranya yaitu program prioritas padat karya dan kartu prakerja. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga terus melakukan kebijakan struktural untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan struktural tersebut, diantaranya yaitu di bidang investasi, perdagangan, dan produktivitas tenaga kerja.

2. REKOMENDASI

Pada tahun 2022, kondisi perekonomian mulai membaik yang diawali dengan keberhasilan domestik dan global dalam mengendalikan penularan pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari peran APBN dan APBD yang berhasil menjadi bantalan selama masa awal pandemi sekaligus memberikan stimulus fiskal yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

APBN dan APBD tahun 2022 menjadi fondasi dalam menyeimbangkan berbagai tujuan pemerintah. APBN dan APBD menjadi instrumen utama dalam mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta melanjutkan berbagai pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. APBN terus berupaya untuk menjadi instrumen yang dapat melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN dan APBD harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas, sehingga peran APBN dan APBD dapat berjalan secara optimal dan terjaga.

Berdasarkan capaian kinerja perekonomian, kesejahteraan, dan fiskal tahun 2022 di masing-masing regional sebagaimana telah diulas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan respon fiskal pemerintah sebagai berikut:

2.1. REGIONAL SUMATERA

Pengembangan Regional Sumatera dapat dilakukan melalui dukungan pengembangan sektor industri baik dari segi sarana dan prasarana seperti dukungan infrastruktur baik fisik maupun non fisik sehingga berdampak pada nilai tambah produk industri. Dukungan dapat berjalan optimal dengan harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berjalan dengan baik. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat tergolong sangat melimpah. Namun, kondisi geografis dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SDA tergolong rendah menyebabkan produktivitas ekonomi masih rendah. Selain itu diperlukannya pengoptimalan iklim investasi serta birokrasi dan perizinan. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.1.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Perlunya pemantauan persiapan kegiatan DAK Fisik oleh Biro atau Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Kota sejak Awal Tahun
- ii. Mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dari K/L untuk mengembangkan sektor jasa



dan pendidikan. Terutama pendidikan yang mendukung sektor pertanian.

- iii. Diperlukannya paket kebijakan mengenai hilirisasi kelapa sawit serta membangun industri berskala nasional.
- iv. Perlunya Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penjualan produk unggulan, promosi pariwisata, pembinaan UMKM, dan sektor lainnya.

2.I.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Pemerintah daerah harus memastikan serta memiliki komitmen untuk mengawal program prioritas yang berjalan.
- ii. Harmonisasi perencanaan program antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga program prioritas yang telah disusun oleh pemerintah pusat dapat didukung dan ditindaklanjuti.
- iii. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan fungsi;
- iv. Pemerintah Daerah agar menyampaikan informasi dan data terkait pelaksanaan major project di wilayahnya dengan lengkap dan jelas dalam RKPD maupun laporan lainnya.
- v. Diperlukan keselarasan standar biaya dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan kebijakan yang mencakup pengembangan sektor pertanian, serta memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran
- vi. Penguatan MoU antar daerah penghasil komoditas yang diperlukan, serta optimalisasi pemanfaatan pergudangan sebagai cadangan komoditas.

2.II. REGIONAL JAWA

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pembangunan di Regional Jawa, dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat berfokus pada peningkatan belanja di sektor potensial regional. Di samping itu, dalam pengelolaan SDA memiliki tantangan dalam penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air bersih, pemanfaatan kawasan hutan yang kurang, pencurian dan kebakaran hutan, peningkatan jumlah timbunan sampah, kegiatan tambang tanpa izin yang merusak lingkungan, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Selain itu, realisasi investasi membaik dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya belum cukup tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi permasalahan kualitas dan daya saing SDM yang berkaitan. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.II.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Diperlukannya prioritas anggaran APBN dan APBD dalam pemberdayaan UMKM.
- ii. Diperlukan harmonisasi atas regulasi yang dibuat serta koordinasi secara periodic antara pemerintah pusat dan daerah. Agar dapat dihindarkan dari tumpang tindih dan pemborosan anggaran yang tidak perlu.
- iii. Perlunya peningkatan belanja berskala nasional, yang berfokus pada sektor unggulan dan potensial serta perlu memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan manusia.

2.II.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Diperlukannya koordinasi dan sinergi antar kelembagaan di daerah.
- ii. Penajaman sasaran belanja Bantuan Sosial pada APBN dan APBD
- iii. Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan realisasi penyaluran DAK Fisik serta mengupayakan penciptaan lapangan kerja khususnya pada sektor unggulan.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

Sampai dengan tahun 2022, komoditas unggulan Regional Kalimantan didominasi hasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (unrenewable resources). Kekayaan alam yang melimpah, disertai dengan kenaikan harga komoditas yang mengalami kenaikan di satu sisi menjadi keuntungan bagi Regional Kalimantan. Namun, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, belum terdiversifikasinya sektor ekonomi serta hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam hal ini menyebabkan struktur perekonomian daerah berbeda-beda. Selain itu, Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertambangan dan penggalian menjadi permasalahan di Pulau Kalimantan dikarenakan penggalian sanga rentan volatile terhadap kondisi pasar global. Tingkat kemiskinan tinggi di daerah penghasil tambang. Penyerapan tenaga kerja yang rendah. Selain itu, konektivitas darat sebagai penghubung perekonomian perlu pengelolaan dan perawatan yang baik akibat mobilitas kendaraan berat pengangkut hasil alam. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

2.III.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Pemerintah perlu meningkatkan konektivitas darat antar wilayah dan laut berupa pelabuhan ekspor skala besar dan diharapkan dapat meratakan kualitas komunikasi di seluruh wilayah.
- ii. Perlu dilakukan harmonisasi yang jelas antara

kebijakan penganggaran, penyerapan anggaran, dan efisiensi anggaran.

- iii. Diperlukannya sistem yang dapat memberikan informasi pajak atas objek di daerah. Serta diterapkan pembatasan revisi dana untuk penambahan perjalanan dinas. Peningkatan alokasi belanja pemerintah dalam APBN difokuskan ke sektor pertanian dan perikanan.

2.III.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Instrumen belanja agar menyelaraskan belanja daerah dengan keberadaan infrastruktur prioritas.
- ii. Pemda perlu melakukan hirilisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan meningkatkan kesempatan kerja, serta mendorong sektor lainnya.
- iii. Diperlukannya langkah inovatif dalam meningkatkan PAD dengan memanfaatkan digitalisasi dan peluang dalam UU HKPD.
- iv. Pemerintah Daerah mampu menjaga stabilitas APBD dan perlu diadakannya kajian mendalam dan evaluasi terhadap keuangan daerah tentang pengelolaan dana. Selain itu, akselerasi belanja APBD dilakukan sejak awal.

2.IV. REGIONAL SULAWESI

Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan harus ditingkatkan dan dieksekusi dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah juga harus senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya terkait tata kelola keuangan negara dan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan alokasi belanja saling melengkapi dan tidak tumpang tindih serta tidak terjadinya duplikasi dan anggaran berlebih. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

2.IV.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Perbaikan kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan perlu dilakukan perubahan pada anggaran, serta perlu ditetapkan persyaratan maksimal yang bisa ditetapkan masing-masing pemerintah daerah pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- ii. Pemerintah dapat mendorong penggunaan Digital Framing dan Digital Marketing untuk mempercepat transaksi ekonomi.
- iii. Pembentukan serta penguatan peran forum ekonomi regional guna penyampaian hasil analisa data dan informasiserta rekomendasi kebijakan

yang cepat dan akurat.

- iv. Pemerintah puast dan daerah harus bersinergi dalam mendukung pencapaian target yang ditetapkan serta responsif dalam menghadapi perubahan keadaan dan menyiapkan kebijakan yang cepat dan akurat.

2.IV.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Pemerintah daerah harus fokus terhadap perencanaan dan pengalokasian anggaran serta program pada sektor unggulan daerah. Selain itu, Pemda harus memperhatikan sektor yang mengalami reposisi.
- ii. Diperlukannya bimbingan kepada pemerintah desa agar penggunaan dana desa dapat difokuskan untuk peningkatan fasilitas infrastruktur jalan dan komunikasi.
- iii. Peran Pemda dalam peningkatan kualitas produk pada sektor unggulan, serta pembinaan ekonomi daerah dalam pendampingan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan.
- iv. Diperlukannya sinkronisasi antara RKPD dan RPJMD dengan RKP dan RPJMN. Selain itu, Pemda perlu mendorong sektor-sektor produktif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

2.V. REGIONAL BALI - NUSA TENGGARA

Kondisi pariwisata di Regional Bali-Nusa Tenggara sedang dalam tahap pemulihan. Kondisi ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi Regional Bali-Nusa Tenggara untuk mengantisipasi potensi kejadian serupa di masa depan. Pengembangan aktivitas sektor selain pariwisata memiliki urgensi karena Bali masih bergantung pada sisi pariwisata. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

2.V.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.
- ii. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan fiskal terhadap sektor potensial dan menjawab tantangan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
- iii. Pemerintah perlu mendorong UMKM serta mendukung pembenahan infrastruktur guna masuknya investasi. Program TPJS kemitraan perlu mendapat pendampingan dan evaluasi



secara berkala.

2.V.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Pemerintah daerah agar mengoptimalkan keberadaan infrastruktur pariwisata yang telah dibangun, serta pengoptimalan komoditas unggulan setiap daerah.
- ii. Pemerintah daerah perlu mengembangkan dan mendukung lapangan usaha industri pengolahan dan sektor pariwisata. Industri pengolahan sebagai sektor penghubung antara sektor unggulan. Serta dukungan ketersediaan fiskal juga harus diperhatikan guna mendukung pembiayaan belanja pusat.

penerimaan pemerintah dan pengelolaan BLU dan BLUD perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- iii. Pemerintah daerah perlu melakukan pemerataan akses petani terhadap pupuk bersubsidi, bibit gratis, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pengeluaran pemerintah harus difokuskan ke daerah pedesaan dan remote area.
- iv. Pemda perlu menginisiasi pelaksanaan monev realisasi anggaran dengan perencanaan kegiatan. Pemda juga perlu menguatkan peran LPSE/UPBJ Pemda.

2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Akselerasi pembangunan menjadi prioritas bagi Regional Maluku-Papua untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan perlu dilakukan secara merata, terutama bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah 3T. Penyediaan layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan perlu terus digencarkan untuk membangun kultur yang kondusif bagi kondisi kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.VI.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan melalui sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan, khususnya infrastruktur.
- ii. Pemerintah Pusat dan Daerah harus responsif dalam menghadapi perubahan keadaan dengan menyiapkan kebijakan yang tepat dan cepat.
- iii. Penggalan potensi daerah yang berpotensi ekspor
- iv. Mendorong perkembangan UMKM, dengan melakukan pelatihan, pendampingan, pemberian akses permodalan (KUR, UMi, inisiatif Pemda, dan lainnya), serta pengembangan pangsa pasar untuk hasil produksi UMKM.

2.VI.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Diperlukannya sinkronisasi dan evaluasi strategis pembangunan antara RPJMD, RKPD dengan RPJMN, RKP, PN. Perumusan target indikator kinerja pembangunan baik jangka menengah, maupun secara target tahunan. Selain itu, dipastikan minimum deviasi antara RKP dan APBD ditetapkan Pemda bersama DPRD.
- ii. Pemprov dan Pemda perlu melakukan akselerasi penyerapan belanja pemerintah, Pemda dapat terus mendorong pertumbuhan PAD,

HALAMAN INI
SEGAJA DIKOSONGKAN



HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN

LAMPIRAN I LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL 2020-2022

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB		
			2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	Sumatera	-0,37%	2,79%	4,21%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	-1,07%	2,61%	4,73%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	-1,62%	3,29%	4,36%
4	Provinsi Riau	Sumatera	-1,13%	3,36%	4,55%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	-3,80%	3,43%	5,09%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	-0,44%	3,66%	5,13%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	-0,11%	3,58%	5,23%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	-1,67%	2,79%	4,28%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	-0,02%	3,24%	4,31%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	-2,30%	5,05%	4,40%
11	Provinsi Banten	Jawa	-3,39%	4,44%	5,03%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	-2,39%	3,56%	5,25%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	-2,52%	3,74%	5,45%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	-2,65%	3,32%	5,31%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	-2,68%	5,53%	5,15%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	-2,33%	3,57%	5,34%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	-1,82%	4,78%	5,07%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	-1,41%	3,40%	6,45%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	-1,82%	3,48%	5,11%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	-2,87%	2,48%	4,48%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	-1,09%	3,98%	5,34%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	-9,33%	-2,47%	4,84%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	-0,62%	2,30%	6,95%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	-0,84%	2,51%	3,05%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	-0,71%	4,65%	5,09%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	-2,42%	3,32%	2,30%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	4,86%	11,70%	15,17%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	-0,65%	4,10%	5,53%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	-0,02%	2,41%	4,04%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	-0,99%	4,16%	5,42%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	5,35%	16,40%	22,94%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	-0,92%	3,04%	5,11%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	-0,76%	-0,51%	2,01%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	2,39%	15,11%	8,97%
NASIONAL			-2,02%	3,69%	5,31%
1	Regional Sumatera		-1,19%	3,18%	4,69%
2	Regional Jawa		-2,51%	3,66%	5,31%
3	Regional Kalimantan		-2,27%	3,18%	4,94%
4	Regional Sulawesi		0,23%	5,67%	7,05%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		-5,01%	0,07%	5,08%
6	Regional Maluku-Papua		1,44%	10,09%	8,65%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022



LAMPIRAN II NOMINAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2020-2022

1	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Nominal PDRB (Juta Rupiah)					
			2020		2021		2022	
			Nominal	Kontri-busi	Nominal	Kontri-busi	Nominal	Kontri-busi
1	Provinsi Aceh	Sumatera	166.372.320,74	1,05%	184.976.301,57	1,09%	211.750,02	1,11%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	811.188.308,84	5,14%	859.870.945,35	5,07%	955.193,09	4,99%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	241.993.529,11	1,53%	252.749.645,35	1,49%	285.378,64	1,49%
4	Provinsi Riau	Sumatera	728.649.985,32	4,62%	843.211.153,00	4,97%	991.589,59	5,18%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	254.227.859,75	1,61%	275.636.327,71	1,63%	308.842,68	1,61%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	206.242.610,97	1,31%	233.725.458,64	1,38%	276.316,37	1,44%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	456.647.864,37	2,90%	491.566.450,41	2,90%	591.603,48	3,09%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	353.530.038,78	2,24%	371.903.171,89	2,19%	414.131,42	2,16%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	73.305.267,04	0,46%	79.576.326,26	0,47%	90.111,95	0,47%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	75.495.257,20	0,48%	85.942.704,03	0,51%	95.285,43	0,50%
11	Provinsi Banten	Jawa	625.979.345,13	3,97%	665.921.915,45	3,93%	747.250,29	3,90%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	2.768.189.732,78	17,55%	2.914.581.082,81	17,19%	3.186.469,91	16,64%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	2.084.620.246,45	13,22%	2.209.822.383,53	13,03%	2.422.782,32	12,65%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	1.347.922.689,03	8,55%	1.420.799.908,38	8,38%	1.560.899,02	8,15%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	138.306.833,26	0,88%	149.369.169,14	0,88%	165.690,21	0,87%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	2.299.791.051,72	14,58%	2.454.498.796,27	14,48%	2.730.907,09	14,26%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	214.001.753,68	1,36%	231.321.163,28	1,36%	255.797,28	1,34%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	152.187.394,25	0,96%	170.001.210,89	1,00%	199.947,90	1,04%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	179.094.106,63	1,14%	192.576.581,16	1,14%	251.256,54	1,31%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	607.586.183,05	3,85%	695.158.330,32	4,10%	921.332,98	4,81%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	100.509.859,57	0,64%	110.668.941,63	0,65%	138.718,18	0,72%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	223.900.894,64	1,42%	219.800.030,51	1,30%	245.233,24	1,28%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	133.613.744,17	0,85%	140.153.319,13	0,83%	156.944,05	0,82%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	106.480.968,02	0,68%	110.885.751,03	0,65%	118.718,20	0,62%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	504.059.368,35	3,20%	545.230.029,06	3,22%	605.144,68	3,16%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	46.427.581,98	0,29%	50.341.228,80	0,30%	54.070,98	0,28%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	197.440.782,72	1,25%	246.987.356,72	1,46%	323.617,16	1,69%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	130.178.026,09	0,83%	139.057.828,16	0,82%	158.761,13	0,83%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	41.729.772,04	0,26%	43.896.365,58	0,26%	47.574,43	0,25%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	132.230.056,87	0,84%	142.600.019,59	0,84%	157.028,36	0,82%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	42.319.470,43	0,27%	52.359.851,79	0,31%	70.902,61	0,37%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	46.262.452,53	0,29%	48.564.217,18	0,29%	53.692,91	0,28%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	83.588.641,76	0,53%	85.072.858,48	0,50%	91.291,75	0,48%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	199.232.884,44	1,26%	235.343.249,91	1,39%	262.515,82	1,37%
NASIONAL			15.773.306.881,71	100,00%	16.954.170.073,01	100,00%	19.146.749,71	100,00%
1	Regional Sumatera		3.367.653.042,12	21,35%	3.679.158.484,21	21,70%	4.220.202,67	22,04%
2	Regional Jawa		9.264.809.898,37	58,74%	9.814.993.255,58	57,89%	10.813.998,84	56,48%
3	Regional Kalimantan		1.253.379.297,18	7,95%	1.399.726.227,28	8,26%	1.767.052,88	9,23%
4	Regional Sulawesi		1.052.065.588,05	6,67%	1.168.112.827,91	6,89%	1.346.196,74	7,03%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		463.995.606,83	2,94%	470.839.100,67	2,78%	520.895,49	2,72%
6	Regional Maluku-Papua		371.403.449,16	2,35%	421.340.177,36	2,49%	478.403,09	2,50%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

LAMPIRAN III TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH 2020-2022

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	SUKU BUNGA ^{*)}			INFLASI ^{**)}			NILAI TUKAR (Rp) ^{***)}		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	3,59%	2,24%	5,89%	14.105	14.265	15.592
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	1,96%	1,71%	6,12%	14.105	14.265	15.592
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	2,11%	1,40%	7,43%	14.105	14.265	15.592
4	Provinsi Riau	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	2,42%	1,54%	6,81%	14.105	14.265	15.592
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	1,18%	2,26%	5,83%	14.105	14.265	15.592
6	Provinsi Jambi	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	3,01%	1,66%	6,35%	14.105	14.265	15.592
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	1,55%	1,82%	5,94%	14.105	14.265	15.592
8	Provinsi Lampung	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	2,00%	2,19%	5,51%	14.105	14.265	15.592
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	0,89%	2,42%	5,92%	14.105	14.265	15.592
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	3,75%	3,50%	5,50%	1,08%	3,75%	5,38%	14.105	14.265	15.592
11	Provinsi Banten	Jawa	3,75%	3,50%	5,50%	1,45%	1,91%	5,08%	14.105	14.265	15.592
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	3,75%	3,50%	5,50%	1,59%	1,53%	4,21%	14.105	14.265	15.592
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	3,75%	3,50%	5,50%	2,18%	1,69%	6,04%	14.105	14.265	15.592
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	3,75%	3,50%	5,50%	1,56%	1,70%	5,63%	14.105	14.265	15.592
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	3,75%	3,50%	5,50%	1,40%	2,29%	6,49%	14.105	14.265	15.592
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	3,75%	3,50%	5,50%	1,44%	2,45%	6,52%	14.105	14.265	15.592
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	3,75%	3,50%	5,50%	4,68%	1,45%	6,30%	14.105	14.265	15.592
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	3,75%	3,50%	5,50%	1,03%	3,32%	6,32%	14.105	14.265	15.592
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	3,75%	3,50%	5,50%	1,68%	2,55%	6,99%	14.105	14.265	15.592
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	3,75%	3,50%	5,50%	0,78%	2,15%	5,35%	14.105	14.265	15.592
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	3,75%	3,50%	5,50%	1,32%	2,73%	4,74%	14.105	14.265	15.592
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	3,75%	3,50%	5,50%	0,80%	2,01%	6,20%	14.105	14.265	15.592
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	3,75%	3,50%	5,50%	0,60%	2,12%	6,23%	14.105	14.265	15.592
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	3,75%	3,50%	5,50%	0,61%	1,67%	6,65%	14.105	14.265	15.592
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	3,75%	3,50%	5,50%	2,04%	2,40%	5,77%	14.105	14.265	15.592
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	3,75%	3,50%	5,50%	1,78%	4,39%	4,85%	14.105	14.265	15.592
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	3,75%	3,50%	5,50%	1,62%	2,20%	5,96%	14.105	14.265	15.592
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	3,75%	3,50%	5,50%	1,37%	2,59%	7,39%	14.105	14.265	15.592
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	3,75%	3,50%	5,50%	0,81%	2,59%	5,15%	14.105	14.265	15.592
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	3,75%	3,50%	5,50%	-0,18%	2,65%	4,00%	14.105	14.265	15.592
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	3,75%	3,50%	5,50%	2,13%	2,38%	3,37%	14.105	14.265	15.592
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	3,75%	3,50%	5,50%	0,21%	0,21%	6,39%	14.105	14.265	15.592
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	3,75%	3,50%	5,50%	0,71%	3,47%	3,87%	14.105	14.265	15.592
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	3,75%	3,50%	5,50%	1,64%	1,79%	5,68%	14.105	14.265	15.592
NASIONAL			3,75%	3,50%	5,50%	1,68%	1,87%	5,51%	14.105	14.265	15.592

Sumber:

*)BI;

**)BRS masing-masing Provinsi;

***) situs BPS RI data dinamis.



LAMPIRAN IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2020-2022

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	Sumatera	71,99	72,18	72,80
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	71,77	72,00	72,71
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	72,38	72,65	73,26
4	Provinsi Riau	Sumatera	72,71	72,94	73,52
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	75,59	75,79	76,46
6	Provinsi Jambi	Sumatera	71,29	71,63	72,14
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	70,01	70,24	70,90
8	Provinsi Lampung	Sumatera	69,69	69,90	70,45
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	71,40	71,64	72,16
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	71,47	71,69	72,24
11	Provinsi Banten	Jawa	72,45	72,72	73,32
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	80,77	81,11	81,65
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	72,09	72,45	73,12
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	71,87	72,16	72,79
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	79,97	80,22	80,64
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	71,71	72,14	72,75
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	67,66	67,90	68,63
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	71,05	71,25	71,63
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	70,91	71,28	71,84
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	76,24	76,88	77,44
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	70,63	71,19	71,83
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	75,50	75,69	76,44
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	68,25	68,65	69,46
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	65,19	65,28	65,90
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	71,93	72,24	72,82
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	66,11	66,36	66,92
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	69,55	69,79	70,28
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	71,45	71,66	72,23
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	68,68	69,00	69,81
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	72,93	73,30	73,81
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	68,49	68,76	69,47
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	69,49	69,71	70,22
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	65,09	65,26	65,89
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	60,44	60,62	61,39
NASIONAL			71,92	71,94	72,91

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

LAMPIRAN V TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2022-2022

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	TINGKAT KEMISKINAN			JUMLAH PENDUDUK MISKIN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	Sumatera	15,43%	15,53%	14,75%	850.260	850.260	818.470
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	9,14%	8,49%	8,33%	1.273.070	1.273.070	1.262.090
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	6,56%	6,04%	6,04%	339.930	339.930	343.820
4	Provinsi Riau	Sumatera	7,04%	7,00%	6,84%	496.660	496.660	493.130
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	6,13%	5,75%	6,03%	137.750	137.750	148.890
6	Provinsi Jambi	Sumatera	7,97%	7,67%	7,70%	279.860	279.860	283.820
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	12,98%	12,79%	11,95%	1.116.610	1.116.610	1.054.990
8	Provinsi Lampung	Sumatera	12,76%	11,67%	11,44%	1.007.020	1.007.020	995.590
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	15,30%	14,43%	14,34%	291.790	291.790	292.930
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	4,89%	4,67%	4,61%	69.700	69.700	69.690
11	Provinsi Banten	Jawa	6,63%	6,50%	6,24%	852.280	852.280	829.660
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	4,69%	4,67%	4,61%	498.290	498.290	494.930
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	8,43%	7,97%	7,98%	4.004.860	4.004.860	4.053.620
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	11,84%	11,25%	10,98%	3.934.010	3.934.010	3.858.230
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	12,80%	11,91%	11,49%	474.490	474.490	463.630
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	11,46%	10,59%	10,49%	4.259.600	4.259.600	4.236.510
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	7,24%	6,84%	6,81%	354.000	354.000	356.510
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	5,26%	5,16%	5,22%	141.030	141.030	144.520
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	4,83%	4,56%	4,61%	197.760	197.760	201.950
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	6,64%	6,27%	6,44%	233.130	233.130	242.300
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	7,41%	6,83%	6,86%	49.490	49.490	50.580
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	4,45%	4,72%	4,53%	211.460	211.460	205.360
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	14,23%	13,83%	13,82%	735.300	735.300	744.690
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	21,21%	20,44%	20,23%	1.146.280	1.146.280	1.149.170
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	8,99%	8,53%	8,66%	765.460	765.460	782.320
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	11,50%	11,85%	11,92%	165.990	165.990	169.260
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	13,06%	12,18%	12,30%	381.210	381.210	389.710
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	11,69%	11,74%	11,27%	323.260	323.260	314.740
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	15,59%	15,41%	15,51%	184.600	184.600	187.350
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	7,78%	7,36%	7,34%	186.550	186.550	187.330
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	6,97%	6,38%	6,37%	81.180	81.180	82.130
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	17,99%	16,30%	16,23%	294.970	294.970	296.660
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	21,70%	21,82%	21,43%	221.290	221.290	222.360
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	26,80%	27,38%	26,80%	944.490	944.490	936.320
NASIONAL			10,19%	9,71%	9,57%	26.503.630	26.503.630	26.363.270
1	Regional Sumatera		10,22%	9,75%	9,47%	5.862.650	5.862.650	5.763.420
2	Regional Jawa		9,71%	9,16%	9,03%	14.023.530	14.023.530	13.936.580
3	Regional Kalimantan		6,16%	5,85%	13,46%	975.410	975.410	995.860
4	Regional Sulawesi		10,41%	10,04%	5,90%	2.007.070	2.007.070	2.030.710
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		13,92%	13,59%	10,06%	2.093.040	2.093.040	2.099.220
6	Regional Maluku-Papua		20,65%	20,43%	20,10%	1.541.930	1.541.930	1.537.470

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022



LAMPIRAN VI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI) 2020-2022

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	TINGKAT KETIMPANGAN		
			2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	Sumatera	0,319	0,323	0,291
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	0,314	0,313	0,326
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	0,301	0,300	0,292
4	Provinsi Riau	Sumatera	0,321	0,327	0,323
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	0,334	0,339	0,325
6	Provinsi Jambi	Sumatera	0,316	0,315	0,335
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	0,338	0,340	0,330
8	Provinsi Lampung	Sumatera	0,320	0,314	0,313
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	0,323	0,321	0,315
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	0,257	0,247	0,255
11	Provinsi Banten	Jawa	0,365	0,363	0,377
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	0,400	0,411	0,412
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	0,398	0,406	0,412
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	0,359	0,368	0,366
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	0,437	0,436	0,459
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	0,364	0,364	0,365
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	0,325	0,315	0,311
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	0,320	0,320	0,309
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	0,351	0,325	0,309
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	0,335	0,331	0,317
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	0,300	0,285	0,270
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	0,369	0,375	0,362
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	0,386	0,384	0,374
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	0,356	0,339	0,340
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	0,382	0,377	0,365
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	0,356	0,366	0,371
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	0,321	0,326	0,305
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	0,388	0,394	0,366
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	0,406	0,409	0,423
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	0,368	0,359	0,359
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	0,290	0,278	0,309
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	0,326	0,316	0,306
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	0,376	0,374	0,384
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	0,395	0,396	0,393
NASIONAL			0,385	0,381	0,381

* Situs BPS RI data per-September; September 2022 dari BRS

LAMPIRAN VII INDIKATOR KETENAGAKERJAAN 2020-2022

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Tingkat Partisipasi Angka-tan Kerja (TPAK) ^{*)}			Tingkat Pengangguran ^{**)}			Jumlah Pengangguran (orang) ^{***)}		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	Sumatera	65,10%	63,78%	63,50%	6,59%	6,30%	6,17%	166.600	158.857	157.568
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	68,67%	69,10%	69,75%	6,91%	6,33%	6,16%	507.805	475.156	472.496
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	69,01%	67,72%	69,30%	6,88%	6,52%	6,28%	190.609	179.948	180.106
4	Provinsi Riau	Sumatera	65,24%	65,03%	63,86%	6,32%	4,42%	4,37%	203.837	145.669	144.889
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	66,28%	68,27%	68,94%	10,34%	9,91%	8,23%	117.176	119.595	103.715
6	Provinsi Jambi	Sumatera	67,79%	67,17%	67,84%	5,13%	5,09%	4,59%	93.990	93.754	86.459
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	68,65%	68,77%	69,31%	5,51%	4,98%	4,63%	238.363	219.199	208.256
8	Provinsi Lampung	Sumatera	70,16%	69,35%	70,06%	4,67%	4,69%	4,52%	209.568	210.632	207.965
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	71,73%	69,75%	69,81%	4,07%	3,65%	3,59%	43.801	38.745	38.619
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	66,89%	65,88%	67,38%	5,25%	5,03%	4,77%	38.756	37.176	36.631
11	Provinsi Banten	Jawa	64,48%	63,79%	64,72%	10,64%	8,98%	8,09%	661.061	562.310	523.013
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	63,81%	62,63%	63,08%	10,95%	8,50%	7,18%	572.780	439.899	377.294
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	64,53%	64,95%	66,15%	10,46%	9,82%	8,31%	2.533.076	2.430.147	2.125.606
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	69,43%	69,58%	70,84%	6,48%	5,95%	5,57%	1.214.342	1.128.223	1.084.475
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	71,12%	73,52%	72,60%	4,57%	4,56%	4,06%	101.846	106.432	94.945
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	70,33%	70,00%	71,23%	3,84%	5,74%	5,49%	1.301.145	1.281.395	1.255.719
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	68,83%	68,45%	68,97%	5,81%	5,82%	5,11%	151.561	153.307	137.680
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	68,40%	68,67%	67,23%	4,58%	4,53%	4,26%	63.309	63.874	59.829
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	69,33%	69,26%	67,55%	4,74%	4,95%	4,74%	103.648	109.968	104.025
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	65,50%	65,49%	64,73%	6,87%	6,83%	5,71%	124.884	126.186	105.882
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	66,51%	66,24%	67,62%	4,97%	4,58%	4,33%	17.290	16.224	16.028
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	74,32%	73,54%	76,86%	5,63%	5,37%	4,80%	144.500	138.669	131.469
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	70,45%	70,57%	70,93%	4,22%	3,01%	2,89%	113.430	82.495	80.833
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	73,11%	73,78%	75,23%	4,28%	3,77%	3,54%	121.884	109.928	107.128
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	63,40%	64,73%	66,18%	6,31%	5,72%	4,51%	269.817	252.349	205.725
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	70,19%	70,27%	73,00%	3,32%	3,13%	2,34%	23.132	22.208	17.545
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	69,44%	68,73%	69,99%	3,77%	3,75%	3,00%	59.381	59.371	49.145
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	69,83%	70,09%	68,82%	4,58%	3,92%	3,36%	61.860	54.134	46.474
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	66,46%	65,94%	68,91%	4,28%	3,01%	2,58%	25.410	17.959	16.284
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	63,42%	62,15%	63,08%	7,37%	7,06%	6,61%	90.248	85.540	82.123
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	64,28%	64,70%	64,88%	5,15%	4,71%	3,98%	29.997	28.133	24.273
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	65,07%	65,75%	65,46%	7,57%	6,93%	6,88%	63.489	59.589	59.737
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	69,55%	70,34%	68,55%	6,80%	5,84%	5,37%	33.501	29.985	27.665
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	72,16%	78,29%	77,75%	4,28%	3,33%	2,83%	75.658	64.996	56.330
NASIONAL			67,77%	67,80%	68,63%	7,07%	6,49%	5,86%	9.767.754	9.102.052	8.425.931
1	Regional Sumatera		66,69%	67,80%	68,18%	6,14%	5,63%	5,37%	1.810.505	1.678.731	1.636.704
2	Regional Jawa		67,35%	67,35%	68,43%	8,09%	7,45%	6,66%	6.384.250	5.948.406	5.461.052
3	Regional Kalimantan		68,04%	67,93%	67,30%	5,52%	5,55%	4,97%	460.692	469.559	423.444
4	Regional Sulawesi		65,82%	66,16%	67,34%	5,45%	4,97%	4,09%	529.848	491.561	417.296
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		72,57%	72,61%	74,26%	4,69%	4,02%	3,73%	379.814	331.092	319.430
6	Regional Maluku-Papua		68,77%	71,92%	71,42%	5,50%	4,66%	4,22%	202.645	182.703	168.005

Sumber:

*)BRS masing2 Provinsi;

**)BRS data per-agustus 2022;

***) Sakernas Indonesia 2020, 2021, dan 2022.



LAMPIRAN VIII JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 2020-2022

No.	Nama Provinsi	Regional	2020 ^{*)}		2021 ^{**)}		2022 ^{***)}	
			Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
1	Aceh	Sumatera	5.274.871	1,95%	5.347.889	1,94%	5.379.937	1,95%
2	Sumatera Utara	Sumatera	14.799.361	5,48%	15.242.297	5,54%	15.305.230	5,56%
3	Sumatera Barat	Sumatera	5.534.472	2,05%	5.604.457	2,04%	5.624.143	2,04%
4	Riau	Sumatera	6.394.087	2,37%	6.574.932	2,39%	6.646.390	2,41%
5	Jambi	Sumatera	3.548.228	1,31%	3.603.439	1,31%	3.642.763	1,32%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	8.467.432	3,13%	8.565.814	3,11%	8.646.686	3,14%
7	Bengkulu	Sumatera	2.010.670	0,74%	2.037.019	0,74%	2.047.110	0,74%
8	Lampung	Sumatera	9.007.848	3,33%	8.882.107	3,23%	8.901.566	3,23%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	1.455.678	0,54%	1.461.893	0,53%	1.472.427	0,53%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	2.064.564	0,76%	2.082.785	0,76%	2.101.215	0,76%
11	DKI Jakarta	Jawa	10.562.088	3,91%	11.261.595	4,09%	11.249.585	4,09%
12	Jawa Barat	Jawa	48.274.162	17,87%	48.220.094	17,51%	48.637.180	17,66%
13	Jawa Tengah	Jawa	36.516.035	13,51%	37.313.063	13,55%	37.488.277	13,61%
14	DI Yogyakarta	Jawa	3.668.719	1,36%	3.677.446	1,34%	3.677.522	1,34%
15	Jawa Timur	Jawa	40.665.696	15,05%	41.063.094	14,91%	41.144.067	14,94%
16	Banten	Jawa	11.904.562	4,41%	12.030.892	4,37%	12.145.161	4,41%
17	Bali	Bali-Nusra	4.317.404	1,60%	4.279.129	1,55%	4.287.193	1,56%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	5.320.092	1,97%	5.432.209	1,97%	5.473.507	1,99%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5.325.566	1,97%	5.489.851	1,99%	5.514.216	2,00%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	5.414.390	2,00%	5.466.942	1,99%	5.482.046	1,99%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	2.669.969	0,99%	2.656.442	0,96%	2.672.790	0,97%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	4.073.584	1,51%	4.119.824	1,50%	4.141.533	1,50%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	3.766.039	1,39%	3.849.832	1,40%	3.891.849	1,41%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	701.814	0,26%	698.003	0,25%	709.620	0,26%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	2.621.923	0,97%	2.657.998	0,97%	2.664.313	0,97%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	2.985.734	1,10%	3.051.754	1,11%	3.074.958	1,12%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	9.073.509	3,36%	9.218.736	3,35%	9.255.930	3,36%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	2.624.875	0,97%	2.679.179	0,97%	2.690.791	0,98%
29	Gorontalo	Sulawesi	1.171.681	0,43%	1.200.663	0,44%	1.203.921	0,44%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	1.419.229	0,53%	1.442.225	0,52%	1.447.186	0,53%
31	Maluku	Maluku-Papua	1.848.923	0,68%	1.880.666	0,68%	1.886.735	0,69%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	1.282.937	0,47%	1.323.927	0,48%	1.337.368	0,49%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	1.134.068	0,42%	1.150.468	0,42%	1.161.028	0,42%
34	Papua	Maluku-Papua	4.303.707	1,59%	4.313.086	1,57%	4.357.024	1,58%
NASIONAL			270.203.917	100,00%	273.879.750	99,46%	275.361.267	100,00%
1	Regional Sumatera		58.557.211	21,67%	59.402.632	21,57%	59.767.467	21,71%
2	Regional Jawa		151.591.262	56,10%	153.566.184	55,77%	154.341.792	56,05%
3	Regional Kalimantan		16.625.796	6,15%	23.324.573	8,47%	16.897.838	6,14%
4	Regional Sulawesi		19.896.951	7,36%	20.250.555	7,35%	20.337.099	7,39%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		14.963.062	5,54%	8.667.659	3,15%	15.274.916	5,55%
6	Regional Maluku-Papua		8.569.635	3,17%	8.668.147	3,15%	8.742.155	3,17%

Sumber:

*) BPS 2020;

**) Kemendagri 2021

***) Kemendagri 2022.

LAMPIRAN IX NTP DAN NTN 2020-2022

No.	Nama Provinsi	Regional	NTP			NTN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	Sumatera	98,82	101,06	107,38	97,49	105,27	111,81
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	110,18	119,52	122,20	99,52	106,18	109,13
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	100,71	107,85	110,63	98,10	100,90	100,08
4	Provinsi Riau	Sumatera	119,47	139,95	145,55	99,49	103,91	104,52
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	97,22	102,25	105,02	103,56	109,51	111,54
6	Provinsi Jambi	Sumatera	107,67	127,26	135,63	107,31	113,65	112,24
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	95,34	107,90	107,74	100,36	104,67	110,92
8	Provinsi Lampung	Sumatera	94,58	101,19	104,33	101,35	105,73	108,41
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	114,32	133,01	134,39	94,31	100,89	106,01
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	103,82	127,21	127,38	105,56	111,25	112,30
11	Provinsi Banten	Jawa	102,39	98,36	99,45	98,73	100,99	102,23
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	-	-	-	95,19	97,83	101,43
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	101,38	97,56	99,48	99,39	108,86	112,09
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	101,68	100,14	103,95	102,71	108,45	109,94
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	101,25	97,46	98,54	106,66	115,83	115,70
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	100,85	100,00	102,48	95,77	101,11	103,73
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	108,67	129,48	142,60	102,13	106,45	105,55
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	103,66	119,65	123,27	102,38	102,48	96,82
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	101,06	108,19	107,79	99,83	98,86	100,39
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	112,53	123,55	129,65	103,17	103,01	100,19
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	102,80	106,74	110,73	102,84	104,15	105,94
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	94,14	92,66	95,30	99,27	100,20	100,42
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	107,46	106,98	105,37	104,89	112,11	116,14
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	95,99	95,30	95,39	94,20	92,55	91,55
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	96,93	98,14	99,71	99,64	107,43	109,27
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	110,26	123,32	118,45	99,23	106,28	108,83
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	95,06	99,48	101,36	98,11	103,28	104,43
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	96,19	98,76	99,48	97,45	101,64	102,45
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	99,72	103,30	103,77	95,23	96,06	98,00
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	98,66	106,87	108,96	100,83	106,45	109,45
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	96,47	102,30	106,62	97,29	104,50	103,62
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	96,32	100,61	103,77	101,26	107,17	115,10
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	101,84	102,30	101,28	95,56	93,69	97,44
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	101,77	101,64	99,36	110,52	111,59	112,78
NASIONAL			101,69	104,66	107,39	100,22	104,69	106,45

LAMPIRAN X IKHTISAR REALISASI APBN MENURUT REGIONAL 2020-2022

REGIONAL		Pendapatan APBN					
		2020		2021		2022	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.943.674,88	100,00%	1.960.633,57	100,00%	1.647.765,43	100,00%
1	Sumatera	81.920,89	4,97%	113.326,73	5,63%	145.201,08	5,51%
2	Jawa	1.469.097,84	89,16%	1.781.687,91	88,58%	2.328.928,20	88,36%
3	Kalimantan	40.145,89	2,44%	51.582,69	2,56%	78.439,60	2,98%
4	Sulawesi	24.431,49	1,48%	28.939,17	1,44%	37.108,70	1,41%
5	Bali-Nusa Tenggara	16.811,39	1,02%	17.766,87	0,88%	23.281,80	0,88%
6	Maluku-Papua	15.375,84	0,93%	18.043,71	0,90%	22.883,66	0,87%
7	Nasional	1.647.783,34	100,00%	2.011.347,07	100,00%	2.635.843,05	100,00%

REGIONAL		Belanja APBN					
		2020		2021		2022	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		2.213.186,54	100,00%	2.309.287,24	100,00%	2.593.300,04	100,00%
1	Sumatera	280.373,64	10,80%	309.393,68	11,10%	306.700,05	9,91%
2	Jawa	1.890.895,50	72,85%	2.004.198,83	71,93%	2.279.425,88	73,62%
3	Kalimantan	112.221,82	4,32%	123.879,92	4,45%	154.719,78	5,00%
4	Sulawesi	127.424,11	4,91%	144.045,17	5,17%	144.001,85	4,65%
5	Bali-Nusa Tenggara	72.231,56	2,78%	82.453,28	2,96%	82.608,33	2,67%
6	Maluku-Papua	112.334,47	4,33%	122.440,48	4,39%	128.806,83	4,16%
7	Nasional	2.595.481,10	100,00%	2.786.411,36	100,00%	3.096.262,72	100,00%

REGIONAL		Surplus/Defisit APBN					
		2020		2021		2022	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		-269.511,66	100,00%	-348.653,67	100,00%	-945.534,61	100,00%
1	Sumatera	-198.452,75	20,94%	-196.066,95	25,30%	-161.498,97	35,08%
2	Jawa	-421.797,66	44,51%	-222.510,92	28,71%	49.502,31	-10,75%
3	Kalimantan	-72.075,92	7,61%	-72.297,24	9,33%	-76.280,18	16,57%
4	Sulawesi	-102.992,62	10,87%	-115.106,00	14,85%	-106.893,14	23,22%
5	Bali-Nusa Tenggara	-55.420,17	5,85%	-64.686,41	8,35%	-59.326,53	12,89%
6	Maluku-Papua	-96.958,64	10,23%	-104.396,77	13,47%	-105.923,16	23,01%
7	Nasional	-947.697,75	100,00%	-775.064,29	100,00%	-460.419,67	100,00%

LAMPIRAN XI IKHTISAR REALISASI APBD MENURUT REGIONAL 2020-2022

REGIONAL		Pendapatan APBD					
		2020		2021		2022	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.072.559,68	100,00%	1.163.879,21	100,00%	1.053.392,89	100,00%
1	Sumatera	300.438,41	24,23%	280.593,60	24,59%	280.233,47	24,18%
2	Jawa	507.577,01	40,94%	474.701,92	41,61%	400.276,21	34,53%
3	Kalimantan	121.781,24	9,82%	107.298,54	9,40%	124.248,46	10,72%
4	Sulawesi	122.722,18	9,90%	110.139,69	9,65%	121.341,39	10,47%
5	Bali-Nusa Tenggara	79.344,22	6,40%	72.210,09	6,33%	59.864,14	5,16%
6	Maluku-Papua	107.888,00	8,70%	95.950,78	8,41%	173.213,79	14,94%
7	Nasional	1.239.751,05	100,00%	1.140.894,62	100,00%	1.159.177,46	100,00%

REGIONAL		Belanja APBD					
		2020		2021		2022	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.047.078,30	100,00%	1.136.023,64	100,00%	1.038.667,01	100,00%
1	Sumatera	312.374,12	24,02%	293.710,99	24,20%	279.761,98	23,47%
2	Jawa	535.119,58	41,15%	505.647,11	41,66%	459.764,82	38,57%
3	Kalimantan	128.760,34	9,90%	116.919,98	9,63%	108.475,84	9,10%
4	Sulawesi	129.853,57	9,99%	117.914,38	9,71%	118.609,11	9,95%
5	Bali-Nusa Tenggara	82.979,44	6,38%	78.800,72	6,49%	67.169,03	5,63%
6	Maluku-Papua	111.267,19	8,56%	100.772,06	8,30%	158.398,57	13,29%
7	Nasional	1.300.354,25	100,00%	1.213.765,25	100,00%	1.192.179,35	100,00%

REGIONAL		Surplus/Defisit APBD					
		2020		2021		2022	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		25.481,38	100,00%	27.855,57	100,00%	14.725,88	100,00%
1	Sumatera	(11.935,71)	19,69%	(13.117,40)	18,00%	471,49	-1,43%
2	Jawa	(27.542,58)	45,45%	(30.945,19)	42,47%	-59.488,61	180,26%
3	Kalimantan	(6.979,10)	11,52%	(9.621,44)	13,20%	15.772,62	-47,79%
4	Sulawesi	(7.131,39)	11,77%	(7.774,69)	10,67%	2.732,28	-8,28%
5	Bali-Nusa Tenggara	(3.635,23)	6,00%	(6.590,63)	9,04%	-7.304,89	22,13%
6	Maluku-Papua	(3.379,19)	5,58%	(4.821,28)	6,62%	14.815,21	-44,89%
7	Nasional	(60.603,19)	100,00%	(72.870,63)	100,00%	-33.001,89	100,00%



LAMPIRAN XII REALISASI APBN (i-Account) 2020-2022 (LKPP 2022 Unaudited)

I-Account (dalam Miliar Rp)	REALISASI APBN (Miliar Rupiah)					
	2020			2021		
	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.699.948,46	1.647.783,34	96,93%	1.743.648,55	2.011.347,07	115,35%
Pendapatan Perpajakan	1.404.507,51	1.285.136,32	91,50%	1.444.541,56	1.547.841,05	107,15%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	294.140,95	343.814,21	116,89%	298.204,17	458.492,98	153,75%
Hibah	1.300,00	18,83	1,45%	902,82	5.013,04	555,27%
BELANJA NEGARA	2.739.165,85	2.595.481,10	94,75%	2.750.028,02	2.786.411,36	101,32%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	1.975.240,21	1.832.950,92	92,80%	1.954.548,54	2.000.703,77	102,36%
Belanja Pegawai	403.722,74	380.532,23	94,26%	421.143,68	387.752,49	92,07%
Belanja Barang	273.162,11	422.338,23	154,61%	362.476,19	530.059,30	146,23%
Belanja Modal	137.383,86	190.919,83	138,97%	246.781,52	239.632,25	97,10%
Belanja Bantuan Sosial	174.517,69	202.529,97	116,05%	161.435,48	173.654,11	107,57%
Belanja Hibah	5.072,14	6.275,91	123,73%	6.781,66	4.319,00	63,69%
Belanja Lain-Lain	450.574,16	120.035,19	26,64%	207.316,81	79.704,43	38,45%
Belanja Pembayaran Bunga Utang	338.784,31	314.088,11	92,71%	373.262,82	343.495,38	92,03%
Belanja Subsidi	192.023,20	196.231,46	102,19%	175.350,38	242.086,82	138,06%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	763.925,65	762.530,18	99,82%	795.479,48	785.707,59	98,77%
Dana Transfer Umum (DTU)	470.800,22	475.518,81	101,00%	492.253,01	494.948,38	100,55%
Dana Alokasi Umum	384.381,52	381.612,45	99,28%	390.291,39	377.791,39	96,80%
Dana Bagi Hasil	86.418,70	93.906,36	108,66%	101.961,62	117.156,99	114,90%
Dana Transfer Khusus (DTK)	182.558,70	176.578,83	96,72%	196.423,55	184.638,30	94,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik	53.787,35	50.175,98	93,29%	65.248,20	57.069,67	87,47%
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128.771,35	126.402,86	98,16%	131.175,35	127.568,62	97,25%
Dana Otsus, DIY, DID	39.376,73	39.332,01	99,89%	34.802,92	34.267,20	98,46%
Dana Otsus, DIY, DID	39.376,73	39.332,01	99,89%	34.802,92	34.267,20	98,46%
Dana Desa	71.190,00	71.100,52	99,87%	72.000,00	71.853,71	99,80%
Dana Desa	71.190,00	71.100,52	99,87%	72.000,00	71.853,71	99,80%
SURPLUS/DEFISIT	(1.039.217,39)	(947.697,75)	91,19%	(1.006.379,47)	(775.064,29)	77,02%
PEMBIAYAAN	1.039.217,39	1.193.293,83	114,83%	1.006.379,47	871.723,16	86,62%
Penerimaan Pembiayaan	1.402.843,55	1.396.213,76	99,53%	1.279.284,95	1.100.979,18	86,06%
Pengeluaran Pembiayaan	(363.626,15)	(202.919,93)	55,80%	(272.905,48)	(229.256,02)	84,01%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	-	245.596,08		96.658,88		
					130.558,47	

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN